BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025;

b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, meliputi pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penambahan kegiatan dan dinamika kebijakan nasional, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 perlu diubah;

c. bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 22) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
pada tanggal 28 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

SRI PURWANINGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

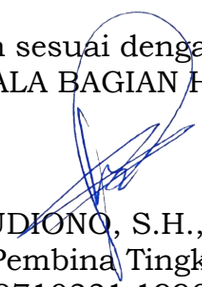

BUDIONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..... I-1

1.1 Latar Belakang..... **I-1**

1.2 Dasar Hukum **I-3**

1.3 Hubungan Antar Dokumen..... **I-5**

1.4 Maksud dan Tujuan..... **I-8**

1.5 Sistematika Dokumen RKPD..... **I-9**

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... II-1

I. Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 hingga Triwulan I. II-1

a. Capaian kinerja program Tahun 2025 hingga Triwulan I II-1

b. Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 hingga triwulan I..... II-76

c. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024..... II-76

II. Permasalahan Pembangunan Daerah II-85

a. Permasalahan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar II-85

b. Permasalahan Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar.. II-88

c. Permasalahan Urusan Pilihan..... II-92

d. Permasalahan Urusan Penunjang II-94

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ... III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1

3.1.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah III-3

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-5

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1. Visi Misi RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2025-2045 **..... IV-1**

4.2. Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Batang 2023-2026 ..... **IV-**Error! Bookmark not defined.

4.3. Visi Misi Tujuan dan Sasaran dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 ..... **IV-8**

4.4. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 ..... **IV-25**

4.5. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ..... **IV-27**

4.6. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 ..... **IV-28**

Prioritas Pembangunan Daerah IV-33

1) Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025. ..... IV-38

2) Kebijakan Sektoral Pembangunan Daerah..... IV-47

4.3 Inovasi Kabupaten Batang **IV-58**

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2025..... **V-1**

5.2 Penyusunan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025 ..... **V-2**

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VI-1

A. Periodesasi RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026..... VI-1

6.1.Indikator Kinerja Utama dalam RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 ..... VI-1

6.2 Indikator Kinerja Daerah dalam RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 ..... VI-2

B. Periodesasi RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026..... VI-39

6.1.Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 ..... VI-39

6.1 Indikator Kinerja Daerah dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 ..... VI-40

BAB VII PENUTUP VII-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2025 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 pada tanggal 3 Juli 2024. Seiring dinamika proses pembangunan yang cenderung bersifat dinamis perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian perencanaan pembangunan yang sedang berjalan. Selain itu, berdasarkan Permendagri 12/2024 Tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025, Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian sebagai berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
4. Pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan dan dinamika perubahan asumsi kerangka ekonomi dan pendanaan daerah, diperlukan sisi perencanaan pembangunan yang disajikan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana dijelaskan bahwa RKPD dapat diubah apabila tidak sesuai dengan keadaan dalam tahun berjalan yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan,

prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Berdasarkan pasal 9 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

Mendasari dalam 2 peraturan diatas, Pada Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Batang melakukan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang didasarkan pada beberapa kondisi antara lain :

1. Capaian kinerja pelaksanaan Program APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2025 dari masing-masing kegiatan;
2. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2025 terhadap kemampuan fiskal daerah;
3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
4. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah mupun kebijakan teknis lainnya.

Proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan a) Penyusunan rancangan Perubahan RKPD; b) Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan c) Penetapan Perubahan RKPD. Dalam Pelaksanaanya, proses perubahan ini melibatkan seluruh perangkat daerah serta memberikan ruang bagi pokok-pokok pikiran DPRD.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025;
22. Surat Edaran Bupati Batang Nomor P/0626/100.3.4.2/III/2025 tentang Efisiensi dan Relokasi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 diperlukan untuk menjamin keselarasan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Sebagaimana disebutkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen-dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 tahun dan berdasarkan strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan untuk saling bersinergi.

Secara ringkas hubungan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

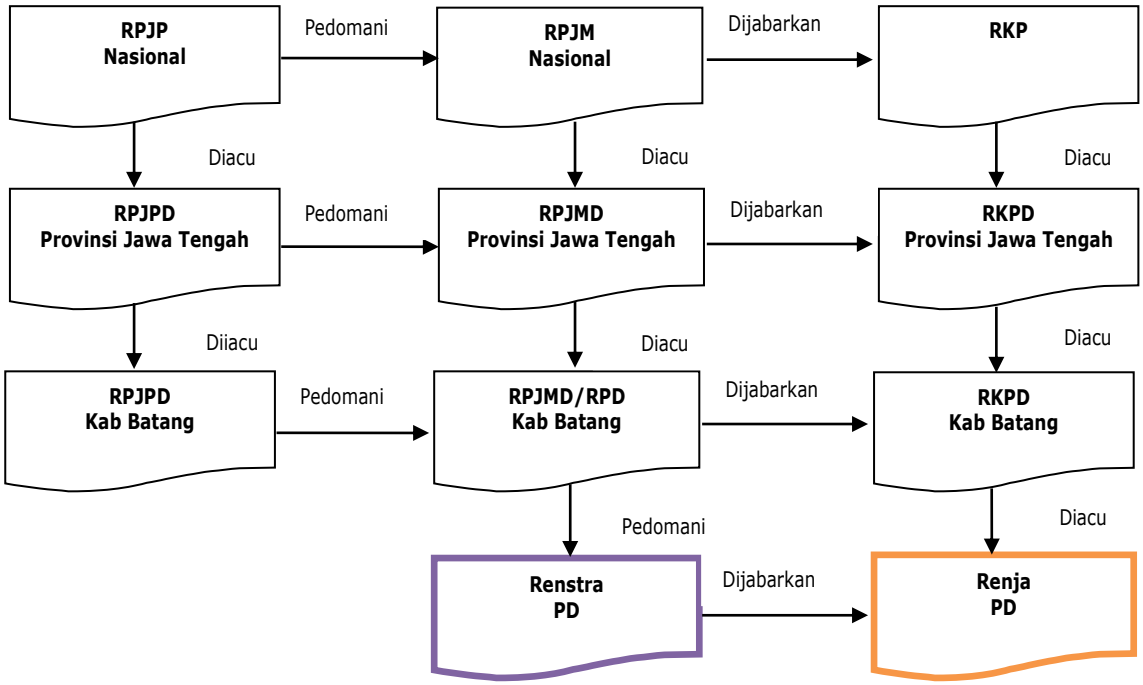

Tabel 1. 1 Keterkaitan RKPD Kabupaten Batang dengan dokumen perencanaan lainnya

a. Keterkaitan RKPD dengan SDG's

Integrasi pembangunan berkelanjutan dapat terintegrasi dengan rencana pembangunan baik nasional dan daerah. Dalam rencana pembangunan daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah dan diterjemahkan melalui tujuan sasaran Kabupaten, kemudian dijadik sebuah rencana pembangunan daerah, dari hasil RPJMD maka dibuat sebuah Renstra SKPD untuk menjadi Rencana Kerja tahunan Rencana Kerja tahunan Pemerintah Daerah (RKPD). Dari segi pembiayaan untuk pelaksanaan program maka bersumber dari APBD. Dengan pola integrasi seperti ini maka pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan baik ditingkatan pusat ataupun tingkatan daerah.

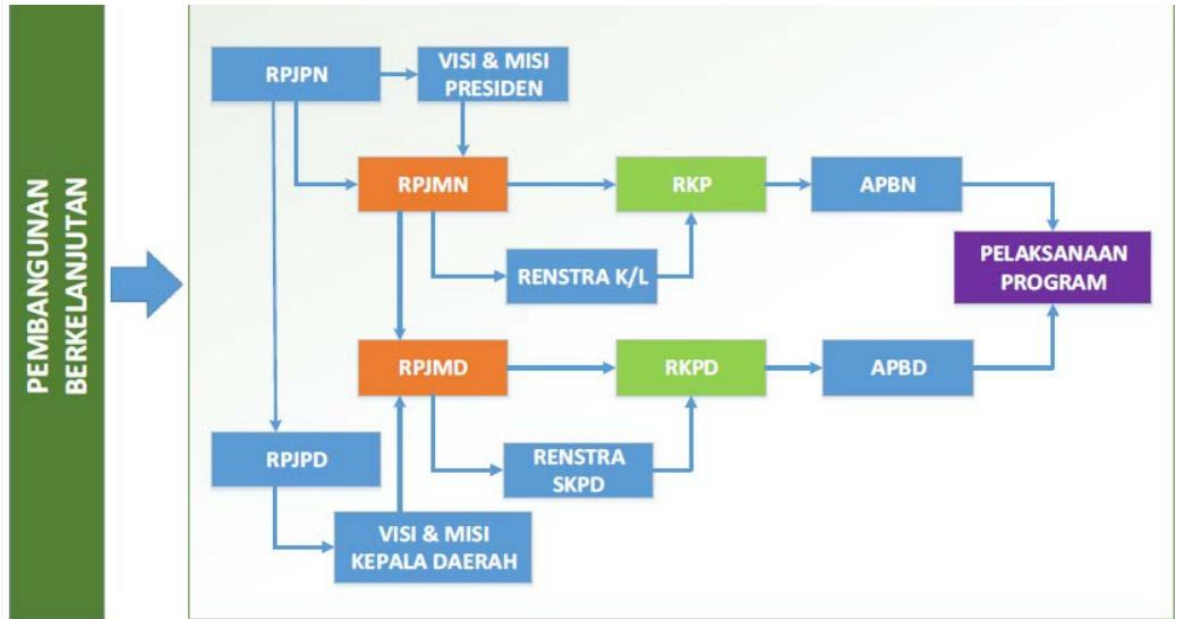

Gambar 1. 1 Keterkaitan dokumen Perencanaan Daerah dengan SGD's

b. Keterkaitan RKPD dengan SPM

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar (SPM) dimuat dalam dokumen RKPD dimana kondisi dan rencana pemenuhan harus diintegrasikan dalam setiap substansi di RKPD. Perumusan pemenuhan SPM dalam dokumen RKPD meliputi kondisi eksisting pemenuhan SPM ditahun berjalan, besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenhan kebutuhan dasar, serta perogram/ kegiatan beserta target capaian, alokasi dana indikatif, serta sumber pendanaan pemenuhan pelayanan dasar ditahun perencanaan.

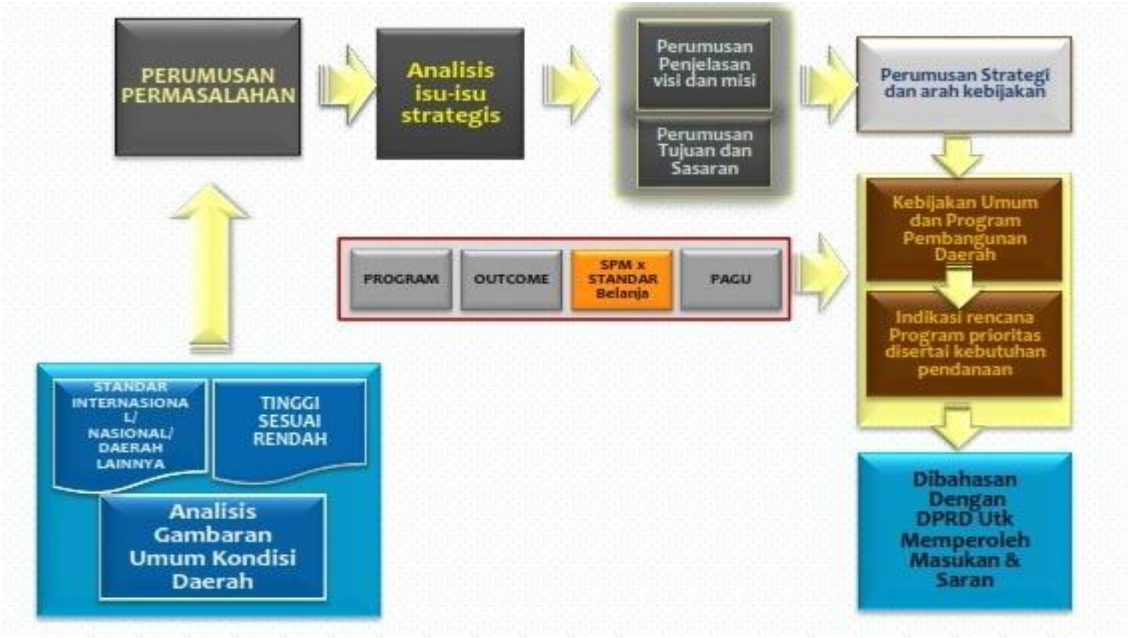

Gambar 1. 2 Integrasi SPM dalam RKPD

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk melakukan penyesuaian kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program/kegiatan, serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dengan memperhatikan dinamika pembangunan.

b. Tujuan

- Memberikan landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Menjadi pedoman pen)rusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian penjelasan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD dan sistematika penyusunan dokumen RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat capaian evaluasi RKPD hingga Triwulan I tahun 2025 dan permasalahan pelaksanaan kegiatan triwulan I tahun 2025

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaah kondisi ekonomi makro Kabupaten Batang mengenai arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Tahun 2025 berdasarkan prioritas yang termuat dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 dan menjadi integrasi pembangunan baik dari tingkat pusat, provinsi dan daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan secara menyeluruh mengenai rencana kerja program dan kegiatan prioritas daerah.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah yang dilaksanakan pada tahun 2025.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi serta tindak lanjut yang diperlukan.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

I. Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 hingga Triwulan I

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 hingga Triwulan I, dilakukan untuk mengukur capaian tiap program dengan melihat *progress* pencapaian target kinerja maupun anggaran sampai dengan Bulan Juni Tahun 2025. Dengan waktu evaluasi kurang dari satu tahun, maka *progress* pencapaian kinerja relatif hanya bisa diamati pada tingkat keluaran program.

a. Capaian kinerja program Tahun 2025 hingga Triwulan I

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Batang diukur dari ketercapaian indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026. Mendasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2025, rekapitulasi hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah per urusan penyelenggaraan pemerintah daerah sampai dengan tahun 2025 Triwulan I adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan
Kabupaten Batang Terhadap target akhir RPD 2023-2026

No	Status Pencapaian Indikator	Tahun 2025 TW I	
		Jumlah Indikator	Persentase
1.	Sangat Tinggi	123	50,62
2.	Tinggi	30	12,35
3.	Sedang	10	4,12
4.	Rendah	7	2,88
5.	Sangat Rendah	73	30,04
Jumlah		**243**	**100**

Dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi	ST
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi	T
(3)	66% ≤ 75%	Sedang	S
(4)	51% ≤ 65%	Rendah	R
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah	SR

Tabel 2. 2
Rata- Rata Realisasi Capaian Kinerja terhadap RKPD dan RPD
Hingga Tahun 2025 triwulan I

Urusan	Rata-Rata Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 TW I			
	Realisasi terhadap Target RKPD 2025	Tingkat capaian thdp Target RKPD 2025	Realisasi terhadap Target RPD	Tingkat capaian thdp Target RPD
Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
Pendidikan	85,00	T	82,50	T
Kesehatan				
- Dinkes	77,36	T	75,15	T
- RSUD Batang	94,36	ST	92,39	ST
- RSUD Limpung	100,00	ST	100,00	ST
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60,40	R	56,20	R
Perumahan dan Permukiman	100,00	ST	100,00	ST
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat				
- Satpol PP	50,00	SR	50,00	SR
- BPBD	62,50	R	62,50	R
Sosial	96,64	SR	96,64	SR
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
Tenaga Kerja	0,00	SR	0,00	SR
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	70,26	S	66,42	S
Pangan	37,50	SR	37,50	SR
Pertanahan	100,00	ST	100,00	ST
Lingkungan Hidup	90,17	ST	79,68	T
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22,60	SR	22,19	SR
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	86,14	T	76,97	T
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66,58	S	68,75	S
Perhubungan	100,00	ST	100,00	ST
Komunikasi dan Informatika	100,00	ST	100,00	ST
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	61,49	R	50,60	R
Penanaman Modal	0,00	SR	0,00	SR
Kepemudaan dan Olahraga	73,33	S	62,37	R
Statistik	76,67	T	76,67	T
Persandian	100,00	ST	100,00	ST
Kebudayaan	36,11	SR	32,64	SR
Kearsipan	99,69	ST	99,62	ST
Perpustakaan	0,00	SR	0,00	SR
Urusan Pilihan				
Transmigrasi	0,00	SR	0,00	SR
Kelautan dan Perikanan	30,95	SR	29,93	SR
Pertanian				
- Dispaperta	58,03	R	55,34	R

Urusan	Rata-Rata Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 TW I			
	Realisasi terhadap Target RKPD 2025	Tingkat capaian thdp Target RKPD 2025	Realisasi terhadap Target RPD	Tingkat capaian thdp Target RPD
- Dislutkannak	100,00	ST	100,00	ST
Pariwisata	15,30	SR	11,92	SR
Perindustrian	55,49	R	55,41	R
Perdagangan	78,94	T	82,65	T
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
Perencanaan	95,01	S	94,88	S
Keuangan	83,59	T	83,59	T
Penelitian dan Pengembangan	100,00	S	100,00	S
Pendidikan dan Pelatihan	0,00	SR	0,00	SR
Kepegawaian	100,00	ST	100,00	ST
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
Seketariat Daerah	76,58	T	87,36	T
Sekretariat DPRD	15,38	SR	15,38	SR
Unsur Pengawasan				
Pengawasan	81,33	T	81,33	T
Unsur Pemerintahan Umum				
Kesatuan Bangsa dan Politik	60,00	R	60,00	R
Kewilayahan				
Kecamatan Batang	40,00	SR	40,00	SR
Kecamatan Warungasem	100,00	ST	97,00	ST
Kecamatan Pecalungan	94,10	ST	91,86	ST
Kecamatan Wonotunggal	89,54	T	85,31	T
Kecamatan Bandar	80,00	T	80,00	T
Kecamatan Tersono	94,87	ST	94,87	ST
Kecamatan Blado	96,89	ST	93,00	ST
Kecamatan Tulis	89,00	T	76,00	T
Kecamatan Banyuputih	100,00	ST	102,22	ST
Kecamatan Kandeman	53,81	R	51,83	R
Kecamatan Limpung	96,00	ST	93,00	ST
Kecamatan Subah	59,67	R	57,45	R
Kecamatan Reban	99,44	ST	101,27	ST
Kecamatan Bawang	83,02	T	82,31	T
Kecamatan Gringsing	102,22	ST	100,22	ST
RATA RATA CAPAIAN TAHUN 2025 TW I	**70,28**	S	**68,84**	S

Sumber : Evaluasi Renja SKPD 2025 TW I

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Berikut tersaji capaian kinerja urusan Pendidikan hingga triwulan I tahun 2025 :

Tabel 2. 3 Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15
1	Program Pengelolaan Pendidikan										Disdikbud
	Angka Partisipasi Sekolah (SPM)	%	100	100	50	50	50	SR	50,00	ST	
	Persentase capaian SPM Pendidikan (SPM)	%	100	100	100	100	100	ST	100,00	ST	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM										
	Prosentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	90	100	90	90	100	ST	90,00	T	
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										
	Prosentase guru berkialifikasi S1/D4	%	100	100	90	90	90,00	T	90,00	T	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**85**	**T**	**83**	**T**	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2025 TW. I

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan pendidikan tahun 2025, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan pendidikan sebesar 85 persen jika dibandingkan dengan target tahun 2025 dan berstatus capaian tinggi serta telah mencapai 83 persen jika dibandingkan dengan target akhir RPD. Urusan pendidikan terdiri dari 4 indikator dalam 3 program yang keseluruhan indikatornya berstatus sangat tinggi. Hal ini didukung Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan cukup tinggi, pendidikan dasar bebas pungutan, bantuan pendidikan dari Pemerintah, Kartu Indonesia Pintar, Program BOS dan BOSDA serta banyaknya event pelatihan kompetensi bagi guru.

b. Urusan Kesehatan

Berikut tersaji capaian kinerja urusan Kesehatan hingga triwulan I tahun 2025 :

Tabel 2. 4 Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										
	Rata-rata capaian SPM Bidang Kesehatan	%	100	100	19,14	19,14	19,14	SR	19,14	SR	Dinkes
	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar / Jumlah gedung, sarana dan prasarana yang diadakan /	%	86	90	76,25	76,30	88,72	T	84,78	T	RSUD Batang

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	jumlah gedung yang dibangun										
	Persentase penyediaan jenis layanan SPM Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	RSUD Limpung
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										
	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	99	99,5	77,60	77,60	78,38	T	77,99	T	Dinkes
	Persentase tenaga kesehatan yang berijin (indikator SPM)	%	100	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	RSUD Batang
	Persentase tenaga kesehatan yang berijin (indikator SPM)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	RSUD Limpung
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN										Dinkes
	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin	%	100	100	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										Dinkes
	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	per 1000 balita	12,24	13,24	13,70	13,70	100	ST	100,00	ST	
					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		85,78	T	85,23	T	

Sumber : Evaluasi Renja Dinkes, RSUD TW. I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan kesehatan tahun 2025 hingga triwulan I yang diampu oleh tiga perangkat daerah yaitu Dinas Kesehatan, RSUD Batang, dan RSUD Limpung, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan kesehatan tahun 2025 jika dibandingkan dengan target RKPD 2025 sebesar 85,78 persen dengan predikat tinggi. Sedangkan jika dibandingkan dengan target RPD, capaian urusan kesehatan sebesar 85,23 dengan predikat Tinggi. Capaian ini didukung karena adanya keharusan pada standar pelayanan minimal mencapai 100 persen pada setiap tahunnya sehingga mengharuskan kinerja berfokus pada pelayanan minimal kepada masyarakat.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berikut tersaji capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hingga triwulan I tahun 2025 :

Tabel 2. 5 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)										DPUPR
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	4,28	17,06	0,042	1,270	29,67	SR	7,44	SR	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase										DPUPR

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air	%	64,41	77,4	0	63,790	99,04	ST	82,42	T	
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum										DPUPR
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak (indikator SPM)	%	100	100	0,2	88,88	88,88	T	88,88	T	
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman (indikator SPM)	%	100	100	0,2	50,98	50,98	R	50,98	R	
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah										DPUPR
	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik (indikator SPM)	%	100	100	0,17	92,69	92,69	ST	92,69	ST	
5	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional										DPUPR
	Persentase TPA dalam kondisi baik	%	100	100	0	0	0,00	SR	0,00	SR	
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi										DPUPR

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	12,5	100	0	0	0,00	SR	0,00	SR	
7	Program Pengembangan Permukiman										DPUPR
	Prosentase Infrastruktur Lingkungan Perumahan yang layak	%	59,04	62,04	0	0	0,00	SR	0,00	SR	
8	Program Penataan Bangunan Gedung										DPUPR
	Persentase Pemanfaatan Gedung yang sesuai dengan peruntukan	%	100	100	20	100	100,00	ST	100,00	ST	
9	Program Penyelenggaran Jalan										DPUPR
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	65,5	70,5	74,12	68,04	103,88	ST	96,51	ST	
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang										DPUPR
	Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang	%	52,4	52,4	1	52	99,24	ST	99,24	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**60,40**	R	**56,20**	R	

Sumber : Evaluasi Renja DPUPR TW. I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun 2025 hingga triwula I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan PUPR jika dibandingkan dengan target RKPD 2025 sebesar 60,40

(Rendah). Sedangkan jika dibandingkan dengan target RPD sebesar 56,20 (Rendah). Hal ini didukung adanya koordinasi efektif dan tepat terkait pembanguan infrastruktur serta adanya dukungan tenaga profesional fasilitator lapangan dalam membantu pelaksanaan pekerjaan.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berikut tersaji capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hingga triwulan I tahun 2025 :

Tabel 2. 6 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN										DPRKP
	Prosentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	%	63	64	0	0	0,00	SR	0,00	SR	
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)										DPRKP
	Prosentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	81	86	87,81	87,81	108,41	ST	102,10	ST	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN										DPRKP

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	Persentase RLH bagi korban bencana / terdampak program pemerintah (indikator SPM)	%	100	100	93,75	93,75	93,75	ST	93,75	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							67,39	S	65,28	S	

Sumber : Evaluasi Renja DPRKP TW. I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan PRKP sebesar 67,39 (sedang). Capaian penanganan pengurangan kawasan kumuh tidak mencapai target karena kurangnya intervensi penanganan kumuh yang tepat sasaran.

e. Urusan Sosial

Berikut tersaji capaian kinerja urusan Sosial hingga triwulan I tahun 2025 :

Tabel 2. 7 Kinerja Urusan Sosial Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Program Perlindungan dan										Dinsos

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	Jaminan Sosial										
1)	Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial (SPM)	%	100	100	79,82	79,82	79,82	T	79,82	T	
2	Progam Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan										Dinsos
1)	persentase Warga Negara Migran korban tidak kekerasan yang berhasil dipulangkan	%	100	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
3	Program Pemberdayaan Sosial										Dinsos
1)	Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	%	100	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
4	Program Rehabilitasi Sosial										Dinsos
1)	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan										Dinsos
1)	Presentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
6	Program Penanganan Bencana										Dinsos

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1)	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**96,64**	**SR**	**96,64**	**SR**	

Sumber : Evaluasi Renja Dinsos TW. I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Sosial tahun 2025, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan sosial sebesar 100 persen (sangat tinggi). Kinerja Urusan Sosial terdiri dari 6 program 6 indikator dengan keseluruhan indikator status sangat tinggi. Hal ini didukung adanya komitmen Pemkab dalam memberikan layanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS serta korban bencana alam dan juga membantu pemulangan bagi tenaga kerja migran.

f. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berikut tersaji capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat hingga triwulan I tahun 2025 :

Tabel 2. 8 Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										Satpol PP
1)	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran										Satpol PP
1)	Persentase waktu tanggap "respon time" (indikator SPM)	%	100	100	0	0,00	0,00	SR	0,00	SR	
3	Program Penanggulangan Bencana										BPBD
	Persentase Korban Bencana Alam Yang Ditangani	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
	Persentase Jumlah Desa/Kel yang mendapat Pelayanan Penanggulangan Bencana (Indikator SPM)	%	100	100	25	25	25,00	SR	25,00	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**56,25**	**SR**	**56,25**	**SR**	

Sumber : Evaluasi Renja Satpol dan Renja BPBD TW. I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh 2 SKPD yaitu Satpol PP dan BPBD pada tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan trantibum sebesar 56,25 (Sangat Rendah).

B. Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Berikut tersaji capaian kinerja urusan Tenaga Kerja hingga triwulan I tahun 2025 :

Tabel 2. 9 Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA										Disnaker
	Persentase Kegiatan yang mengacu RTK	%	100	100	30,77	30,77	30,77	SR	30,77	SR	
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										Disnaker
	Rasio Penduduk yang bekerja	%	72	76	77,91	77,91	108,21	ST	102,51	ST	
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA										Disnaker
	Persentase Pencari Pekerjaan yang mendapat pekerjaan	%	36	46	97,14	97,14	100,00	ST	100,00	ST	
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL										Disnaker

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	Penurunan Jumlah Perselisihan HI	rasio	16	14,2	0,49	0,49	3,06	ST	3,45	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							60,51	R	59,18	R	

Sumber : Evaluasi Renja Disnaker TW. I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Tenaga Kerja tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan tenaga kerja sebesar 60,51 dengan status Rendah yang didukung oleh adanya kesesuaian pendidikan, keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja serta semakin rendahnya rasio indikator tersebut maka semakin sedikitnya jumlah perusahaan yang mengalami sengketa di Kabupaten Batang.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berikut tersaji capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakhingga triwulan I tahun 2025 :

Tabel 2. 10 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										DP3AP2KB
1)	Persentase ARG pada belanja pelaksanaan program dan kegiatan di APBD	Persen	3,20	3,50	2,81	2,81	87,81	T	80,29	T	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN										DP3AP2KB
1)	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA										DP3AP2KB
1)	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	Persen	21,43	28,57	0,00	0,00	0,00	SR	0,00	SR	
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK										DP3AP2KB
1)	cakupan data pilah gender dan anak	Persen	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	SR	25,00	SR	
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)										DP3AP2KB
1)	cakupan kecamatan layak anak	Persen	80,00	93,33	87,00	87,00	108,75	ST	93,22	ST	
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK										DP3AP2KB

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1)	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							70,26	S	66,42	S	

Sumber : Evaluasi Renja DP3AP2KB TW. I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 70,26% dengan status sedang sedangkan jika dibandingkan dengan target RPD sebesar 66,42 persen dengan status sedang. Capaian ini didukung dengan adanya sistem layanan pengaduan dan penanganan korban kekerasan telah berjalan dengan baik. Namun terkendala dengan adanya perbedaan budaya dan nilai dalam masyarakat yang kurang mendukung program peningkatan kualitas keluarga.

c. Pangan

Berikut tersaji capaian kinerja urusan Pangan hingga triwulan I tahun 2025 :

Tabel 2. 11 Kinerja Urusan Pangan Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat										Dispaperta
1)	Skor Pola Pangan Harapan	%	89,50	89,8	97	97,0	108,38	ST	108,02	ST	
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan										Dispaperta
1)	Rasio Desa Mandiri Pangan	%	16,00	18	15	15,00	93,75	ST	83,33	T	
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan										Dispaperta
1)	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	%	100	100	30	30	30,00	SR	30,00	SR	
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan										Dispaperta
1)	Prosentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	%	12,5	12,5	0	0,00	0,00	SR	0,00	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**58,03**	R	**55,34**	R	

Sumber : Evaluasi Renja Dispaperta Tahun 2025 hingga tw I

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pangan tahun 2025 Hingga Triwulan. I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pangan jika dibandingkan dengan target RKPD 2025 sebesar 58,03% (rendah) sedangkan jika

dibandingkan dengan target RPD sebesar 55,34 % (rendah). Capaian ini didukung adanya bantuan pangan untuk desa rawan pangan agar menjadi desa mandiri pangan.

d. Pertanahan

Berikut tersaji capaian kinerja urusan Pertanahan hingga triwulan I tahun 2025 :

Tabel 2. 12 Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
4	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN										DPRKP
	Persentase permohonan fasilitasi pernyelesaian permasalahan pertanahan yang tertangani	%	100	100	2	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							100,00	ST	100,00	ST	

Sumber : Evaluasi Renja DPRKP Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pertanahan tahun 2025 Hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pertanahan mencapai 100%. Capaian ini melebihi target tahunan yang ditetapkan. Hal ini didukung

adanya peran aktif dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang terkait dengan fasilitasi pertanahan di Kabupaten Batang.

e. Lingkungan Hidup

Berikut tersaji capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup hingga triwulan I tahun 2025 :

Tabel 2. 13 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3										DLH
1)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	%	100	100	30	30	30,00	SR	30,00	SR	
2	Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)										DLH
1)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	65	70	40	40	61,54	R	57,14	R	
3	Program Pengelolaan Persampahan										DLH

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	Prosentase penanganan sampah	%	80	100	80	80	100,00	ST	80,00	T	
4	Program Perencanaan lingkungan hidup										DLH
	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah	%	100	100	80	80	80,00	T	80,00	T	
5	Program Pengendalian Pencemaran dan atau KerusakanLingkungan Hidup										DLH
	Indek kualitas air	Indek	50	80	80	80	160,00	ST	100,00	ST	
	indek kualitas udara	indek	80	80	80	80	100,00	ST	100,00	ST	
6	Program pengelolaan keanekaragaman hayati										DLH
	Prosentase RTH dalam kondisi baik	%	70	70	70	70	100,00	ST	100,00	ST	
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat										
	Persentase dunia pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	%	90	100	90	90	100,00	ST	90,00	T	
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat										
	Persentase masyarakat	%	100	100	80	80	80,00	T	80,00	T	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	komunitas peduli LH yag mendapat edukasi lingkungan hidup										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**90,17**	ST	**79,68**	T	

Sumber: Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang TW I 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup jika dibandingkan dengan target RKPD 2025 sebesar 90,17 (sangat tinggi) sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 79,68 (tinggi).

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga triwulan I tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2. 14 Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Program Pendaftaran Penduduk										Disdukcapil
	Prosentase identitas Kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan	%	94,05	100	20	20	21,27	SR	20,00	SR	
2	Program Pencatatan Sipil										Disdukcapil
	Persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir	%	97,6	97,5	25	25	25,61	SR	25,64	SR	
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										Disdukcapil
	Prosentase Penyajian data Kependudukan yang Valid	%	95,6	95,5	20	20	20,92	SR	20,94	SR	
						RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	**22,60**	SR	**22,19**	SR	

Sumber: Evaluasi Renja Disdukcapil Kabupaten Batang TW I 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 22,60 (sangat rendah) namun jika dibandingkan dengan target RPD sebesar 22,19% (sangat rendah). Ketercapaian indikator pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil terkendala karena masih kurangnya minat penduduk dalam perekaman KIA walaupun telah dilakukan jemput bola pelayanan KIA serta masih banyaknya penduduk ber-NIK ganda.

g. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa hingga triwulan I tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2. 15 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENATAAN DESA										Dispermades
	persentase budaya desa yang dilestarikan	%	40	80	60	60	100,00	ST	75,00	S	
2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA										Dispermades
	Persentase desa yang tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan	%	46,03	56,49	33	33	58,42	R	58,42	R	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT										Dispermades
	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa	%	70	80	78	78	100,00	ST	97,50	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**153,08**	ST	**100,65**	ST	

Sumber: Evaluasi Renja Dispermades Kabupaten Batang TW I 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa jika dibandingkan dengan target Tahun 2025

sebesar 86,14% atau berstatus tinggi sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 76,97% dengan status tinggi. Capaian ini didukung dengan adanya peran aktif dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan juga adanya pendampingan dari Kecamatan.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hingga triwulan I tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2. 16 Kinerja Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK										DP3AP2KB
1)	Persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)										DP3AP2KB
1)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	73,84	74,84	72,24	72,24	97,83	ST	96,53	ST	
2)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet	Persen	13,36	11,66	9,15	9,15	68,49	S	78,47	T	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	need)										
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)										DP3AP2KB
1)	Cakupan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok tribina (BKB, BKR dan BKL)	Persen	78,21	79,21	0,00	0,00	0,00	SR	0,00	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							66,58	S	68,75	S	

Sumber : Evaluasi Renja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 66,58 persen dengan status Sedang sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 68,75 persen dengan status sedang. Capaian ini didukung dengan data kependudukan terkait keluarga berencana telah tercatat dengan lengkap serta Program keluarga berencana telah berjalan efektif. Masyarakat sudah banyak menggunakan kontrasepsi modern. Namun beberapa hambatan dalam pencapaian indikator ini antara lain Masih ada sekitar 7,5% pasangan usia subur yang belum menggunakan kontrasepsi modern dan masih banyak pasangan usia subur yang belum terpenuhi kebutuhan ber-KB-nya. Perlu ditingkatkan akses terhadap pelayanan KB.

i. Perhubungan

Gambaran kinerja urusan Perhubungan dapat dilihat dari indikator kinerja yang selengkapnya tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 17 Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan										Dishub
	Persentase terselenggaranya lalu lintas angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							100,00	ST	100,00	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 hingga triwulan I

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Perhubungan tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Perhubungan sebesar 100 (sangat tinggi) yang terdiri dari 1 indikator dalam 1 program. Capaian ini didukung Komitmen dari sebagian besar Stake Holder Angkutan Darat yang mendukung RUNK (Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas) Pilar 3 yaitu Kendaraan yang Berkeselamatan dibuktikan dengan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor yang dari segi jumlah dalam tingkatan stabil tidak mengalami penurunan.

j. Komunikasi dan Informasi

Gambaran kinerja urusan Komunikasi dan Informasi dapat dilihat dari indikator kinerja yang selengkapnya tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 18 Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Program Informasi Dan Komunikasi Publik										Diskominfo
	Persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	72	100	100,00	108,25	100,00	ST	100,00	ST	
2	Program Aplikasi Informatika										Diskominfo
	Persentase Jumlah Layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	73	100	100	122,25	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**100,00**	ST	**100,00**	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Triwulan I 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2025 Hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika sebesar 100% (sangat tinggi) yang terdiri dari 2 indikator dalam 2 program. Capaian ini didukung adanya kerjasama yang baik dengan para awak media dan pihak ke tiga (sumber berita) serta adanya pelatihan dari pemerintah pusat dan propinsi dalam bidang IT namun beberapa kendala dalam proses pencapaian indikator tersebut antara lain berita terkadang tidak sampai tepat waktu di redaksi dan kurangnya tenaga tenaga IT yang berkompeten dalam pembuatan aplikasi.

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Gambaran kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat dari indikator kinerja yang selengkapnya tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 19 Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI										Disperindagkop dan UKM
	Presentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	24	50,53	39	39,00	100,00	ST	77,18	T	
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI										Disperindagkop dan UKM
	Persentase koperasi aktif	%	68	70	0,76	0,76	1,12	SR	1,09	SR	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN										Disperindagkop dan UKM
	Persentase peserta pelatihan dengan predikat baik	%	90	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)										Disperindagkop dan UKM
	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru	%	10	20	14	14,00	100,00	ST	70,00	S	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM										Disperindagkop dan UKM
	Persentase produk UMKM yang terstandarisasi	%	15	20	0,95	0,95	6,33	SR	4,75	SR	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				-						
	Persentase peserta diklat dengan predikat baik	%	90	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM										
	Persentase Koperasi yang mengurus Izin usaha simpan pinjam	%	75	100	26,31	26,31	35,08	SR	26,31	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**61,49**	R	**50,60**	R	

Sumber : Evaluasi Renja Disperindagkop dan UKM TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah jika dibandingkan dengan target RKPD 2025 sebesar 61,49 (Rendah). Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 50,60 (Rendah). Capaian ini didukung dengan tingkat legalitas Koperasi yang berbadan hukum sudah banyak.

l. Penanaman Modal

Gambaran kinerja urusan Penanaman Modal dapat dilihat dari indikator kinerja yang selengkapnya tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 20 Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL										DPMPTSP
1)	Jumlah dokumen terkait pemberian fasilitasi/ insentif dibidang Penanaman modal yang disusun	%	60	80	0	0	0,00	SR	0,00	SR	
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL										DPMPTSP
1)	Persentase promosi di kabupaten Batang	%	100	100	0	0	0,00	SR	0,00	SR	
3	PROGRAM PELAYANAN										DPMPTSP

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	PENANAMAN MODAL										
3)	Persentase ijin yang diterbitkan	%	100	100	0,00	0	0,00	SR	0,00	SR	
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL										DPMPTSP
	Prosentase perusahaan yang mematuhi ketentuan Penanaman Modal	%	7,5	8	0	0	0,00	SR	0,00	SR	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL										DPMPTSP
	Prosentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia	%	45	45	0	0	0,00	SR	0,00	SR	
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						0,00	SR	0,00	SR	

Sumber : Evaluasi Renja DPMPTSP TW. I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Penanaman Modal tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Penanaman Modal sebesar 0 % atau berstatus sangat rendah.

m. Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat dari indikator kinerja yang selengkapnya tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 21 Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN										Disparpora
1)	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	Persen	32	45	32	32	100,00	ST	71,11	S	
6	PROGAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN										Disparpora
1)	capaian medali kejuaraan	medali	40	50	8	8	20,00	SR	16,00	SR	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN										Disparpora
1)	Penghargaan yang diterima	%	10	10	0	10	100,00	ST	100,00	ST	
						RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	**73,33**	S	**62,37**	R	

Sumber : Evaluasi Renja Disparpora TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2025 hingga Triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga jika dibandingkan dengan target RKPD 2025 sebesar 73,33 (sedang) sedangkan jika dibandingkan dengan target RPD 2023-2026 sebesar 62,37% (rendah). Capaian ini didukung dengan semakin berkembangnya komunitas kepemudaan serta semakin meningkatnya daya saing antar daerah.

n. Statistik

Gambaran kinerja urusan Statistik dapat dilihat dari indikator kinerja yang selengkapnya tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 22 Kinerja Urusan Statistik Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral										Diskominfo
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	100	100	76,67	76,67	76,67	T	76,67	T	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							76,67	T	76,67	T	

Sumber : Evaluasi Renja Diskominfo Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Statistik tahun 2025, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Statistik sebesar 76,67% dengan status Tinggi. Capaian ini didukung adanya kerjasama yang intens dengan pihak produsen data dan instansi vertikal (BPS).

o. Persandian

Gambaran kinerja urusan Statistik dapat dilihat dari indikator kinerja yang selengkapnya tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 23 Kinerja Urusan Persandian Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi										Diskominfo
	Capaian sistem elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**100,00**	ST	**100,00**	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Diskominfo TW. I 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Persandian tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Persandian sebesar 100% (sangat tinggi) yang terdiri dari 1 indikator dalam 1 program dengan status sangat tinggi. Capaian ini didukung adanya pelatihan persandian dari Pusat.

p. Kebudayaan

Beberapa kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Batang sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 24 Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD
					TW I					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN									
	Persentase festival seni yang dilaksanakan	%	100	80	-	-	0,00	SR	0,00	SR
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL									
	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	%	75	80	25	25	33,33	SR	31,25	SR
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA									
	Prosentase benda cagar budaya yang dilestarikan	%	80	90	60	60	75,00	S	66,67	S
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**36**	**SR**	**33**	**SR**

Sumber : Evaluasi Renja Disdikbud Tahun 2025 Tw. I

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Kebudayaan tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan kebudayaan jika dibandingkan dengan target RKPD 2025 sebesar 36 persen berstatus sangat rendah namun jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 33 persen dengan status sangat rendah.

q. Perpustakaan

Beberapa kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Batang sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 25 Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Program Pembinaan Perpustakaan										Disperpuska
1)	persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun	persen	0,16	4,13	-36,49	-36,49	0,00	SR	0,00	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**0,00**	SR	**0,00**	SR	

Sumber : Evaluasi Renja Disperpuska TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Perpustakaan tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Perpustakaan jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 0,00 (sangat rendah) sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 0,00 (sangat rendah).

r. Kearsipan

Beberapa kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Batang sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 26 Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
2	Program Pengelolaan Arsip										Disperpuska
1)	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (IKK outcome)	indeks	75,5	75,60	75,03	75,03	99,38	ST	99,25	ST	
3	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip										Disperpuska
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara,	indeks	22,60	22,80	79,25	79,25	100,00	ST	100,00	ST	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK outcome)										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**99,69**	ST	**99,62**	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Disperpuska TW.I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Kearsipan tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Kearsipan sebesar 99,69 persen (sangat tinggi) yang terdiri dari 2 indikator dalam 2 program dengan 2 indikator berstatus sangat tinggi. Capaian ini didukung dengan adanya pengolahan arsip sudah tertata dari level Unit Pencipta Arsip (UPA) sampai dengan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD).

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Transmigrasi

Beberapa kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Batang sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 27 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Taun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD	Tingkat Capaian Kinerja	Status Capaian terhadap	Tingkat Capaian kinerja	Status Capaian terhadap	Perangkat Daerah

				s/d 2026	TW I	Tahun 2025 hingga TW I	RKPD 2025 Hingga TW I (%)	target RKPD 2025 Hingga TW I	terhadap Target Akhir RPD (%)	target akhir RPD	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
5	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI										Disnaker
	Persentase Transmigran yang berhasil ditempatkan	%	100	100	0	0	0	SR	0	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**0**	SR	**0**	SR	

Sumber : Evaluasi Renja Disnaker TW. I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Transmigrasi tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Transmigrasi sebesar 100 (sangat tinggi) yang terdiri dari 1 indikator dalam 1 program dengan 1 indikator berstatus sangat tinggi yang dikarenakan banyaknya minat warga untuk menjadi transmigran, Banyaknya kuota pemberangkatan.

b. Kelautan dan Perikanan

Beberapa kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 28 Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap										Dislutkannak
	Prosentase Capaian Produksi Perikanan Tangkap	%	98,00	98,00	21,83	21,83	22,28	SR	22,28	SR	
2	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan										Dislutkannak
	Capaian Bina Kelompok Masyarakat Pengawas	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	SR	0,00	SR	
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya										Dislutkannak
	Prosentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya	%	94,00	95,00	0,00	0,00	0,00	SR	0,00	SR	
4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan										Dislutkannak
	Prosentase Capaian Tingkat konsumsi makan ikan	%	96,00	100,00	97,46	97,46	101,52	ST	97,46	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							30,95	SR	29,93	SR	

Sumber : Evaluasi Renja Dislutkan TW. I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Kelautan dan Perikanan terhadap target RKPD 2025 sebesar 30,95 % (Sangat rendah) sedangkan jika dibandingkan dengan target RPD 2023-2026 sebesar 29,93 (Sangat Rendah). Capaian ini didukung dengan Sosialisasi Gemar Makan Ikan belum menjangkau ke seluruh wilayah kecamatan non perikanan (produksi perikanan rendah).

c. Pertanian

Beberapa kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Batang sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 29 Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian										Dispaperta
1)	Prosentase Produktivitas Pertanian Pangan per hektar per tahun	%	0,0103	0,0106	0,1200	0,1200	100,00	ST	100,00	ST	
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian										Dispaperta
1)	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	%	100	100	25	25	25,00	SR	25,00	SR	
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian										Dispaperta
1)	Prosentase Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100	100	25	25	25,00	SR	25,00	SR	
4	Program Penyuluhan Pertanian										Dispaperta
1)	Persentase kenaikan kualitas dan kapasitas SDM Penyuluh, pelaku	%	100	100	25	25	25,00	SR	25,00	SR	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian										
2)	Persentase validitas data dan kelembagaan pertanian	%	100	100	25	25	25,00	SR	25,00	SR	
3)	Persentase kenaikan pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan	%	100	100	25	25	25,00	SR	25,00	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**37,50**	SR	**37,50**	SR	

Sumber : Evaluasi Renja Dispaperta Tahun 2025 hingga triwulan I

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pertanian tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pertanian terhadap target RKPD 2025 maupun target akhir RPD sebesar 37,50 (sangat rendah). Capaian ini didukung adanya sistem SImluhtan dalam pendataan penyuluh dan kelembagaan pertanian.

d. Pariwisata

Beberapa kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Batang sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 30 Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	PARIWISATA										
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA										Disparpora
1)	prosentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	persen	17	20	3	3	17,65	SR	15,00	SR	
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA										Disparpora
1)	Prosentase peningkatan wisatawan	%	20	25	4	4	20,00	SR	16,00	SR	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL										Disparpora
1)	Persentase jumlah ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	0	20	30	3	3	15,00	SR	10,00	SR	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF										Disparpora
1)	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	persen	35	45	3	3	8,57	SR	6,67	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**15,30**	SR	**11,92**	SR	

Sumber : Evaluasi Renja Disparpora TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pariwisata tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pariwisata jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 15,3 (sangat rendah) sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 11,92 (sangat rendah).

e. Perindustrian

Beberapa kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Batang sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 31 Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
6	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN										
	Persentase Verifikasi Teknis	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN										
	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	36,36	36,36	0,12	0	0,33	SR	0,33	SR	
8	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING										
	Persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga	%	75	75	75	75	100,00	ST	100,00	ST	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR										
	nilai ekspor perdagangan	USD	59.034.726	61.419.729,00	7.434.434	7.434.434	12,59	SR	12,10	SR	
10	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN										
	Persentase alat2 ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	75	75	15	15	20,00	SR	20,00	SR	
10	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri										

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	Persentase Pelaksanaan Pameran Dagang Dalam Negeri Di Kabupaten Batang	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**55,49**	R	**55,41**	R	

Sumber : Evaluasi Renja Disperindagkop dan UKM TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Perindustrian tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Perindustrian terhadap target RKPD 2025 dan RPD 2023-2026 sebesar 55,4% (Rendah). Capaian ini terkendala oleh banyaknya prosedur yang harus dilalui serta perbedaan otorisasi antar instansi tak jarang membuat para pelaku usaha kebingungan untuk mengumpulkan data.

f. Perdagangan

Beberapa kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Batang sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 32 Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						

								I			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI										Disperindagkop dan UKM
	persentase peningkatan jumlah pelaku IKM	%	0,78	0,78	1,90	1,90	100,00	ST	100,00	ST	
12	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL										Disperindagkop dan UKM
	persentase jumlah Industri dalam SIINas	%	84	88	57,47	57,47	68,42	S	65,31	S	
12	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KAB/KOTA										Disperindagkop dan UKM
	persentase peningkatan jumlah perijinan berusaha sektor industri	%	84	88	57,47	57,47	68,42	S	65,31	S	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							78,94	T	82,65	T	

Sumber : Evaluasi Renja Disperindagkop dan UKM TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Perdagangan tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Perdagangan sebesar 78,94 persen dengan predikat tinggi. Capaian ini terkendala dengan berkurangnya konsumen, waktu buka pasar dan omset atau penerimaan penjualan pedagang pasar tradisional serta banyaknya kejadian kelangkaan gas dan bahan pokok.

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Fungsi Perencanaan

Beberapa kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Batang sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 33 Kinerja Fungsi Urusan Perencanaan Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah										Bapelitbang
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
	persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah										Bapelitbang
	persentase indikator program prioitas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target	%	91	92	97,32	129,92	100,00	ST	100,00	ST	
	persentase indikator program pembangunan bidang Perekonomian & SDA yang mencapai target	%	91	92	95,56	63,74	70,04	S	69,28	S	
	persentase indikator program	%	91	92	91,8	112,13	100,00	ST	100,00	ST	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	pembangunan bidang IPW yang mencapai target										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							95,01	S	94,88	S	

Sumber : Evaluasi Renja Bapperida TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Perencanaan tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Perencanaan jika dibandingkan dengan target RKPD 2025 sebesar 95% (sangat tinggi). Kendala pencapaian indikator pada urusan perencanaan yaitu adanya dinamika perubahan aturan dari pemerintah pusat dan mandatory yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten namun didukung dengan ketersediaan sdm yang kompeten;intensitas koordinasi yang semakin baik; serta tim koordinasi bidang pemerintahan yang optimal.

b. Keuangan

Beberapa kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Batang sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 34 Kinerja urusan keuangan Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah										BPKPAD
1)	Penyampaian Raperda APBD Tepat Waktu	status	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	100	100,00	ST	100	ST	
2)	Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	status	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	100	100,00	ST	100	ST	
3)	Persentase Realisasi Serapan Belanja terhadap Anggaran Belanja	%	90	90	16,14	16,14	17,93	SR	17,93	SR	
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah										BPKPAD
1)	Persentase tersusunnya data aset Pemda menurut lokasi, legalitas kepemilikan, pemnfaatan dan kondisinya	%	100	100	15	135	100,00	ST	100,00	ST	
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah										BPKPAD
1)	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	%	2,03	2,25	16,36	16,36	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							83,59	T	83,59	T	

Sumber : Evaluasi Renja BPKPAD TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Keuangan tahun 2025, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Keuangan sebesar 83,59% (Sangat Tinggi). Capaian ini didukung dengan Kecepatan dan keakuratan SKPD - SKPD dalam penyusunan Laporan keuangan SKPD serta inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah berhasil menaikkan pendapatan.

c. Kepegawaian

Beberapa kinerja Urusan Kepegawaian Kabupaten Batang sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 35 Kinerja Fungsi Urusan Kepegawaian Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										BKD
1)	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**100,00**	ST	**100,00**	ST	

Sumber : Evaluasi Renja BKD TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Kepegawaian tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Kepegawaian sebesar 100% (Sangat Tinggi) yang terdiri dari 1 indikator dalam 1 program berstatus tinggi. Ketercapaian pada didukung dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian didukung oleh alokasi anggaran yang cukup serta Standar Pelayanan yang dipahami oleh seluruh SDM layanan dengan baik.

d. Pendidikan dan Pelatihan

Beberapa kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Batang sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 36 Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										BKD
1)	Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target	%	100	100	0	0	0,00	SR	0,00	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**0,00**	SR	**0,00**	SR	

Sumber : Evaluasi Renja BKD TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pendidikan dan Pelatihan tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pendidikan dan Pelatihan sebesar 0% (Sangat Rendah).

e. Penelitian dan Pengembangan

Beberapa kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 37 Kinerja Fungsi Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah										Bapelitbang
	Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	**%**	**60**	**65**	**81,25**	**81,25**	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**100,00**	**S**	**100,00**	**S**	

Sumber : Evaluasi Renja Bapperida TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan jika dibandingkan dengan target RKPD 2025 sebesar 100 (sangat tinggi) yang terdiri dari 1 indikator dalam 1 program yang berstatus sangat tinggi. Hal ini didukung oleh tingginya minat Perangkat Daerah terhadap inovasi.

f. Sekretariat Daerah

Beberapa kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Batang sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 38 Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota										
1	Persentase rata rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	90	90	25	25	100,00	ST	100,00	ST	
2	Persentase rata rata Capaian Kinerja Anggaran Perangkat Daerah	%	90	90	11,6	11,6	12,89	SR	12,89	SR	
3	Cakupan layanan Operasional Kantor	%	85	85	25	25	100,00	ST	100,00	ST	
4	Persentase kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	%	90	90	25	25	100,00	ST	100,00	ST	
5	Persentase ASN yang telah mengikut diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	90	90	3,2	3,2	100,00	ST	100,00	ST	
6	Persentase Administrasi Kepegawaian dan Keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan	%	90	90	43	43	100,00	ST	100,00	ST	
7	Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Skor	32	48	39,4	39,4	123,13	ST	82,08	T	
8	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
9	Persentase kegiatan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi Kepala Daerah	%	100	100	91	91	100,00	ST	100,00	ST	
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN										
9	Persentase Bagi Hasil BUMD terhadap APBD (Penyertaan Modal)	persen	100	15	38,07	38,07	38,07	SR	253,80	ST	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
11	Persentase Pelaksanaan APBD pada SKPD yang sesuai target	persen	96	98	98	98	102,08	ST	100,00	ST	
12	Persentase lelang melalui e-procurement	persen	100	100	8	8	8,00	SR	8,00	SR	
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										
13	Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu	0	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
14	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang difasilitasi	%	100	100	0	0	0,00	SR	0,00	SR	
15	Presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	100	100	0	0	0,00	SR	0,00	SR	
16	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berhasil difasilitasi	%	95	95	134,0	134	141,05	ST	141,05	ST	
						RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	76,58	T	87,36	T	

Sumber : Evaluasi Renja Sekretariat Daerah TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Sekretariat Daerah tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Sekretariat Daerah jika dibandingkan dengan target RKPD 2025 sebesar 76,58% dengan status capaian tinggi. Hal ini didukung adanya Koordinasi yang baik dengan Instansi terkait serta di dukung Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yan memadai, tersedianya sdm pada OPD pengampu paket pekerjaan dan

Sumber Daya Manusia JFPBJ serta tersedianya Sumber Daya Manusia JFPPBJ yang melaksanakan proses tender dan adanya beberapa paket pekerjaan yang dikonsolidasi sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Namun terkendala adanya salah satu BUMD masih belum dapat menghasilkan laba sehingga tidak dapat memberikan deviden kepada pemerintah daerah, paket pekerjaan dilaksanakan tergantung pada kecepatan OPD melaksanakan proses pemilihan pengadaan barang jasa, dan terbatasnya jumlah penyedia konsultan perencanaan di Kabupaten Batang sehingga menghambat OPD dalam memasukkan dokumen yang akan ditenderkan.

g. Sekretariat DPRD

Beberapa kinerja Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 39 Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										Setwan
1)	Persentase Peraturan Daerah non APBD yang ditetapkan	%	100	100	10	10	10,00	SR	10,00	SR	
2)	Persentase KUA/PPA dan	%	100	100	7	7	7,00	SR	7,00	SR	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	Perda APBD yang ditetapkan										
3)	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana dan Kode Etik DPRD	%	100	100	11	11	11,00	SR	11,00	SR	
4)	Persentase peningkatan kapasitas Anggota DPRD	%	100	100	16	16	16,00	SR	16,00	SR	
5)	Persentase penyerapan aspirasi masyarakat	%	100	100	4	4	4,00	SR	4,00	SR	
6)	Persentase fasilitasi tugas Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD	%	100	100	38	38	38,00	SR	38,00	SR	
7)	Persentase fasilitasi layanan administrasi DPRD	%	100	100	5	5	5,00	SR	5,00	SR	
8)	Persentase fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	100	100	32	32	32,00	SR	32,00	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**15,38**	SR	**15,38**	SR	

Sumber : Evaluasi Renja Sekretariat DPRD TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Sekretariat DPRD tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Sekretariat DPRD jika dibandingkan dengan target RKPD 2025 sebesar 15,38 persen dengan predikat sangat rendah. Hal ini didukung adanya jadwal pelaksanaan kegiatan anggota dewan yang terlaksana tepat waktu.

h. Pengawasan

Beberapa kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Batang sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 40 Kinerja Pengawasan Kabupaten Batang Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
Urusan Pengawasan											
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN										
	Prosentase jumlah pemeriksaan yg dilakukan	persen	100	100	44	44	44,00	SR	44,00	SR	
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI										
	Level SPIP	level	3	3	3	3	100,00	ST	100,00	ST	
	Persentase kapabilitas APIP	persen	80	85	3	3	100,00	ST	100	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**81,33**	T	**81,33**	T	

Sumber : Evaluasi Renja Inspektorat TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pengawasan tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pengawasan sebesar 81,33 (Tinggi). Ketercapaian indikator pengawasan didukung dengan adanya kolaborasi antar Perangkat Daerah yang baik serta kapasitas SDM cukup memadai.

E. Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan Batang

Beberapa kinerja Urusan Kewilayahan apda Kecamatan Batang sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 41 Kinerja Kecamatan Batang Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										Kec Batang
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	100	25	25	25,00	SR	25,00	SR	
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum										Kec Batang
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan										Kec Batang

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	Publik										
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	100	25	25	25,00	SR	25,00	SR	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum										Kec Batang
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	25	25	25,00	SR	25,00	SR	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan										Kec Batang
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	%	100	100	25	25	25,00	SR	25,00	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**40,00**	SR	**40,00**	SR	

Sumber : Evaluasi Renja Kecamatan Batang TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Batang tahun 2025, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Batang sebesar 40 persen.

b. Kecamatan Warungasem

Beberapa kinerja Urusan Kewilayahan apda Kecamatan Warungasem sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 42 Kinerja Kecamatan Warungasem Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										Kec Warungasem
	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	75	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum										Kec Warungasem
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100,00	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										Kec Warungasem
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										Kec Warungasem
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	90	90	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN										Kec

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										Warungasem
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	85	100	85	85	100,00	ST	85,00	T	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**100,00**	ST	**97,00**	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Kecamatan Warungasem TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Warungasem tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Warungasem sebesar 100 persen dengan predikat sangat tinggi. Capaian ini didukung Koordinasi antara Kecamatan dan Desa berjalan baik, meningkatnya kesadaran desa mengenai tertibnya administrasi Pemerintahan Desa.

c. Kecamatan Wonotunggal

Beberapa kinerja Urusan Kewilayahan apda Kecamatan Wonotunggal sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 43 Kinerja Kecamatan Wonotunggal Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										Kec Wonotunggal
	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	75	100	90	90	100,00	ST	90,00	T	
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										Kec Wonotunggal
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										Kec Wonotunggal
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	69,6	70	69,57	S	69,57	S	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										Kec Wonotunggal
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa	%	90	100	100	100	111,11	ST	100,00	ST	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	yang Aktif										
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										Kec Wonotunggal
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	100	67	67	67,00	S	67,00	S	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**89,54**	T	**85,31**	T	

Sumber : Evaluasi Renja Kecamatan Wonotunggal TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Wonotunggal tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Wonotunggal sebesar 89,54 persen dengan predikat tinggi. Hal ini didukung telah terbentuknya sinergitas Aparatur TNI/Polri, ASN,Pemerintahan Desa ,Linmas Tokoh masyarakat dalam menegakkan dan menjaga stabilitas kemanan wilayah.

d. Kecamatan Bandar

Beberapa kinerja Urusan Kewilayahan pada Kecamatan Bandar sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 44 Kinerja Kecamatan Bandar Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	ST	100	ST	
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	0	0	0,00	SR	0,00	SR	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**80,00**	T	**80,00**	T	

Sumber : Evaluasi Renja Kecamatan Bandar TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Bandar tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Bandar jika dibandingkan dengan target RKPD 2025 sebesar 60 persen dengan predikat rendah. Capaian ini didukung dengan telah terbentuknya Sinergitas Aparatur TNI/Polri, ASN,Pemerintahan Desa, Linmas Tokoh masyarakat dalam menegakkan dan menjaga stabilitas kemanan wilayah.

e. Kecamatan Limpung

Beberapa kinerja Urusan Kewilayahan pada Kecamatan Limpung sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 45 Kinerja Kecamatan Limpung Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	100	90	90	90,00	T	90,00	T	
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	100	100	90	90	90,00	T	90,00	T	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN										

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	85	100	85	85	100,00	ST	85,00	T	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**96,00**	ST	**93,00**	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Kecamatan Limpung TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Limpung tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Limpung sebesar 96% (sangat tinggi). Capaian ini didukung dengan telah terbentuknya Sinergitas Aparatur TNI/Polri, ASN,Pemerintahan Desa, Linmas Tokoh masyarakat dalam menegakkan dan menjaga stabilitas kemanan wilayah. Namun terkendala kurangnya SDM yang menangani urusan di kecamatan.

f. Kecamatan Blado

Beberapa kinerja Urusan Kewilayahan pada Kecamatan Blado sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 46 Kinerja Kecamatan Blado Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum										
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	90	90	90,00	T	90,00	T	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik										
	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	75	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum										
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan										
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	90	100	90	90	100,00	ST	90,00	T	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	90	100	85	85	94,44	ST	85,00	T	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**96,89**	ST	**93,00**	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Kecamatan Blado TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Blado tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Blado sebesar 96,89 persen dengan predikat sangat tinggi.

g. Kecamatan Kandeman

Beberapa kinerja Urusan Kewilayahan pada Kecamatan Kandeman sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 47 Kinerja Kecamatan Kandeman Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga	Status Capaian terhadap target RKPD	Tingkat Capaian kinerja terhadap	Status Capaian terhadap target	Perangkat Daerah

					TW I	hingga TW I	TW I (%)	2025 Hingga TW I	Target Akhir RPD (%)	akhir RPD	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	100	25	50,00	50,00	SR	50,00	SR	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum										
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	25	25,00	25,00	SR	25,00	SR	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	90	100	85	100,00	111,11	ST	100,00	ST	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan	%	90	100	25	25,00	27,78	SR	25,00	SR	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	desa yang tertib dan baik										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**53,81**	R	**51,83**	R	

Sumber : Evaluasi Renja Kecamatan Kandeman TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Kandeman tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Kandeman sebesar 53,81 persen dengan predikat rendah.

h. Kecamatan Tulis

Beberapa kinerja Urusan Kewilayahan pada Kecamatan Tulis sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 48 Kinerja Kecamatan Tulis Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM										Kec Tulis

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										Kec Tulis
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	90	100	60	60	100,00	ST	60,00	R	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										Kec Tulis
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	85	85	85,00	T	85,00	T	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										Kec Tulis
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	60	60	60,00	R	60,00	R	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										Kec Tulis
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta	%	90	100	75	75	100,00	ST	75,00	S	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik										
						RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	**89,00**	T	**76,00**	T	

Sumber : Evaluasi Renja Kecamatan Tulis TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Tulis tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Tulis sebesar 89,00persen dengan predikat tinggi.

i. Kecamatan Subah

Beberapa kinerja Urusan Kewilayahan pada Kecamatan Subah sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 49 Kinerja Kecamatan Subah Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Program Program										

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik										
	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	100	87,23	87,23	87,23	T	87,23	T	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan										
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang Aktif	%	90	100	100	100	111,11	ST	100,00	ST	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum										
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum										
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	0	0	0,00	SR	0,00	SR	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi	%	90	100	0	0	0,00	SR	0,00	SR	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik										
					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		**59,67**	R	**57,45**	R	

Sumber : Evaluasi Renja Kecamatan Subah TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Subah tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Subah jika dibandingkan dengan target RKPD 2025 sebesar 59,67 persen dengan predikat rendah.

j. Kecamatan Pecalungan

Beberapa kinerja Urusan Kewilayahan pada Kecamatan Pecalungan sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 50 Kinerja Kecamatan Pecalungan Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN										Kec Pecalungan

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	Persentase Pelayanan PATEN yang Sesuai SOP	%	100	100	100	58	58,30	R	58,30	R	
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										Kec Pecalungan
	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	%	90	100	100	101	112,22	ST	101,00	ST	
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										Kec Pecalungan
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	90	80	107	100,00	ST	100,00	ST	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										Kec Pecalungan
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	100	90	90	102	100,00	ST	100,00	ST	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN										Kec Pecalungan

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	PEMERINTAHAN UMUM										
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Dengan Baik	%	90	100	100	140	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**94,10**	ST	**91,86**	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Kecamatan Pecalungan TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Pecalungan tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Pecalungan sebesar 94,10 persen dengan predikat sangat tinggi.

k. Kecamatan Banyuputih

Beberapa kinerja Urusan Kewilayahan pada Kecamatan Banyuputih sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 51 Kinerja Kecamatan Banyuputih Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum										
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	100,0	100	100,00	ST	100,00	ST	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik										
	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan										
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	90	90	90	90	100,00	ST	100,00	ST	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	90	90	100	100	100,00	ST	111,11	ST	
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum										
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**100,00**	ST	**102,22**	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Kecamatan Banyuputih TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Banyuputih tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Banyuputih sebesar 100 persen dengan predikat sangat tinggi .

1. Kecamatan Bawang

Beberapa kinerja Urusan Kewilayahan pada Kecamatan Bawang sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 52 Kinerja Program Kecamatan Bawang tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	Persentase Pelayanan Paten Yang Seuai SOP	%	100	100	90	90	90,00	T	90,00	T	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
	Persentase Lembaga	%	90	100	31,57	31,57	35,08	SR	31,57	SR	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	Kemasyarakatan di Desa yang Aktif										
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	90	90	90,00	T	90,00	T	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	90	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**83,02**	T	**82,31**	T	

Sumber : Evaluasi Renja Kecamatan Bawang TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Bawang tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Bawang sebesar 83,02 persen dengan predikat Tinggi.

m. Kecamatan Reban

Beberapa kinerja Urusan Kewilayahan pada Kecamatan Reban sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 53 Kinerja Program Kecamatan Reban Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	100	100	85	85,00	85,00	T	85,00	T	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	90	75	91	91,00	101,11	ST	121,33	ST	
3	PROGRAM PEMBINAAN										

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	85	80	80,00	100,00	ST	100,00	ST	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	90	100	100	100	111,11	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**99,44**	ST	**101,27**	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Kecamatan Reban TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Reban tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Reban sebesar 99,44 persen dengan predikat sangat tinggi.

n. Kecamatan Tersono

Beberapa kinerja Urusan Kewilayahan pada Kecamatan Tersono sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 54 Kinerja Program Kecamatan Tersono Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	100	91	91,00	91,00	ST	91,00	ST	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	90	90	85	85,00	94,44	ST	94,44	ST	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	90	90	80	80,00	88,89	T	88,89	T	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**94,87**	ST	**94,87**	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Kecamatan Tersono TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Tersono tahun 2025 hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Tersono sebesar 94,87 persen dengan predikat sangat tinggi.

o. Kecamatan Gringsing

Beberapa kinerja Urusan Kewilayahan pada Kecamatan Gringsing sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 55 Kinerja Program Kecamatan Gringsing Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	90	100	90	90,00	100,00	ST	90,00	T	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
					TW I						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	90	90	100	100,00	111,11	ST	111,11	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**102,22**	ST	**100,22**	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Kecamatan Gringsing TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Gringsing tahun 2025 hingga trwiulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Gringsing sebesar 100 persen dengan predikat sangat tinggi.

F. Unsur Pemerintahan Umum

Beberapa kinerja Urusan Pemerintahan Umum sampai Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 56 Kinerja Program Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2025

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN										
	persentase masyarakat yang mengamalkan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang bagus	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK										
	Persentase parpol dan lembaga pendidikan yang	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target 2025	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2025 TW I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 hingga TW I	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2025 Hingga TW I (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2025 Hingga TW I	Tingkat Capaian kinerja terhadap Target Akhir RPD (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	berperan aktif mendukung pemerintah										
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA										
	Persentase masyarakat yang paham ketahanan Ekososbud	%	100	100	0	0	0,00	SR	0,00	SR	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN										
	Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	%	100	100	0	0	0,00	SR	0,00	SR	
5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL										
	Persentase penurunan konflik sosial	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**60,00**	R	**60,00**	R	

Sumber : Evaluasi Renja Bakesbangpol TW I Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol tahun 2025 Hingga triwulan I, rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 60% dengan status rendah. Capaian ini didukung dengan adanya partisipasi dan minat masyarakat yang aktif dalam kemasyarakatan.

b. Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 hingga triwulan I

Rata – rata capaian kinerja IKU Pemda Kabupaten Batang hingga Tahun 2025 hingga triwulan I sebesar 93,17 persen yang terdiri dari 22 indikator. Sebagaimana selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 57 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 hingga triwulan I

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Tahun 2025 TW I		Tingkat Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	PDRB Per Kapita (ADHK)	juta rupiah	22,3	22,3	100,00
2	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,51	3,59	100,00
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	70	70,73	100,00
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	91,98	92,59	100,00
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)*	indeks	63,96	92,48	100,00
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,01	6,03	100,00
7	Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan (Rp.000/tahun)	ribu rupiah	9803	10919	100,00
8	Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)*	%	21,6	20,17	93,38
9	Persentase Penduduk Miskin	%	8,34	8,73	95,53
10	Tingkat Pengangguran terbuka	%	5,6	5,67	98,77
11	Indeks Infrastruktur	Indeks	197,04	151,04	76,65
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,04	64,47	99,12
13	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68,66	80,6	100,00
14	Nilai SAKIP	Skor	70,05	68,95	98,43
15	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Indeks	3	2,9	96,67
16	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	79	80,11	100,00
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,45	86,91	100,00
18	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	155	128,7	100,00
19	Indeks Rasa Aman	Indeks	4,2	4,47	100,00
20	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,81	0,57	70,37
21	Indeks Demokrasi	Indeks	72	83,18	100,00
22	Angka Kriminalitas	%	0,015	0,046	32,61
Rata-rata capaian IKU Pemda					**93,71**

Sumber : Bapelitbang, 2025

**angka 2023*

c. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024

Rata-rata capaian Indikator Kinerja utama Perangkat Daerah di Kabupaten Batang sebesar 83,96 persen dengan 165 indikator. Sebagaimana rincian capaian per IKU Perangkat daerah tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 58 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	2024		Kondisi Akhir Kinerja
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Angka Rata-Rata Lama sekolah	tahun	7,1	7,08	99,72
		Angka Harapan Sekolah	tahun	12,4	12,17	98,15
		Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk	%	80	85,2	100,00
		Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	100,00
		Persentase pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	%	70	100	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,75	90,21	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	77,5	76,5	98,71
2	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	136	98,4	-
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	8,08	13,99	100,00
		Angka prevalensi balita stunting	%	13,72	9,59	69,90
		Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,89	75,01	100,00
		Persentase Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan (UU No. 40 Th 2004 dan UU No.36 Th 2009)	%	89	98,62	100,00
		Persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar (PMK 43. Th 2019)	%	80,95	66,67	82,36
		Persentase Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar (PMK No.73 Th. 2016, PMK No. 74 Th 2016, PMK No. 34 Th 2021)	%	70	91,24	100,00
		Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri. Kepmenkes RI Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010	%	11,69	37,9	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,75	83,61	94,21
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	80	79,6	99,50
3	RSUD Batang	Persentase Capaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	86	80,2	93,26

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	2024		Kondisi Akhir Kinerja
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Capaian Standart Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	86	87,53	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	99,25	80,75	81,36
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	80	67,3	84,13
4	RSUD Limpung	Persentase Capaian Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	87	87	100,00
		Persentase Capaian Standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	85	84,32	99,20
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	99	88,42	89,31
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	80	69,7	87,13
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Infrastruktur Wilayah kondisi Baik	%	71,2	70,57	99,12
		Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	69,87	68,43	97,94
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	%	88,5	85,31	96,40
		Persentase bangunan gedung yang layak fungsi	%	77,01	77,01	100,00
		Presentase Pengaturan Rencana Detail Tata Ruang Daerah	%	11,07	11,07	100,00
		Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Rasio	28,87	25,6	88,67
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,75	88,95	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	66,56	79,6	100,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	%	63	81,12	100,00
		Presentase perumahan dan lingkungan permukiman yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik	%	81	82,92	100,00
		Persentase pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak	%	63	71,65	100,00
		Persentase pengurangan pemukiman kumuh	%	63	38,49	61,10
		Tingkat penurunan kasus	%	85	100	100,00

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	2024		Kondisi Akhir Kinerja
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
		sengketa pertanahan				
		Persentase penyelesaian kasus pertanahan	%	100	100	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	65	84,44	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	66,5	74,65	100,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	75	82,56	100,00
		Persentase penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	%	75	82,56	100,00
		Persentase luasan wilayah bencana kebakaran	%	4	0,355	8,88
		Persentase penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran	%	72	100	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	72	77,6	100,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kerukunan	%	75	71,95	95,93
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	70,8	76,6	100,00
		Persentase demo tertangani	%	100	100	100,00
		Persentase potensi gangguan/konflik sosial keagamaan yang teratasi	%	100	100	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,75	91,04	100,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	%	67,44	100	100,00
		Persentase Penanggulangan Bencana secara cepat dan akurat	Indeks	100	100	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,75	81,53	91,86
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	80	73,8	92,25
10	Dinas Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri, dan berfungsi sosial	%	74	100	100,00
		Presentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	%	85	100	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,71	87,27	100,00

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	2024		Kondisi Akhir Kinerja
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	86	76,95	89,48
11	Dinas Tenaga Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	88,82	100,00
		Tingkat Kesempatan kerja	%	97	94,33	97,25
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	31,17	71,02	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	70	76,1	100,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,13	100	100,00
		TFR (Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total)	Indeks	3	1,44	48,00
		Ratio KDRT	Rasio	0,0071	0,71	100,00
		Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	%	0	0,0004	-
		Persentase cakupan pernikahan anak	%	4,2747	0	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,75	0,0163	0,02
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	80	85,87	100,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Luas RTH	%	60	73,76	100,00
		Indeks Kualitas Air	Indeks	50	56,5	100,00
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	80	56,5	70,63
		Indeks Tutupan Lahan	Indeks	68,5	84,61	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	62	68,21	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	90	72,75	80,83
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	23	96,04	100,00
		Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	0,56	41,42	100,00
		Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks	0,78	1,079	100,00
		Indeks Ketahanan Ekologi	Indeks	0,48	2,59	100,00
		Persentase pkk aktif	%	50,21	10,7	21,31
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89	55,3	62,13
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	67	81,41	100,00
15	Dinas Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	91,45	75	82,01

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	2024		Kondisi Akhir Kinerja
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
	dan Pencatatan Sipil					
		Persentase kepemilikan identitas Penduduk dan Akte Kelahiran	%	85	92,13	100,00
		Menurunnya Presentasi Data Ganda dan Anomali	%	2,3	84,46	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	62	2	3,23
16	Dinas Perhubungan	Rasio ijin trayek	rasio	1,5	77,4	100,00
		Tingkat kelancaran dan keamanan lalu lintas	rasio	0,5	0,00012	0,02
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,75	0,43	0,48
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	80	86,88	100,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	Indeks	3,5	74,6	100,00
		Indeks Smart City	Indeks	3,47	3,55	100,00
		Indeks Keamanan Informasi	%	100	3,59	3,59
		Persentase pemanfaatan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	%	100	100	100,00
		Persentase informasi dan komunikasi publik yang bisa diakses lewat media komunikasi	%	100	100	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	74	100	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,75	78,65	88,62
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan	%	12,75	86,68	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	67	12,53	18,70
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81	77,2	95,31
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pntu	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	75	84,51	100,00
		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	40	96,55	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,5	57,89	65,41

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	2024		Kondisi Akhir Kinerja
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	70	91,42	100,00
20	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	21	75,8	100,00
		Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	10	19,35	100,00
		Persentase inovasi ekonomi kreatif	%	10	15	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	71	18,8	26,48
		Jumlah medali yang diperoleh	Medali	35	0	-
		Persentase peningkatan pemuda berprestasi	%	4	71	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,75	75,35	84,90
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	66,33	84,72	100,00
		index pembangunan literasi masyarakat	Indeks	2,8	73,95	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	60,8	13,82	22,73
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,66	74,05	84,47
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Indeks	75,4	88,26	100,00
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Indeks	22,4	75,03	100,00
22	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan	Indeks tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang dilaksanakan	Indeks	84,5	79,25	93,79
		Kontribusi sektor Perikanan dan Peternakan terhadap PDRB ADHK	%	21,9	87,08	100,00
		Persentase Capaian Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	%	93,3	19,03	20,40
		Persentase Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan	%	96	119,88	100,00

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	2024		Kondisi Akhir Kinerja
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Produksi Hasil Ternak (Daging, Telur dan Susu)	%	87	95,97	100,00
		Persentase Hewan / Ternak yang Terobati	%	100	150,49	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	80	508,85	100,00
23	Dinas Pangan dan Pertanian	Persentase penguatan cadangan pangan daerah	%	0,024	68,4	100,00
		Ketersediaan Bahan Pangan Utama (Ton)			5,56	-
		a. Beras	Ton	119.615,00		-
		b. Jagung	Ton	71.156,00	160.298,00	100,00
		Cadangan Pangan Daerah (Ton)	Ton	10,6	87365	100,00
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	%	24,76	123023	100,00
		Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	0,0103	19,03	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	75,3	0,04	0,05
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	67	93.96	-
24	Sekretariat Daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP B	%	90	77,01	85,57
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	97,27	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor		88	-
		Nilai EKPPD	Skor	2,98	80	100,00
25	Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	78	3	3,85
		Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	78	82,78	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	62,5	78,55	100,00
26	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Indeks Perencanaan	Indeks	78	0	-
		Rata-rata capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	%	90,5	0	-
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100,00
		Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100	100	100,00
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	60,10	57,46	95,61
		Persentase pemanfaatan	%	100	100	100,00

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	2024		Kondisi Akhir Kinerja
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
		hasil kelitbangan				
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	100	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	62.50	80,05	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,7	88,78	100,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	status	WTP	WTP	100,00
		Persentase Kepatuhan OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan	%	100	100	100,00
		Presentase peningkatan pendapatan daerah	%	0,5	7,71	100,00
		Persentase Peningkatan PAD	%	2,03	9,68	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	64	93,21	100,00
28	Badan Kepegawaian Daerah	Nilai Sistem Merit	Skor	200	274,5	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	69	80,5	100,00
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Skor	86	90,07	100,00
		Persentase ASN dengan nilai kinerja kriteria "baik"	%	100	100	100,00
		Persentase ASN yang meningkat kemampuannya sesuai bidang tugas	%	70	100	100,00
29	Inspektorat	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	85	85,11	100,00
		Persentase pencapaian peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	%	85	100	100,00
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	85	80	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,75	88,3	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	80	80,2	100,00

Sumber : Bapelitbang, 2024

II. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah disusun mendasari pada hasil evaluasi tahun 2025 Triwulan I yang dikelompokkan berdasarkan pembagian urusan yaitu permasalahan urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, permasalahan urusan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar, permasalahan urusan pilihan dan permasalahan urusan penunjang. Secara rinci permasalahan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Permasalahan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Pendidikan sangat penting dalam peran meningkatkan terlihat masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan untuk kedepan yaitu:

a) Masih terdapat anak usia 5-15 tahun yang belum/tidak mau sekolah;
b) Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana minimal pendidikan seperti ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebelair, khususnya sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang belum semuanya dalam kondisi baik;
c) Masih adanya satuan PAUD yang belum terakreditasi B;
d) Belum semua guru memahami dan mendapatkan pelatihan kurikulum muatan lokal;
e) Belum semua guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi;
f) Masih adanya guru PAUD yang berkualifikasi dibawah S1/D4.

2. Urusan Kesehatan

Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan terlihat masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan untuk kedepan yaitu:

a) Tingginya AKI (Angka Kematian Ibu);

b) Belum optimalnya skrining pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi, TB, DM;
c) Belum optimalnya penanganan gizi buruk;
d) Masih adanya kasus *Stunting*;
e) Belum optimalnya sarana dan prasarana bidang kesehatan;
f) Belum optimalnya skrining kesehatan bagi warga Negara usia 15-59 tahun;
g) Belum optimalnya pelayanan terhadap Ibu Bersalin maupun Ibu Hamil.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Banyaknya asset tanah pengairan yang dipergunakan masyarakat secara illegal;
b) Masih adanya luasan irigasi dalam kondisi rusak;
c) Belum seluruh ruas jalan kabupaten tersedia drainase serta banyaknya drainase belum terkelola dengan baik;
d) Kondisi geometri jalan kabupaten, terutama yang berada di daerah selatan banyak yang ekstrim (belokan tajam, tikungan, naik, turun);
e) Minimnya tenaga perawat jalan/mantri jalan yang berada di UPTD DPU-PR Kabupaten Batang;
f) Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan terhadap kemampuan jalan dalam menerima beban muatan;
g) Belum adanya implementasi dan regulasi tentang penataan bangunan dan lingkungan;
h) Belum terintegrasinya perencanaan pengembangan dan penataan Perkotaan Batang;
i) Peta ruang yang tidak sesuai fakta dilapangan dengan peta existing RTRW sehingga menimbulkan ketidak pastian investasi yang ingin masuk ke Batang; Rawan terjadi

pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang berdasar RTRW.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam masyarakat, terciptanya lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang aman dan sehat sangat diperlukan. Namun dalam upaya pemenuhannya masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh;
b) Belum adanya *database* perumahan;
c) Terdapat *backlog* perumahan;
d) Belum tersusunnya perda perumahan dan permukiman.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Beberapa permasalah yang perlu diperhatikan urusan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat yaitu:

a) Terbatasnya jumlah SDM Linmas untuk mendukung upaya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
b) Belum optimalnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana;
c) Rendahnya kecepatan respon yang diberikan kepada masyarakat.

6. Urusan Sosial

Berdasarkan permasalah yang perlu diperhatikan urusan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat yaitu:

a) Belum optimalnya penanganan PMKS;
b) Masih sedikitnya panti yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial;
c) Masih rendahnya bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar PMKS;
d) Validasi dan verifikasi data penerima bantuan yang dilaksanakan oleh desa belum optimal.

b. Permasalahan Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan sektor tenaga kerja menjadi sangat penting guna menjawab bagaimana tantangan kualitas tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga. Dengan begitu, beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dari sektor tenaga kerja yaitu:

a) Rendahnya kualitas tenaga kerja di Kabupaten Batang;
b) Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Batang;
c) Jumlah lowongan kerja belum mampu memenuhi kebutuhan pada jumlah angkatan kerja;

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Dalam pelaksanaan pembangunan dengan perspektif gender masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Belum optimlanya perwujudan kesetaraan gender dan anak;
b) Belum optimalnya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan.

3. Urusan Pangan

Beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dalam urusan pangan yaitu belum optimalnya penanganan *food loss and food waste* (pemborosan pangan).

4. Urusan Pertanahan

Berdasarkan data capaian kinerja urusan Pertanahan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu masih rendahnya lahan yang bersertifikat.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Berdasarkan data capaian kinerja Lingkungan Hidup, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Kualitas Lingkungan Hidup secara keseluruhan masih belum baik;

b) Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan pengendalian limbah B3 di Kabupaten Batang;
c) Rendahnya cakupan penanganan persampahan;
d) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan penanganan sampah rumah tangga.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pelayanan *online* dalam pembuatan dokumen kependudukan;

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan data capaian kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Rendahnya tingkat pemahaman aparatur desa terkait pelestarian budaya desa;
b) Belum optimalnya peran PKK di masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan desa;
c) Kurang aktifnya pembinaan dan monitoring secara intensif baik ke desa binaan maupun desa non binaan;
d) Belum optimalnya peran tenaga pendamping desa dalam mengawal program pemberdayaan masyarakat baik infrastruktur maupun non infrastruktur.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:

a) Menurunnya PUS yang menjadi peserta KB aktif;
b) *Unmetneed* KB yang masih relatif tinggi;
c) Menurunnya angka partisipasi KB (akseptor KB) di Kabupaten Batang;
d) Belum optimalnya akses dan pelayanan KB di Kabupaten Batang.

9. Urusan Perhubungan

Berdasarkan data capaian kinerja Perhubungan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Masih rendahnya pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, khususnya rambu-rambu dan penerangan jalan umum;
b) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur perhubungan.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan data capaian kinerja Komunikasi dan Informatika, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kenerja Pemerintah;
b) Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan;
c) Belum optimalnya tata kelola dan layanan SPBE;
d) Belum optimalnya sarana dan prasarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan data capaian kinerja Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Belum optimalnya pengelolaan produk unggulan dan UMKM;
b) Ketidakteriban koperasi dalam pelaporan keuangan dan hasil RAT;
c) Minimnya permodalan UMKM yang menyebabkan UMKM dan wirausaha baru yang tidak dapat bertahan dalam guncangan/isu ekonomi.

12. Urusan Penanaman Modal

Berdasarkan data capaian kinerja Penanaman Modal, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:.

a) Kurang minatnya investor untuk menggunakan lahan KITB;

b) Belum optimalnya penyediaan informasi peluang investasi yang siap ditawarkan kepada investor.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan data capaian kinerja kepemudaan dan Olahraga, maka masih terdapat permasalah yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan prestasi pemuda dan atlet dalam keolahragaan;
b) Rendahnya kemampuan dan pengetahuan pemuda dalam berwirausaha, berorganisasi;
c) Rendahnya sertifikasi pelaku ekonomi kreatif;

14. Urusan Statistik

Berdasarkan data capaian kinerja urusan statistik, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan adalah belum optimalnya penguatan kolaborasi dengan perangkat daerah dan juga BPS dalam pengelolaan data statistic serta produsen data sektoral yang terlambat dalam menberikan *update* data.

15. Urusan Persandian

Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Urusan Kebudayaan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu :

a) adanya *hacker* yang berusaha menembus sistem keamanan informasi pemerintah;
b) Minimnya tenaga ahli dalam menangani keamanan sistem informasi.

16. Urusan Kebudayaan

Berdasarkan data capaian kinerja Urusan Kebudayaan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan adalah belum optimalnya fasilitasi dan pembinaan komunitas sanggar seni di Kabupaten Batang;

17. Urusan Perpustakaan

Berdasarkan data capaian kinerja maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Penurunan pengunjung perpustakaan;
b) Pergeseran minat baca buku fisik ke buku digital.

18. Urusan Kearsipan

Berdasarkan data capaian kinerja Kearsipan, pada urusan kearsipan masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu banyaknya perangkat daerah yang belum memahami kearsipan.

c. Permasalahan Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan data capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Dampak perubahan iklim yang berimbas pada hasil penangkapan ikan dan daya dukung lingkungan perairan darat;
b) Pendangkalan di muara/jalan masuk ke TPI sehingga kapal kesulitan untuk masuk dan melaksanakan bongkar muat ikan di TPI Kab Batang dan memilih untuk melakukan bongkar muatan ikan di TPI lain di luar Kab. Batang;
c) Belum optimalnya binaan kelompok usaha kelautan dan perikanan.

2. Urusan Pariwisata

Berdasarkan data capaian kinerja Urusan Pariwisata, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Terdapat produk ekonomi kreatif terdata dan terdaftar secara resmi.
b) Masih adanya destinasi wisata yang belum bekerjasama dengan Disparpora Kabupaten Batang;
c) Belum optimalnya kapasitas Pokdarwis dan SDM Pelaku Pariwisata;

d) Minimnya aksesibilitas menuju objek wisata dan konektivitas antar lokasi wisata
e) Belum optimalnya kolaborasi multipihak dalam promosi pariwisata dan ekplorasi destinasi baru wisata

3. Urusan Pertanian

Pembangunan urusan pertanian diharapkan mampu meningkatkan nilai produksi dan produktivitas serta mampu meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal ini masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Adanya gap persepsi SOP Tanaman;
b) Kemarau panjang efek el nino yang menyebabkan masa tanam mundur dan pengurangan hasil produksi;
c) Harga komoditas pertanian yang cenderung fluktuatif;
d) Belum optimalnya pendampingan dan fasilitasi terhadap petani.

4. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki peran yang cukup strategis dalam mendukung kelancangan perekonomian yang mana saling berkaitan dan menunjang dengan sektor lain. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Keterbatasan informasi jenis barang, persaingan dan lokasi produksi produk perdagangan;
b) Lemahnya jaringan usaha dan akses pasar
c) Pembatasan tarif ekspor;
d) Masih adanya perusahaan yang belum berizin;
e) Rendahnya kontribusi pendapatan pasar dan PKL terhadap PAD Kabupaten Batang.

5. Urusan Perindustrian

Sebagai salah satu sektor yang menjadi penopang dalam struktur ekonomi di Kabupaten Batang, urusan perindustrin masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Industri Kecil Menengah (IKM) masih banyak yang belum memiliki perijinan dalam usahanya
b) Rendahnya kesadaran akan pentingnya perijinan bagi IKM.

6. Urusan Ketransmigrasian

Permasalahan dalam transmigrasi karena rendahnya minat masyarakat untuk transmigrasi.

d. Permasalahan Urusan Penunjang

1. Perencanaan

Berdasarkan data capaian kinerja Perencanaan,maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Belum optimalnya proses perencanaan pembangunan salah satu kendalanya adalah dimana tidak semua Organisasi Perangkat Daerah telah memahami mekanisme dan manfaat perencanaan;
b) Dinamika perubahan regulasi dalam penyusunan dokumen perencanaan yang cepat.

2. Keuangan

Berdasarkan data capaian kinerja Keuangan,maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b) Kurang kolaborasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait persyaratan pelayanan pajak;
c) Banyaknya wajib pajak yang mengajukan keberatan atas pajak yang ditagihkan;
d) Masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya menjalankan kewajiban pajaknya;
e) Belum optimalnya kepengurusan aset milik daerah (status kepemilikan, kondisi, dan persebaran aset).

3. Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan data capaian kinerja Penelitan dan Pengembangan,maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu :

a) Kurangnya pengintegrasian data dari Organisasi Perangkat Daerah agar dapat diakses dengan mudah dan cepat;
b) Belum adanya ekosistem inovasi;
c) Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan kelitbangan daerah.

4. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Berdasarkan data dan capaian kinerja kepegawaian, belum terdapat permasalahan dominan yang menghambat kinerja kepegawaian di Kabupaten Batang.

5. Sekretariat Daerah

Berdasarkan data capaian kinerja sekretariat daerah,maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi;
b) Masih adanya Perangkat Daerah yang belum berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan SAKIP;
c) Belum optimalnya penguatan komunikasi informasi kepada organisasi pemerintah daerah;
d) Belum optimalnya implementasi manajemen kinerja.

6. Sekretariat DPRD

Permasalahan yang perlu diperhatikan dalam urusan sekretaria DPRD yaitu

a) Kurangnya pemahaman anggota dewan pentingnya program kerja dan rencana kerja dalam pelaksanaan kegiatan dewan sebagai implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi dewan sbg tolok ukur akuntabilitas kinerja dewan

7. Pengawasan

Berdasarkan data capaian kinerja Pengawasan,maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Rendahnya transisi digitalisasi data pengawasan di Kabupaten Batang;
b) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah di Kabupaten Batang;

c) Sinkronisasi perubahan rencana *Mandatory* pengawasan.

e. Unsur Kewilayahan

Berdasarkan data capaian kinerja kewilayahan, secara umum masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu jumlah usulan banyak yang belum terakomodir dengan baik hal ini dikarenakan usulan tidak termasuk dalam prioritas pembangunan daerah.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

a. Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia tahun 2020 sempat mengalami kontraksi sebesar 1,29 persen dan mulai tumbuh pada tahun 2021 sebesar 3,69 persen (y-o-y), lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020. Hingga tahun 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02 persen dari yang sebelumnya 5,04 persen (y-o-y). Dari sisi produksi, kontribusi tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 18,98 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi tertinggi terdapat pada Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 54,04 persen.

Menurunnya kondisi perekonomian di Indonesia berbanding terbalik dengan kondisi pengangguran dan kemiskinan nasional. Dimana pengangguran Indonesia turun menjadi 4,91 persen pada tahun 2024 dari yang sebelumnya 5,32 persen tahun 2023. Sementara pada tingkat kemiskinan menurun menjadi 8,57 persen tahun 2024 dari yang sebelumnya 9,36 persen tahun 2023. Mempertimbangkan potensi keberlanjutan dari pembangunan ekonomi tersebut, sehingga kondisi tersebut cukup kondusif dalam mendukung pencapaian tema Pembangunan RKP Tahun 2025 yang ditetapkan yaitu **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.**

a. Arah Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Perekonomian Jawa Tengah pada akhir tahun 2024 (y-on-y) tercatat sebesar 4,95 persen, mengalami penurunan sebesar 0,02 poin dari tahun 2023. Kondisi perekonomian tersebut berbanding terbalik dengan kondisi kemiskinan dan pengangguran di Jawa Tengah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,78 persen pada Tahun 2024 dari 5,13 persen pada Tahun 2023. Sementara, Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun menjadi 9,58 persen pada tahun 2024, turun

dari yang sebelumnya 10,77 persen di Tahun 2023. Sedangkan Inflasi di Jawa Tengah hingga tahun 2024 sebesar 1,43 persen (y-o-y). Capaian tersebut cukup kondusif dalam mendukung pencapaian tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 yang diarahkan pada **Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter**.

b. Arah Pembangunan Ekonomi Kabupaten Batang

Perekonomian Kabupaten Batang tumbuh sebesar 6,03 pada tahun 2024 capaian ini meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 5,53 persen. Sektor penyumbang perekonomian Kabupaten Batang terbesar yakni sektor industri pengolahan dengan menyumbang sekitar 34,89 persen dari seluruh total PDRB Kabupaten Batang Tahun 2024.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi kemiskinan daerah. Kemiskinan di Kabupaten Batang tahun 2024 turun pada 8,73 persen dari 8,92 persen tahun 2023. Sementara itu, peningkatan ekonomi ini juga memberikan dampak signifikan terhadap ketenagakerjaan di Kabupaten Batang. TPT batang turun menjadi 5,67 persen pada tahun 2024 dari 6,06 persen tahun 2023. Hal tersebut mengindikasikan perlunya penguatan upaya dan strategi untuk menekan pengangguran di daerah.

Dengan memperhatikan arah kebijakan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang Tahun 2024, maka kebijakan ekonomi Kabupaten Batang tahun 2025 diarahkan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang guna mendukung kebijakan Kabupaten Batang tahun 2025 yang difokuskan melalui Tema pembangunan "**Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi sektor pariwisata**".

3.1.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang tumbuh hingga 6,03 persen di tahun 2024 yang didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha yaitu Industri Pengolahan yang menyumbang sebesar 34,89%; selanjutnya disusul oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan menyumbang sebesar 18,35%; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,45% dari total PDRB 2024.

Struktur ekonomi Kabupaten Batang dari sisi pengeluaran menunjukkan bahwa komponen pengeluaran pada tahun 2024 yang menunjukkan peningkatan terhadap kontribusi PDRB adalah konsumsi rumah tangga menyumbang sebesar 69,10 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 27,07 persen. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di Kabupaten Batang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) Kemudian digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB) dan perubahan inventori.

Mengacu pada telaah kondisi perekonomian Kabupaten Batang, perekonomian Kabupaten Batang tahun 2020 sempat berkontraksi hingga 1,29 persen. Namun mulai menunjukkan pemulihan ekonomi pasca Covid 19 pada tahun 2021 menjadi 4,88 persen dan terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 6,03 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga memberikan *Multiplier effect* pada sektor lainnya seperti pada sektor tenaga kerja. Peningkatan ekonomi ini memberikan dampak signifikan terhadap ketenagakerjaan di Kabupaten Batang. TPT Kabupaten Batang menurun menjadi 5,67 persen pada tahun 2024 dari 6,06 persen tahun 2023. Sementara itu, kemiskinan di Kabupaten Batang tahun 2024 turun pada 8,73 persen dari 8,92 persen tahun 2023. Hal tersebut mengindikasikan perlunya penguatan upaya dan strategi untuk menekan pengangguran di daerah. Selain itu dalam memproyeksi pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan indentifikasi tandangan, peluang, dan arah

kebijakan dalam mewujudkan proyeksi tersebut. Tantangan ekonomi di Kabupaten Batang diantaranya :

- Peningkatan investasi, yang didorong untuk selalu tumbuh. Penguatan kelembagaan hingga prosesdur investasi yang efisien akan mampu mendorong investor masuk untuk menanamkan modal di Kabupaten Batang;
- Kualitas Sumber Daya Manusia, secara kuantitas, penduduk Kabupaten Batang sudah cukup potensial untuk memenuhi pasar tenaga kerja. Namun dalam sisi kualitas, kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Batang belum cukup unggul untuk bersaing dengan tenaga kerja global. Hal ini didasari oleh capaian rata-rata lama sekolah serta pendidikan penduduk terakhir ditamatkan yang masih didominasi pada tamatan SD-SMP.
- Ketersediaan Bahan Baku Industri, dengan adanya kawasan industri di Kabupaten Batang seharusnya daerah mampu dalam menyediakan/men-supply dalam jumlah yang banyak untuk menjamin kelangsungan produksi di kawasan industri.
- Kemandirian keuangan daerah yang masih cukup rendah
- Laju inflasi cenderung fluktuatif
- Potensi peningkatan ketimpangan daerah mengingat adanya pembangunan industri baru di Kabupaten Batang

Melihat adanya tantangan ekonomi di Kabupaten Batang, dalam sisi lain pasti terdapat peluang yang ada dalam mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Batang, antara lain :

- Investasi yang akan terus tumbuh mengingat adanya kawasan industri di Kabupaten Batang yakni KIT dan BIP
- Kebijakan Pengembangan aglomerasi Petanglong
- Dukungan perkembangan teknologi informasi
- Potensi Pariwisata yang cukup banyak di Kabupaten Batang, dari adanya wisata gunung hingga pantai. Dampak pariwisata terhadap perekonomian mampu memberi efek penggandaan (*multiplier effect*).

- Penguatan industri dan potensi lokal, pengembangan industri lokal serta potensi lokal diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri lokal Kabupaten Batang.
- Kemudahan dalam perijinan perusahaan serta kemudahan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
- Pemanfaatan CSR (*Corporate Social Responbility*) dalam mendukung prioritas Pembangunan daerah

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara umum kinerja pelaksanaan keuangan daerah Kabupaten Batang dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, sedangkan pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran.

Dalam kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggung-jawaban. Sebagai informasi, Penetapan APBD Tahun 2025 tepat waktu yaitu 24 Desember 2024.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD yang akan digunakan untuk mendanai belanja daerah Tahun 2025 didasarkan atas penghitungan pertumbuhan PDRB dan potensi daerah yang dapat dikembangkan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

a) Proyeksi pajak daerah Tahun 2025, didasarkan atas *baseline* tahun 2022 sampai dengan 2024 dengan mempertimbangkan potensi Pajak dan retribusi di daerah. Variabel PDRB penting untuk dimasukkan dalam model, karena terdapat pengaruh pertumbuhan PDRB dengan potensi pajak yang dapat diraih. Pajak Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 217.060.000.000.

b) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, proyeksi Pertumbuhan Pajak Daerah pada tahun 2025 diharapkan dapat tumbuh secara signifikan. Pada perubahan tahun 2025 retribusi daerah Kabupaten Batang diproyeksikan meningkat dari target penetapan APBD 2025 menjadi sebesar Rp 166.914.148.457.

c) Proyeksi Hasil Pengelolan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bersumber dari BUMD yang ada di Kabupaten Batang, yaitu dari Perumda Aneka Usaha, Bapera dan PDAM Sendang Kamulyan. Proyeksi ini didasarkan atas perilaku pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuasi cukup sigifikan. Sehingga pada perubahan tahun 2025 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan meningkat menjadi Rp. 17.024.865.330.

d) Proyeksi lain-lain PAD yang sah didasarkan pada perilaku pertumbuhan selama tahun 2022-2024. Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah bersumber dari pendapatan Hasil Penjualan Aset Lain-Lain Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional

Pemerintah, Jasa Giro, serta Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah. Pada perubahan 2025 ini, lain lain PAD yang Sah diproyeksikan sebesar Rp. 3.679.183.000.

2) Pendapatan Transfer

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur Pendapatan Transfer pada APBD. Yang semula (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005) Dana Transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, berubah menjadi Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat, didasarkan atas asumsi dengan menggunakan baseline data alokasi dana TKDD Tahun Anggaran 2025. Secara umum sumber utama pendapatan transfer pemerintah pusat yang diterima Pemerintah Kabupaten Batang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik dan Dana Insentif Daerah (DID). Dana *block grant* melalui DAU sebagai instrumen menutup kesenjangan fiskal antar daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik dan Non Fisik, dengan pola proposal based yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional.

Berikut adalah tabel realisasi pendapatan tahun 2022-2024 :

Tabel 3. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Batang

Nomor Urut	URAIAN	REALISASI		
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024**
1	*2*	*3*	***4***	***5***
1	**PENDAPATAN**			
01.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**300.965.373.375,01**	**327.784.151.481,65**	**359.778.837.359,30**
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	129.078.191.268,00	146.490.281.630,00	162.562.189.075,00
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	22.354.240.158,00	25.913.239.170,00	170.234.277.164,30

Nomor Urut	URAIAN	REALISASI		
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024**
1	*2*	*3*	***4***	***5***
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	13.058.044.717,00	14.301.507.571,00	16.607.120.002,00
01.01.04	Lain-lain PAD	136.474.897.232,01	141.079.123.110,65	10.375.251.118,00
1,2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.444.829.519.507,00**	**1.479.285.834.327,00**	**1.452.173.365.406,00**
01.02.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.096.299.986.931,00	1.105.903.284.669,00	1.452.173.365.406,00
01.02.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	208.032.695.000,00	223.279.438.000,00	
01.02.03	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.638.152.000,00	150.103.111.658,00	145.906.696.894,00
01.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**1.020.475.000,00**	**500.000.000,00**	**480.000.000,00**
01.03.01	Pendapatan Hibah	1.002.000.000,00	500.000.000,00	480.000.000,00
01.03.02	Pendapatan Dana Darurat	-	-	
01.03.03	Pendapatan Lainnya	18.475.000,00	-	
	Jumlah Pendapatan	**1.750.957.035.202,01**	**1.807.569.985.808,65**	**1.958.338.899.659,30**

Sumber : BPKPAD Kab Batang, 2025

*** 2024 unaudited*

Tabel 3. 2 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Batang RKPD 2025, APBD 2025, dan Perubahan RKPD 2025

Uraian	TAHUN		
	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**407.759.182.058**	**411.689.806.831**	**404.678.196.787**
Pajak Daerah	230.125.000.000	230.125.000.000	217.060.000.000
Retribusi Daerah	154.733.598.738	157.757.588.738	166.914.148.457
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.783.126.320	17.774.761.093	17.024.865.330
Lain-lain PAD yang Sah	6.117.457.000	6.032.457.000	3.679.183.000
PENDAPATAN TRANSFER	**1.566.288.258.378**	**1.566.288.258.378**	**1.526.786.380.800**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.474.851.006.578	1.474.851.006.578	1.440.294.530.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.437.251.800	91.437.251.800	86.491.850.800
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**480.000.000**	**480.000.000**	**-**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	480.000.000	480.000.000	-
Jumlah Pendapatan	**1.974.527.440.436**	**1.978.458.065.209**	**1.931.464.577.587**

Sumber : BPKPAD, Bapelitbang, 2025

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 antara lain :

- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dengan memanfaatkan digitalisasi

(penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah);

- Penyesuaian Tarif Pajak dan Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak tertentu;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak;
- Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis online system;
- Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme SDM Aparatur;
- Peningkatan kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak maupun Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- Optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah;
- Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah;
- Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah;
- Penyempurnaan Dasar Hukum Pungutan.
- Meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Batang.
- Gebyar pajak dengan samsat (opsen PKB dan bbnkb)
- Sosialisasi **SENGKUYUNG** prioritas dan *launching* pantang sambat (pajaknya batang bersama samsat batang);
- *samsat corporate* kerjasama lewat koperasi bpkpad utk pbayaran pajak kendaraan bermotor

B. Belanja Daerah

Struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang

Tahun 2023-2026. Struktur belanja daerah tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi dengan rincian :

1. Belanja Pegawai

   Guna memenuhi kewajiban belanja pegawai, termasuk di dalamnya adalah proyeksi kenaikan jumlah ASN di Kabupaten Batang, maka belanja pegawai mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama dalam penambahan dan pemenuhan gaji ASN baru. Belanja pegawai pada perubahan tahun 2025 diproyeksikan meningkat menjadi Rp 972.557.562.163.

2. Belanja Barang Jasa

   Belanja Barang Jasa diasumsikan naik menjadi Rp 464.930.912.180. Belanja ini salah satunya digunakan untuk pemenuhan UHC *(Universal Health Coverage).*

3. Belanja Hibah

   Pada pos belanja ini terjadi perubahan yang fluktuatif. Pada anggaran perubahan tahun 2025 belanja hibah di proyeksikan sebesar Rp. 70.319.108.693.

4. Belanja Bantuan Sosial

   Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya berupa Beasiswa Siswa Miskin. Belanja Bantuan Sosial pada perubahan tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 8.433.074.833.

b. Belanja Modal

Belanja modal diproyeksikan meningkat pada perubahan tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 161.496.083.789. Belanja modal ini terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga perubahan tahun 2025 di proyeksikan sebesar Rp. 24.561.101.879

d. Belanja Transfer

Belanja transfer pada perubahan tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 369.024.932.200.

Tabel 3. 3 Realisasi Belanja Tahun 2022-2024

Nomor Urut	URAIAN	REALISASI		
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2	**BELANJA**			
02.01	**BELANJA OPERASI**	**1.267.645.675.943,00**	**1.289.626.340.877,00**	**1.395.297.308.693,00**
02.01.01	Belanja Pegawai	728.689.787.535,00	727.519.485.187,00	808.924.356.457,00
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	440.412.460.908,00	439.445.809.479,00	476.784.495.553,00
02.01.05	Belanja Hibah	85.009.607.500,00	109.820.396.211,00	98.128.650.683,00
02.01.06	Bantuan Sosial	13.533.820.000,00	12.840.650.000,00	11.459.806.000,00
02.02	**BELANJA MODAL**	**183.195.271.255,00**	**139.566.988.711,00**	**176.258.634.060,00**
02.02.01	Belanja Tanah	49.000.000,00	313.120.881,00	
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	33.491.783.408,00	48.610.030.041,00	44.895.586.594,00
02.02.03	Belanja Gedung dan Bangunan	58.779.585.910,00	42.805.231.598,00	55.266.619.898,00
02.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	89.951.704.275,00	36.048.267.476,00	62.829.046.044,00
02.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	923.197.662,00	11.790.338.715,00	12.730.146.582,00
02.02.06	Belanja Aset Lainnya	-	-	537.234.942,00
02.03	**BELANJA TAK TERDUGA**	**4.170.055.600,00**	**3.514.581.828,00**	**1.257.261.878,00**
2,4	**BELANJA TRANSFER**	**346.902.433.685,00**	**367.903.546.431,00**	**370.073.158.365,00**
	Belanja Bagi Hasil	**9.576.624.904,00**	**10.251.862.223,00**	**11.185.892.973,00**
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	9.576.624.904,00	10.251.862.223,00	11.185.892.973,00
	Belanja Bantuan Keuangan	**337.325.808.781,00**	**357.651.684.208,00**	358.887.265.392,00
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau	337.325.808.781,00	357.651.684.208,00	358.887.265.392,00

Nomor Urut	URAIAN	REALISASI		
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024**
1	*2*	*3*	***4***	***5***
	Kabupaten/Kota kepada Desa			
	Jumlah Belanja	**1.801.913.436.483,00**	**1.800.611.457.847,00**	**1.942.886.362.996,00**
	Surplus/Defisit	**- 50.956.401.280,99**	**6.958.527.961,65**	**15.452.536.663,30**

Sumber : BPKPAD, Bapelitbang, 2021 diolah

*** 2024 unaudited*

Tabel 3. 4 Proyeksi Belanja Tahun 2025

Uraian	TAHUN		
	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.488.676.679.523	1.472.243.382.498	1.516.240.657.869
Belanja Pegawai	905.659.544.885	903.088.413.817	972.557.562.163
Belanja Barang dan Jasa	504.167.409.085	487.104.743.128	464.930.912.180
Belanja Hibah	69.005.437.553	70.171.437.553	70.319.108.693
Belanja Bantuan Sosial	9.844.288.000	11.878.788.000	8.433.074.833
BELANJA MODAL	170.283.413.975	190.500.869.231	161.496.083.789
Belanja Modal Tanah	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.119.970.223	35.195.403.724	29.584.283.300
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.572.307.077	71.476.297.924	46.899.856.783
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.907.212.675	72.048.827.222	71.920.903.345
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.233.924.000	10.993.280.361	12.187.980.361
Belanja Modal Aset Lainnya	350.000.000	687.060.000	803.060.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	**10.000.000.000**	**12.000.000.000**	**24.561.101.879**
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	12.000.000.000	24.561.101.879
BELANJA TRANSFER	**42.082.654.076**	**36.042.454.076**	**369.024.932.200**
Belanja Bagi Hasil	13.959.954.076	13.959.954.076	18.638.133.000
Belanja Bantuan Keuangan	28.122.700.000	22.082.500.000	350.386.799.200
JUMLAH BELANJA	**2.034.527.440.436**	**2.038.458.065.209**	**2.071.322.775.737**
Surplus / (defisit)	**-60.000.000.000**	**-60.000.000.000**	**-139.858.198.150**

Sumber : BPKPAD, Bapelitbang, 2025 diolah

Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 berdasarkan hasil analisis keuangan terdapat defisit Rp. **139.858.198.150**, hal ini dikarenakan ada beberapa alokasi belanja yang diprioritaskan pada belanja modal serta kenaikan belanja pegawai. Sedangkan defisit tersebut dapat ditutup dengan penerimaan pembiayaan

yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sehingga tidak menimbulkan risiko fiskal.

Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 antara lain :

- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN),
- Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta peningkatan ketertiban dan keamanan kenyamanan lingkungan
- Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan; sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi;
- Mengakomodir masukan usulan pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui, bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Pelaksanaan efisiensi belanja di tahun 2025 dan difokuskan pada belanja bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan, serta priotitas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan.

C. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan secara selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Batang tahun 2021 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukan sebagai pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014, daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 304 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2020 mengatur Tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah, yang mana penyertaan modal ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan ketahanan kelembagaan, memperluas ruang gerak dalam melakukan perluasan usaha dan meningkatkan layanan kepada masyarakat guna mendorong perekonomian di Kabupaten Batang dan pendapatan Daerah dari deviden Badan Usaha Milik Daerah.

Pada tabel berikut dicantumkan hasil realisasi pembiayaan tahun 2022-2024 dan proyeksi pembiayaan Kabupaten Batang tahun 2025 :

Tabel 3. 5 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2024

Nomor Urut	URAIAN	REALISASI PEMBIAYAAN		
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024**
1	*2*	*3*	***4***	***5***
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6,1	**PENERIMAAN**			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**215.751.265.851,77**	**144.458.319.116,78**	**143.719.568.550,43**
6,2	**PENGELUARAN**			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**20.342.000.000,00**	**7.700.000.000,00**	**7.500.000.000,00**
	Pembiayaan Netto	**195.409.265.851,77**	**136.758.319.116,78**	**136.219.568.550,43**
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	**144.452.864.570,78**	**143.716.847.078,43**	**151.672.105.213,73**

Sumber : BPKPAD, Bapelitbang, 2025 diolah

*** 2024 unaudited*

Tabel 3. 6 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025

Uraian	TAHUN		
	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.000.000.000	70.000.000.000	144.858.198.150
Penerimaan Pinjaman Daerah			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	70.000.000.000	70.000.000.000	144.858.198.150
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000
Pembiayaan Netto	60.000.000.000	60.000.000.000	139.858.198.150

Sumber : Bapelitbang, BPKPAD, 2025

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Batang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani amanat pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 secara khusus amanat pembangunan Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan sinergitas dan amanat pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 khususnya amanat pembangunan RKP Tahun 2025, serta amanat pembangunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

4.1. Visi Misi RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2025-2045

Berdasarkan Instruksi Dalam Negero Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045, Bupati/Walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota untuk segera membahas RPJPD Kabupaten/kota Tahun 2025-2045 yang selaras dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045, dan RTRW Kabupaten/Kota serta menetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 paling lambat minggu keempat Bulan Agustus Tahun 2024. Mendasari hal tersebut makan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2025-2045 menetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang 2025-2045 dengan frasa pokok sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Kerangka Visi Pembangunan Kabupaten Batang
Sumber : RPJPD Kabupaten Batang 2025-2045

Bersatu diartikan dengan terciptanya karakter yang guyub dan rukun, terjaganya kondusivitas wilayah, tidak terpecah dan tercerai berai serta mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Kondisi ini didasarkan pada permasalahan terkait dengan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat yang perlu dioptimalkan, peningkatan partisipasi masyarakat dan seluruh aktor/stakeholders pembangunan di Kabupaten Batang.

Mandiri diartikan sebagai kondisi daerah yang mampu mencukupi dan memprioritaskan kebutuhan daerah serta mampu memberikan kontribusi kepada pihak lain. Kondisi ini didasarkan pada permasalahan terkait dengan daya saing daerah yang belum optimal, perwujudan kemandirian berbagai sektor utamanya sektor unggulan sesuai potensi daerah.

Berdaya Saing diorientasikan sebagai daerah Maju dimana daerah mampu tumbuh dan berkembang dengan unggul dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan akselerasi pembangunan Infrastruktur yang harapannya disertai dengan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan dengan tetap menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam serta ketahanan terhadap resiko bencana secara berkesinambungan. Hal ini disertai dengan kinerja birokasi yang adaptif dan inovatif dalam mengakselerasi kinerja pembangunan di Kabupaten Batang.

Tabel 4. 1 Sasaran Visi pada Periode 2025-2029

Visi Batang	Sasaran Visi Batang	Indikator	Satuan	Baseline (2025) *)	Target Periodesasi *)
					2025-2029
Kabupaten Batang yang Bersatu, Mandiri, Berdaya Saing dan Membangun yang berkelanjutan	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB Per Kapita	Jt/Rp	36,45-36,70	36,71-76,68
		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,50-6,10	5,3-5,8
		Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	35,55	36,66
	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan	%	8,27-8,34	6,47
	Birokrasi yang Adaptif dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	67,09	70,5
		Kapabilitas Inovasi	Angka	1,85	1,85-2,25
		Indeks Rasa Aman	Indeks	89,9	89,6-89,9
	Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	%	70,75	73,2
	Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	70,66	70,84

Sumber : RPJPD Kabupaten Batang, 2025-2045

Sementara itu dalam rangka mencapai Visi tersebut, ditetapkan 6 Misi guna mendukung pencapaian Visi Pembangunan Tahun 2025-2045 sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Batang Yang Berkualitas
2. Akselerasi Ekonomi
3. Pembangunan Wilayah yang adil, merata, berkualitas, dan ramah lingkungan
4. Pemerintahan Yang Dinamis
5. Stabilitas dan Kondusivitas Wilayah
6. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Sebagaimana keterkaitan misi dan arah pembangunan Periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Arah Kebijakan Periode 2025-2029

Periode pertama pada pembangunan jangka panjang diarahkan pada **Penguatan Modal Dasar Pembangunan Daerah.** Pada periode ini dilakukan dengan penguatan fondasi transformasi pembangunan ekonomi dan sosial yang didukung dengan peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur yang berkualitas. Kebijakan ini perlu didukung melalui dukungan pembiayaan pembangunan, penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih

adaptif berbasis pelayanan pada masyarakat dan pembangunan wilayah yang adil merata serta mampu memberikan rasa nyaman aman bagi masyarakat Batang.

Pada periode pertama, Misi **Sumber Daya Manusia Batang yang berkualitas** diarahkan pada Pemerataan akses layanan pendidikan dan kualitas pendidik, peningkatan layanan kesehatan masyarakat di tingkat primer, pemerataan akses dan jaminan kesehatan, penyelenggaraan jaminan sosial dan perlindungan sosial secara menyeluruh, peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar, serta peningkatan partisipasi pemuda dan anak dalam pembangunan.

Pada misi **Akselerasi Ekonomi** diarahkan pada Penguatan produksi pada sektor unggulan di Kabupaten Batang yang didukung pada peningkatan infrastruktur dan kelembagaannya, Pengembangan ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif, serta Penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah.

Pada Misi **Pembangunan Wilayah yang adil, merata, berkualitas, dan ramah lingkungan** diarahkan pada penguatan penyediaan infrastruktur dasar dan kelengkapannya, penanganan kawasan kumuh, serta Penguatan kolaborasi kemitraan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Pada Misi **Pemerintahan yang Dinamis** diarahkan pada Penguatan implementasi tata kelola pemerintahan dalam pemenuhan pelayanan publik, penerapan manajemen risiko pada setiap proses bisnis pemerintahan, peningkatan peran serta masyarakat dan *stakeholder* dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan, Penguatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan transparan, serta peningkatan kualitas dan integritas penyelenggara pemerintahan desa.

Pada Misi **Stabilitas dan Kondusivitas Wilayah** diarahkan pada penguatan ketentraman dan ketertiban umum dalam menciptakan rasa aman nyaman bagi masyarakat, penguatan nilai nilai demokrasi Pancasila dalam masyarakat, penguatan stabilitas daerah berupa terkendalinya inflasi dan stabilitas harga dalam menjaga daya beli masyarakat.

Pada Misi **Ketahanan sosial budaya dan ekologi** diarahkan pada penguatan karakter masyarakat yang berlandaskan kebudayaan, penguatan kualitas keluarga dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak, penguatan cadangan pangan, pengendalian dan pengelolaan kualitas lingkungan hidup, Peningkatan pengelolaan dan cakupan pelayanan

persampahan, Penguatan resiliensi dampak perubahan iklim, serta penguatan kemampuan daerah yang tangguh dalam mitigasi bencana.

Selanjutnya berikut tersaji tabel keterkaitan visi misi, sasaran pokok, dan indikator beserta target pada periode pertama 2025-2029 RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2025-2045 :

Tabel 4. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Sasaran pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan beserta target periode pertama dalam RPJPD Kab. Batang tahun 2025-2045

Visi Batang	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	SATUAN	*Baseline 2025*	Target 2025-2029
1	2	3	4	5	6		7
Kabupaten Batang yang Bersatu, Mandiri, Berdaya Saing dan Membangun yang berkelanjutan	1. Sumber Daya Manusia Batang yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia Batang secara holistik	Akses dan Kualitas Kesehatan untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,14	75,31
				Jumlah Kasus Kematian Ibu	kasus	13	13
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	14,38	8,84
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	90	92,5
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	90	91,25
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98,84	98
			Pendidikan Berkualitas Yang Merata	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):	0	0	0
				a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	64,04	86,65
				b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	62,26	86,45
				c) Numerasi SD/Sederajat	%	51,06	70,1
				d) Numerasi SMP/Sederajat	%	36,83	63,25
				Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,66	8,2925
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,17	13,04

Visi Batang	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	SATUAN	*Baseline 2025*	Target 2025-2029
1	2	3	4	5	6		7
				Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	4,62	5,59
				Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	96,99	100
				Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,11	19
			Pemerataan Kesempatan dan daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,8-5,27	5,27-4,55
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	63,94	67,92
		Terwujudnya Perlindungan Sosial yang menyeluruh	Akselerasi pemenuhan Perlindungan Sosial	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	34	36
	2. Akselerasi ekonomi	Terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat	Peningkatan Sektor Unggulan Daerah yang berdaya saing	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	35,55	36,66
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	4,21	4,79
				Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	75	100
			Pemerataan Pembangunan ekonomi masyarakat	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	20,77-20,97	21,75
			Peningkatan iklim investasi dan produktivitas ekonomi daerah	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,97	4,14
				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	6,22	7,13
				Return on Aset (ROA) BUMD	%	2,69	3,6
				Disparitas Harga	%	±10	±10
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	27,08	28,25
	3. Pembangunan Wilayah yang adil, merata, berkualitas, dan ramah lingkungan	Terwujudnya pemerataan kualitas pelayanan infrastruktur	Pemerataan akses dan infrastruktur perekonomian	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	83	86
				Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	22,45	25,45
				Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Angka	57,5	59

Visi Batang	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	SATUAN	*Baseline 2025*	Target 2025-2029
1	2	3	4	5	6		7
				Kewenangan Kabupaten/Kota			
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	60	70
			Pemenuhan perumahan yang layak, aman, dan terjangkau	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	7,84	10,34
				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	54,9	58,5
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	32,48	41,3
	4. Pemerintahan yang dinamis	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, tanggap dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat *(agile governance*)	Pelayanan Publik yang berkualitas dan berintegritas	Indeks Integritas Nasional	Angka	82,51	83
				Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,15	4,37
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,53	3,7
		Terwujudnya pemerintahan desa yang Berdaya saing	Pembangunan dari Desa	Persentase Desa Mandiri	%	3,97	31
	5. Stabilitas dan Kondusivitas Wilayah	Terciptanya lingkungan yang stabil, aman dan kondusif	Stabilitas ekonomi daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,73	0,74-0,75
				Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kab/Kota per PDRB	%	0,93	1,1
				Total Kredit pada Bank Milik Kab/Kota per PDRB	%	0,6	0,64
			Penguatan keamanan, ketertiban, dan demokrasi	Jumlah Kejadian Konflik SARA	kali	n/a	0
				Indeks Reformasi Hukum	Angka	58,7	71,2
	6. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Terciptanya masyarakat yang berkarakter dan berbudaya	Peningkatan wawasan dan karakakter budaya masyarakat	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	19,28	23,19
				Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	15034	15395
				Persentase kelompok kesenian yang	%	18,1	26,33

Visi Batang	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	SATUAN	*Baseline 2025*	Target 2025-2029
1	2	3	4	5	6		7
				aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir			
				Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	100	100
			Peningkatan ketahanan keluarga dan kesetaraan gender secara inkusif	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,38 - 0,37	0,38-0,42
				Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	64,16-65,77	69,68
		Terwujudnya pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan	Keutamaan Lingkungan Berkelanjutan dalam Pembangunan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2 eq	1572902,67	707822
				Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	5	20
		Terciptanya kemampuan daerah yang tangguh dalam mitigasi bencana	Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	148,98 - 147,58	145,6-138,9
			Ketahanan dan Kemandirian Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	83,6	84,51
				Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	8,81	6,64

Sumber : RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2025-2045

4.2. Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Batang 2023-2026

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah. Penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada Visi Misi RPJPD Kabupaten Batang tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 tahap ke empat dan isu strategis aktual. Selanjutnya, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2023-2026. Dalam penentuan target indikator kinerja secara umum

dihitung berdasarkan data tren capaian 5 tahun terakhir dengan diasumsikan kondisi perekonomian telah mulai pulih, tidak terjadi gejolak sosial dan politik serta tidak terjadi bencana besar. Tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2023-2026 diuraikan sebegai berikut :

- **Tujuan I** : Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan.

  Melalui tujuan pertama ini, Pemerintah Kabupaten Batang, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup dan kehidupan sekurangnya dari aspek: a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sektor unggulan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran Batang, dan menurunkan kesenjangan antar kelompok pengeluaran. d. Peningkatan harmoni kehidupan, kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan dengan didukung oleh penyediaan dan pemerataan infrastruktur.

  Sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator PDRB per Kapita (ADHK) dan Indeks Daya Saing Daerah, serta dijabarkan dalam sasaran :

  a. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
  b. Menguatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah, dengan indikator sasaran Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengeluaran Perkapita.
  c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan penganggura, dengan indikator sasaran Angka ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia), Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran terbuka.
  d. Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan kawasan ekonomi dan non ekonomi, dengan indikator

sasaran Indeks Infrastruktur.

e. Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan, dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

- **Tujuan II** : Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Tujuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi serta mendorong reformasi birokrasi pada semua level pemerintahan yang semakin berpihak kepada kepentingan publik dan tanggap terhadap permasalahan yang dihadapai masyarakat secara dinamis, serta meningkatnya transparasi dan akuntabilitas.

Sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, dengan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan indikator sasaran Nilai SAKIP, Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui *agile governance,* dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat.

- **Tujuan III** : Meningkatnya ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif.

Tujuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan ketahanan (*resilience*) serta untuk mengurangi kerentanan (vulnerability) dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana, yang dilator belakangi dalam periode 4 (empat) tahun terakhir ini Kabupaten Batang termasuk daerah dengan resiko bencana tinggi. Tujuan ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Batang yang aman dan nyaman, kerukunan antar umat beragama, tanpa ada konflik sosial maupun agama bahkan konflik SARA, serta terciptanya kohesi sosial masyarakat yang baik.

Sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan ini, diukur dengan indikator Indeks Risiko Bencana (IRBI) dan Indeks Rasa Aman, dengan sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana, dengan indikator sasaran Indeks Ketahanan Daerah.

b. Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, dengan indikator sasaran Indeks

Demokrasi.

c. Berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang, dengan indikator sasaran Angka kriminalitas.

Perwujudan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten telah ditentukan target dalam empat tahun kedepan. Sebagai landasan implementasi dalam Perubahan RKPD tahun 2025, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 yang akan diwujudkan tertuang dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4. 3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
1	Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan		PDRB per Kapita (ADHK)	juta Rp	22,9
			Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,5413
		1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	70,75
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	92,25
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	63,96
		2. Menguatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,50-6,10
			Tingkat Pengeluaran Per Kapita	(Rp.000/tahun)	9,896
		3.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Angka ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)	persen	21,7
			Persentase Penduduk Miskin	persen	8,34-8,27
			Tingkat Pengangguran terbuka	persen	5,80-5,27
		4. Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan kawasan ekonomi dan non ekonomi	Indeks Infrastruktur	indeks	200
		5. Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	70,66
2	Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	69,96
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	skor	71,25
			Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	indeks	Level 3
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	indeks	80
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui *agile governance*	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	85,6
3	Meningkatnya ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif		Indeks Risiko Bencana (IRBI)	indeks	150
			Indeks Rasa Aman	indeks	4,4
		Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	indeks	0,83
		Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Indeks Demokrasi	indeks	74
		Berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang	Angka kriminalitas	persen	0,014

Sumber : RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026

4.3. Visi Misi Tujuan dan Sasaran dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Batang tahun 2025–2029 atau RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan perwujudan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Batang periode tahun 2025–2030. Dalam upaya mewujudkan arah pembangunan jangka menengah yang adaptif dan berkelanjutan, Kabupaten Batang mengusung *tagline* ***"Clean Industrial City"*** sebagai identitas sekaligus kompas pembangunan wilayah yang dimaknai sebagai berikut:

Clean Industrial City yang bermakna keseimbangan antara tiga dimensi utama pembangunan: kemajuan industri, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial-ekonomi komunitas lokal. Filosofi ini merespon tantangan pesatnya pertumbuhan kawasan industri yang tidak hanya membawa potensi ekonomi, tetapi juga risiko sosial dan ekologis. Dengan pendekatan yang transformatif dan kolaboratif, konsep ini menekankan bahwa industri bukan hanya pelaku pertumbuhan, melainkan mitra dalam menciptakan kota yang bersih, sehat, dan membahagiakan.

Secara umum ***"Clean Industrial City"*** diharapkan mampu menjembatani berbagai pendekatan: ***Green City*** yang menekankan aspek ekologis yang berfokus pada lingkungan hijau, ***Smart City*** yang berfokus pada digitalisasi dan teknologi cerdas, serta ***Sustainable City*** yang menyatukan ketiganya secara makro yang lebih afirmatif terhadap sektor industri, melalui pilar-pilar pembangunan yang mengedepankan pengelolaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, inklusi UMKM, transformasi digital, tata ruang berkelanjutan, investasi hijau, dan tata kelola kolaboratif.

Tagline ***"Clean Industrial City"*** menjadi filosofi pembangunan dalam perwujudan semangat kepemimpinan daerah yang mengakar pada potensi lokal namun berpandangan global. Ini adalah komitmen untuk menjadikan Batang bukan hanya sebagai kawasan industri, tetapi juga sebagai ekosistem kehidupan yang bersih, cerdas, manusiawi, dan berdaya saing. Dari filosofi diatas, ditetapkan visi pembangunan daerah Kabupaten Batang tahun 2025–2029 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BATANG YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU INDONESIA EMAS 2045”

Visi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Batang dalam membangun daerah yang **MANDIRI** dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan pembangunan, serta **BERDAYA SAING** di tingkat regional maupun

nasional dengan mengoptimalkan potensi daerah. Seluruh upaya pembangunan ini diarahkan untuk berkontribusi dalam mewujudkan **INDONESIA EMAS 2045**.

Makna dari Visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

MANDIRI. Kemandirian daerah merujuk pada kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi secara optimal, mengurangi ketergantungan pada pihak luar, termasuk pemerintah pusat. Sebagai bagian dari otonomi dan desentralisasi, Kabupaten Batang harus mengembangkan kemandirian, khususnya mencakup pada pengelolaan ekonomi, penguatan sektor lokal, penyediaan layanan dasar, dan tata kelola pemerintahan yang efisien. Cerminan daerah yang mandiri mampu menciptakan lapangan kerja, menjaga ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Indikator Keberhasilan dari frasa "Mandiri" yaitu dan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah dan PDRB Perkapita.

DAYA SAING DAERAH. Daya saing daerah merujuk pada kemampuan suatu daerah atau wilayah untuk bersaing dengan daerah lain dalam hal peningkatan ekonomi, pembangunan, serta kualitas hidup masyarakat. Daya saing ini melibatkan berbagai faktor, seperti kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, kebijakan pemerintah, potensi alam, inovasi, dan sektor-sektor unggulan yang ada di daerah tersebut. Daya saing daerah sangat penting dalam menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, daya saing daerah juga berperan dalam pembangunan suatu daerah, karena daerah yang memiliki daya saing tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Indikator Keberhasilan dari frasa "Daya Saing Daerah" yaitu Indeks Daya Saing Daerah.

INDONESIA EMAS 2045. Kalimat "*menuju Indonesia Emas 2045*" pada visi Kabupaten Batang selaras dengan cita – cita Indonesia untuk menjadi negara maju dan berdaulat pada tahun 2045. Kabupaten Batang harus berkontribusi secara signifikan pada cita – cita nasional tersebut, salah satunya yakni mewujudkan Indonesia Emas melalui pemanfaatan bonus demografi dengan penguatan sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas pembangunan. Perbaikan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan menjadi faktor kunci untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat dalam jangka panjang. Indikator Keberhasilan dari

frasa “Indonesia Emas 2045” yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tindkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Reformasi Birokrasi.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kepala Daerah, dirumuskan delapan misi yang akan menjadi pedoman bersama antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Batang. Delapan misi tersebut adalah sebagai berikut:

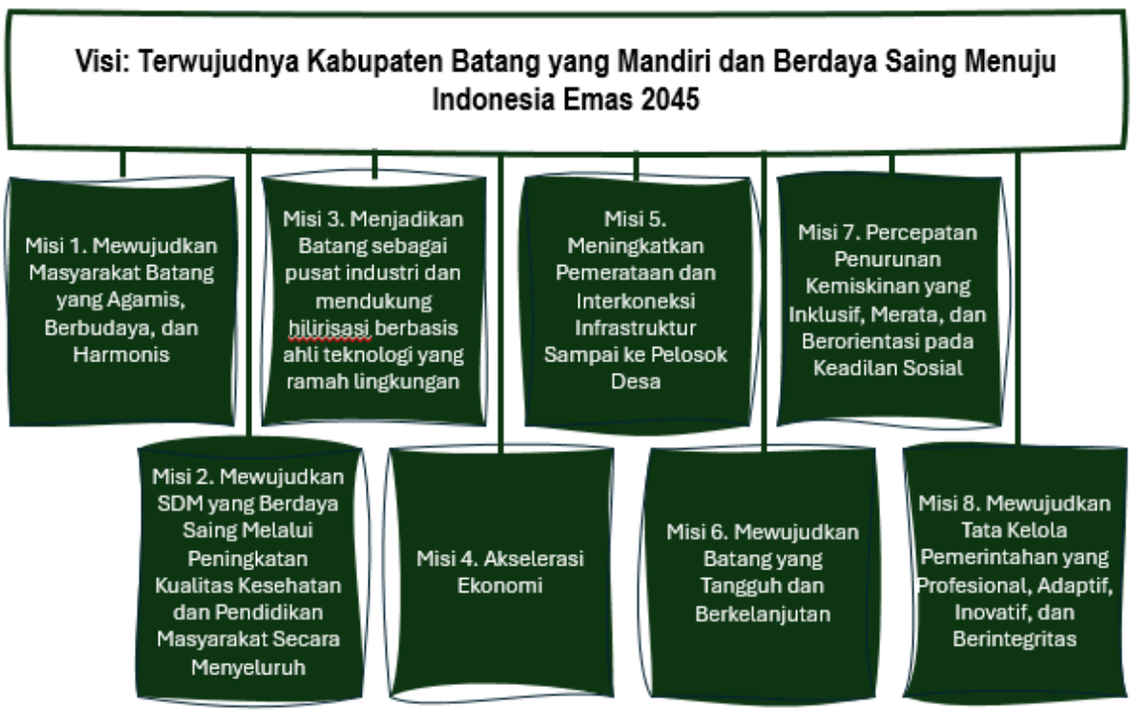

Gambar 4. 2 Visi dan Misi Kabupaten Batang Tahun 2025 – 2029
Sumber : RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Berdasarkan penjabaran visi dan misi pembangunan yang telag ditetapkan, selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai penjabaran operasional dari visi yang selaras dengan misi pembangunan Kabupaten Batang tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah kemudian dirumuskan lebih rinci dalam bentuk strategi dan arah kebijakan hingga program prioritas yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Kabupaten Batang dalam periode 2025-2029 kedepan, Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

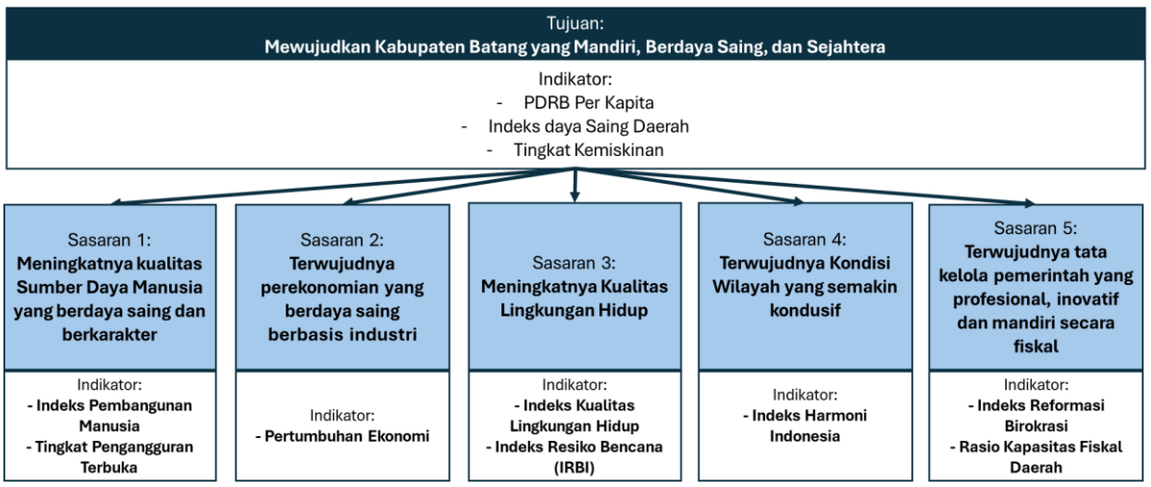

Gambar 4. 3 Cascading Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

Sumber : RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

Tujuan Pembangunan Kabupaten Batang dalam lima tahun kedepan adalah **Kabupaten Batang yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera.** Kabupaten Batang yang **"Mandiri"** merujuk pada kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi secara optimal, mengurangi ketergantungan pada pihak luar selain itu diarahkan pada peningkatan kemandirian daerah secara fiskal.

Kabupaten Batang yang "**Berdaya Saing**" merujuk pada kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam hal peningkatan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai faktor kunci dalam pembangunan. Daya saing daerah sendiri diharapkan dapat menjadi magnet pembangunan yang mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Kabupaten Batang ýang "**Sejahtera**" merujuk pada kondisi ideal yang diharapkan dalam pembangunan dimana masyarakat Kabupaten Batang mengalami peningkatan kualitas hidup baik secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan pembangunan yang merata, pemerintahan yang baik, dan masyarakat yang mandiri serta berdaya saing.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan tujuan pembangunan Kabupaten Batang yang ditetapkan untuk lima tahun kedepan digunakan 3 indikator kinerja yaitu PDRB Perkapita, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), dan Tingkat Kemiskinan. Sementara itu guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan lima Sasaran pembangunan Daerah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter

Dalam mewujudkan tujuan daerah, sasaran pertama yang ingin diwujudkan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter. Pembangunan manusia menjadi pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Oleh karena itu, peningkatan kualitas **Sumber Daya Manusia (SDM)** diarahkan tidak hanya pada penguasaan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter yang kuat, cerdas, sehat, dan produktif.

Peningkatan kualitas **Sumber Daya Manusia (SDM)** harus didorong melalui berbagai aspek secara inklusif. Berbagai upaya peningkatan kualitas SDM antara lain melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas, kesehatan untuk semua, penyediaan perlindungan sosial yang adaptif, mendorong kesetaraan gender pada berbagai sektor pembangunan, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi, serta penguatan ketahanan keluarga sebagai pondasi pembentukan karakter yang berakhlak dan berdaya saing. Selain itu, pembangunan dan pembentukan karakter Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan dengan memperkuat ketahanan budaya yang tak terbatas pada seni dan warisan budaya saja namun juga mendorong penguatan budaya hidup sehat jasmani serta budaya literasi masyarakat pada berbagai aspek.

Pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini diukur melalui indikator kinerja **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** dan **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).**

Sasaran 2 : Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing berbasis industri

Dalam upaya mendorong kemajuan perekonomian Kabupaten Batang, ditetapkan sasaran pembangunan Perekonomian yang berdaya saing. Hal ini menjadi pijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor- sektor unggulan ekonomi serta peningkatan produktivitas yang dikolaborasikan dengan pengembangan inovasi dan teknologi.

Perekonomian yang berdaya saing difokuskan pada optimalisasi potensi sumber daya alam, peningkatan kualitas produk unggulan daerah, pengembangan sektor industri secara berkelanjutan menuju *Clean Industrial City*, serta pengembangan industri/ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, pembangunan dan peningkatan kualitas

infrastruktur yang memadai menjadi salah satu faktor utama dalam peningkatan daya saing yang mampu menarik investasi baru di Kabupaten Batang, memperkuat keberlangsungan pembangunan perekonomian daerah serta menciptakan kemudahan akses pasar secara luas.

Kawasan Industri yang berkembang pesat di Kabupaten Batang tidak hanya menjadi pusat kegiatan produksi, tetapi juga menjadi magnet bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja melalui kehadiran industri baru yang mendorong tumbuhnya sektor pendukung pembangunan daerah seperti sektor jasa, perdagangan, transportasi, dan penyediaan bahan baku yang secara simultan meningkatkan aktivitas ekonomi daerah.

Pembangunan ekonomi secara inklusif dan pengembangan kawasan industri secara tidak langsung dapat memberikan *Multiplier effect* yang signifikan terhadap perekonomian daerah yang melibatkan semua lapisan masyarakat dalam proses pembangunannya sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata, mengurangi ketimpangan sosial ekonomi masyarakat, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini diukur melalui indikator kinerja **Pertumbuhan Ekonomi (PE).**

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pencapaian sasaran pembangunan peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan terhadap risiko bencana. Sasaran ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan sampah yang terpadu dan ramah lingkungan, serta perlindungan terhadap sumber daya alam dan ekosistem. Langkah ini terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana. Selain itu, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan, konservasi air, dan penghijauan menjadi bagian penting dalam pencapaian sasaran ini.

Kabupaten Batang yang memiliki karakteristik geografis, menjadikannya rentan terhadap berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan abrasi pantai. Oleh karena itu, pembangunan diarahkan untuk tidak

hanya memperbaiki kualitas lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana, kesiapsiagaan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Pembangunan yang berpihak pada kelestarian lingkungan juga didukung oleh penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon dan penguatan tata kelola lingkungan. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Batang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengutamakan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan.

Sinergi antara pembangunan lingkungan dan kebencanaan diwujudkan melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan lingkungan dengan dokumen kebijakan penanggulangan bencana, serta penerapan teknologi ramah lingkungan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Melalui berbagai kebijakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas air, udara, dan tanah sehingga risiko bencana lingkungan dapat ditekan dan mewujudkan masyarakat yang tangguh, aman, dan berkelanjutan.

Pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini diukur melalui indikator kinerja **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** dan **Indeks Resiko Bencana (IRBI).**

Sasaran 4 : Terwujudnya Kondisi Wilayah yang semakin kondusif

Pencapaian sasaran terwujudnya kondisi wilayah yang semakin kondusif difokuskan pada penguatan ketahanan sosial dan menjaga stabilitas daerah dari potensi konflik sosial, kriminalitas, serta ancaman yang dapat menghambat investasi dan kegiatan ekonomi. Selain itu, iklim wilayah yang kondusif juga ditopang oleh peningkatan kualitas pelayanan publik serta penegakan hukum yang adil. Pemerintah Kabupaten Batang terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan, memperluas akses informasi, serta membangun budaya toleransi dan gotong royong ditengah masyarakat.

Kondisi wilayah yang kondusif menjadi pondasi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Lingkungan yang aman, tertib, dan stabil menjadi syarat mutlak bagi terjadinya pembangunan yang berkelanjutan. Kondisi wilayah yang kondusif mencakup aspek keamanan dan ketertiban masyarakat, harmonisasi kehidupan sosial, kepastian hukum, serta sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat.

Pencapaian sasaran ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan produktif bagi masyarakat, investor, dan pelaku usaha, sehingga mendukung terwujudnya daerah yang maju, harmonis, dan berdaya saing tinggi.

Pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini diukur melalui indikator kinerja **Indeks Harmoni Indonesia (IHaI).**

Sasaran 5 : Terwujudnya tata kelola pemerintah yang profesional, inovatif dan mandiri secara fiskal

Sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, dan mandiri secara fiskal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang responsif, akuntabel, serta mampu mendorong percepatan pembangunan melalui pelayanan publik yang berkualitas dan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan.

Pemerintahan yang profesional ditandai dengan aparatur yang kompeten, berintegritas, serta mampu menjalankan tugas secara efektif dan efisien sesuai prinsip *good governance*. Untuk mendukung hal tersebut, penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur terus dilakukan melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian.

Di sisi lain, tata kelola yang inovatif menekankan pentingnya pembaruan dan kreativitas dalam pelayanan publik serta dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Penggunaan teknologi digital serta transformasi layanan berbasis data menjadi prioritas guna menciptakan pelayanan yang cepat, transparan, dan adaptif terhadap perubahan.

Kemandirian fiskal juga menjadi bagian penting dari sasaran ini. Dengan memperkuat potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi belanja, Kabupaten Batang diarahkan untuk tidak terlalu bergantung pada transfer pusat, melainkan mampu membiayai pembangunan secara berkelanjutan dari sumber daya lokal. Strategi ini ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, digitalisasi pajak dan retribusi, serta pengelolaan aset daerah yang produktif.

Dengan terwujudnya tata kelola yang profesional, inovatif, dan mandiri secara fiskal, Kabupaten Batang akan memiliki pondasi pemerintahan yang kuat dan *modern* dalam mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini diukur melalui indikator kinerja **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)** dan **Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (Rasio KFD).**

Tabel 4. 4 Target Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN 2025
Terwujudnya Kabupaten Batang yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Indonesia Emas 2045	Mewujudkan Kabupaten Batang yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera		PDRB Perkapita	36,26	41,67
			Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,32	3,74
			Tingkat Kemiskinan	8,73	8,34-8,27
		Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,73	70,75
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,67	5,65 - 5,27
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Batang yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis					
Misi 2 : Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat Secara Menyeluruh					
Misi 7 : Percepatan Penurunan Kemiskinan yang Inklusif, Merata dan Berorientasi pada Keadilan Sosial					
		Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing berbasis industri	Pertumbuhan Ekonomi	6,03	5,5 - 6,1
Misi 3 : Menjadikan Batang sebagai pusat industri dan mendukung hilirisasi berbasis alih teknologi yang ramah lingkungan					
Misi 4: Akselerasi Ekonomi					
Misi 5 : Meningkatkan Pemerataan dan Interkoneksi Infrastruktur sampai ke Pelosok Desa.					
Misi 7 : Percepatan Penurunan Kemiskinan yang Inklusif, Merata dan Berorientasi pada Keadilan Sosial					
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,47	70,66
			Indeks Resiko Bencana (IRBI)	128,7	125,04
Misi 3 : Menjadikan Batang sebagai pusat industri dan mendukung hilirisasi berbasis alih teknologi yang ramah lingkungan					
Misi 6 : Mewujudkan Batang yang Tangguh dan Berkelanjutan					
		Terwujudnya tata kelola pemerintah yang profesional, inovatif dan mandiri secara fiskal	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	81,71	81,5
			Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	0,962	0,992
Misi 7 : Percepatan Penurunan Kemiskinan yang Inklusif, Merata dan **Berorientasi pada Keadilan Sosial**					
Misi 8 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Adaptif, Inovatif, dan Berintegritas					
		Terwujudnya Kondisi Wilayah yang semakin kondusif	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	NA	6,64
Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Batang yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis					

Sumber : RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

Program Kepala Daerah Terpilih Tahun 2025-2029

Program prioritas dirumuskan dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Program Prioritas Kepala Daerah untuk periode RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 sebnayak 8 program yang terdiri dari :

1. Menyiapkan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045

Berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan dan pelatihan, serta penyediaan layanan kesehatan yang memadai. Program ini diarahkan untuk mencetak generasi yang cerdas, sehat, berdaya saing tinggi, dan siap menghadapi tantangan global di masa mendatang.

2. Menurunkan Pengangguran Melalui Pelatihan Berbasis Industri

Dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran, pelatihan kerja akan difokuskan pada pendekatan berbasis kebutuhan industri. Kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan dunia industri akan terus diperkuat untuk menciptakan ekosistem pelatihan yang adaptif dan relevan dengan perkembangan teknologi serta dinamika pasar kerja. Program yang mendukung pencapaian Program Prioritas Kepala Daerah ini dilaksanakan melalui **DAPAT KERJA (DAKER)** yang melibatkan seluruh *stakeholder*s dan masyarakat termasuk Pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya.

3. Afirmasi Kepada UMKM

Dengan memberikan perhatian khusus terhadap penguatan UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat. Afirmasi dilakukan melalui pemberian akses permodalan, pelatihan manajerial dan digitalisasi, serta fasilitasi pemasaran produk. Diharapkan UMKM dapat tumbuh berkelanjutan, naik kelas, dan mampu bersaing di pasar lokal maupun global.

4. Pembangunan Infrastruktur Dasar untuk Meningkatkan Aksesibilitas dan Efisiensi yang Menunjang Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan air bersih menjadi prioritas utama guna membuka keterisolasian wilayah serta mendorong efisiensi distribusi barang dan jasa, selain itu juga dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Infrastruktur yang handal akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Program/aktivitas yang mendukung pencapaian Program Prioritas Kepala

Daerah ini dilaksanakan melalui **Batang Terang dan Saber Lubang,** Program ini bertujuan dalam peningkatan kualitas pencahayaan (LPJU) dan sapu bersih jalan berlubang.

5. Kelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah yang Menyeluruh

Program ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem melalui pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sampah secara holistik. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan regulasi, serta penerapan teknologi ramah lingkungan akan terus diupayakan agar pembangunan dapat berjalan selaras dengan keberlanjutan lingkungan. Program/aktivitas yang mendukung pencapaian Program Prioritas Kepala Daerah ini dilaksanakan melalui **Batang Hijau,** Program ini bertujuan dalam peningkatan kualitas udara dan alam Batang.

6. Perlindungan Sosial untuk Mengurangi Angka Kemiskinan dan Ketimpangan

Pemerintah daerah berkomitmen melaksanakan program perlindungan sosial secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat miskin akan dilakukan dengan pendekatan holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat rentan serta menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial secara signifikan. Beberapa aktivitas dalam mendukung pencapaian Program Prioritas Kepala Daerah ini dilaksanakan melalui Santunan Kematian, Peningkatan Program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) serta kesehatan untuk semua.

7. Penciptaan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, program ini menitikberatkan pada penguatan integritas aparatur, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme menjadi prinsip utama dalam mewujudkan birokrasi yang responsif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

8. Pembinaan dan Pengembangan Pengamalan Agama dan Kelestarian Budaya

Untuk menjaga harmonisasi sosial dan memperkuat jati diri daerah, pemerintah daerah akan terus membina kehidupan beragama yang moderat serta melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Kegiatan keagamaan dan kebudayaan akan difasilitasi secara inklusif sebagai bagian dari upaya

memperkuat identitas daerah dan memperkokoh persatuan dalam keberagaman.

Program Strategik dalam RPJMD Kabupaten Batang 2025–2030

1. Pengembangan Infrastruktur Transportasi – Transjateng

Program ini berfokus pada penguatan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Batang melalui kehadiran layanan Transjateng. Pengoperasian transportasi publik ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang efisien, aman, dan terjangkau, serta menunjang akses ke pusat-pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Dengan memanfaatkan jaringan Transjateng, mobilitas masyarakat dari wilayah pinggiran ke pusat kota atau kawasan industri akan semakin lancar. Program ini merupakan Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu, pengembangan feeder angkutan pengumpan yang terintegrasi dengan Trans Jateng juga merupakan langkah strategis untuk mewujudkan konektivitas kawasan industri dan wisata di Kabupaten Batang. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, operator transportasi, dan masyarakat, diharapkan sistem ini dapat menjadi tulang punggung mobilitas dan akselerasi pertumbuhan ekonomi Batang menuju masa depan yang lebih maju dan berdaya saing tinggi.

2. Peningkatan Infrastruktur Pengairan

Infrastruktur pengairan yang memadai menjadi kebutuhan utama dalam mendukung produktivitas pertanian. Program ini meliputi rehabilitasi dan peningkatan sistem irigasi yang ada di Kabupaten Batang. Dengan memperkuat jaringan irigasi, lahan pertanian akan memiliki pasokan air yang stabil, sehingga mampu meningkatkan hasil panen dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Program ini mendukung petani lokal sekaligus menekan dampak kekeringan akibat perubahan iklim.

3. Penerangan Jalan Umum (PJU)

Program ini diarahkan pada penguatan penerangan jalan di seluruh wilayah Kabupaten Batang melalui Penerangan Jalan Umum Kabupaten Batang berdasarkan hasil dokumen *baseline* PJU. Penambahan titik lampu di ruas-ruas strategis akan menciptakan lingkungan yang lebih aman, memperlancar arus kendaraan di malam hari, dan mendukung aktivitas ekonomi malam. Program ini juga mendukung kenyamanan serta menurunkan potensi kriminalitas di ruang publik. Pada proyek ini terdapat

alternatif pembiayaan menggunakan skema Kerjasama antara Pemerintah daerah dengan Badan Usaha atau KPBU dalam pemenuhan infrastruktur ini. PJU yang digunakan juga merupakan alat yang hemat energi sehingga termasuk dalam infrastruktur konservasi energi.

4. Infrastruktur Sekolah dan Bantuan Pendidikan

Program ini terdiri dari beberapa inisiatif penting:

a) Rehabilitasi sekolah, terutama bangunan yang sudah tidak layak.
b) Beasiswa bimbingan belajar bagi siswa berprestasi untuk masuk perguruan tinggi negeri.
c) Bantuan seragam sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
d) Dukungan terhadap Program Sekolah bagi masyarakat yang kurang mampu, sebagai bentuk inklusi pendidikan.

Kombinasi program ini bertujuan meningkatkan akses, kualitas, dan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga Batang, khususnya kelompok rentan.

5. Penataan Ruang dan Kawasan Strategis

Pemerintah akan melakukan penataan kawasan strategis meliputi:

a) Ruang Terbuka Hijau
b) Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten
c) Fasilitas Umum dan Olahraga
d) Mendukung Pengembangan Stasiun Batang
e) Mendukung Pengembangan Pelabuhan Batang

6. Taman dan Videotron di tiap Kecamatan

Setiap kecamatan akan dilengkapi ruang terbuka hijau sebagai tempat masyarakat berkumpul, beraktivitas, dan berinteraksi sosial. Selain itu, akan dibangun videotron sebagai media promosi, destinasi wisata, serta sarana sosialisasi program pemerintah. Program ini menggabungkan aspek estetika, komunikasi publik, dan pemberdayaan ekonomi dalam satu sistem tata ruang yang terpadu.

7. Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Beberapa inisiatif penting dalam program ini:

a) Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sentul dan Peningkatan TPA Randukuning menjadi TPST Randukuning
b) Penertiban TPS ilegal
c) Mendorong tiap desa memiliki TPS dan sistem pengelolaan mandiri
d) Sosialisasi dan edukasi gerakan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)

e) Implementasi sistem pengelolaan sampah mandiri di setiap pelaku usaha untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan

Program ini menekankan prinsip partisipatif dan berkelanjutan dalam menjaga kebersihan lingkungan Batang.

8. Pengembangan Pariwisata Daerah

Pengembangan difokuskan pada kawasan wisata alam dan buatan. Setiap destinasi akan dikembangkan secara tematik dengan memperlihatkan aktivitas khas, pemandangan alam, serta pemanfaatan media sosial dan kolaborasi dengan *travel vlogger*. Selain konten, penguatan infrastruktur dan sistem transportasi akan menjadi penunjang utama dalam mendongkrak sektor pariwisata.

9. Ketenagakerjaan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Program ini mencakup:

f) Perancangan Perda tentang serapan tenaga kerja lokal dengan mencantumkan persentase minimum.

g) Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi di balai pelatihan kerja.

h) Pengembangan platform Aplikasi Ketenagakerjaan, yang memungkinkan warga lokal mendapat prioritas melalui sistem layering berdasarkan jarak tempat tinggal, serta integrasi sistem informasi melalui media sosial untuk mempercepat informasi lowongan kerja.

10. *Government Integrated Management System* (GIMS)

Pemerintah Kabupaten Batang akan mengembangkan sistem manajemen terintegrasi berbasis data center yang digunakan untuk memonitor *Key Performance Indicator* (KPI) setiap perangkat daerah. Sistem ini akan memperkuat analisis pengambilan keputusan berbasis data objektif.

4.4. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. "**Akselerasi Pertumbuhan**

Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Sebagaimana Target dan sasaran pembangunan Tahun 2025 tersaji pada grambar berikut ini :

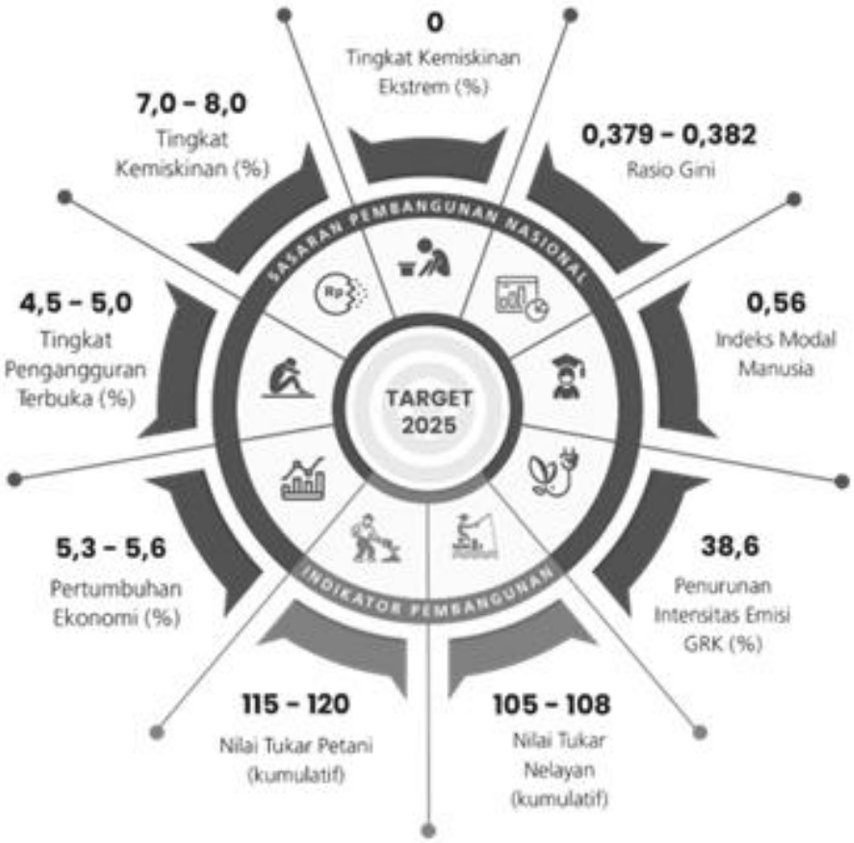

Gambar 4. 4 Target dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025
Sumber : RKP 2025



Gambar 4. 5 Prioritas Nasional Tahun 2025
Sumber : RKP 2025

Transisi estafet pembangunan perlu dilakukan secara akseleratif untuk menjaga kesinambungan kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada

RKP Tahun 2025 disusun 18 program yang menjadi penekanan, termasuk di dalamnya delapan Program Hasil Terbaik Cepat, yang memuat inisiatif untuk menghasilkan output signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. Berikut 8 program hasil terbaik cepat dalam RKP Tahun 2025 :

1. Memberikan makan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di Kabupaten
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen.

4.5. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada tema pembangunan daerah yaitu **Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter**. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah (PD) dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merat;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.



Gambar 4. 6 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Sumber : Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

4.6. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025

Dengan menyongsong tema pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2025 diarahkan pada **"Pemantapan Kondisi Sosial Ekonomi melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Optimalisasi Sektor Pariwisata, dan Infrastruktur Dasar"** dengan fokus sebagai berikut :

a. Membangun kolaborasi multipihak dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, melalui :
   - Kolaborasi antara pihak pemerintah dan dunia usaha dalam pemenuhan pelayanan dasar;
   - Membangun kolaborasi dalam peningkatan budaya literasi di masyarakat;
   - Penguatan kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dalam gerakan kembali ke sekolah.

b. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan :

- Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar kesehatan, menurunkan kasus stunting serta penuntasan ODF;
- Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik;
- Peningkatan upaya pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana.

c. Meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, kolaborasi dengan dunia usaha serta optimalisasi teknologi informasi untuk :
   - Pelatihan berkelanjutan untuk pekerja berketerampilan rendah;
   - Pemanfaatan potensi pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran pokdarwis;
   - Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan;
   - Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam olahraga;
   - Pengembangan yang fokus pada sinergitas dan kolaborasi antar lembaga (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) dalam penanggulangan kemiskinan.

d. Perwujudan Kabupaten yang ramah perempuan dan layak anak, melalui:
   - Meningkatkan pembangunan perempuan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
   - Penguatan peran serta lembaga dan masyarakat terkait upaya perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak korban Kekerasan Seksual, TPPO, dan Penelataran Anak;
   - Perwujudan Kabupaten Layak Anak.

e. Penguatan Sistem Kesehatan Integratif dan Holistik, melalui;
   - Deteksi dini melalui perluasan case detection, skrining awal, surveilans penyakit menular dan tidak menular, rapid test dan PCR;
   - Penanganan dan pengobatan penyakit melalui karantina kesehatan, pemenuhan farmasi dan alkes;
   - Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Promkes, germas dan PHBS.

f. Menciptakan nilai tambah sektor unggulan serta diversifikasi ekonomi , melalui :

- Mendorong iklim investasi melalui peningkatan pelayanan perijinan terpadu satu pintu, promosi investasi, pengurangan / penundaaan pembayaran pajak serta penciptaan lingkungan yang kondusif;
- Meningkatkan pariwisata daerah melalui promosi wisata, fasilitasi pengembangan atraksi dan amenitas wisata;
- Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian antara lain melalui bantuan alat, pemberian bantuan benih/bibit/ternak/pakan ternak, fasilitasi dan bantuan pemasaran produk, pemanfaatan pekarangan, serta intensifikasi pertanian;
- Menjaga stabilitasasi harga barang kebutuhan masyarakat;
- Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi & produktivitas pertanian, perkebunan, peningkatan produksi hasil peternakan & perikanan serta penyediaan cadangan pangan daerah;
- Peningkatan dan pengembangan media promosi dan informasi pariwisata “on hand” dengan mengoptimalkan teknologi informasi;
- Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
- Pengembangan fasilitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan fasilitas pengolahan hasil perikanan; pengembangan kawasan minapolitan; dan pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya.

g. Akselerasi pemulihan dan penguatan UMKM, melalui :
   - Meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses permodalan bagi Wirausaha dan UMKM, fasilitasi bantuan pemasaran produk UKM, dukungan sarana & asarana UMKM serta pendampingan dan pelatihan usaha/manajemen UKM;
   - Peningkatan penciptaan peluang usaha melalui fasilitasi wirausaha melalui pendampingan, penyiapan SDM, fasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk UMKM, kemudahan perijinan usaha serta peningkatan promosi dan pemasaran produk.

h. Mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi melalui :
   - Pengembangan daya saing dan kemandirian desa, dan pemerataan pendapatan;

- Penciptaan dan perluasan lapangan kerja dengan padat karya disektor infrastruktur, pelatihan kerja dan bantuan alat, job market serta fasilitasi penyelesaian kasus sengketa;
- Mengembangkan kesempatan kerja terkait dengan pembangunan Kawasan Industri Terpadu.

i. Meningkatkan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin, melalui:
   - Peningkatan jangkauan pendidikan melalui beasiswa untuk siswa miskin dan optimalisasi pendidikan non formal;
   - Penyediaan Rumah Tidak Layak Huni pada masyarakat berpenghasilan rendah/miskin dan bagi korban bencana daerah;
   - Peningkatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti serta pemberian jaminan dan perlindungan social;
   - Penguatan dan peningkatan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat utamanya bagi masyarakat rentan;
   - Sinergitas dan kerjasama lintas sektor dan tingkat pemerintahan terkait dalam penanggulangan kemiskinan.

j. Pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan strategis serta pro lingkungan berkelanjutan, melalui :
   - Pembangunan infrastruktur untuk mendukung wilayah strategis dan konektifitas antar wilayah;
   - Penataan sistem transportasi, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu;
   - Peningkatan ketersediaan dan cadangan sumber daya air;
   - Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan akses aman air minum dan sanitasi;
   - Peningkatan dan pengembangan infrastruktur air limbah;
   - Meningkatkan kualitas permukiman perkotaan padat dan/atau permukiman kumuh serta menyediakan sarana dan prasarana permukiman.

k. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, melalui:
   - Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan;
   - Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta pengolahan limbah rumah tangga dan limbah industri.

l. Reformasi Birokrasi di semua level pemerintahan :

- Pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat melalui pemanfaatan sistem informasi terintegrasi;
- Peningkatan peran penelitian dan pengembangan (Litbang) sebagai *Research Based Policy*;
- Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen risiko.

m. Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber pendanaan pembangunan:
- Peningkatan upaya dukungan pendanaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*), BUMN serta *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

n. Pengembangan inovasi pelayanan publik yang inklusif serta gesit, responsif, inovatif, melalui :
- Pengembangan dan peningkatan budaya inovasi bagi perangkat daerah melalui Perangkat Daerah Inovatif maupun masyarakat melaluai Krenova;
- Peningkatan keterbukaan akses publik terhadap informasi;
- Peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi yang valid dan *up to date* serta keterbukaan informasi dan satu data sebagai langkah berbenah dalam penyediaan data;
- Meningkatkan kualitas layanan publik melalui optimalisasi Teknologi Informasi;
- Meningkatkan kualitas sumber daya ASN melalui peningkatan kapasitas dan peningkatan pengelolaan manajemen ASN;
- Optimalisasi pelaksanaan SKM sebagai dasar perbaikan pelayanan, utamanya pada perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik.

o. Penyiapan dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, fokus pada penyediaan informasi rawan bencana, Konservasi dan rehabilitasi lahan serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

p. Penguatan modal sosial untuk peningkatan kondusivitas wilayah, melalui:
- Peningkatan pendidikan karakter dan budaya sejak dini serta Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya;
- Penguatan kapasitas kelompok masyarakat, komunitas dan tokoh2 agama tentang wawasan kebangsaan serta parpol dalam pengembangan etika budaya politik;

- Peningkatan ketertiban dan keamanan kenyamanan lingkungan dengan fokus pada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat/ lembaga kemasyarakatan mulai dari tingkat dukuh, desa, RT/RW hingga Kel/Kec.

Prioritas Pembangunan Daerah

Mendasari arah kebijakan 2025 yang telah ditetapkan pada RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 maka dalam mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. **Perwujudan kondusivitas wilayah**

   Kondusivitas wilayah menjadi salah satu prasyarat dalam perwujudan keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyakarat. Penguatan kondusivitas wilayah difokuskan pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, sinergi antar organisasi dalam penguatan kerukunan antar umat beragama, serta pengamanan pada pelaksanaan pilkades

2. **Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing**

   Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pembangunan SDM saat ini difokuskan pada peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing diarahkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Upaya ini diharapkan mampu mendongkrak nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Batang.

3. **Pengembangan ekonomi lokal dan penguatan daya saing industri pariwisata**

   Pengembangan ekonomi lokal sangat diperlukan dalam upaya meningkatan perekonomian di daerah. Langkah ini tak lepas dari peran pemerintah daerah dan juga *stakeholder* yang terkait untuk merangsang aktivitas usaha dalam menciptakan lapangan kerja. Salah satu strategi dalam pengembangan ekonomi lokal yaitu melalui sektor pariwisata. Pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata ini dilakukan sebagai

upaya yang komprehensif guna meningkatkan taraf hidup lebih baik bagi masyarakat dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam keberlangsungannya. Pengembangan ekonomi lokal melalui sektor industri pariwisata ini diharapkan mampu memantik sektor UMKM dan ekonomi kreatif untuk dapat tumbuh melihat adanya potensi alam, dan keunggulan daerah di setiap kawasan pariwisata. Sehingga dengan langkah ini diharapkan juga mampu meningkatkan perekonomian desa dan daerah melalui pengembangan pariwisata.

4. Pemantapan kualitas infrastruktur dasar

Pelayanan infrastruktur yang berkualitas akan memudahkan pergerakan roda ekonomi di suatu daerah. Infrastruktur dasar menjadi langkah utama mendukung pemerataan dan aksesibilitas wilayah. Dari tahun ke tahun, pembangunan infrastruktur dasar difokuskan pada pembangunan infrastruktur di wilayah strategis seperti jalan, jembatan, irigasi, dan bendungan; pengembangan aksesibilitas wilayah; Peningkatan Pengelolaan lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau; Pencegahan dan Peningkatan kualitas lingkungan kumuh; Peningkatan kualitas permukiman padat; serta Pengendalian pencemaran dan penanganan lahan kritis. Namun pada tahun 2025, dalam mendukung tema pembangunan pada sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur diprioritas mendukung kawasan pariwisata. Infrastruktur pada kawasan pariwisata harus diarahkan pada perbaikan jalan, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan, dan sanitasinya.

5. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik akan berdampak positif bagi masyarakat dan pemerintah dan menjadi salah satu agenda utama dilaksanakannya reformasi birokrasi di Indonesia. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat meningkatkan efektivitas dan efiensiensi penyelenggaraan pemerintah yang lebih cepat, tanggap dan responsif dalam mendukung ketercapaian *Agile Governance.* Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik ini diarahkan untuk optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, Pengelolaan manajemen risiko di lingkungan pemerintahan, pengembangan dan peningkatan budaya inovasi di pemerintahan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas sumber daya aparatur, dan peningkatan kualitas data informasi pembangunan.

Tabel 4. 5 Integrasi Prioritas Pembangunan 2025 dalam menyelesaikan Isu Strategis Tahun 2025

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan Tahun 2025
1. Peningkatan daya saing daerah dan pembangunan berkelanjutan 2. Penyiapan Tenaga Kerja Lokal dalam menghadapi KITB 3. Penanggulangan Kemiskinan 4. *Stunting* 5. Pengembangan Sektor Pariwisata Daerah	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Membangun kolaborasi multipihak dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
		Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan
		Meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, kolaborasi dengan dunia usaha serta optimalisasi teknologi informasi
		Perwujudan Kabupaten yang ramah perempuan dan layak anak,
		Penguatan Sistem Kesehatan Integratif dan Holistik
	Pengembangan ekonomi lokal dan penguatan daya saing industri pariwisata	Menciptakan nilai tambah sektor unggulan serta diversifikasi ekonomi
		Akselerasi pemulihan dan penguatan UMKM
		Mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi
	Pemantapan kualitas infrastruktur dasar	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup
		Meningkatkan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin
	Perwujudan kondusivitas wilayah	Penyiapan dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, fokus pada penyediaan informasi rawan bencana, Konservasi dan rehabilitasi lahan serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana
		Penguatan modal sosial untuk peningkatan kondusivitas wilayah
Permasalahan lingkungan dan penanganan kawasan kumuh	Pemantapan kualitas infrastruktur dasar	Pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan strategis serta pro lingkungan berkelanjutan
1. Rendahnya Kemandirian Keuangan 2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi di semua level pemerintahan
		Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber pendanaan pembangunan
		Pengembangan inovasi pelayanan publik yang inklusif serta gesit, responsif, inovatif

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan Tahun 2025
	Pengembangan ekonomi lokal dan penguatan daya saing industri pariwisata	Menciptakan nilai tambah sektor unggulan serta diversifikasi ekonomi

Sumber : Analisa Penyusun, 2024

Tabel 4. 6 persandingan antara PN RPJMN dengan sasaran pembanguann RPD dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan RPD 2023-2026	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Perwujudan kondusivitas wilayah
PN 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Menguatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah	Pengembangan ekonomi lokal dan penguatan daya saing industri pariwisata
PN 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan kawasan ekonomi dan non ekonomi	Pemantapan kualitas infrastruktur dasar
		Pengembangan ekonomi lokal dan penguatan daya saing industri pariwisata
PN 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Menguatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah	Pengembangan ekonomi lokal dan penguatan daya saing industri pariwisata
PN 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Pengembangan ekonomi lokal dan penguatan daya saing industri pariwisata
PN 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Perwujudan kondusivitas wilayah

Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan RPD 2023-2026	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
penyelundupan		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance)	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	
PN 8 : Memperkuat penjelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan	Perwujudan kondusivitas wilayah
	Berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang	
	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	

Sumber : Analisa Penyusun, 2024

Tabel 4. 7
Perbandingan Target Indikator Makro Kab. Batang, Prov. Jateng, dan Nasional Tahun 2025

Kategori	PE (%)	IPM (%)	TPT (%)	Kemiskinan (%)
Kab. Batang	5,50-6,10	70,75	5,80-5,27	8,34-8,27
Provinsi Jawa Tengah	4,90-5,6	73,99	4,81-4,42	9,66-9,0
Nasional untuk Jawa Tengah	4,90-5,6	0,59 (IMM)	4,42-4,81	9,0-9,66
Nasional	5,3-5,6	0,56 (IMM)	4,50-5,00	7,0-8,0

Sumber : RKP, RKPD Prov Jateng 2025

1) Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025

Prioritas pembangunan Kabupaten Batang dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan, serta memperhatikan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 serta Prioritas Nasional tahun 2025 yang tercantum dalam RKP Tahun 2025 sebagaimana Prioritas Nasional Tahun 2025 disajikan dalam gambar berikut :



Gambar 4. 7 Prioritas Nasional Tahun 2025
Sumber : RKP 2025

Dari 8 (delapan) Prioritas Nasional diatas, adapun program daerah yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4. 8 Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Program Daerah Tahun 2025

Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengamalkan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang bagus
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi dan	Skor Pola Pangan Harapan

Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
	Ketahanan Pangan Masyarakat	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rasio Desa mandiri Pangan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun
		Prosentae Capaian Populasi Ternak dan Produksi Hasil Peternakan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian
		Capaian Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian
		Persentase Capaian Jumlah Hewan yang Terobati
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Capaian Produksi Perikanan Tangkap
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Capaian Bina Kelompok Masyarakat Pengawas
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Capaian Tingkat konsumsi makan ikan
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kualitas dan kapasitas SDM Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian
		Persentase validitas data Pertanian
		Persentase kenaikan pelaksanaan Penyelenggaraan Penyuluhan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Capaian Jumlah Hewan yang Terobati
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Peternakan
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan wisatawan
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	persentase peserta pelatihan dengan predikat baik

Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	persentase peserta diklat dengan predikat baik
	Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah UMKM	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru
	Program Pengembangan UMKM	Persentase produk UMKM yang terstandarisasi
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Presentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi aktif
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase jumlah ekonomi kreatif yang memiliki HAKI
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase RLH bagi korban bencana / terdampak program pemerintah
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak
		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase TPA dalam kondisi baik
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik (indikator SPM)
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Pemanfaatan Gedung yang sesuai dengan peruntukan
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat

Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Infrastruktur Lingkungan Perumahan yang layak
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang mengacu RTK
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari pekerja yang mendapat pekerjaan
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio penduduk yang bekerja
	Program Hubungan Industrial	Penurunan Jumlah Perselisihan HI
	Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah UMKM	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru
	Program Pengembangan UMKM	Persentase produk UMKM yang terstandarisasi
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Jumlah Layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase capaian sistem elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang PSDA yang mencapai target
		Persentase indikator program priroitas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target
		Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang IPW yang mencapai target
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permohonan fasilitasi pernyelesaian permasalahan pertanahan yang tertangani
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Bagi Hasil BUMD terhadap APBD (Penyertaan Modal)
		Persentase kebijakan perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti

Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
		Persentase Pelaksanaan APBD pada SKPD yang sesuai target
		Persentase lelang melalui e-procurement
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar /Jumlah gedung, sarana dan prasarana yang diadakan / jumlah gedung yang dibangun
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang berijin
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita
	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (SPM)
		Persentase capaian SPM Pendidikan (SPM)
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru berkualifikasi S1/D4
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	cakupan data pilah gender dan anak
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	cakupan kecamatan layak anak
	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja pelaksanaan program dan kegiatan di APBD
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	capaian medali kejuaraan

Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Penghargaan yang diterima
	Program Pembinaan Perpustakaan	persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan pembangunan ketahanandan kesejahteraan keluarga melalui kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL)
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan
	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten (indikator SPM)
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan
	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan yang valid
	Program Pengendalian Penduduk	Persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial (SPM)
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang difasilitasi
		Presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi
		Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berhasil difasilitasi
		Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target

Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	persentase peningkatan jumlah pelaku IKM
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	persentase peningkatan jumlah perijinan berusaha sektor industri
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	persentase jumlah Industri dalam SIINas
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi di kabupaten Batang
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase ijin yang diterbitkan
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Verifikasi Teknis
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga
	Program Pengembangan Ekspor	nilai ekspor perdagangan
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat2 ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	Persentase Pelaksanaan Pameran dagang dalam negeri di Kabupaten Batang
Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif
	Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	persentase transmigran yang berhasil ditempatkan
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan
	Program Penataan Desa	persentase budaya desa yang dilestarikan
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa

Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Program Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif mendukung Pemerintah
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Peraturan Daerah non APBD yang ditetapkan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral
	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (IKK outcome)
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK outcome)
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu
		Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan
		Persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level SPIP
		Persentase kapabilitas APIP
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian Raperda APBD tepat waktu
		Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban tepat waktu
		Persentase Realisasi serapan belanja terhadap anggaran belanja

Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tersusunnya data aset Pemda menurut lokasi, legalitas kepemilikan, pemnfaatan dan kondisinya
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah Pemeriksaan Yang Dilakukan
Memperkuat penjelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase masyarakat yang paham tentang ketahanan Ekososbud
	Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air
		Indeks Kualitas Udara
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH dalam kondisi baik
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase festival seni yang dilaksanakan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase waktu tanggap "respon time" (indikator SPM)
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Yang ditangani (indikator SPM)
		Persentase Jumlah Desa/Kel yang mendapat Pelayanan Penanggulangan Bencana (Indikator SPM)
	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (SPM)

Sumber : Analisa penyusun, 2025

2) Kebijakan Sektoral Pembangunan Daerah

Adapun berikut Kebijakan Sektoral Kabupaten Batang dalam mendukung ketercapaian tujuan sasaran Kabupaten Batang serta mendukung ketercapaian dari Program asta cita yang menjadi prioritas nasional, antara lain :

a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem;
d. inflasi di daerah;
e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
f. Dukungan swasembada pangan; dan
g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

a) Arah Kebijakan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan SPM. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, sementara urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM meliputi enam bidang yaitu

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Capaian SPM bidang pendidikan terus meningkat dari tahun 2022 sebesar 78,56 persen dengan kategori ”Tuntas Pratama”, naik menjadi sebesar 89,04 persen dengan kategori ”Tuntas Madya” di tahun 2023. Tahun 2024 kembali meningkat menjadi sebesar 96,19 persen dengan kategori ”Tuntas Utama”. Meskipun indeks SPM pendidikan semakin meningkat, namun masih terdapat beberapa indikator SPM yang perlu mendapat perhatian karena capaiannya yang masih rendah yaitu proporsi PTK bersertifikat dan PTK penggerak pada jenjang pendidikan dasar serta kemampuan literasi dan kemampuan numerasi pada jenjang pendidikan kesetaraan. Sedangkan sebagian indikator lainnya meskipun capaiannya tidak terlalu rendah, namun masih belum mencapai angka yang ditargetkan.

Memperhatikan hal tersebut, maka arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan difokuskan pada:

a) Pemenuhan standar pendidikan.
b) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik, dilaksanakan melalui pembentukan komunitas belajar dan memastikan kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, dan guru/pamong belajar/tutor terlibat aktif; kegiatan penguatan kompetensi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, dan guru/pamong belajar/tutor serta **peningkatan profesionalitas** guru/pendidik dan tenaga kependidikan.
c) Pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan satuan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan melalui pendataan

warga masyarakat yang berusia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah dan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Selain itu, pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik juga dilaksanakan melalui: a. pemberian bantuan biaya pendidikan **(beasiswa) bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu**; b. Peningkatan pemenuhan layanan pendidikan jenjang PAUD, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; c. penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung; serta d. penyediaan layanan pendidikan di wilayah kantong kemiskinan.

Pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan satuan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan dengan pelaksanaan pendataan warga masyarakat yang berusia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah, pemberian **biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu**; penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung; dan/atau

d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan melalui: sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi; fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan; pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak; pemeliharaan dan **perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak** sedang dan rusak berat; pemberian **tunjangan kepada guru honorer** jenjang PAUD, SD, SMP dan pendidikan kesetaraan, **serta pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak**.

Bidang urusan Pendidikan, dengan indicator sebagai berikut :

a. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan (APS);
b. Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan (APS);
c. Rata rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen Nasional;
d. Rata-rata kemampuan Numerasi berdasarkan asesmen nasional;
e. Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan assesmen nasional;

f. Rata rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional;
g. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B;
h. Pertumbuhan proporsi guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/DIV;
i. Rasio pengawas dan penilik PAUD.

2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Capaian SPM bidang kesehatan terus meningkat dari tahun 2022 sebesar 88,50 persen dengan kategori ”Tuntas Madya”, meningkat di tahun 2024 menjadi sebesar 99,63 persen dengan kategori ”Tuntas Utama”. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan pemenuhan SPM bidang kesehatan menjadi ”Tuntas Paripurna” maka arah kebijakan yang diambil adalah mengoptimalkan layanan kesehatan pada semua siklus kehidupan dengan difokuskan pada :

a) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di setiap desa serta pelaksanaan ILP di semua desa;
b) **Meningkatkan kualitas layanan RSUD dan puskesmas**, melalui peningkatan dukungan **sarpras** dan **tenaga kesehatan** yang memadai;
c) Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita;
d) Penanganan dan penuntasan TB dan HIV;

Layanan program kesehatan gratis yang berupa **Layanan Gawat Darurat 24 Jam Ambulan Gratis, berobat gratis**, serta **bantuan persalinan dan sunat gratis**, utamanya pada keluarga rentan dan kurang mampu.

Sementara itu sasaran pelayanan sebagai berikut :

a) Pelayanan kesehatan ibu hamil
b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin
c) Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir
d) Pelayanan Kesehatan balita
e) Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar
f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
i) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus.
j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis.

l) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinveksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiancy Virus*).

3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum

Dengan sasaran pelayanan sebagai berikut :

a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari hari;
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic.

4. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

Dengan sasaran pelayanan sebagai berikut :

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari 2 sub urusan, yaitu :

1) Sub Urusan Pemadam Kebakaran
2) Sub Urusan Bencana

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dengan pemberian pelayanan standar minimal bidang trantibumlinmas, meliputi;

a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum kepada masyarakat
b. yang terdampak penegakan hukum atas pelanggaran perda dan perkada berupa pemberian:
c. Ganti rugi materiil bagi warga negara yang terdampak baik kerugian materiil ringan, sedang atau berat akibat penegakan perda dan perkada;
d. Pengobatan bagi warga negara yang terdampak baik cacat ringan, sedang atau berat akibat penegakan perda dan perkada.
e. Pelayanan kebakaran kepada masyarakat yang mengalami kejadian
f. kebakaran berupa pelayanan respon time maksimal 15 menit sejak laporan diterima sampai dengan aparatur pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian.

6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Bidang Urusan Sosial, Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar dengan pemberian pelayanan standar minimal bidang Sosial meliputi :

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti diberikan untuk pelayanan penyediaan permakanan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, Pemberian Layanan Rujukan, dan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat penyandang disabilitas berupa hibah uang sebesar Rp.3.000.000,- per/orang.
b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti diberikan bantuan sosial berupa hibah uang sebesar Rp. 1.000.000,- per/anak kepada anak Yatim, anak Piatu, dan anak Yatim Piatu di lingkungan kabupaten Batang.
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti diberikan bantuan sosial berupa hibah uang sebesar Rp. 200.000,- per/orang selama 10 bulan kepada lanjut usia terlantar di lingkungan kabupaten Batang.
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti diberikan untuk pelayanan penyediaan permakanan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, Pemberiana akses layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar, pemberian layanan data dan pengaduan dan pemberian layanan rujukan;
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota diberikan bantuan penyediaan sandang dan pelaksanaan Kampong Siaga Bencana.

b) Arah Kebijakan *Stunting* Kabupaten Batang Tahun 2025

Stunting masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Penyebab utama stunting meliputi kurangnya asupan gizi, sanitasi yang buruk, dan kurangnya edukasi mengenai pola hidup sehat. Pemerintah telah menetapkan target penurunan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam regulasi

tersebut, terdapat lima sasaran utama dalam upaya percepatan penurunan stunting, yaitu: remaja; catin dan PUS; ibu hamil; balita dan KRS. Untuk mencapai target ini, diperlukan pendekatan multi-sektoral yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, sektor swasta, dan akademisi dalam satu gerakan terpadu.

Kebijakan penurunan stunting tahun 2025 di Kabupaten Batang diprioritaskan pada upaya mewujudkan *zero new stunting* melalui pencegahan dari hulu, terutama pada remaja putri dan ibu hamil agar tidak melahirkan balita stunting baru. Masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Batang, diantaranya cakupan kehadiran balita di Posyandu dan cakupan layanan intervensi spesifik dan sensitif yang belum optimal, yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor pola asuh yang tidak tepat serta masih kurangnya pemahaman keluarga akan pentingnya pemantauan tumbuh kembang balita sehingga masih enggan membawa balitanya ke Posyandu, sehingga pertumbuhan balita tersebut tidak dapat terpantau secara berkala dan tidak terintervensi secara optimal. Faktor kurangnya asupan gizi juga masih menjadi masalah utama khususnya pada keluarga miskin. Faktor berikutnya adalah SDM tenaga terlatih yang masih terbatas, serta belum semua rumah tangga mendapatkan akses sanitasi dan air minum layak. Oleh karena itu, intervensi prioritas untuk upaya menjawab permasalahan tersebut adalah peningkatan cakup;an layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif, utamanya pemberian pendampingan dan edukasi kepada keluarga beresiko stunting, pemberian makanan tambahan untuk balita stunting selama 90 hari dengan melibatkan peran swasta melalui program CSR, pelatihan dan peningkatan kapasitas kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) serta pemberian akses sanitasi berupa stimulan jamban dan akses air minum layak. Sedangkan upaya untuk meningkatkan cakupan kunjungan balita ke posyandu dilakukan melalui program ”jemput bola” dengan menggandeng Babinsa dan Babinkamtibmas serta Penguatan Upaya Kesehatan Perorangan melalui peningkatan pelayanan kesehatan primer serta peningkatan kualitas layanan kuratif dan rehabilitatif, dan Penguatan Upaya Kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan program promotif dan preventif dan

pemberdayaan masyarakat dan kader kesehatan dalam meningkatkan deteksi dini dan pengendalian penyakit.

Konvergensi Percepatan Penurunan stunting di Kabupaten Batang juga telah dilaksanakan melalui kolaborasi *Pentahelix* dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat, akademisi dan media. Keterlibatan swasta dalam perecepatan penurunan stunting Kabupaten Batang diantaranya melalui CSR dalam bentuk pemberian makanan tambahan baik berupa bantuan susu, telur dan makanan berprotein tinggi lainnya kepada keluarga yang memiliki balita Stunting dengan lokasi prioritas di desa lokus stunting selama 3 (tiga) bulan; Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), melalui pemberian makanan tambahan untuk 18 anak stunting selama 3 bulan; serta dukungan perusahaan untuk edukasi pemenuhan gizi bagi karyawan perempuan guna pencegahan stunting. Sementara keterlibatan akademisi diwujudkan melalui keikutsertaan Perguruan Tinggi dalam upaya penurunan stunting diantaranya penempatan KKN Tematik di Desa lokus stunting dan lokus Kemiskinan Ekstrim. Sedangkan peran media dalam percepatan penurunan stunting adalah sebagai sumber informasi untuk para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi terbaru dalam upaya pencegahan stunting. Informasi terbaru yang disajikan dapat digunakan sebagai sumber rujukan, untuk mengetahui sejauh mana upaya pencegahan stunting yang telah dilaksanakan.

Tabel 4. 9
Strategi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025

Permasalahan	Strategi	Intervensi	PD
Belum optimalnya layanan intervensi spesifik dan sensitif untuk percepatan penurunan stunting	pemenuhan 29 indikator esensial sesuai Perpres 72/2021	Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri	Dinkes
		layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin) untuk Remaja putri	Dinkes
		Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) kepada Calon pengantin /calon ibu	Dinkes
		Pemberian bantuan tunai bersyarat untuk Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Dinsos
		pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah kepada	DP3AP2KB

Permasalahan	Strategi	Intervensi	PD
		calon Pasangan Usia Subur (PUS)	
		Pemberian bantuan pangan nontunai untuk Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Dinsos
		Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu	Dinsos
		Pemberian tambahan asupan gizi untuk Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	Dinkes
		Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet kepada ibu hamil	Dinkes
		Peningkatan pelayanan keluarga berencana	DP3AP2KB
		Pemenuhan asupan gizi balita melalui optimaliasasi pemberian (ASI) eksklusif dan MP ASI	Dinkes
		Pemberian pelayanan tata laksana gizi buruk untuk Anak balita gizi buruk	Dinkes
		tambahan asupan gizi untuk anak balita dengan status gizi kurang	Dinkes, Dispermades
		Pemberian imunisasi dasar lengkap kepada balita	Dinkes
		penuntasan BABS	Dinkes, DPUPR
		Peningkatan penerapan PHBS	Dinkes
		Promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri kepada Keluarga berisiko stunting, serta pemberian bantuan olahan ikan, susu dan telur bagi keluarga beresiko stunting	Dislutkannak
		Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	DP3AP2KB
		Pelaksanaan pendampingan kepada Keluarga berisiko stunting	DP3AP2KB
		Pemanfaatan sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi Keluarga berisiko stunting	Dispaperta
		Peningkatan akses air	DPUPR

Permasalahan	Strategi	Intervensi	PD
		minum layak	
		Peningkatan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	DPUPR
		Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) tentang kesehatan dan gizi kepada Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	Dinsos
		Pemberian bantuan pangan selain beras dan telur kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta	Dinsos
Kapasitas KPM yang belum merata serta belum optimalnya peran desa dalam percepatan penurunan stunting	Peningkatan kapasitas KPM dan peran desa dalam percepatan penurunan stunting	Peningkatan Kapasitas KPM	Dispermades
		Peningkatan dukungan DD dan Pemantauan dan evaluasi Percepatan Penurunan Stunting tk Desa	Dispermades
		kebijakan pemberian dukungan operasioal bagi KPM dan kader Posyandu	Dispermades
belum optimalnya Koordinasi, Pemantauan dan evaluasi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Peningkatan Koordinasi, Pemantauan dan evaluasi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Peningkatan Koordinasi, Pemantauan dan evaluasi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tk Kabupaten	Bapelitbang
		Perbaikan Manajemen Data	Bapelitbang
		Pelaksanaan Rembug Stunting	DP3AP2KB
belum teridentifikasinya akar masalah penyebab stunting	Audit Kasus Stunting	Audit Kasus Stunting	DP3AP2KB

Sumber : Bapelitbang, 2024

Upaya percepatan penurunan stunting juga diwujudkan melalui inovasi-inovasi penurunan stunting diantaranya :

1. D'Basinem (Desa Binaan Asi Thok Nem wulan)

Merupakan inovasi dalam memberikan Edukasi Asi Eksklusif yang sekaligus dipadukan dengan perbaikan gizi balita melalui aktivitas memasak menu gizi seimbang untuk diberikan kepada balita, yang dilanjutkan dengan makan bersama balita di posyandu sambil bermain & Brain storming. Inovasi ini telah berhasil meningkatkan cakupan layanan intervensi spesifik pada indikator balita yang mendapatkan ASI eksklusif dari 47,62% tahun 2017 menjadi 64,31% pada tahun 2022.

2. Bambang Tilang (Balita Ditimbang Stunting Hilang)

Merupakan kegiatan pemantauan tumbuh kembang, pemberian vitamin A, imunisasi, konseling dan pemberian makanan tambahan untuk balita, sehinga berhasil meningkatkan cakupan intervensi spesifik pada indikator balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya dari sebesar 73.56 (2021) menjadi 83,84 (2022), balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi dari 91,25% (2021) menjadi 100% (2022), Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap dari 78,29% (2021) menjadi 97,15% (2022).

3. GEMATI (Gerakan Makan Telur Tiap Hari)

Merupakan inovasi untuk menekan angka stunting di Kabupaten Batang dengan memberikan telur kepada sasaran setidaknya 1 telur 1 hari selama 3 bulan berturut-turut sebagai intervensi pencegahan stunting.

4. Gerakan Terpadu Cegah Stunting (GERDU CETING)

Gerakan Terpadu Cegah Stunting (GERDU CETING) hadir sebagai strategi kolaboratif dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting di daerah. Gerakan ini merupakan intervensi dari hulu sampai ke hilir yang meliputi: Pendampingan Bagi Remaja, Calon Pengantin, Keluarga Muda dan Pencegahan Perkawinan Anak; Pendampingan Bagi Remaja, Calon Pengantin, Keluarga Muda dan Pencegahan Perkawinan Anak; Bimbingan Remaja Usia Sekolah Mandiri “Penghulu & Penyuluh Mengajar”; Berkah (Belajar Rahasia Nikah), Kompak (Konseling, mediasi, pendampingan, advokasi & Konsultasi), Lestari (Layanan Bersama ketahanan keluarga indonesia); Pemantauan tumbuh kembang, pemberian vitamin A, imunisasi, konseling dan pemberian makanan tambahan; Keluarga Peduli Stunting dengan cara ber KB Desa Binaan Asi Eksklusif.

5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan

Merupakan inovasi untuk meningkatkan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan konvergensi penurunan stunting di Kecamatan.

Dalam upaya percepatan penurunan stunting, program dan kegiatan dalam rangka penurunan persentase stunting difokuskan di Desa lokus stunting tahun 2024 ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 441/169/2022 tanggal 26 April 2022, berdasarkan

jumlah keluarga beresiko stunting, prevalensi stunting, jumlah balita stunting dan cakupan layanan yang dilakukan, pada 24 Desa sebagai berikut :

Tabel 4. 10 Daftar Desa/Kelurahan Prioritas Stunting Kabupaten Batang Tahun 2024

NO	Kecamatan	Puskesmas	Desa/Kelurahan
1	KANDEMAN	KANDEMAN	Depok
2	PECALUNGAN	PECALUNGAN	Selokarto
3	BAWANG	BAWANG	Sidoharjo
4	BATANG	BATANG III	Kauman
5	PECALUNGAN	PECALUNGAN	Pretek
6	BLADO	BLADO I	Wonobodro
7	PECALUNGAN	PECALUNGAN	Gemuh
8	BAWANG	BAWANG	Jambangan
9	BAWANG	BAWANG	Deles
10	KANDEMAN	KANDEMAN	Karanganom
11	PECALUNGAN	PECALUNGAN	Pecalungan
12	BATANG	BATANG III	Cepokokuning
13	BAWANG	BAWANG	Bawang
14	BAWANG	BAWANG	Surjo
15	BANDAR	BANDAR I	Wonomerto
16	LIMPUNG	LIMPUNG	Tembok
17	BATANG	BATANG III	Rowobelang
18	KANDEMAN	KANDEMAN	Botolambat
19	KANDEMAN	KANDEMAN	Cempereng
20	WARUNGASEM	WARUNGASEM	Menguneng
21	BATANG	BATANG III	Watesalit
22	BAWANG	BAWANG	Sangubanyu
23	REBAN	REBAN	Mojotengah
24	BLADO	BLADO II	Keputon

Sumber : Bapelitbang, 2023

c) Arah kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Pengarustamaan Gender di Kabupaten Batang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dengan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung

jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan diharapkan mampu memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak sehingga mampu meningkatkan peran anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan, penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak.

Tingginya komitmen Pemerintah Indonesia terhadap berbagai kesepakatan internasional untuk melakukan perlindungan terhadap anak perlu direspon oleh Pemerintah Kabupaten Batang dengan mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Program Kota/Kabupaten Layak Anak yaitu Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Tabel 4. 11 Strategi Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Batang

Permasalahan	Strategi	Intervensi	PD
Masih terjadi kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual	Pencegahan, penanganan, pendampingan, pemberian bantuan, dan pemberian perlindungan terhadap anak	pengobatan dan rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial	DP3AP2KB, Dinkes, RSUD
		Pemberian pendampingan antara lain dalam pemberian psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan	DP3AP2KB
		pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu	DINSOS
		Kolaborasi dan kemitraan antara pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dapat membantu memperkuat upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak	DP3AP2KB, Dispermades
		Edukasi dan promosi terkait kesadaran tentang kekerasan seksual dan memotivasi masyarakat untuk bertindak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan.	DP3AP2KB, Disdikbud

Permasalahan	Strategi	Intervensi	PD
		Pembentukan UPTD PPPA	DP3AP2KB
		Pembentukan Forum Anak Kecamatan	DP3AP2KB
Belum optimalnya dukungan regulasi dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Penyusunan PerBup tentang Komite aksi daerh penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;	DP3AP2KB
		Penyusunan Perbup tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.	DP3AP2KB
Belum optimalnya dukungan Dunia Usaha dalam menunjang program dan Kegiatan Pemenuhan Hak anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan hak anak	Peningkatan kerjasama dengan Dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	Dinkes
		Pelatihan Konvensi Hak Anak pada Perangkat Daerah, Lembaga Masysarakat, Media dan Dunia Usaha	DP3AP2KB
		Penyediaan Data Pilah Gender dan Anak	DP3AP2KB
Belum semua anak memiliki Akta Kelahiran	fasilitasi kepemilikan akta kelahiran	fasilitasi kepemilikan akta kelahiran	Disdukcapil
		Kerjasama dengan fasilitas kesehatan dalam Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Disdukcapil
		Kerjasama dengan lembaga masyarakat dan PT dalam upaya percepatan kepemilikan akte kelahiran anak	Disdukcapil
Belum semua Sekolah Ramah Anak	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	pembangunan sarana, prasarasna dan utilitas sekolah dasar menuju ramah anak	Disdikbud
		pembangunan sarana, prasarasna dan utilitas sekolah menengah pertama menuju ramah anak	Disdikbud

Sumber : Bapelitbang, 2024

Disamping memaksimalkan pemenuhan hak anak di Kabupaten Batang, Pemerintah Daerah juga diwajibkan responsif terhadap isu

perempuan. Hal ini menjadi amanat dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan (SDG's) guna mencapaian target di tahun 2030. Pembangunan pemberdayaan perempuan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Paradigma gender saat ini sudah berkembang dan tidak lagi terbatas pada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan saja, namun juga termasuk didalamnya keadilan dan kesetaraan untuk kaum rentan.

Berikut pemetaan permasalahan serta strategi dalam rangka pemenuhan kesetaraan gender di Kabupaten Batang Tahun 2025 :

Tabel 4. 12 Strategi Pengarustamaan Gender Kabupaten Batang

Permasalahan	Strategi	Intervensi	PD
Belum semua Perangkat Daerah mengakomodir Program/kegiatan/subkegitan responsif yang gender	Penguatan peran tim teknis Pokja PUG untuk mendorong dan mengimplementasi-kan Perencanaan dan penganggaran responsif gender pada OPD	Kebijakan satu OPD minimal dua subkeg yang di ARG kan	Bapelitbang
		Pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender kepada OPD (rekom hasil evaluasi PUG dari inspektorat)	DP3AP2KB
		Penyusunan profil gender dan penyediaan data pilah gender	DP3AP2KB
		Penyusunan analisis gender dan Sinkronisasi analisis gender dalam dokumen perencanaan	Bapelitbang
Masih adanya kesenjangan gender dalam akses, partisipasi, dan manfaat hasil pembangunan	meningkatkan peran perempuan dan kaum rentan dalam akses, partisipasi, dan manfaat hasil pembangunan	Meningkatkan implementasi anggaran responsif gender dalam perencan aan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan untuk meminimalisir kesenjangan gender	Bapelitbang, BPKPAD, Inspektorat
Adanya stereotip gender, marginalisasi perempuan, *sub ordinary* dan *double burden*	Mengatasi stereotip gender, marginalisasi perempuan, *sub ordinary* dan *double burden*	Sosialisai, edukasi serta meningkatkan pendidikan dan keahlian SDM perempuan	DP3AP2KB, Disnaker

Sumber : Bapelitbang, 2024

d) Arah Kebijakan Kemiskinan Kabupaten Batang Tahun 2024

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, persentase kemiskinan di Kabupaten Batang cenderung fluktuatif. Setelah mengalami peningkatan pada Tahun 2020 dan 2021 akibat adanya Pandemi Covid

19, pada Tahun 2022 dan 2023 persentase kemiskinan di Kabupaten Batang kembali mengalami penurunan. Penurunan persentase kemiskinan ini diikuti pula dengan penurunan persentase kemiskinan ekstrem dari 2,97% pada Tahun 2021 menjadi 1,55% pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023 tidak ada rilis persentase kemiskinan ekstrem untuk kabupaten/kota. Persentase kemiskinan ekstrem pada Tahun 2023 yang dirilis hanya sampai level provinsi, dimana persentase kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dari 1,97% pada Tahun 2022 menjadi 1,11% pada Tahun 2023. Hal ini dapat diasumsikan bahwa persentase kemiskina ekstrem di Kabupaten Batang juga mengalami penurunan walaupun seberapa besar penurunannya tidak dapat diketahui.

Penghapusan kemiskinan merupakan tujuan pertama *Sustainable Developments Goals (SDGs)* yang harus dicapai pada tahun 2030. Penghapusan kemiskinan ini dapat dilaksanakan dengan strategi kebijakan sebagai berikut:

a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin

   Berkurangnya beban pengeluaran masyarakat miskin dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yang berkolaborasi dengan CSR dan Program Pemerintah Pusat.

   Program Pemerintah Pusat melalui Kemensos, Kemendikbudridtek dan Kemenkes memberikan bantuan berupa PKH, BPNT, Program Indonesia Pintar, dan juga PBI Jaminan Kesehatan Nasional.

   Sedangkan melalui CSR (BUMD & Swasta) melalui Bank jateng, PT Bhimasena Power Indonesia dan juga PT Nestle memberikan bantuan berupa Bantuan Makanan Tambahan, Jambanisasi, Pembagian Sembako, Pengembangan kapasitas guru dan kesetaraan, pemberian demplot tanaman obat keluarga serta pemberian bantuan sosial kepada warga rentan.

b. peningkatan pendapatan masyarakat

   Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Batang berkolaborasi dengan CSR (BUMD & Swasta) yang menyediakan kemitraan dengan KUB dalam penyediaan bibit pada program *green belt* serta penyediaan lowongan kerja bagi tenaga kerja di desa sekitar; dan Pemerintah Pusat dengan menyediakan Program Kartu Prakerja.

c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.

Dalam upaya menurukan kantong kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Batang berkolaborasi dengan CSR (BUMD & Swasta) dengan menyediakan program renovasi RTLH, Pembangunan taman literasi, renovasi penataan drainase lingkungan sekolah, program bank sampah berbasis desa serta kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat melalui program PKK dan pelatihan kepada masyarakat desa.



Gambar 4. 8 Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan dengan CSR (BUMD & Swasta) dan Pemerintah Pusat

Sumber : Bapelitbang, 2024

Strategi kebijakan penghapusan kemiskinan tersebut didukung dengan program strategis yang dapat mempercepat pencapaian tujuan. Program tersebut diantaranya adalah

1. Perbaikan akurasi data, yang dilaksanakan melalui proses pemutakhiran, verifikasi dan validasi data warga miskin sebagai sasaran program;
2. Perbaikan mekanisme program;
3. Konvergensi program, yang dilaksanakan dengan metode kolaborasi multipihak (Pentahelix) antara pemerintah baik pusat maupun daerah, badan usaha melalui dana CSR dan filantropi, perguruan tinggi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, organisasi masyarakat/komunitas dan media massa sebagai sarana untuk edukasi publik;
4. Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat miskin

   Pendidikan non formal bagi masyarakat miskin yang tidak sekolah, beasiswa untuk siswa miskin, bantuan biaya pendidikan

bagi operasional sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dan keterampilan yang berdampak pada meningkatnya peluang kerja bagi masyarakat miskin.

5. Perlindungan Jaminan Sosial dan Perlindungan Kesehatan

   Program perlindungan jaminan sosial dan perlindungan ksesehatan dengan meningkatkan akses masyarakat miskin, terhadap jaminan kesehatan, meningkatkan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan yang diharapkan dapat meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan di kalangan masyarakat miskin dan rentan, tersalurkannya bantuan sosial bagi masyarakat miskin/rentan.

6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar

   Keterbatasan dalam mendapatkan akses air bersih dan sanitasi yang memadai menjadi permasalahan utama di Kabupaten Batang sehingga diperlukan peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang memadai yang diharapkan dalam menambah jumlah rumah tangga yang memiliki akses ke air bersih dan sanitasi layak, peningkatan jumlah fasilitas sanitasi (jamban, IPAL) yang dibangun di daerah miskin.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam upaya penanganan kemiskinan pada Tahun 2025 adalah pembangunan inklusif yang melibatkan dan memberi manfaat bagi semua orang, termasuk kaum wanita, lanjut usia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Ketersediaan data yang akurat dapat mendorong terwujudnya pembangunan inklusif tersebut. Ketersediaan data tersebut diantaranya adalah data kependudukan, data kesehatan, data pendidikan, data perkawinan dan lain-lain. Ketersediaan data yang terpilah dapat menunjukkan kondisi keberagaman gender, ras, suku, agama, disabilitas, kondisi sosial ekonomi, dan kelompok rentan. Ketersediaan data terpilah ini juga dapat mendorong ketepatan sasaran program dan memberi kesempatan semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahap pembangunan.

Perubahan paradigma perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan inklusif. Misalnya, untuk penyandang disabilitas. Bila sebelumnya penyandang disabilitas merupakan objek pembangunan, mendapat perlakuan khusus dengan pendekatan *charity based*, hanya

berpartisipasi di bidang sosial dan menjadi tanggung jawab Kementrian/Dinas Sosial, maka pada pembangunan inklusif penyandang disabilitas akan menjadi subyek pembangunan yang tidak mengalami diskriminasi dengan pendekatan *human right based*, dapat berpartisipasi pada semua sektor (multi sektor) dan menjadi tanggung jawab semua kementrian/lembaga/instansi/perangkat daerah.

e) Kebijakan Satu Data Indonesia Kabupaten Batang

Dalam mengamanatkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Kabupaten Batang telah menyusun peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Kabupaten Batang sebagai dasar serta upaya untuk memenuhi tata Kelola pengelolaan statsitik sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Tindak Lanjut dari Perbup tersebut akan dibentuk Forum Satu Data Indonesia yang terdiri dari :

a. Pembina SDI yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang;
b. Koordinator SDI yaitu Bapelitbang Kabupaten Batang;
c. Walidata SDI yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang; dan
d. Produsen Data yaitu seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Batang.

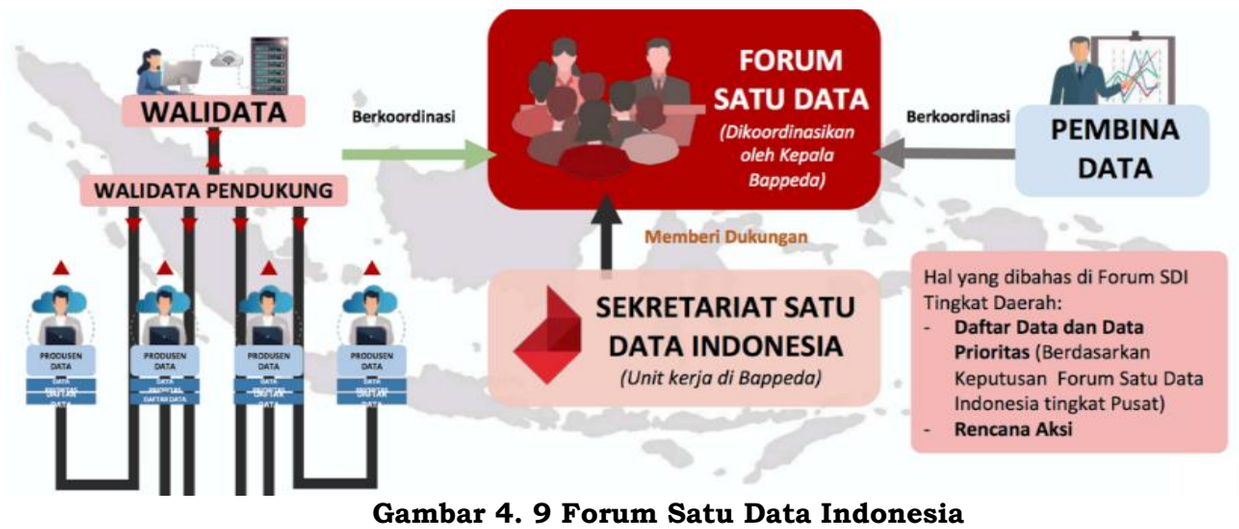

Gambar 4. 9 Forum Satu Data Indonesia

Sumber : Bapelitbang, 2024

Forum Satu Data di Kabupaten Batang rencananya dilakukan satu kali dalam setahun. Selain Forum SDI, Kabupaten Batang juga telah melaksanakan kegiatan Forum tematik SDI dan kegiatan pembinaan statistik sektoral dengan perangkat daerah sebagai produsen data bersama BPS dan Diskominfo Kabupaten Batang. Kegiatan pembinaan yang berupa visitasi tersebut dalam rangka untuk mewujudkan tata Kelola data statistik sektoral di Kabupaten Batang yang sesuai dengan 4

prinsip SDI melalui media online yaitu *Open* Data (data.batangkab.go.id) serta sistem informasi statistik sektoral (sitika) kabupaten batang (sitika.batangkab.go.id) dan Geoportal (geoportal.batangkab.go.id) data spasial yang juga merupakan data sektoral sudah dapat didesiminasikan dan sudah terintegrasi dengan tingkat provinsi dan pusat pada portal SDI (data.go.id). Jumlah data Prioritas tahun 2024 sesuai hasil kesepakatan forum Satu Data Indonesia sebanyak 1346 data.

Sementara itu, aplikasi Sitika terus dilakukan pengembangan dan hingga saat ini telah mengakomodir ± 4500 data yang bersumber dari eWalidata dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini dilakukan guna memastikan sinkronisasi indikator prioritas nasional dan program kerja daerah.

f) Penyiapan Sarana Pendukung TPST Sentul dan Randukuning

Mendasari kondisi sampah yang telah menggunung serta *overloud,* TPA Randukuning Kabupaten Batang, perlu dilakukan upaya guna menangani sampah di Kabupaten Batang yang kian melonjak. Penggunaan metode *Open Dumping* mengakibatkan pencemaran lingkungan, *overload,* dan Risiko Kesehatan. Potensi timbulan sampah di KIT Batang perhari diperkirakan 140 ton/hari yang akan diolah di TPST KITB, namun akan menghasilkan residu sebesar 12% yang akan keluar dari TPST tersebut dengan jumlah yaitu 12% x 140 ton, sehingga total residu yang akan dibuang ke luar dari TPST KITB menuju Randukuning adalah 16,8 Ton/hari. Sesuai dengan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Batang, Pengembangan sistem jaringan persampahan wilayah dilaksanakan guna meningkatkan cakupan layanan persampahan yang meliputi pengembangan dan pembangunan TPA sampah Batang wilayah timur, pengembangan dan pengelolaan TPS 3R, TPST, dan pengelolaan sampah skala rumah tangga.

Rekomendasi solusi persampahan Kabupaten Batang antara lain:

1. Pembangunan TPST Di Sebelah TPA Randukuning Desa Tegalsari Kecamatan Kandeman

   Pengolahan sampah di TPA serta untuk mengatasi permasalahan sampah perkotaan

2. Pembangunan TPST di Desa Sentul Kecamatan Gringsing

   Digunakan bersama Oleh Pemerintah Kabupaten Batang dan Pembuangan Residu dari KITB

3. Penyusunan *Feasibility Study* Pembangunan TPA / TPST Batang Wilayah Timur.

Berdasarkan tata cara pemilihan lokasi dan hasil analisis kelayakan lokasi TPA/TPST, maka lokasi TPA/TPST yang sesuai adalah sebagai berikut :

- Lahan Pemkab Batang : Desa Sentul (1) Kecamatan Gringsing (TPST)

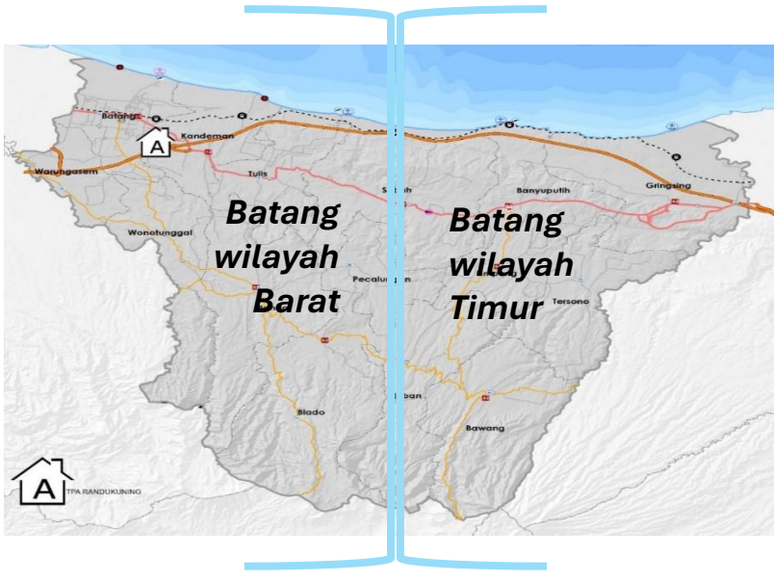

Gambar 4. 10 Pembagian wilayah persampahan dan penanganannya di Kabupaten Batang
Sumber : IPW Bapelitbang, 2024

g) Peningkatan Kualitas Jalan dan askesibilitas Menuju Kawasan Tujuan Wisata

Kerangka wisata Kabupaten Batang atau Tourism Skeleton yang menjadi jalur utama pergerakan wisatawan yang akan berwisata terdiri dari Jalan Utama, Jalan Pendukung Utama, Pintu masuk wisata, Terminal Wisata dan Shelter, serta Jalan Pendukung di tiap Klaster pariwisata Kabupaten Batang. Koridor Utama Wisata Kabupaten Batang sebagai berikut:

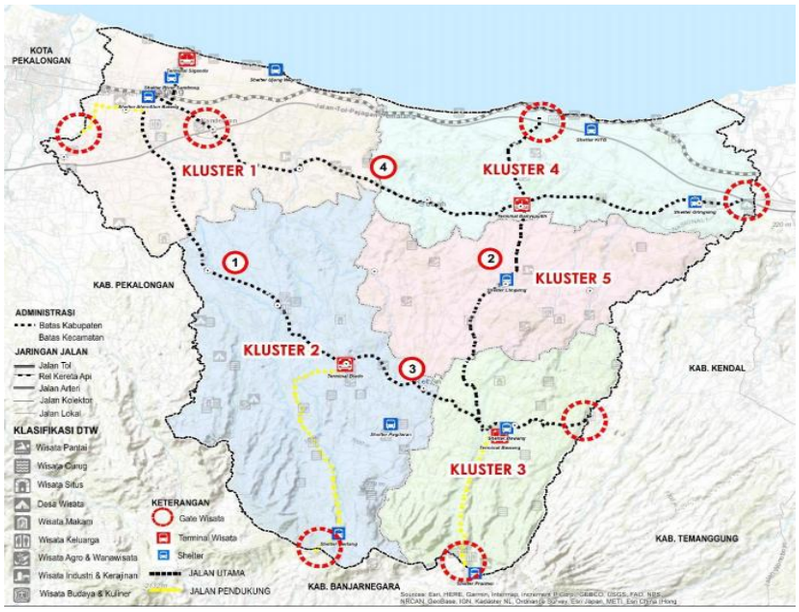

Gambar 4. 11 Kerangka Wisata (Jalan Wisata) Kabupaten Batang
Sumber : Kajian Pariwisata Kabupaten Batang

1. **KORIDOR SIGANDU – BATANG – BLADO**

   Menghubungkan kluster 1 (Alun-alun Batang, Sigandu, Ujung Negoro,) dengan kluster 2 (Bandar, dan Terminal Blado)

2. **KORIDOR KITB – BANYUPUTIH – BAWANG**

   Menghubungkan kluster 4 (KITB Batang, Siluwuk, Sri Gunung) menuju Kluster 5 (Terminal Banyuputih dan Terminal Limpung) dan berakhir di Kluster 3 (Bawang, Tol Khayangan)

3. **KORIDOR BLADO – SURJO – BAWANG**

   Menghubungkan Kluster 2 (Bandar, dan Terminal Blado) dengan Kluster 3 (Bawang, Tol Khayangan) dan berakhir di Pintuk Masuk Sukorejo (Kabupaten Batang)

2. **KORIDOR PANTURA**

   Menghubungkan Kluster 1 dengan Kluster 4 melalui jalur pantura dan berakhir di Gringsing (Pintu Masuk dari Kabupaten Kendal via Pantura).

Matriks Penguatan Jaringan Jalan Utama Pariwisata

NO	NAMA KORIDOR	NAMA JALAN	KELAS JALAN	PANJANG JALAN (m)
1.	Koridor Sigandu – Batang – Blado	Jl. Sultan Agung	Kabupaten	2.590
		Jl. Pemuda	Kabupaten	3.520
		Jl. Raya Wonotunggal - Bandar	Kabupaten	17.750
2.	Koridor Jalan KITB – Bayuputih _ Bawang	Jl. Kedawung – Banyuputih	Kabupaten	7.350
		Jl. Banyuputih – Terminal Limpung	Kabupaten	5.381
		Jl. Terminal Limpung – Bawang	Kabupaten	10.850
3.	Koridor Blado – Surjo – Bawang	Jl. Reban – Bawang – Sukorejo	Kabupaten	17.050
4.	Koridor Pantura	Jl. Pantura	Negara	39.061

Sumber: SK Bupati Batang 50/243/2016 dan Analisis Penyusun 2022

Gambar 4. 12 Matriks Penguatan Jaringan Jalan Utama Pariwisata

Sementara itu, diperlukan akses tambahan untuk menuju lokasi tepat objek wisata. Hal tersebut dikarenakan tidak semua objek wisata berada di Jalur Utama Wisata Kabupaten Batang. Jaringan jalan kabupaten atau jalan desa yang menghubungkan jalur utama wisata dengan objek objek wisata yang tersebar ditiap klusternya disebut dengan jalan pendukung kluster yang terdiri dari matriks jalan dalam 4 kluster wisata.

h) Arah Kebijakan Penanganan Kawasan Kumuh

Penanganan kawasan kumuh dilakukan berdasarkan identifikasi lokasi-lokasi kawasan kumuh yang disusun oleh masing-masing daerah dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati. Penanganan kawasan kumuh dibagi menjadi 3 klasifikasi wewenang. Kawasan kumuh dengan luasan kurang dari 10 hektar ditangani oleh Pemerintah Kabupaten, kawasan kumuh dengan luas 10-15 hektar ditangani oleh Pemerintah Provinsi, dan kawasan kumuh dengan luas lebih dari 15 Ha ditangani oleh Pemerintah Pusat.

Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Batang telah dilakukan pemutakhiran data dan telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah dan Balai Pelaksana Penyedia Perumahan (BP2P) Jawa III, serta diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah. Lokasi kumuh di Kabupaten Batang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 050/422/2023 tertanggal 8 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Batang. Lokasi kumuh meliputi 64 (enam puluh empat) lokasi yang tersebar di 11 (sebelas)

desa/kelurahan, di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Batang dan Kecamatan Kandeman, dengan luas total sebesar 105,38 (seratus lima koma tiga puluh delapan) hektar. SK tersebut ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) di Kabupaten Batang, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh.

Berdasarkan hasil Berita Acara Penyepakatan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2023 dengan mempertimbangkan perhitungan kolaborasi penanganan kumuh (APBD II, APBD I, APBN, dan pihak lainnya) bersama Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP), telah dihitung capaian penanganan kawasan kumuh tingkat Kabupaten sebesar 20,94 ha dengan luas kumuh awal 95,58 ha. Terdapat 3 desa/ kelurahan di Kabupaten Batang yang telah mencapai luas kumuh 0 ha. Sehingga total luasan kumuh di Kabupaten Batang pada awal tahun 2024 adalah sebesar 74,64 ha meliputi 11 desa/ kelurahan dalam 2 kecamatan. Luasan kumuh dapat bertambah jika dilakukan pendataan ulang (update baseline survey). Lokasi kumuh di Kabupaten Batang pada awal tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4. 13 Lokus Kawasan Kumuh Kabupaten Batang

No.		Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas Kumuh (ha)	Kewenangan
A.	1.	Batang	Denasri Wetan	0,51	
	2.	Batang	Karangasem Selatan	2,26	
	3.	Batang	Karangasem Utara	34,78	Pusat
	4.	Batang	Kasepuhan	20,87	Pusat
	5.	Batang	Kauman	9,34	
	6.	Batang	Klidang Lor	0,87	
	7.	Batang	Proyonanggan Selatan	10,75	Provinsi
	8.	Batang	Proyonanggan Tengah	4,21	
	9.	Batang	Proyonanggan Utara	3,09	
	10.	Batang	Watesalit	15,32	Pusat
B.	11.	Kandeman	Depok	3,38	
Total				**105,38**	

Sumber : SK Bupati Batang Nomor 050/422/2023 dan BA Pengurangan Kumuh Tahun 2023.

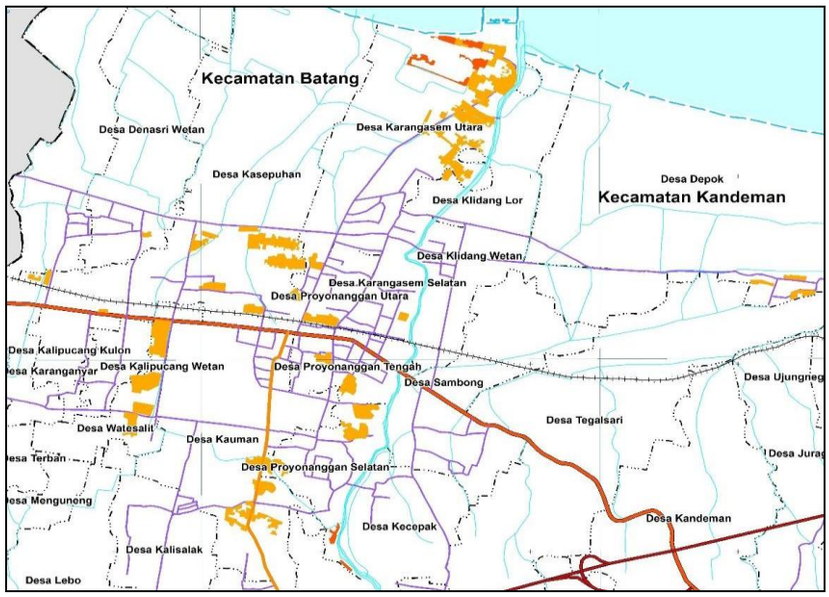

Gambar 4. 13 Lokasi Permukiman Kumuh Kabupaten Batang
Sumber : *SK Bupati Nomor 050/422/2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Batang*

Dalam rangka penyelesaian permasalahan kumuh, Pemerintah Kabupaten Batang sedang berupaya untuk mengikuti program yang didanai oleh APBN melalui Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK TPPKT) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang didalamnya mencakup pengintegrasian komponen rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang didukung oleh sarana prasarana seperti air minum, sanitasi (ari limbah dan sampah), jalan, dan drainase lingkungan. serta sarana prasarana proteksi kebakaran. Terdapat 4 (empat) macam menu dalam penanganan kumuh meliputi :

1. Peremajaan yaitu menata ulang permukiman secara total/ menyeluruh (konsolidasi total);
2. Pemugaran yaitu menata ulang permukiman secara sebagian (konsolidasi sebagian);
3. Relokasi yaitu pemindahan permukiman kumuh dari lokasi yang tidak sesuai RDTR/ permukiman yang terdapat pada kawasan rawan bencana;
4. Pembangunan permukiman baru yaitu pembangunan baru permukiman melalui kelompok/ komunitas masyarakat untuk mengurangi *backlog*.

Sementara itu, kawasan Karangasem Utama yang berada di Kecamatan Batang dengan luas kumuh terluas yaitu 33,15 Ha. Kawasan ini memiliki nilai strategis dalam penanganan kumuh di Kabupaten

Batang karena berada di Ibukota Kabupaten Batang dan memiliki potensi dalam pembangunan Kabupaten Batang yaitu Kawasan Pelabuhan. Arah pengembangan penanganan kumuh pada kawasan ini yaitu peningkatan dan pengembangan wisata muara sungai sambong serta pembangunan *coastal road* pencegah abrasi.

i) Pengembangan Jaringan SPAM IKK Banyuputih

Banyuputih merupakan satu-satunya Ibu Kota Kecamatan yang belum ada jaringan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum). Kecamatan Banyuputih sebagai salah satu kawasan penyangga penting KITB yang diperkirakan bertambah penduduk yang mengakibatkan bertambah-nya kebutuhan prasarana permukiman dimana Kecamatan Banyuputih juga sering terjadi kekeringan saat musim kemarau.

Pembangunan SPAM Di Kec. Banyuputih Yang Merupakan Penyangga KIT Batang rencananya (1) Menggunakan Mata Air Bangkangan dengan debit 100 ltr/dtk, (2) Dalam proses penyusunan Review FS dan DED (oleh PERUMDAM) serta (3) Rencana pemanfaat untuk 2000 SR

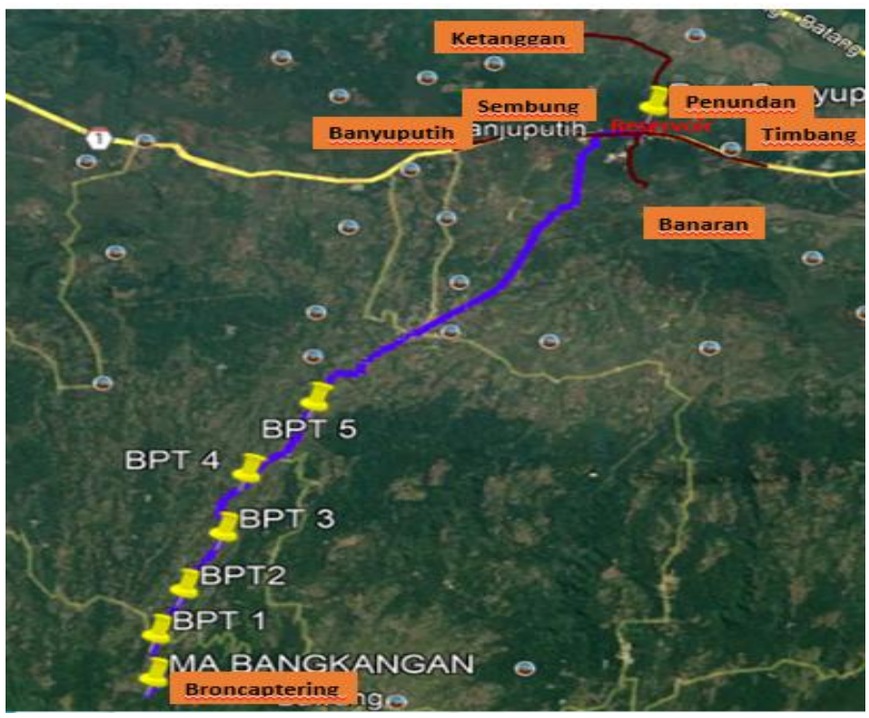

Gambar 4. 14 Rencana SPAM IKK Banyuputih
Sumber : PDAM Kab Batang

j) Pengembangan Jaringan Prasarana Permukiman (Sampah, Air Minum, Jalan Lingkungan, Drainase, Sanitasi)

a. Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan

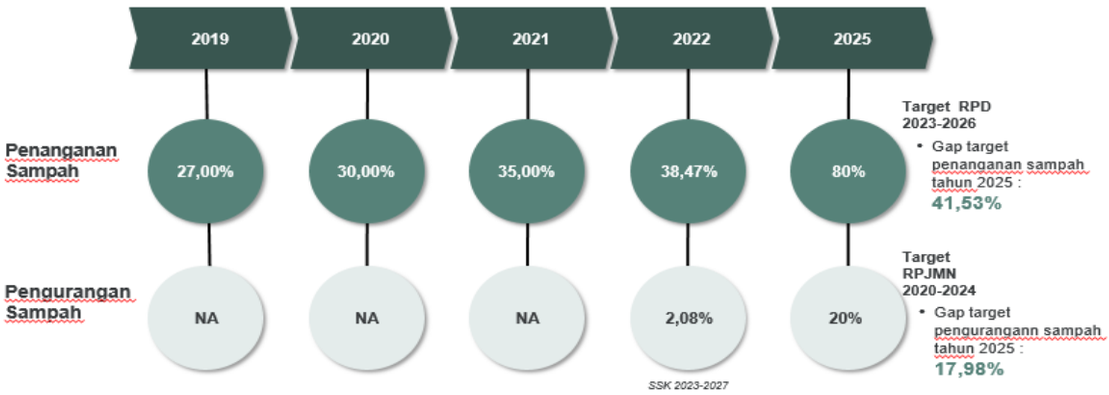

Gambar 4. 15 Kondisi cakupan pelayanan pengelolaan persampahan Kabupaten Batang

Sumber : simanis.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id dan SSK 2023

Kapasitas TPA eksisting yang *overload* dan melebihi umur pakai serta kesulitan lahan untuk membuat TPA Baru di kawasan padat permukiman, sehingga konsep pengelolaan sampah dilakukan melalui pendekatan hulu-hilir difokuskan pada upaya pengurangan sampah dan pengolahan sampah semaksimal mungkin (dengan pemanfaatan teknologi) untuk mengurangi sisa residu sampah. Pengurangan sampah pendekatan hulu-hilir dilakukan antara lain melalui: pembangunan TPS3R skala desa, TPST lokal/ kawasan, serta peningkatan sistem pengelolaan sampah.

Strategi :

- Memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, antar kabupaten/kota dan desa
- Memperkuat kerja sama dengan swasta
- Dukungan terhadap Peraturan Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan daerah
- Peningkatan nilai ekonomi hasil pengolahan sampah
- Kerjasama pemanfaatan RDF oleh UMKM, industri, dan PLTU

b. Rencana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

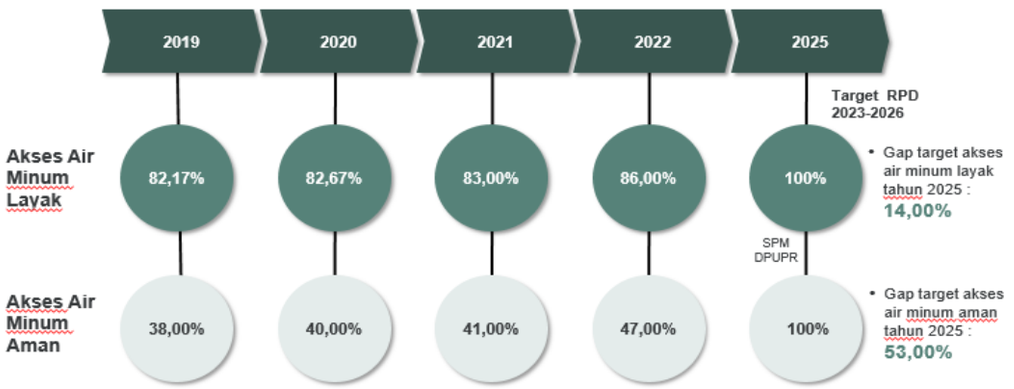

Gambar 4. 16 Cakupan Pelayanan Air Minum Kabupaten Batang

Sumber : simanis.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id dan SSK 2023

Wilayah Perkotaan :

- Penambahan sambungan rumah disetiap tahunnya dengan peningkatan persentase pelayanan;
- Pengendalian kebocoran yang dilakukan melalui penurunan kebocoran secara bertahap;
- Penambahan kapasitas produksi melalui sumber air baku yang ketersediaannya masih mencukupi;
- Peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan dan;
- Peningkatan efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan.

Wilayah Perdesaan :

- Sosialisasi program penyediaan air bersih kepada masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan air minum terlindungi (akses aman) sehingga masyarakat dapat mengajukan proposal dalam penyediaan sarana air bersih;
- Penambahan sambungan rumah di daerah yang sudah direncanakan sebagai peruntukan permukiman perdesaan;
- Menjadikan lokasi BJP masuk dalam jaringan perpipaan dengan persiapan pembuatan jaringan baru (masuk dalam program PAMSIMAS, DAK, dan/atau Hibah Air Minum Perdesaan)

c. Rencana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional

RENCANA PELAYANAN SPAM REGIONAL PETANGLONG – Sistem Kaliboyo Kab. Batang : Kec. Batang, Kandeman, Tulis (200 L/d)



Sistem Jambangan

NO	Petanglong (Jambangan)	Pembagian Debit	SR (Unit)
1	Kota Pekalongan	150 l/dt (Tahap I)	12.000
2	Kab. Pekalongan	50 l/dt (Tahap I)	4.000
		150 l/dt (Tahap II)	12.000
3	Kab. Batang	50 l/dt (Tahap II)	4.000
TOTAL		400	32.000

Sistem Kaliboyo

NO	Petanglong (Kaliboyo)	Pembagian Debit	SR (Unit)
1	Kota Pekalongan	250 l/dt	20.000
2	Kab. Batang	200 l/dt	16.000
TOTAL		450	36.000

Gambar 4. 17 Rencana Pengembangan SPAM Regional Petanglong

d. Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kondisi capaian Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kabupaten Batang sebagai berikut :

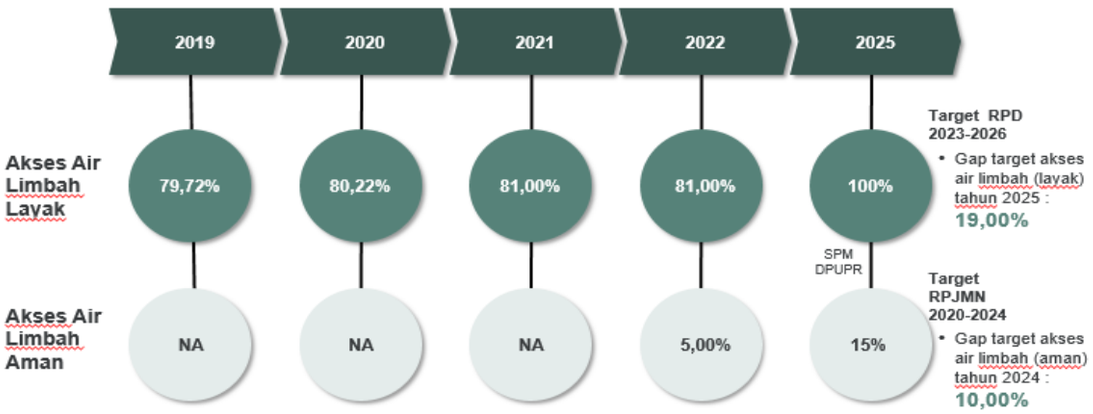

Gambar 4. 18 Cakupan pelayanan Air Limbah Domestik
Sumber : simanis.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id dan SSK 2023

Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebagai berikut :

- ✓ Meningkatkan akses terhadap layanan sanitasi layak (kloset menggunakan leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik);
- ✓ Meningkatkan akses terhadap layanan sanitasi aman (rumah tangga terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja dan disedot minimal sekali dalam jangka waktu 3-5 tahun terakhir);
- ✓ Peningkatan sarana prasarana layanan pengelolaan air limbah dengan mengoptimalkan IPLT Randukuning;
- ✓ Menyiapkan peraturan perundangan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik
- ✓ Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan;
- ✓ Penguatan kelembagaan dan kemampuan manajemen pengelolaan air limbah domestik (belum ada UPTD PAL);
- ✓ Meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.

e. Jalan dan Drainase Lingkungan

Isu Permasalahan dan Kebutuhan Penanganan sebagai berikut :

Tabel 4. 14 Penanganan Jalan dan drainase Lingkungan

Aspek	Isu Permasalahan	Kebutuhan Penanganan
Jalan Lingkungan	• Jalan lingkungan dalam kondisi sedang – buruk • Pengembangan jalan coastal road	• Pengaturan pembangunan dan pemanfaatan jalan lingkungan • Pembangunan jalan lingkungan baru • Perbaikan jaringan alan yang mengalami kerusakan
Drainase	• Kurang baiknya kondisi drainase lingkungan • Sedimentasi sungai • Sistem drainase tercampur oleh air hujan dan air buangan rumah	• Penyusunan regulasi terkait pembangunan dan pemeliharaan drainase lingkungan • Membangun drainase baru • Memisahkan saluran drainase

Aspek	Isu Permasalahan	Kebutuhan Penanganan
	tangga • Sebagian besar saluran drainase dalam keadaan kurang memadai • Banyak saluran yang tidak berfungsi • Terdapat beberapa kawasan jalan yang belum memiliki drainase • Kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase masih rendah	dari saluran air limbah • Memperbaiki saluran drainase yang rusak

Sumber : Bapelitbang Kabupaten Batang, 2024

k) Penanganan Banjir Rob dan Abrasi Pantai

Kerusakan terparah terjadi di sepanjang Pantai Sigandu hingga Ujungnegoro. Abrasi ini telah merusak bangunan milik pelaku dan menyebabkan pelaku usaha mengalami kerugian. Jika dibiarkan, maka kerusakan lingkungan menjadi semakin parah. Hasil identifikasi dari tahun 2009 hingga 2017 garis pantai mengalami kemunduran antara 50 m - 100 m. Garis pantai terbagi dalam 3 segmen dengan kondisi sebagai berikut :

1. Segmen 1 : batas Kabupaten Pekalongan - dermaga batang dengan 3 titik abrasi sebagai berikut :
   - Abrasi 1 seluas 87,287 m^2 di desa Denasri Kulon
   - Abrasi 2 seluas 9.533 m^2 di desa Kasepuhan
   - Abrasi 3 seluas 10.103 m^2 di desa Karangasem Utara

   Kondisi Eksisting Intrusi Air Laut desa Luas Area genangan 3,022,841 m^2 didesa Denasri kulon, Denasri Wetan.
2. Segmen 2 : dari pantai Sigandu – Ujungnegoro dengan 4 titik abrasi sebagai berikut :
   - Abrasi 4 seluas 48.408 m2 di desa Klidang Lor
   - Abrasi 5 seluas 5.791 m2 di desa Klidang Lor
   - Abrasi 6 seluas 76.493 m2 di desa Depok
   - Abrasi 7 seluas 4.844 m2 di desa Ujungnegoro Tulis

   Kondisi Eksisting Kerusakan Bangunan disekitar pantai sigandu.
3. Segmen 3 : dari Ds Kenconorejo Kec Tulis - Ds Yosorejo Kec Gringsing dengan 1 titik abrasi sebagai berikut :
   - Abrasi 8 seluas 27.585 m2 di desa Gondang Kec Subah

   Kondisi Eksisting Pencemaran Lingkungan tidak ada hanya sebagian titik titik lokasi sampah di pantai.

   Kondisi Eksisting Sedimentasi berada di pantai Roban

Rencana Penanganan Banjir, Rob dan Abrasi Pantai sebagai berikut :

- Penataan permukiman/ fasilitas umum dan Kawasan
- Perlu penataan kawasan pertanian dan perkebunan
- Instrumen AMDAL, UKL UPL Program Kali Bersih
- Program Pantai Lestari
- Penyediaan air bersih
- Konservasi dan rehabilitasi mangrove
- Pembatasan pembuatan sumur dalam
- Perbaikan system drainase
- Penataan Kawasan pantai pantai
- Dilakukan kegiatan perawatan alur
- Dilakukan kegiatan perawatan dan monitoring
- Dilakukan kegiatan rehabilitasi dan perbaikan bangunan
- Perlu dibuatkan bangunan pantai sebagai pelindung
- Penyuluhan masyarakat Pantai mengenai pentingnya terumbu karang
- Penyuluhan manfaat hutan mangrove terhadap pengamanan Pantai
- Pembangunan bangunan penghambat laju erosi disesuaikan penyebabnya

Adaptasi lingkungan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Penanaman Mangrove
2. Relokasi Bangunan
3. Pemasangan Batu
4. Pemasangan Trucuk Bambu
5. Pemasangan Geotube
6. Reklamasi Pantai

l) Arah Kebijakan yang mendukung Ketahanan dan swasembada Pangan di Kabupaten Batang

Ketahanan pangan di Kabupaten Batang melibatkan kerjasama dari berbagai lintas sektoral. Ketahanan pangan ditujukan untuk mengantisipasi kerawanan dan krisis pangan di daerah karena suatu kondisi serta untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok masyakarat. Kebijakan ketahanan pangan ini didukung dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Batang.

Selain dukungan dari terbitnya Perbup tersebut, beberapa kebijakan spesifik yang mendukung ketahanan pangan daerah antara lain :

1. *Food Loss* dan *Food Waste*

Komitmen Pemerintah Kabupaten Batang untuk menurunkan angka Food Loss dan Food Waste dilakukan melalui sosialisasi oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang kepada masyarakat untuk meningkatkan praktik penanganan pangan yang baik (good handling practices) dengan selalu menghabiskan makanan yang dimakan atau makan sesuai porsi yang dibutuhkan. Penurunan angka food loss dan food waste menjadi hal yang penting dilakukan karena syarat tercapainya ketahanan pangan suatu daerah adalah adanya ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan memenuhi persyaratan gizi bagi penduduk. Bahan pangan yang

dapat diproduksi di dalam daerah diupayakan tetap menjadi pilar utama dalam penyediaan pangan daerah

2. Konsep Lumbung Pangan

Lumbung Pangan ditujukan untuk menopang ketahanan Kebutuhan Pangan daerah. Terdapat 4 lumbung pangan yang telah diresmikan di Kabupaten Batang antara lain

a. Pengadaan Th 2021: Desa Pejambon (kec warungasem)
b. Pengadaan Th.2022 : desa wonobodro kec. Blado
c. Pengadaan Th 2022 : desa sidorejo kec. Gringsing
d. Pengadaan 2022 : desa tersono kec. Tersono

m) Arah Pengembangan Pariwisata

a. Pengembangan Kluster Pariwisata

Pengembangan kluster pariwisata Kabupaten Batang yang terbagi dalam 5 kluster pengembangan, sebagaimana tersaji dalam gambar berikut ini :

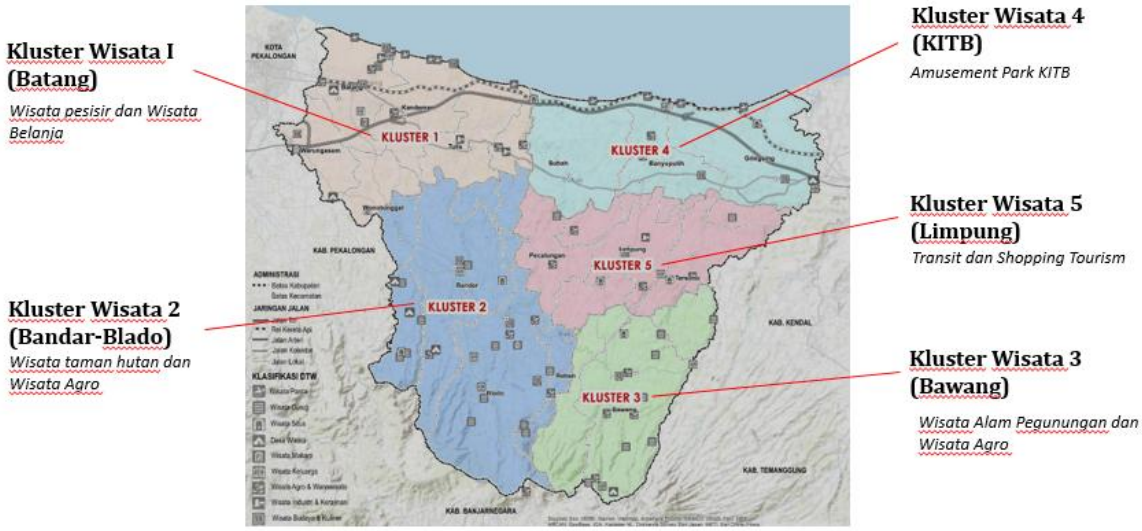

Gambar 4. 19 Pengembangan Kluster Pariwisata Kabupaten Batang
Sumber : Kajian Pariwisata Kabupaten Batang

b. **Pengembangan *Community Based Tourism* – Desa Wisata**

Ekosistem pariwisata Kabupaten Batang yang sudah terbentuk saat ini terdiri dari beberapa kelompok yaitu berbasis komunitas, dikembangkan swasta, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Batang memiliki peran fasilitasi dan regulasi

sehingga seluruh komponen dari ekosistem dapat berjalan lancar dan terintegrasi untuk saling memberikan dampak positif.

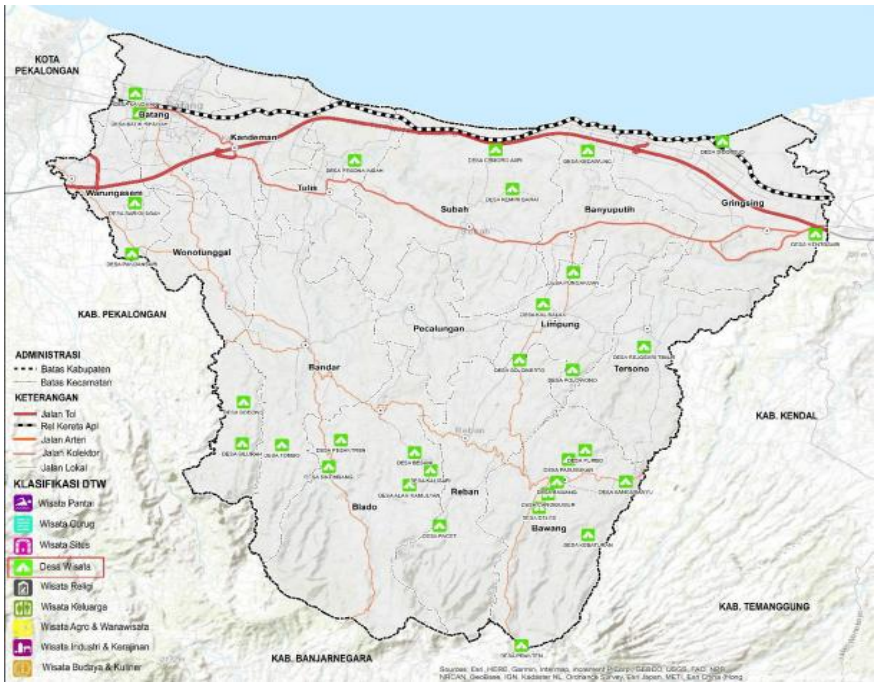

Gambar 4. 20 Peta Wisata Desa Kabupaten Batang
Sumber : Kajian Pariwisata Kabupaten Batang

Community Based Tourism – Desa Wisata dalam pengembangannya didukung dengan peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan serta memperhatikan faktor *Ancilliary* atau pelayanan tambahan sebagai pendukung kepariwisataan di Kabupaten Batang

n) Arah Kebijakan dalam Mendukung Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Terpadu Batang

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Batang diarahkan kepada pengembangan kawasan yang memiliki daya tarik bagi investasi pada sektor industri dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pengembangan kawasan tersebut diwujudkan dalam bentuk pembangunan kawasan industri. Diharapkan dengan pembangunan dan pengembangan kawasan industri dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah, mendorong kemandirian daerah dalam kemampuan keuangan dan kesejahteraan

masyarakat serta tetap mempertahankan kualitas lingkungan yang berkelanjutan.

Kawasan industri di Kabupaten Batang yang telah berdiri dan sedang dikembangkan yaitu Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang berada di Kecamatan Banyuputih dan Gringsing, dan Batang Industrial Park (BIP) yang berada di Kecamatan Tulis. Di samping itu masih ada rencana pengembangan kawasan industri baru yang juga berlokasi di Kecamatan Tulis.

Berdasarkan tinjauan lokasi kawasan industri di Kabupaten Batang memiliki akses yang baik dari Jakarta, Bandung, Cirebon, Pekalongan, dan Semarang serta dengan adanya jalan tol Trans Jawa. Akses melalui jalan non-tol juga tersedia khususnya menuju lokasi tapak yaitu jalan raya Pantura. Hal ini juga mendorong bertumbuhnya kawasan penyangga di sekitar kawasan industri, terutama sektor perumahan dan penyediaan barang jasa yang membutuhkan infrastruktur pendukung kawasan. Kebutuhan *supply chain* (semisal penyediaan kardus untuk bungkus produk tertentu) dalam kawasan juga berpotensi untuk dikerjakan oleh investor lokal sehingga dapat meningkatkan usaha UMKM. Keberadaan kawasan industri akan membutuhkan kurang lebih 300 ribu tenaga kerja dan secara demografi mendorong perubahan mata pencaharian masyarakat di sektor agraris menuju sektor industri. Untuk itu diperlukan pelatihan agar siap untuk dipekerjakan. Isu lingkungan juga tetap menjadi perhatian utama agar keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang dapat dipertahankan kualitasnya.

Strategi pengembangan kawasan industri

Upaya dan strategi dalam mencapai tujuan sasaran pengembangan kawasan industri :

1. Mengarahkan pengembangan kawasan penyangga di sekitar Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Batang Industrial

Park (BIP) dalam bentuk pengembangan infrastruktur pendukung :

- Pembangunan dan pengembangan jalan akses baru (termasuk jembatan dan drainase) melalui pertigaan Banyuputih tembus ke arah jalan kabupaten Kedawung-KITB, penyediaan kawasan permukiman dan penyediaan barang jasa dengan panjang 25 km dan lebar 12 m.
- Pembangunan dan pengembangan jalan akses baru (termasuk jembatan dan drainase) melalui jalan pantura Tulis menuju BIP dengan panjang sekitar 4 km dan lebar 12 m.
- Penyediaan lahan permukiman dan perumahan di sekitar Kecamatan Gringsing, Banyuputih, Limpung untuk mendukung KITB.
- Penyediaan transportasi massal.
- Penyediaan lahan permukiman dan perumahan di sekitar Kecamatan Tulis, Bandar, Kandeman untuk mendukung BIP.
- Pembangunan dan penyediaan sistem jaringan air minum di Kecmatan Banyuputih.
- Mendorong peran serta BUMD dalam kerjasama investasi di dalam kawasan industri.

2. Pemberdayaan UMKM untuk mendukung *supply chain* di kawasan industri dan kebutuhan barang jasa di kawasan penyangga.
   - Pembangunan dan pengembangan Pusat Kegiatan Kabupaten (PKK) di dalam KITB yang terdiri dari pembangunan rest area, pusat UMKM, ruko, hotel, pergudangan dan perkantoran.
   - Inisiasi penyediaan kebutuhan dasar seperti katering, laundry, kos, kontrakan dan sebagainya yang dapat dilakukan oleh masyarakat atau badan usaha desa dengan profesional.
   - Kemudahan permodalan dan pelatihan UMKM.
   - Sinergi UMKM dan Industri

Terbatasnya akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) terhadap pasar dan sumber daya, serta kurangnya kolaborasi antara UMKM dan industri besar. Hal ini mengakibatkan UMKM kesulitan dalam bersaing, inovasi yang rendah, dan ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan pasar yang lebih besar. Sehingga diperlukan *platform* kolaborasi yang menghubungkan UMKM dengan industri besar, menyediakan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk UMKM. Selain itu, memfasilitasi akses ke pembiayaan dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing. Dari upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM yang mampu berkolaborasi dengan industri besar, menghasilkan produk yang berkualitas, serta memperluas akses pasar.

3. Percepatan kesiapan penyediaan tenaga kerja

Strategi peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, terutama dalam menghadapi Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Batang Industrial Park (BIP), berfokus pada beberapa langkah strategis. Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di sektor industri, pariwisata, agribisnis, dan teknologi digital, sehingga tenaga kerja lokal memiliki keterampilan yang relevan dan siap bersaing. Penyediaan fasilitas dan peralatan modern di Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi prioritas untuk mendukung proses pelatihan yang efektif dan efisien. Untuk meningkatkan kredibilitas tenaga kerja, fasilitasi uji kompetensi bagi tenaga kerja dilakukan agar dapat memperoleh sertifikat yang diakui secara nasional maupun internasional, yang akan meningkatkan daya tawar di pasar kerja. Pelaksanaan bursa kerja (job fair) dan program penempatan tenaga kerja, baik dalam negeri maupun luar negeri, juga menjadi bagian penting

dari kebijakan ini, memberikan kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan. Selain itu, proyek padat karya di sektor infrastruktur, seperti pembangunan jalan desa, saluran irigasi, dan fasilitas umum, tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga dapat meningkatkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
   - Mengembangkan sarana prasarana pendukung pengukuran kualitas air dan udara di seluruh sungai dan kawasan industri di Kabupaten Batang.
   - Mendorong komitmen perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.
   - Memperbanyak tutupan lahan terutama lahan kritis di kawasan lindung di Batang bagian selatan.
   - Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Kecamatan Gringsing.

Aksesibilitas Kawasan Industri dengan Kawasan Penyangga

Jalan Kabupaten cukup penting sebagai akses menuju KITB dan juga digunakan masyarakat dalam setiap hari, terdapat dengan kondisi jalan yang rusak karena dilewati kedaraan berat dalam masa pembangunan KITB. Selain itu lebar jalan yang hanya 4 meter diperkirakan akan menghambat aksesibilitas dan berpotensi terjadi kemacetan di waktu mendatang, terlebih belum tersedianya moda angkutan umum yang pasti dan menjangkau Kawasan Industri.

Jalan yang diperkirakan cukup penting untuk mobilitas pekerja BIP, dengan kondisi saat ini:

- Jalan Bandar – Tulis, panjang 10 Km lebar 4 m. Jalan ini membelah KI BIP, menghubungkan pantura Kec Tulis dan bandar.
- Jalan Tulis – Batiombo, panjang 4,3 Km lebar 4 m. menghubungkan pantura tulis dari arah barat

- Jalan Cempereng – Botolambat, panjang 5 Km lebar 4 m. menghubungkan pantura Kandeman

  Jalan yang diperkirakan cukup penting untuk mobilitas pekerja KITB, dengan kondisi saat ini:
- Jalan Plelen – Kedawung, panjang 11,6 Km lebar 4 m. Merupakan jalan masuk dari Pantura Gringsing
- Jalan Banyuputih – Kedawung, panjang 7,35 Km lebar 4 m. merupakan jalan masuk dari Pantura Banyuputih
- Jalan Kedawung – Mangunsari, merupakan jalan yang melewati KI menghubungkan Dukuh Mangunsari dan Pantai Celong.
- Jalan Kalimanggis – Kedawung Pos, panjang 5.5 Km lebar 3 m. merupakan jalan masuk dari Pantura Subah
- Jalan Subah – Kedawung, panjang 10,2 Km lebar 4 m merupakan jalan masuk dari Pantura Subah

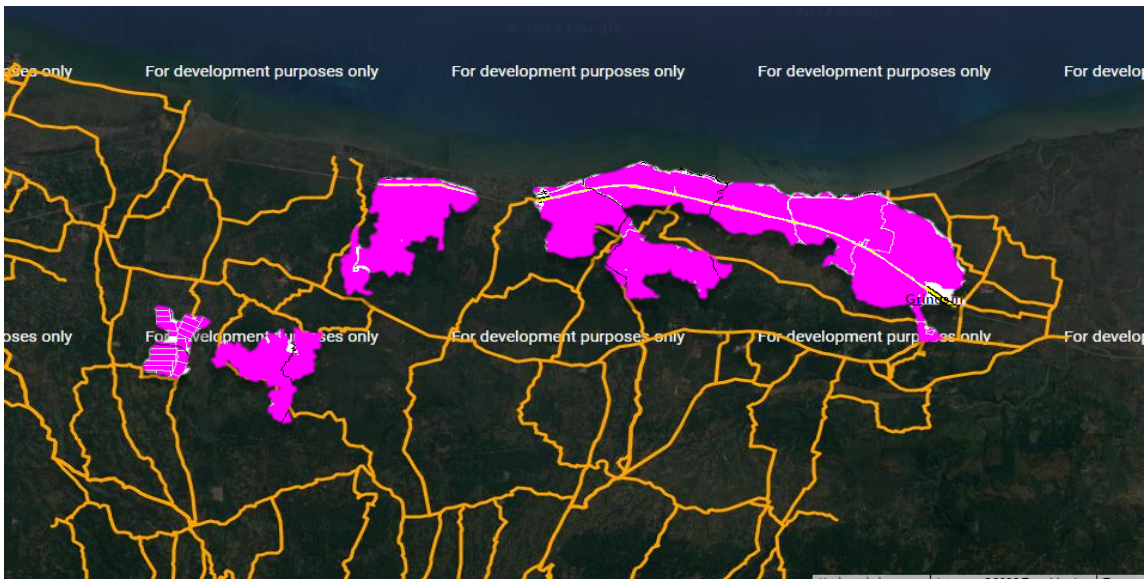

Gambar 4. 21 Aksesibilitas menuju Kawasan Industri
Sumber : Bapelitbang, 2023

<u>Upaya dalam mendukung Peningkatan Ekonomi Kawasan Penyangga Kawasan Industri melalui ”Batang SAKPORE”</u>

Kawasan penyangga mengalami ketidakmerataan ekonomi, dengan pendapatan masyarakat yang rendah dan keterbatasan infrastruktur. Tenaga kerja lokal tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan

kebutuhan industri, dan UMKM kurang terlibat dalam sektor industri, mengakibatkan potensi ekonomi yang tidak teroptimalkan. Sehingga diperlukan upaya pengembangan kebijakan dan strategi yang fokus pada peningkatan infrastruktur, pelatihan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong kolaborasi antara UMKM dan industri. Program **BATANG SAKPORE (Strategi kawasan penyangga sebagai pendorong ekonomi rakyat)** ini akan menciptakan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Output yang dihasilkan dari Program ***Batang SAKPORE*** yaitu Meningkatnya pendapatan masyarakat, perbaikan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, dan keterlibatan UMKM yang lebih besar dalam sektor industri. Hal ini akan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan di kawasan penyangga.

4.3 Inovasi Kabupaten Batang

Pada tahun 2025 ini, terdapat 70 Perangkat Daerah yang memiliki inovasi daerah yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, dengan masing-masing kategori sebagai berikut:

Gambar 4. 22 Daftar Inovasi di Kabupaten Batang Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI
1	2	3
1	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG	SINAWAS (Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan)
		LAKON'E (Lapor dan Konsultasi Elektronik)
2	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG	JDIH DPRD Batang Terintegrasi
		E-Aspirasi
		Digital Library DPRD
		Pojok UMKM DPRD Kabupaten Batang
3	SATPOL PP KABUPATEN BATANG	MAS-Linmas
		LAPOR-PP
4	BAPELITBANG KABUPATEN BATANG	(DELIMA) Digitalisasi Izin Magang dan Penelitian
		Sentra Kekayaan Intelektual (HKI)
5	BPKPAD KABUPATEN BATANG	E-BPHTB
		E-PBB (Implementasi Digitalisasi Pelaporan dan Elektronifikasi Pembayaran pajak Bumi Bangunan)

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI
1	2	3
		E-SPTPD
		GEBYAR PAJAK
		SIMPATDA
		SP2D ONLINE
		SIKEND (SISTEM INFORMASI KENDARAAN)
		E-LAYANAN (Digitalisasi Pelayanan Perubahan Pajak Bumi Bangunan)
		SENSUS PAJAK
		BILLING CENTER
		BULAN KEPATUHAN PAJAK
		EPERBEND (Sistem Informasi Penyelenggaraan Perbendaharaan Derah)
		SIM Aset (Sistim Informasi Pengelolaan Aset Daerah Terintegrasi)
6	BKD KABUPATEN BATANG	E-Kinerja
		E-Presensi
		SIMPEG Plus Pelayanan Kepegawaian Online
		Portal Aplikasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang
		Channel YouTube : BKD Kabupaten Batang
		E-Jabatan
		Si-Elang
7	BAKESBANGPOL KABUPATEN BATANG	SIOPA (Sistem Informasi Pengawasan Ormas, Parpol dan Orang Asing)
8	BPBD KABUPATEN BATANG	SIPITUNG (Siaga Pitulungan)
		SILADNA
		Alibaba (Aplikasi Layanan dan Informasi Bencana Batang)
		BASKOMLOG (Bantuan Satu Komando Logistik Penanggulangan Bencana)
9	DISDIKBUD KABUPATEN BATANG	Penerimaan Peserta Didik Baru Online Jenjang SMP
		Bandikmenti (Aplikasi Bantuan Biaya Pendidikan bagi peserta didik pendidikan menengah dan mahasiswa berprestasi)
		PAUD Holistik Integratif (Penurunan Stunting melalui kegiatan PAUD Holistik Integratif secara berkala)
		Transisi PAUD ke SD untuk menjembatani dan tidak menciptakan halangan tumbuh kembang anak
10	DINAS KESEHATAN BATANG	E-Logis (Elektronik Logistik Obat Di Puskesmas)
11	DPUPR KABUPATEN BATANG	Batang Smart Spasial Sistem (BS3)
		Sijantan (Sistem Informasi Jalan dan Jembatan) Kab. Batang
		Layanan Perizinan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha Online
12	DPRKP KABUPATEN BATANG	CIAMIK (Citra Manajemen Perumahan dan Kawasan Permukiman)
		Mas Darsani (Masyarakat Sadar Sanitasi dalam rangka percepatan ODF Memfasilitasi Masyarakat memiliki jamban sehat)
13	DINAS SOSIAL KABUPATEN	Sistem Informasi Santunan Kematian (e-Sakti)

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI
1	2	3
	BATANG	Sistem Informasi Santunan Kematian (e-Sakti)
		PUSKESSOS (Pusat Kesejahteraan Sosial)
14	DISNAKER KABUPATEN BATANG	Batang Career
		Sistem Informasi Data Hubungan Industrial (SIDAHI)
		Sistem Seleksi Online Peserta Pelatihan di Era Pandemi (SILENI)
15	DP3AP2KB KABUPATEN BATANG	TERAJANA (Integrasi Laporan Jejaring Dan Jaringan Keluarga Berencana)
		SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak)
		NGOPI KENCANA (Ngobrol Pagi Keluarga Berencana)
		CETING NGANTEN (Cegah Stunting Melalui Pendampingan Pengantin)
		NYANTING (Nyambangi Kasus Stunting)
		SAPA KELUARGA (layanan informasi dan konsultasi terkait permasalahan perempuan, anak, dan keluarga)
		EMPING GARING (Elektronik Monitoring Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting)
16	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BATANG	Budidaya Coro Pedang dan Budidaya Talas Pratama
		Penelitian Pupuk Organik
		e-Pertanian
		SIKEP
		E- Farming
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BATANG	Pembentukan Pasukan Got
		Aplikasi Pengaduan Masyarakat terkait Pencemaran Lingkungan
		Pengelolaan Bank Sampah
		Inovasi IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)
		Pengolahan Sampah Menjadi Bahan Kerajinan
		Pengolahan Limbah dengan IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah)
		Pengolahan Limbah dengan Biodigester
		Gerakan Setor Sampah Setiap Jum'at di OPD Kab. Batang
18	DISDUKCAPIL KABUPATEN BATANG	SIPPADUKA (Integrasi Pelayanan Pengadilan Agama, Disdukcapil dan KUA dalam hal perubahan status perkawinan)
		Podcast (Pelayanan Online Disdukcapil dengan Smathphone baik berbasis mobile)
		SISUK SARAHAN (SIAK Masuk Desa Kelurahan)
		Calon Manten (Catatan Sipil Online untuk Masyarakat Kabupaten Batang)
		Cekatan (Cetak dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa turun dari Kendaraan (drive thru))
		Susis Bakpia (Semua Siswa Bakal Punya Kartu Identitas Anak)
19	DISPERMADES KABUPATEN BATANG	Pengisian Perangkat Desa Sistem CAT
20	DINAS PERHUBUNGAN	ATCS (AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM)

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI
1	2	3
	KABUPATEN BATANG	Penyelenggaraan Layanan KIR Online
21	DISKOMINFO KABUPATEN BATANG	SIGADIS (Desiminasi Data Statistik Sektoral dengan Infografis)
		Dashboard Sistem Informasi Eksekutif
		Penyelenggaraan Integrasi Layanan Panggilan Darurat 112 di Wilayah Kabupaten Batang
		Penerapan Sistem Perkantoran Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik (Tanda Tangan Elektronik)
		Pembuatan E-Kliping Berita Daerah
		Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Android
		Podcast Special Bincang Batang
		Batangkab CSIRT
		Media Analitics
		SI TIKA (Sistem Informasi Statistik Sektoral)
		Perluasan Pengawasan Area Publik dengan CCTV
		Perluasan Jaringan Komunikasi Radio Komunitas
22	DISPERIDAGKOP & UKM KABUPATEN BATANG	CINTA PRODUK Batang
		KLINIK BISNIS (Sistem informasi dan sentra layanan konsultasi dan fasilitasi bisnis bagi Industri Kecil dan Menengah)
		E-Retribusi (Pengoptimalan restribusi darimenggunakan sistem elektronik)
23	DPMPTSP KABUPATEN BATANG	Mal Pelayanan Publik Kab. Batang
		Percepatan Pelayanan SIM Drive Thru Perpanjangan SIM A dan SIM C di Mal Pelayanan Publik Kab. Batang
		SIPUAS (Gerakan Setor Sampah Setiap Jum'at di OPD Kab. Batang)
		Service Point Pelayanan Perizinan Usaha
24	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BATANG	Pembuatan buku E-katalog Ekonomi Kreatif
		Penerapan E-Tiketing
		Sinergitas Sistem Data Dan Pelaporan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Branding Batang melalui Kalender Event/Kalender Pariwisata
25	DISPERPUSKA KABUPATEN BATANG	SIMARDI (Sistem Manajemen Arsip Dinamis)
		JIKD (Jaringan Informasi Kearsipan Daerah)
		e-Perpus Batang
		Soleha (Strategi Olah Arsip Efektiv Dan Handal)
		Rasah Tuku (Gerakan Satu Orang Hibah Satu Buku)
		Sapu Geni (Saka Pustaka untuk Gerakan Literasi Berbasis Inklusi Sosial)
		ARTIS (Layanan Peminjaman Arsip Statis
		TELENOVELA

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI
1	2	3
		(Memasyarakatkan Literasi dengan Program satu Desa Satu Perpustakaan)
26	DISLUTKANNAK KABUPATEN BATANG	APLIKASI PENERBITAN REKOM BBM SUBSIDI
		APLIKASI PROFIL NELAYAN KECIL
		Aplikasi Profil Unit Pengolahan Ikan (UPI)
		Demplot Budidaya Ikan Air Payau (Polikultur Kerapu dan Bandeng) di Tambak
		Penandaan dan Pendataan Hewan menggunakan eartag berbasis aplikasi dengan scan barcode
		Pengelolaan Limbah Batubara Menjadi Rumah Ikan
27	BAGIAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BATANG	Pembuatan Aplikasi Penyusunan Data Base LPPD dan LKPJ tahun 2024
28	BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BATANG	LAKON (Layanan Konsultasi) JDIH Kabupaten Batang
		Podcast JDIH
		Lomba menulis esai hukum
		Lomba Pengelolaan JDIH Pemerintah Desa
		Lomba menulis esai hukum
		Ebook JDIH
		E-Sakip
		Penyelenggaraan dan Pengembangan Layanan Simpelbang (Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan)
		SIPemerintahan Batang
		e-Agenda
		DIGITAL Kliping Internal Prokompin
29	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BATANG	Simpelbang NG (Sistem Informasi Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan Pembangunan New Generation) alamat web: simpelbang.Batangkab.go.id
30	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KABUPATEN BATANG	BPR BAPERA VIRTUAL ACCOUNT
31	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BATANG	E-Sakip
32	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KABUPATEN BATANG	CILOG (LOMBA CIPTA LOGO DALAM RANGKA HUT KABUPATEN Batang)
		DIKENAL Prokompin (DIGITAL Kliping Internal Prokompin)
33	BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN BATANG	e-Agenda
34	KECAMATAN BATANG	SISTEM INFORMASI DESA (SID)
		Program Digitalisasi Buku Letter C Desa (PROTADES)
		PERMADANI (Persaudaraan Madani)
		ANTI GRATIFIKASI, SUAP dan KORUPSI
35	KECAMATAN TULIS	SISTEM INFORMASI DESA (SID)
		Program Digitalisasi Buku Letter C Desa (PROTADES)
		One Point Service
36	KECAMATAN WONOTUNGGAL	GERTAK PBB (Gerakan Serentak Pembayaran PBB)

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI
1	2	3
37	KECAMATAN WARUNGASEM	LAPOR CAMAT WARAS
38	KECANATAN BLADO	Cepat Halalin
39	KECAMATAN BANDAR	Warung Pelayanan
40	KECAMATAN REBAN	Gebyar Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Serentak
41	KECAMATAN KANDEMAN	Monev SERASI (Senyum Ramah Selalu Inovatif)
42	KECAMATAN TERSONO	MANIS LEGIT SI GULA SEMUT
43	KECAMATAN GRINGSING	Desa LUK (Laboratorium Unit Kerja)
		GAPS (Gringsing Ayo Pilah Sampah)
		KETAN (Kecamatan Ramah Anak)
44	KECAMATAN BAWANG	Percepatan Pelayanan Perijinan melalui Klinik OSS menuju optimalisasi pemberdayaan UKM di Kecamatan Bawang Kab.Batang
45	KECAMATAN BANYUPUTIH	Kegiatan Gerakan Serentak Lunas Pajak PBB (GERTAK LUPA PBB)
46	KECAMATAN LIMPUNG	Gebyar PBB Serentak
47	KECAMATAN PECALUNGAN	Creative Farm
48	KECAMATAN SUBAH	Digitalisasi UMKM
		"Angkringan Ijin Usaha Mikro dan Kecil" Melalui pelayanan keliling ke Desa dan tempat keramaian (pasar)
49	RSUD BATANG	My RSUD Batang
50	RSUD LIMPUNG	Si Emping RSUD Limpung
		Elektronik Rekam Medis (ERM) RSUD Limpung
51	PUSKESMAS GRINGSING 1	SABTU BERKAH (abtu Bersama Makan Buah)
		SINGSET PUBER (Gringsing Sehat Pantau Bersama)
		SENIN AMUNISI
		SELASA AKRAB
52	PUSKESMAS BATANG 2	SUKET BIRU (Suluh Kesehatan Berhenti Merokok Yuk)
		KULTUM KIA (Kuliah Tujuh Menit buku KIA)
		BIOPORI ALAS ROBAN (Atasi Limbah Sampah Organik Karo Banjir)
		AKU GEMES (Aksi Menuju Generasi Merdeka Stunting)
		DIGAJI HEBAT (Gangguan Jiwa Harus Minum Obat)
		NYEDAK RONDHO (Nyetor Dahak Loro TBC Endho)
		PORA CETAR (Pojok Ramah Anak Cerdas Pintar)
53	PUSKESMAS BANDAR I	SIGITAR TUA (Implementasi Gigitan Ular Terkini dan Aktual)
		SAIFA (Sahabat Ibu Nifas)
		SADESAWAT (Satu desa satu perawat)
		KOPI PINTAR (Program Promkes dengan melakukan pemberian fotocopi materi saat penyuluhan kepada peserta agar bisa di baca dan dipelajari dengan baik)
		JEJAMA (Jelajah jamban masyarakat)
		KURMA MANIS (Kunjungan rumah ibu nifas dan bayi baru lahir)
		UBER SI MIKO (Berburu dengan investigasi

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI
1	2	3
		microbacterium)
		KAMPAS (Kampanye peduli stunting)
		GREBEG MIKORESA PLUS PLUS
		GEPREK PITIK
		GEPREK BASO
54	PUSKESMAS BAWANG	BINA ASI (Bapak Ibu Nenek, Aku Mau Asi Eksklusif ini)
		CETING MAS (Cegah Stunting dengan Wong Meteng, ASI Eksklusif dan Sanitas)
		JUS TOMAT (Jumat Sehat Temukan Obat TB Masyarakat)
55	PUSKESMAS PECALUNGAN	JBRET (Jumat Berkah Entuk Sehat)
		SADESAPER
		GREBEG TIK-TOK (Tim gerak cepat terhadap kejadian penyakit menular (DBD))
56	PUSKESMAS REBAN	GEMBIL (Gerakan Bersama Jaga Ibu Hamil)
		POSYANDU CENDIKIA
		PLESIR
57	PUSKESMAS SUBAH	DE BASINEM (Desa binaan ASI thok nem wulan)
		PIJAT MESRA (Pijat mesra berupa pijak oksitocin yang merupakan pemijatan pada sepanjang tulang belakang)
		GERAK PESAT (Gerakan Serentak Pesan Singkat)
		SI GESIT IRIT (Diskusi gerakan komunikasi interaktif dan deteksi resiko tinggi)
58	PUSKESMAS BLADO I	BAMBANG TILANG (balita ditimbang stunting Hilang)
		JABAT KASIH (Jamban Sehat,kaline bersih)
		LASEGAR (Lansia Sehat dan Bugar)
		ANTI BAPER (Ayo Tingkatkan Imun bebaskan penyakit Tidak menular)
		SIDIKJARI (Sistim Informasi Dini Kesehatan Jiwa Mandiri)
		PIPI BAPAO (Pijat Pijat buat anak sehat tanpa obat)
		JAHE CANTING (Remaja Hebat Cegah Stunting)
		SIBUNTAR (Kelas Ibu Pintar)
59	PUSKESMAS BLADO II	Goyang Ibu Hamil Mantap
		Susu Sapi (Susunan Surat Satu Pintu)
		Jebol Gravitasi (Jemput Bola dengan Gerakan Bersama melawan Covid-19 melalui Tanggap Vaksinasi)
		Sambar Nasehat (Senam Bersama Guna Sehat Bersama dan Jum'at bersih)
		Sisuper Limbad (Aplikasi Surat Perjalanan Dinas Puskesmas Blado Dua)
		Safari Kesehatan (Pelayanan peningkatan upaya promotif, preventif Puskesmas di Luar gedung dengan cara Jemput Bola ke Desa Binaan secara berkala)
		Gemindu (Gerakan Mobile Posbindu)
60	PUSKESMAS BATANG 1	Gerak Berjuang (Gerakan ber KB jangka

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI
1	2	3
		panjang)
		Siduta (Pemberian ASI 2 tahun)
61	PUSKESMAS BANDAR 2	GERSANG JIWA (Program Kesehatan Jiwa yang dilatarbelakangi banyaknya kasus gangguan jiwa)
		KAKA DESI (Kader kesehatan deteksi tuberkulosis)
62	PUSKESMAS KANDEMAN	SIMAMAT (Pengisian Materi 5 menit)
		PONLINE (PENDAFTARAN ONLINE)
		Media sehat Puskesmas Kandeman
63	PERUMDA AIR MINUM SENDHANG KAMULYAN	Aplikasi Banyu
		Tim ULC (Unit Layanan Cepat)
		Sistem Informasi Pelanggan Baru (SIMPB)
		Web GIS SPAM dan Pelanggan Perumda Air Minum Sendang Kamulyan
		Sistem Informasi Skematik SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dan Monitoring Data Logger
64	PUSKESMAS BATANG 3	BUCIN (Rabu Cerita Informasi Kesehatan)
		SPIK (Seputar Informasi Kesehatan)
		Desa Binaan "Sego Ceting ASIEX"
65	PUSKESMAS BANYUPUTIH	PENTOL PUTIH (Pendaftaran Online Puskesmas Banyuputih)
66	PUSKESMAS LIMPUMG	TIGER PATAS Puskesmas Limpung
		MAS DAESANI Puskesmas Limpung
		MAIN GASING Puskesmas Limpung
		KURAS ANIK Puskesmas Limpung
67	PUSKESMAS GRINGSING 2	Saking Cinta (Deteksi dini kanker leher rahim melalui pemeriksaan IVA)
		Pijat Oksitosin (Kegiatan memijat punggung ibu paska bersalin)
		Kebuli dalam Ceting (Kegiatan pembelajaran kelompok balita dengan sasaran ibu)
		Jamali TB (Kegiatan deteksi dini/penemuan kasus TBC)
		Kejar Bumil (Kegiatan dalam rangka penurunan AKI dan AKB)
		Gebrak DB (kunjungan keluarga kasus (pe) dan gerakan kader untuk pemantauan jentik berkala di RT keluarga)
68	PUSKESMAS TULIS	PUSKESMAS SANTUN LANSIA
		PUSKESMAS RAMAH ANAK
		SI PITUNG (Edukasi kesehatan dalam gedung durasi 7 menit)
		PAJERO SIDIA (PELAYANAN JEJARING SOSIAL MEDIA)
		Jumatik (Pelacakan dan pemberantasan jentik nyamuk)
		PEGANG GRAJI (Pemeriksa Orang Dengan Gangguan Jiwa)
		POTENSI (Pemeriksa Dengan Hipertensi)
		DESI ASIK (Desa Binaan ASI EKSKLUSIF)
		PASUTRI HAMIL (Pelayanan USG Trimester 1

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI
1	2	3
		&3 Ibu Hamil)
		GADIS MANIS (Gerakan Deteksi Dini Metode IVA & Sadanis)
		KADUS NINGRAT (Keluarga Peduli Skrining Bayi Baru Lahir Sehat)
		GEMPITA NING RATRI (Gerakan Minum Table FE dan Skrining Remaja Putri)
69	PUSKESMAS TERSONO	MISTORMIL (Kamisan Monitor ibu Hamil. Kegiatan bertujuan untuk menekan angka kematian ibu bersalin)
		GRABS (Gerakan Anti Buang air besar Sembarangan)
		PDKT (Penyuluhan dan edukasi kesehatan Terpadu, penyuluhan ke desa dengan berbagai disiplin ilmu atau tenaga kesehatan)
		KAMPUNG IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat merupakan salah satu metode deteksi dini untuk kanker serviks)
		TEBAS TB (Tersono Bebas TB)
70	PUSKESMAS WARUNGASEM	Inisiasi Kader Desa Siaga Sehat Jiwa
		Kepiting Cabe (Keluarga Peduli Stunting Cegah dengan Berkabe)
71	PUSKESMAS WONOTUNGGAL	PURA BALI (Puskesmas ramah balita dan lansian)
		SI - GOLAN (Pelayanan jemput bola pada pelayanan Posyandu Lansia bagi Lansia yang tidak bisa datang ke Posyandu)

Sumber : Bapelitbang Kabupaten Batang, 2024

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2025

Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka kerangka pendanaan untuk Perubahan RKPD tahun 2025 sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5. 1
Persandingan Kerangka Pendanaan RKPD Tahun 2025, APBD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025

URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**407.759.182.058**	**411.689.806.831**	**404.678.196.787**
Pajak Daerah	230.125.000.000	230.125.000.000	217.060.000.000
Retribusi Daerah	154.733.598.738	157.757.588.738	166.914.148.457
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.783.126.320	17.774.761.093	17.024.865.330
Lain-lain PAD yang Sah	6.117.457.000	6.032.457.000	3.679.183.000
PENDAPATAN TRANSFER	**1.566.288.258.378**	**1.566.288.258.378**	**1.526.786.380.800**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.474.851.006.578	1.474.851.006.578	1.440.294.530.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.437.251.800	91.437.251.800	86.491.850.800
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**480.000.000**	**480.000.000**	**-**
Pendapatan Hibah	480.000.000	480.000.000	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
Jumlah Pendapatan	**1.974.527.440.436**	**1.978.458.065.209**	**1.931.464.577.587**
BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI	**1.488.676.679.523**	**1.472.243.382.498**	**1.516.240.657.869**
Belanja Pegawai	905.659.544.885	903.088.413.817	972.557.562.163
Belanja Barang dan Jasa	504.167.409.085	487.104.743.128	464.930.912.180
Belanja Hibah	69.005.437.553	70.171.437.553	70.319.108.693
Belanja Bantuan Sosial	9.844.288.000	11.878.788.000	8.433.074.833
BELANJA MODAL	**170.283.413.975**	**190.500.869.231**	**161.496.083.789**
Belanja Modal Tanah	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.119.970.223	35.195.403.724	29.584.283.300
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.572.307.077	71.476.297.924	46.899.856.783
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.907.212.675	72.048.827.222	71.920.903.345
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.233.924.000	10.993.280.361	12.187.980.361
Belanja Modal Aset Lainnya	350.000.000	687.060.000	803.060.000

URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
BELANJA TIDAK TERDUGA	**12.000.000.000**	**12.150.000.000**	**24.561.101.879**
Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000	12.150.000.000	24.561.101.879
BELANJA TRANSFER	**363.567.346.938**	**363.563.813.480**	**369.024.932.200**
Belanja Bagi Hasil	19.743.886.738	19.740.353.280	18.638.133.000
Belanja Bantuan Keuangan	343.823.460.200	343.823.460.200	350.386.799.200
Jumlah Belanja	**2.034.527.440.436**	**2.038.458.065.209**	**2.071.322.775.737**
Total Surplus/(Defisit)	**- 60.000.000.000**	**- 60.000.000.000**	**-139.858.198.150**
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**70.000.000.000**	**70.000.000.000**	**144.858.198.150**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.000.000.000	70.000.000.000	144.858.198.150
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**70.000.000.000**	**70.000.000.000**	**144.858.196.994**
Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**5.000.000.000**
Pembiayaan Netto	**60.000.000.000**	**60.000.000.000**	**139.858.198.150**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)		-	-
TOTAL APBD	**2.044.527.440.436**	**2.048.458.065.209**	**2.076.322.775.737**

Sumber : Perubahan RKPD dalam SIPD Tahun 2025

5.2 Penyusunan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025

Mendasarkan kerangka pendanaan, dijabarkan dalam rencana program prioritas daerah seluruh perangkat daerah yang kemudian dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Pada Tabel 5.2 memuat seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2023-2026 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar,18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan,2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) urusan pengawasan, serta 15 (limabelas)) unsur kewilayahan.

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan pendidikan PAUD, dan Pengelolaan pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang didukung dengan pembangunan atau Rehabilitasi sedang/berat unit sekolah baru, ruang kelas, ruang guru, serta fasilitas sekolah lainnya. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator angka partisipasi sekolah dan persentase capaian SPM Pendidikan.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar melalui penyusunan kompetensi dasar dan silabus muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal melalui penyusunan kompetensi dasar dan silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Prosentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan melalui Perhitungan, Pemetaan, serta

penataan pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase guru berkualifikasi S1/D4.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah, kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan, terselenggaranya sistem informasi kesehatan terintegrasi, serta kegiatan penerbitan izin rumah sakit kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase penyediaan jenis layanan SPM BK.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten melalui Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan, kegiatan pembinaan teknis, pengawasan praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten melalui pembinaan dan pengawasan sumberdaya manusia kesehatan dan penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten melalui Perencanaan, distribusi, pemerataan, pemenuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar Serta Pemerataan Sumber Daya

Manusia Kesehatan, Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui Peningkatan Kompetensi Teknis dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Sumber daya manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten Kota melalui Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan dan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber daya manusia kesehatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase tenaga kesehatan yang berizin.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan untuk kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) melalui pengendalian, pengawasan, penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRTP sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga melalui Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) melalui Pengendalian dan Pengawasan

serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), dan Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga melalui Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan dan Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga. Program ini dilaksanakan untuk mencapai Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berizin.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang didukung melalui Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang didukung melalui Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, dan kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang didukung melalui Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Program ini dilaksanakan guna mendukung pencapaian indikator Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam Kabupaten Batang. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase luas sawah yang beririgasi dan rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten Batang yang dilayani oleh jaringan irigasi.

b. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampang Regional

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota dari mulai penyusunan rencana, kebijakan, strategi, pembangunan, peningkatan rehabilitasi sistem pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota serta Pembinaan dan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator Persentase TPA dalam kondisi baik.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan perdesaan Kabupaten Batang. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak dan Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan pembangunan/ penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) Skala Permukiman. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah.

e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam wilayah Kabupaten Batang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air dalam kondisi baik.

f. Program Pengembangan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Kawasan Strategis Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase infrastruktur lingkungan perumahan yang layak.

g. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kabupaten Batang, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase pemanfaatan gedung yang sesuai dengan peruntukan.

h. Program Penyelenggaraan Jalan

Penyelenggaraan jalan dilaksanakan melalui : penyusunan rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan; pengelolaan leger jalan; survei kondisi jalan/ jembatan; pembangunan jalan; pelebaran jalan menuju standar; pelebaran jalan menambah lajur; rekonstruksi jalan; pemeliharaan berkala jalan;

pemeliharaan rutin jalan; pembangunan jembatan; penggantian jembatan; pelebaran jembatan; rehabilitasi jembatan; pemeliharaan rutin jembatan; dan pemeliharaan berkala jembatan. Program penyelenggaraan jalan dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam).

i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. Program ini dilakukan untuk rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.

j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten, koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah beserta dengan pemanfaatan tata ruang. Program ini dilakukan guna mencapai indikator Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Perumahan

Program pengembangan perumahan ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase RLH bagi korban bencana/ terdampak program pemerintah.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada : kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha melalui koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan

pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh; dan kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini dilaksanakan melalui penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk menunjang fungsi hunian serta koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan. Program ini dilakukan untuk memenuhi indikator persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan penanganan gangguan Trantibum Linmas; Penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota; Pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota; Pengembangan kinerja dan kapasitas Satlinmas Kabupaten/Kota. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani.

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; Penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator Persentase Korban Bencana Alam Yang ditangani.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran; Inspeksi peralatan proteksi kebakaran; Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase waktu tanggap *"response time"*.

6. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada pengembangan potensi kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator

Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemulangan warga negara migran tindak kekerasan dengan kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal. pelaksanaan program ini guna mencapai indikator persentase Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang berhasil dipulangkan.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar melalui penyediaan permakanan, Sandang, Alat Bantu, Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak, Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pemberian Layanan Data dan Pengaduan dan Pemberian Layanan Rujukan melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pengelolaan anak terlantar dan data miskin kabupaten melalui penjangkauan anak-anak terlantar dan data fakir miskin serta fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan memenuhi kebutuhan dasar bencana alam dan sosial dengan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota yang didukung dengan Penyediaan Makanan, Penyediaan Sandang, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial dan dengan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana. Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan memelihara Taman Makam Pahlawan dengan kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang didukung dengan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana, pemeliharaan, serta pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik.

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro melalui kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase Kegiatan yang mengacu RTK

b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta melalui kegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta serta pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu rasio penduduk yang bekerja

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, serta pemberi Kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya melalui kegiatan pelayanan antar kerja. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase pencari pekerja yang mendapat pekerjaan.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan dan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan. Selain itu, melalui kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan, program hubungan industrial diarahkan untuk mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu penurunan jumlah perselisihan HI.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah melalui koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG; Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG; Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan melalui sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi; Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan melalui advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan; peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase ARG pada belanja langsung APBD.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan; Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan. penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi melalui

penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan; Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan; Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak melalui pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak melalui advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak; Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga; Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak melalui pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator partisipasi angkatan kerja perempuan

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data melalui penyediaan data gender dan anak serta penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator cakupan data pilah gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelembagaan pha pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha melalui advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha; Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak; Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator cakupan kecamatan layak anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak melalui advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak; Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi melalui

penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus; Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan; Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan; Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Indikator yang hendak dicapai dengan adanya program ini adalah cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu.

3. Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

   Program ini diarahkan pada penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan, termasuk penyediaan infrastruktur lumbung pangan, penyediaan infrastruktur lantai jemur, serta penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya. program ini memiliki indikator yang akan dicapai yaitu persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah melalui penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan, penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal, pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan, pemantauan stok, pasokan dan harga pangan, dan pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia. Selain itu, program ini diarahkan pada pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten. Adapun indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah Skor Pola Pangan Harapan.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan serta penanganan kerawanan pangan. melalui penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan; koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten; pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah. Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam, penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat serta keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok. Adapun indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah rasio desa mandiri pangan.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program pengawasan keamanan pangan diarahkan untuk menjaga persentase pengawasan keamanan pangan yang merupakan indikator yang ingin dicapai dari adanya

program ini melalui kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah.

4. Pertanahan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase fasilitasi hak atas tanah program daerah dan penyelesaian permasalahan pertanahan.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) melalui penyusunan dan penetapan RPPLH serta pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten Batang. Selain itu, program ini juga diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) melalui pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang serta pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator tingkat ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Program ini dilaksanakan untuk

mencapai indikator indeks kualitas air dan indeks kualitas udara.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini dilaksanakan melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati. Program ini dilakukan untuk memenuhi indikator persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam kondisi baik.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Selain itu, program ini juga diarahkan pada kegiatan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH serta pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Program ini dilakukan untuk memenuhi indikator persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat

Program ini diarahkan untuk peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia bidang lingkungan hidup bagi lembaga kemasyarakatan dengan pelaksanaan sosialisasi terhadap komunitas peduli LH. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup.

g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penilaian sekolah peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten.

h. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada penyusunan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah melalui penyusunan masterplan persampahan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui kegiatan pasukan got, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase penanganan sampah di Kabupaten Batang.

6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk serta pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen, atas pelaporan peristiwa kependudukan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target indikator persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pencatatan sipil serta pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen, atas pelaporan peristiwa penting. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan data kependudukan serta pemanfaatan dan penyajian database kependudukan. Program ini dilakukan dengan cara pengolahan dan penyajian data kependudukan untuk mencapai indikator persentase penyajian data kependudukan yang valid.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan penataan desa yang didukung fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase budaya desa yang dilestarikan.

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa melalui kegiatan Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang didukung dengan adanya fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemdes, fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta penyelenggaraan kepala desa. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase desa yang tertib administrasi sesuai peraturan yang berlaku.

c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Desa melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten yang didukung dengan fasilitasi kelembagaan desa, penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan desa, fasilitasi tim penggerak PKK, serta fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam peningkatan PAD. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk melalui penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga (Program KKBPK); Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK); Penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal; Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal; Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur nonformal dan informal; Implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan nonformal; Pelaksanaan sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga; Pelaksanaan rapat pengendalian program KKBPK. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk melalui perumusan parameter kependudukan; Penyediaan dan pengolahan data kependudukan; penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; Membentuk rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPK di sektor lain; Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga; Pemanfaatan data hasil pemutakhiran data keluarga; Penyediaan data dan informasi keluarga; Pencatatan dan pengumpulan data keluarga; Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB; Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal; Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB); Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan

alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah; dan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator peningkatan cakupan kesertaan Ber-KB

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator Cakupan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL).

9. Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ, penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten, pengelolaan terminal penumpang tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten, pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas, persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten, peningkatan kapasitas penilai Andalalin, koordinasi dan sinkronisasi

penilaian hasil Andalalin, pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin, serta audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui pengelolaan media komunikasi publik; Layanan hubungan media; Pelayanan informasi publik; Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas; Monitoring opini dan aspirasi publik; Manajemen komunikasi krisis; dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten melalui penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah dan terselenggaranya pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah Kabupaten melalui Pengelolaan pusat data pemerintah daerah; Pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota cerdas dan kota cerdas; dan Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik. Program ini ditujukan untuk mencapai

indikator persentase jumlah layanan yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi.

11. Koperasi dan UKM

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penilaian dan Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam satu daerah Kabupaten. Melalui pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi dan penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi, program ini diarahkan untuk mencapai indikator persentase koperasi aktif.

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator persentase peserta pelatihan dengan predikat baik.

c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada monitoring, evaluasi dan pendampingan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten serta pembinaan dan pengawasan koperasi. Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase peserta diklat dengan predikat baik.

d. Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah UMKM

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro. Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase pertambahan wirausaha baru.

e. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil melalui fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi; promosi produk Usaha Kecil dan Menengah; dan monitoring, evaluasi dan pelaporan UMKM. Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase produk UMKM yang terstandarisasi.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan melalui penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal serta pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota melalui penyusunan rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten/Kota; penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota. Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA).

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota melalui penyusunan strategi promosi penanaman modal dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Batang.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program pelayanan penanaman modal diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota melalui Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan; serta Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah jumlah izin usaha yang diterbitkan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal diarahkan pada pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Indikator yang akan

dicapai dengan adanya program ini adalah persentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda melalui koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor; koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula; koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/kota; pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan; pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD tingkat Kabupaten/Kota; perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan Kabupaten/Kota; pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi; peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda; dan penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera. Selain itu, program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan juga diarahkan pada

pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha serta peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase organisasi kepemudaan yang dibina.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota; penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota; pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi; pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga; serta pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah capaian medali kejuaraan.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik; peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah; pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah; penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan di daerah Kabupaten/Kota; penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah; penyediaan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah; perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah; serta partisipasi dan

keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah penghargaan yang diterima.

14. Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan statistik adalah program penyelenggaraan statistik sektoral. Program ini diarahkan pada koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan,analisis dan diseminasi data statistik sektoral, membangun metadata statistik sektoral, pengembangan infrastruktur melalui pemeliharaan dan pengembangan sistem statistik sektoral, serta peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase ketersediaan data statistik sektoral.

15. Persandian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan persandian adalah program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Program ini diarahkan pada pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten berbasis elektronik dan non elektronik. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase capaian sistem elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kebudayaan dan kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator

peningkatan jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional serta peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional.

c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan perlindungan cagar budaya. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase benda cagar budaya yang dilestarikan.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pembinaan perpustakaan. Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota serta pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan arsip dinamis daerah, pengelolaan arsip statis daerah, serta pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan

akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota, penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan, kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota, dan kegiatan pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

B. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota; pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota; pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI); serta penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah prosentase capaian produksi perikanan tangkap.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada pemberdayaan pembudidaya ikan kecil melalui pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil dan pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha serta pengelolaan pembudidayaan ikan melalui penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam satu daerah kabupaten/kota dan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase capaian produksi perikanan budidaya.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini diarahkan pada pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air melalui pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah capaian bina kelompok masyarakat pengawas.

d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil melalui penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam satu daerah Kabupaten/Kota serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah Kabupaten/ Kota melalui peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 satu daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan

adanya program ini adalah persentase capaian tingkat konsumsi makan ikan.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata diarahkan pada pengelolaan daya tarik wisata; pengelolaan kawasan strategis pariwisata;; pengelolaan destinasi pariwisata; dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah tingkat Kabupaten/Kota. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program pemasaran pariwisata diarahkan pada pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota melalui penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata Kabupaten/Kota; penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/Kota, baik dalam dan luar negeri; peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri; monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan wisatawan.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah

melalui pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui pengembangan riset; pengembangan pendidikan; fasilitasi pendanaan dan pembiayaan; penyediaan infrastruktur; pengembangan sistem pemasaran; pemberian insentif; fasilitasi kekayaan intelektual; perlindungan hasil kreativitas; penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif; dan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase jumlah ekonomi kreatif yang memiliki HAKI.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata; pelatihan dasar sdm kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa); sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata; fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif; fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif, dan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif; dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia Usaha; Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat.

3. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengawasan penggunaan sarana pertanian melalui pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi; pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian, dan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota melalui peningkatan kualitas SDG hewan / tanaman. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ditujukan untuk mencapai target indikator produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun.

b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengembangan prasarana pertanian melalui koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya dan pembangunan prasarana pertanian melalui pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya; dan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator capaian jumlah hewan yang terobati.

d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian melalui pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian ditujukan untuk mencapai target indikator persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator jumlah asuransi usaha ternak sapi/kerbau dan calon/penerima (orang/perusahaan) pendampingan perizinan usaha peternakan

f. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada pelaksanaan penyuluhan pertanian melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa; pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa; dan pembentukan badan usaha milik petani. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator Persentase kenaikan kualitas dan kapasitas SDM Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian, Persentase validitas data Pertanian, dan Persentase kenaikan pelaksanaan Penyelenggaraan Penyuluhan

4. Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan; penerbitan tanda daftar gudang; penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri; dan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/ Kota. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator jumlah verifikasi teknis.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan melalui penyediaan sarana distribusi perdagangan dan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta pembinaan

terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya melalui pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan dan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/ Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat; Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat; Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat. Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota melalui pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota; Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan; dan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan; Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi; dan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi. Program ini

ditujukan untuk mencapai target indikator persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten/Kota; Pameran dagang nasional; Pameran dagang lokal; Misi dagang bagi produk ekspor unggulan; Peningkatan citra produk ekspor; dan pembinaan pelaku usaha ekspor. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator nilai ekspor perdagangan.

e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri

Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang; Pengawasan/penyuluhan metrologi legal. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator Persentase pelaksanaan pameran dagang dalam negeri di Kabupaten Batang.

5. Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota melalui penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan

kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat; evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan jumlah pelaku IKM.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota melalui fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/ Kota. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan jumlah perizinan berusaha sektor industri.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota melalui fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri

Kabupaten/Kota melalui SIINas; dan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase jumlah industri dalam SIINas.

6. Transmigrasi

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan transmigrasi. Program ini diarahkan pada kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota melalui pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase transmigran yang berhasil ditempatkan.

C. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan melalui penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan serta fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah, kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat melalui fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial dan masyarakat, kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum melalui fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum, serta kegiatan fasilitasi kerjasama daerah melalui fasilitasi kerja sama dalam negeri. Program ini

dilaksanakan guna mendukung pencapaian indikator Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu, Persentase Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang difasilitasi, Presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi, dan Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berhasil difasilitasi

b. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian yang didukung pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil, dan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD; kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang didukung melalui Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, dan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan; kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang didukung melalui Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; serta kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang didukung Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan dan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Energi dan Air. Program ini dilaksanakan guna pencapaian indikator Persentase Bagi Hasil BUMD terhadap APBD (Penyertaan Modal), Persentase kebijakan perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti, Persentase Pelaksanaan APBD pada SKPD yang sesuai target, dan Persentase lelang melalui e-procurement.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

Beberapa kegiatan dalam Urusan Sekretariat Daerah ada yang masuk ke dalam program penunjang. Kegiatan ini diarahkan dalam Penataan Organisasi, Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Program ini dilaksanakan guna pencapaian indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Tingkat Kematangan OPD, Persentase Kegiatan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi Kepala Daerah, Persentase layanan kebutuhan kantor yang terpenuhi, Persentase layanan kepegawaian yang terpenuhi, Persentase kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD yang diarahkan pada pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, melalui penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah, pembahasan rancangan Perda, penyelenggaraan kajian perundang-undangan, dan fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan naskah akademik. Kemudian, program juda diarahkan pada Pembahasan Kebijakan Anggaran, melalui pembahasan KUA dan PPAS. pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, pembahasan APBD, pembahasan APBD Perubahan, pembahasan Laporan Semester, dan pembahasan Pertanggungjawaban APBD. kemudian juga diarahkan pada pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, melalui pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan

hukum, pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur, pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat, pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian, pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan, pengawasan penggunaan anggaran, dan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Setelah itu program juga diarahkan pada peningkatan kapasitas dprd melalui pendalaman tugas DPRD, publikasi dan dokumentasi dewan, penyediaan tenaga ahli fraksi, penyelenggaraan hubungan masyarakat, dan penyusunan program kerja DPRD. Arahan lain dari program ini adalah pada penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, melalui kunjungan kerja dalam daerah, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, dan pelaksanaan reses. Arahan lain yaitu pada pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD, melalui pengawasan kode etik DPRD. yang terakhir program ini diarahkan pada fasilitasi tugas DPRD melalui koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah, dan fasilitasi tugas pimpinan DPRD. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peraturan daerah non APBD yang ditetapkan, persentase perda APBD yang ditetapkan, serta persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana.

D.Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, melalui Analisis Kondisi

Daerah, permasalahan, dan isu strategis Pembangunan Daerah, Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, Pelaksanaan Konsultasi Publik, Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD, Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang disusun.

Kemudian program ini juga diarahkan pada kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui: Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penyusunan Profil pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. kegiatan ini dilakukan untuk mencapai target Jumlah data dan informasi yang tersedia.

Selain itu, program ini juga diarahkan pada Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui Monitoring, evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah. kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi target Jumlah Perangkat Daerah yang sudah melaporkan evaluasi tepat waktu

Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu, persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah, serta Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia, melalui: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Kegiatan ini untuk memenuhi Jumlah laporan hasil perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

kemudian terdapat kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), melalui: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA,

serta Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai target Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Selain itu, terdapat kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, melalui: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai target Jumlah laporan hasil perencanaan bidang IPW.

Program ini dilakukan untuk mencapai target persentase indikator program prioritas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target, persentase indikator program pembangunan bidang PSDA yang mencapai target, dan persentase indikator program pembangunan bidang IPW yang mencapai target.

2. Keuangan

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, serta koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Program ini memiliki indikator yang harus dipenuhi yaitu penyampaian Raperda APBD tepat waktu.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini dilaksanakan melalui penyusunan standar harga penatausahaan barang milik daerah; pengamanan barang milik daerah; optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator tersusunnya data aset Pemerintah Daerah menurut lokasi, legalitas kepemilikan, pemanfaatan, dan kondisinya.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini dilaksanakan melalui perencanaan pengelolaan pajak daerah penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah; pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah; pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah; penetapan wajib pajak daerah; pelayanan dan konsultasi pajak daerah; penagihan pajak daerah; serta pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah. Program ini memiliki indikator yang harus dicapai yaitu persentase peningkatan penerimaan PAD, penyampaian raperda pertanggungjawaban tepat waktu, dan persentase realisasi serapan belanja terhadap anggaran belanja.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program kepegawaian daerah. Program ini diarahkan pada

kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, kegiatan mutasi dan promosi ASN, kegiatan pengembangan kompetensi ASN, dan kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengembangan sumber daya manusia. Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan kompetensi teknis serta kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Program ini diarahkan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, melalui Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, dan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan. kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi target Jumlah hasil kajian bidang pemerintahan yang mendukung perencanaan pembangunan.

Kemudian Program ini juga diarahkan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, melalui Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial dan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi

target Jumlah rekomendasi kajian bidang sosial dan kependudukan yang mendukung perencanaan pembangunan.

Selain itu, program ini juga diarahkan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan, melalui Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan dan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi target Jumlah rekomendasi kegiatan kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang mendukung perencanaan pembangunan.

Serta program ini juga diarahkan pada kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, melalui Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif, Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan, dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi target Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.

Program ini ini dilakukan untuk memenuhi target Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti.

E. Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Pengawasan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan internal melalui penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan penyelenggaraan pengawasan

dengan tujuan tertentu melalui penyediaan bahan logistik kantor. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase jumlah pemeriksaan yang dilakukan.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada pendampingan dan asistensi melalui penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD; Pengawasan kinerja pemerintah daerah; Reviu laporan kinerja; Reviu laporan keuangan; Pengawasan desa; Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP; Kerjasama pengawasan internal; Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP; Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah; Pengawasan dengan tujuan tertentu; Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah; Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi; Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi; Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan; dan Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan. program ini ditujukan untuk mencapai indikator Level SPIP.

F. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan Batang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan

untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa,

fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

2. Kecamatan Wonotunggal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

3. Kecamatan Bandar

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator

Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

4. Kecamatan Blado

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan

kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

5. Kecamatan Bawang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat

kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

6. Kecamatan Kandeman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi

pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

7. Kecamatan Tulis

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini

dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

8. Kecamatan Subah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

9. Kecamatan Pecalungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan

pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

10. Kecamatan Tersono

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini

dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

11. Kecamatan Limpung

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa.

program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

12. Kecamatan Banyuputih

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

13. Kecamatan Gringsing

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

14. Kecamatan Warungasem

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan

penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

15. Kecamatan Reban

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna

mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

G.Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan melalui Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target persentase masyarakat yang mengikuti Wasbang.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala

daerah, serta pemantauan situasi politik, melalui Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target Persentase parpol dan lembaga pendidikan yang berperan aktif mendukung pemerintah.

c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan melalui Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan.

d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, melalui Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target Persentase masyarakat yang paham ketahanan Ekososbud.

e. Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial melalui Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target Persentase penurunan konflik sosial.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase Persentase ketercapaian layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah; Persentase unit kerja internal yang terlayani; Persentase capaian kinerja Perangkat daerah yang mencapai target.

Berikut ini pagu indikatif pada setiap program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2025. Secara rinci untuk penjabaran Program beserta indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 2
Pagu Indikatif Program Pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2025 beserta Pagu Anggaran dalam RKPD 2025, APBD 2025 dan Perubahan RKPD 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			690.610.081.173	686.593.632.847	714.706.729.058	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			686.911.081.173	682.894.632.847	711.052.717.058	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			686.911.081.173	682.894.632.847	711.052.717.058	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	512.560.045.131	508.873.596.805	553.038.948.255	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.475.400.000	2.475.400.000	1.639.259.420	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	921.000.000	921.000.000	361.865.370	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	49.080.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.504.400.000	1.504.400.000	1.228.314.050	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	505.522.676.853	501.836.228.527	546.814.971.857	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1850 Orang/bulan	503.312.579.853	499.296.131.527	544.102.657.157	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.516.470.000	1.846.470.000	1.855.081.700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	50.000.000	50.000.000	189.150.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	1 Dokumen	500.000.000	500.000.000	476.956.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Akuntansi SKPD	Pelaksanaan Akuntansi SKPD					DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	15.000.000	15.000.000	52.400.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	43.627.000	43.627.000	42.627.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	85.000.000	85.000.000	96.100.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	200.000.000	200.000.000	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	626.821.000	759.245.000	1.048.117.700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	25.000.000	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	300.000.000	432.424.000	543.291.700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	150.000.000	304.825.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	11.821.000	11.821.000	10.001.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	120.000.000	120.000.000	120.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	100.000.000	100.000.000	-	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	100.000.000	100.000.000	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.124.074.278	1.760.022.278	1.521.398.278	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	392.234.278	392.234.278	418.234.278	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	234.580.000	234.580.000	234.580.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.492.260.000	1.128.208.000	863.584.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.511.073.000	1.742.701.000	1.815.201.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	585.073.000	585.073.000	580.073.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	26.000.000	26.000.000	51.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	600.000.000	600.000.000	652.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000	531.628.000	531.628.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	171.351.036.042	171.021.036.042	154.718.780.603	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	90.894.996.005	90.564.996.005	79.425.362.214	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	330.000.000	330.000.000	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	240.000.000	240.000.000	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	1.354.000.000	1.354.000.000	1.018.350.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	760.000.000	760.000.000	780.961.252	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	120.000.000	120.000.000	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	660.000.000	660.000.000	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	0 Paket	300.000.000	300.000.000	1.292.800.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5 Peserta Didik	460.000.000	460.000.000	284.684.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1 Satuan Pendidikan	17.093.596.005	16.763.596.005	14.558.106.755	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	57.383.900.000	57.383.900.000	57.457.035.713	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1 Orang	200.000.000	200.000.000	215.800.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	1.440.000.000	1.440.000.000	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	1.415.000.000	1.415.000.000	375.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	300.000.000	300.000.000	74.645.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	400.000.000	400.000.000	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang	2 Ruang	7.040.000.000	7.040.000.000	2.061.803.494	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Kelas Sekolah	Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1.398.500.000	1.398.500.000	1.106.176.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	52.249.924.021	52.249.924.021	46.575.314.148	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	299.970.000	299.970.000	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	895.000.000	895.000.000	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	2.903.286.410	2.903.286.410	1.650.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	89.991.000	89.991.000	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	388.564.000	388.564.000	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1.722.833.000	1.722.833.000	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	942.296.727	942.296.727	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket	-	-	2.016.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5 Peserta Didik	500.000.000	600.000.000	448.367.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	7.587.214.157	7.487.214.157	7.198.892.207	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	25.956.700.000	25.956.700.000	25.968.928.620	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1 Orang	250.000.000	250.000.000	214.801.571	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	200.000.000	200.000.000	100.986.250	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang	3 Ruang	8.200.000.000	8.200.000.000	8.190.614.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Bertambah					DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1.273.068.727	1.273.068.727	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1.041.000.000	1.041.000.000	436.224.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	21.620.788.416	21.620.788.416	20.799.040.341	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	1.082.975.863	962.975.863	798.229.288	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	150.000.000	150.000.000	15.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta Didik	584.200.000	334.200.000	210.900.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	16.959.612.553	16.959.612.553	16.909.138.053	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	0 0	-	250.000.000	125.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	575.000.000	1.057.030.000	545.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	802.000.000	439.970.000	594.899.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1.017.000.000	1.017.000.000	855.498.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	300.000.000	300.000.000	225.375.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	150.000.000	150.000.000	520.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	6.585.327.600	6.585.327.600	7.919.063.900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta Didik	119.316.400	119.316.400	102.533.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	5.127.504.200	5.127.504.200	7.094.030.700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	200.000.000	200.000.000	197.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Peserta Didik	200.000.000	200.000.000	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1 unit	413.507.000	413.507.000	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	0 Paket	425.000.000	425.000.000	325.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-	1.150.000.000	1.150.000.000	2.052.037.000	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-	1.150.000.000	1.150.000.000	2.052.037.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	1 Orang	450.000.000	450.000.000	852.062.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	5 Buku	700.000.000	700.000.000	1.199.974.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	1.850.000.000	1.850.000.000	1.242.951.200	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.850.000.000	1.850.000.000	1.242.951.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	1 Dokumen	1.000.000.000	1.000.000.000	719.495.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	850.000.000	850.000.000	523.455.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04.2.01.0002	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.699.000.000	3.699.000.000	3.654.012.000	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			3.699.000.000	3.699.000.000	3.654.012.000	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	800.000.000	800.000.000	607.175.000	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	200.000.000	200.000.000	142.125.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek	200.000.000	200.000.000	142.125.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	600.000.000	600.000.000	465.050.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	600.000.000	600.000.000	465.050.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-	2.392.000.000	2.392.000.000	2.580.337.000	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.392.000.000	2.392.000.000	2.580.337.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	550 Lembaga	2.392.000.000	2.392.000.000	2.580.337.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-	507.000.000	507.000.000	466.500.000	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	507.000.000	507.000.000	466.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 Objek	275.000.000	275.000.000	375.590.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	4 Objek	232.000.000	232.000.000	90.910.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	DINAS KESEHATAN			201.110.372.045	201.110.372.045	-	
2.22.05.2.02.0002	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			201.110.372.045	201.110.372.045	209.175.557.633	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			201.110.372.045	201.110.372.045	209.175.557.633	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja Dinas Kesehatan Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan cakupan layanan operasional kantor	98 98 95 94 16 92 % % % % % %	126.310.107.955	126.189.677.105	128.576.823.210	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	284.973.000	284.973.000	233.807.451	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	41.385.000	41.385.000	37.681.450	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	106.524.000	106.524.000	100.224.001	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	137.064.000	137.064.000	95.902.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah laporan Keuangan yang	2 Dokumen	123.525.316.705	123.456.127.705		DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Daerah	disusun				126.525.162.825	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	820 Orang/bulan	122.809.361.247	122.809.361.247	125.943.867.597	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	709.755.458	640.566.458	575.095.228	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.100.000	3.100.000	3.100.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.100.000	3.100.000	3.100.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SK kepegawaian yang diusulkan	14 Dokumen	25.000.000	25.000.000	17.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	25.000.000	25.000.000	17.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan yang dibeli, jumlah rapat koordinasi, jumlah arsip yang dikelola	3 Paket	599.397.250	578.927.576	326.853.409	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.500.000	20.284.400	15.236.700	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	231.397.250	221.143.176	108.441.600	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	36.500.000	36.500.000	18.346.300	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	90.000.000	90.000.000	84.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	58.500.000	58.500.000	29.250.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	3 Dokumen	2.500.000	2.500.000	-	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Disediakan					
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150.000.000	150.000.000	71.578.809	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	5 Unit	55.000.000	65.215.600	38.534.650	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	55.000.000	55.000.000	33.426.850	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	10.215.600	5.107.800	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	6 Jenis	925.653.150	899.994.074	842.032.964	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000	2.500.000	1.250.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	469.153.150	487.393.150	474.770.850	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	33.000.000	33.000.000	16.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	421.000.000	377.100.924	349.512.114	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	54 Unit	825.286.000	879.439.150	593.431.911	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	54 Unit	30.000.000	30.000.000	15.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	371.440.000	371.440.000	196.869.362	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	-	54.153.150	27.076.575	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit	372.786.000	372.786.000	328.955.974	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit	51.060.000	51.060.000	25.530.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21 Puskesmas	69.481.850	-	-	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja	69.481.850	-	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (Incidence Rate/IR) CNR semua kasus Tuberculosis/TB (Case Notification Rate/CNR) Rata-rata capaian SPM Bidang Kesehatan Angka penemuan kasus baru kusta (New Case Detection Rate/NCDR)	20 120 100 4.3 Per 100.000 Penduduk Per 100.000 Penduduk % Per 100.000 Penduduk	72.121.448.090	72.234.878.940	79.480.427.047	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	21 unit	22.243.617.564	23.976.617.564	14.786.611.921	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Paket Unit	5.716.649.000	5.716.649.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6 Unit	-	1.740.000.000	1.740.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	7.321.324.800	7.321.324.800	2.367.455.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	1.351.220.000	1.351.220.000	200.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang	1 Unit	1.482.470.400	552.008.000	200.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 Unit	60.037.950	63.839.000	6.660.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	6.261.211.514	7.176.573.514	10.263.197.571	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	4 Paket	50.703.900	55.003.250	9.299.350	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah balita stunting Jumlah Desa ODF Jumlah kasus baru kusta yang ditemukan Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue Jumlah kasus kematian balita Jumlah kasus kematian bayi Jumlah kematian ibu hamil, bersalin dan nifas Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan minimal Jumlah semua Kasus TB yang diobati dan dilaporkan (tercatat)	1.000 orang 100 balita 14 orang 160 desa/kelurahan 165 orang 21 pusk 35 orang 5.400 bayi 95 bayi	49.447.830.526	47.846.501.376	64.432.072.626	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12000 Orang	84.800.000	84.800.000	41.650.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11000 Orang	94.150.000	94.150.000	57.760.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11500 Orang	317.364.490	317.364.490	118.382.200	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58000 Orang	92.000.000	92.000.000	57.393.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121196 Orang	91.300.000	91.300.000	48.292.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	550439 Orang	41.590.750	41.590.750	23.486.375	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	109000 Orang	53.080.000	53.080.000	30.590.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	226251 Orang	15.600.000	15.600.000	7.710.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13847 Orang	1.105.226.196	1.105.226.196	19.758.771	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2114 Orang	23.900.000	23.900.000	16.125.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8000 Orang	828.675.000	828.675.000	55.635.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11000 Orang	382.675.000	406.675.000	267.337.500	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	105.000.000	105.000.000	44.375.400	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	3.925.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	22 Dokumen	5.352.269.500	5.352.269.500	151.414.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	1 Dokumen	60.000.000	60.000.000	79.927.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Olahraga					
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	4.509.216.200	2.769.216.200	610.076.600	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	236.683.000	286.633.000	119.641.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0 Dokumen	28.946.500	28.946.500	3.440.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	182.000.000	182.000.000	184.502.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	80 Orang	18.000.000	18.000.000	8.820.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2 Orang	50.000.000	50.000.000	13.975.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	1.850.551.590	1.850.551.590	310.023.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	32.210.072.500	32.210.072.500	60.195.072.400	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 Paket	62.500.000	62.500.000	38.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	226.000.000	242.720.850	256.208.180	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	100 % Unit	115.000.000	115.000.000	28.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	90.360.000	90.360.000	52.441.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 Dokumen	80.000.000	80.000.000	43.055.200	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100 % Unit	926.799.800	926.799.800	851.324.500	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	10.000.000	58.000.000	27.990.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	350 Orang	23.600.000	23.600.000	7.350.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	500 Orang	57.070.000	57.070.000	3.842.500	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	22 Dokumen	113.400.000	113.400.000	654.050.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah aplikasi yang dikelola Jumlah dokumen profil kesehatan Kab Batang	1 dok 2 aplikasi	180.000.000	161.760.000	115.891.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	180.000.000	161.760.000	115.891.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasyankes yang berijin	56 fasyankes	250.000.000	250.000.000	145.851.500	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	100 % Unit	9.000.000	9.000.000	4.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	100 % Unit	241.000.000	241.000.000	141.351.500	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang berijin Persentase tenaga kesehatan yang berijin	99.40 99,40 % %	1.541.912.000	1.541.912.000	421.336.650	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan surat ijin	170 orang 170 Orang	55.000.000	55.000.000	24.067.500	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pembinaan teknis praktek tenaga kesehatan	690 orang 690 Orang				
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	5.297.500	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	40.000.000	40.000.000	18.770.000	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDMK	1 dokumen 1 Dokumen	245.345.000	245.345.000	144.368.400	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	9.399.000	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2500 Orang	78.000.000	78.000.000	47.911.400	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	147.345.000	147.345.000	87.058.000	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nakes yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi	40 nakes 40 Nakes	1.241.567.000	1.241.567.000	252.900.750	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	40 Orang	1.241.567.000	1.241.567.000	252.900.750	DINAS KESEHATAN
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin	100 %	639.604.000	646.604.000	424.570.426	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Jumlah Apotek yang berijin Jumlah Toko Alat Kesehatan dan Optikal yang berijin	13 Toko alkes/optikas 13 Toko Alkes /	112.443.000	112.443.000	91.153.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	(UMOT)	Jumlah Toko Obat yang berijin	Optikas 4 Toko obat 4 Toko Obat 74 apotek 74 Apotik				
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	106 Dokumen	112.443.000	112.443.000	91.153.000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang mendapatkan sertifikat Jumlah PIRT yang mendapatkat sertifikat	220 sertifikat 220 Sertifikat	149.369.000	149.369.000	112.236.500	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 Dokumen	149.369.000	149.369.000	112.236.500	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan	460 TPM	111.543.000	111.543.000	16.354.400	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	111.543.000	111.543.000	16.354.400	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah hasil pengujian laboratorium PIRT tidak mengandung bahan berbahaya Jumlah hasil pengujian laboratorium PIRT tidak mengandung bahan berbahaya.	33 PIRT	266.249.000	273.249.000	204.826.526	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	266.249.000	273.249.000	204.826.526	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	12,74 %	497.300.000	497.300.000	272.400.300	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa siaga aktif strata mandiri	35 desa	92.100.000	92.100.000	41.388.800	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	92.100.000	92.100.000	41.388.800	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tatanan PHBS yang dipetakan	2 dokumen	230.000.000	230.000.000	139.049.900	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	230.000.000	230.000.000	139.049.900	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	700 Posyandu	175.200.000	175.200.000	91.961.600	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	175.200.000	175.200.000	91.961.600	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS WONOTUNGGAL			2.862.552.053	2.862.552.053	3.146.929.201	
1.02.05.2.03.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB			2.862.552.053	2.862.552.053	3.146.929.201	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.862.552.053	2.862.552.053	3.146.929.201	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.187.189.053	2.187.189.053	2.349.179.201	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.187.189.053	2.187.189.053	2.349.179.201	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	2.187.189.053	2.187.189.053	2.349.179.201	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	630.262.000	630.262.000	792.233.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	630.262.000	630.262.000	792.233.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang	62.100.000	62.100.000	117.900.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	8.020.000	8.020.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	15.800.000	15.800.000	17.250.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	84 Orang	-	-	4.200.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15 Orang	7.850.000	7.850.000	6.600.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15 Orang	4.500.000	4.500.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	125 Dokumen	173.063.000	173.063.000	314.014.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	72 Dokumen	-	-	3.600.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Kerja dan Olahraga	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15 Dokumen	7.000.000	7.000.000	7.100.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20 Dokumen	18.680.000	18.680.000	9.800.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	88 Orang	-	-	4.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	30 Dokumen	97.200.000	97.200.000	117.065.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	30 Dokumen	120.569.000	120.569.000	171.962.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24 Laporan	1.200.000	1.200.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	250 Orang	16.800.000	16.800.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	4.200.000	4.200.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	30 Dokumen	6.830.000	6.830.000	6.342.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	30 Dokumen	86.450.000	86.450.000	1.200.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	216 Dokumen	-	-	10.800.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	45.101.000	45.101.000	5.517.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	-	-	45.101.000	45.101.000	5.517.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Kabupaten/Kota						
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	30 Dokumen	45.101.000	45.101.000	5.517.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS BANDAR 1			4.139.432.000	4.139.432.000	5.451.818.686	
1.02.05.2.03.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.139.432.000	4.139.432.000	5.451.818.686	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.139.432.000	4.139.432.000	5.451.818.686	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.405.500.000	3.405.500.000	4.539.023.386	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.405.500.000	3.405.500.000	4.539.023.386	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	3.405.500.000	3.405.500.000	4.539.023.386	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	72.121.448.090	72.234.878.940	909.642.000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	22.243.617.564	23.976.617.564	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0 Unit	-	-	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	664.632.000	664.632.000	909.642.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	44.400.000	44.400.000	139.680.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	24.825.000	24.825.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	20.700.000	20.700.000	23.800.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	-	-	1.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	1.600.000	1.600.000	1.600.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	3.750.000	3.750.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	182.440.000	182.440.000	358.978.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	-	1.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	5.000.000	5.000.000	3.050.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	13.075.000	13.075.000	2.750.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	-	-	1.200.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	120.913.000	120.913.000	153.436.300	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	131.029.000	131.029.000	198.503.700	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	600.000	600.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	1.600.000	1.600.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	500.000	500.000	-	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	39.600.000	39.600.000	22.294.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	74.600.000	74.600.000	750.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	-	-	1.100.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	69.300.000	69.300.000	3.153.300	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	69.300.000	69.300.000	3.153.300	DINAS KESEHATAN
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	69.300.000	69.300.000		DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS BANDAR 2			1.684.885.000	1.684.885.000	1.839.663.983	
1.02.05.2.03.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.684.885.000	1.684.885.000	1.839.663.983	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.684.885.000	1.684.885.000	1.839.663.983	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.131.900.000	1.131.900.000	1.186.483.283	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.131.900.000	1.131.900.000	1.186.483.283	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	1.131.900.000	1.131.900.000	1.186.483.283	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	512.470.000	512.470.000	649.548.300	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	512.470.000	512.470.000	649.548.300	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan	0 Orang	31.440.000	31.440.000	49.727.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	14.225.000	14.225.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	30.000.000	30.000.000	24.700.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	-	-	9.200.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	3.200.000	3.200.000	9.800.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	1.800.000	1.800.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	177.710.000	177.710.000	274.884.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	-	-	6.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	15.600.000	15.600.000	11.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	26.400.000	26.400.000	14.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	-	-	7.200.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	47.400.000	47.400.000	79.492.700	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	98.730.000	98.730.000	141.954.600	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian	0 Laporan	3.400.000	3.400.000	-	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Massal)	Obat Massal)					
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	3.300.000	3.300.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	1.800.000	1.800.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	18.225.000	18.225.000	11.790.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	39.240.000	39.240.000	100.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0 Dokumen	-	-	8.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	40.515.000	40.515.000	3.632.400	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	40.515.000	40.515.000	3.632.400	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	40.515.000	40.515.000	3.632.400	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS BLADO 1			2.666.703.000	2.666.703.000	3.370.268.020	
1.02.05.2.03.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.666.703.000	2.666.703.000	3.370.268.020	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.666.703.000	2.666.703.000	3.370.268.020	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.113.260.000	2.113.260.000	2.690.525.020	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.113.260.000	2.113.260.000	2.690.525.020	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.113.260.000	2.113.260.000	2.690.525.020	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	519.468.000	519.468.000	677.543.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	519.468.000	519.468.000	677.543.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	24.840.000	24.840.000	74.520.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10 Orang	9.450.000	9.450.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	33.900.000	33.900.000	15.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	16 Orang	-	-	9.600.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	6.000.000	6.000.000	2.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	1.500.000	1.500.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10 Dokumen	142.572.000	142.572.000	293.980.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10 Dokumen	-	-	2.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 Dokumen	12.000.000	12.000.000	7.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	39.675.000	39.675.000	15.912.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	-	-	8.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	12 Dokumen	88.200.000	88.200.000	94.860.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Menular dan Tidak Menular	Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	98.801.000	98.801.000	148.947.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10 Laporan	1.200.000	1.200.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	6.000.000	6.000.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	1.200.000	1.200.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	24 Dokumen	7.350.000	7.350.000	2.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	100 Dokumen	46.780.000	46.780.000	624.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	-	-	1.800.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	33.975.000	33.975.000	2.200.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	33.975.000	33.975.000	2.200.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	33.975.000	33.975.000	2.200.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS BLADO 2			1.710.541.000	1.710.541.000	1.790.866.131	
1.02.05.2.03.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.710.541.000	1.710.541.000	1.790.866.131	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			1.710.541.000	1.710.541.000	1.790.866.131	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	KESEHATAN						
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.124.700.000	1.124.700.000	1.191.982.631	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.124.700.000	1.124.700.000	1.191.982.631	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Bulan Unit Kerja	1.124.700.000	1.124.700.000	1.191.982.631	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	534.341.000	534.341.000	598.587.800	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	534.341.000	534.341.000	598.587.800	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	6.600.000	6.600.000	86.790.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	17.695.000	17.695.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan Orang	12.000.000	12.000.000	3.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 % Orang	-	-	1.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Bulan Orang	1.800.000	1.800.000	400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Bulan Orang	6.900.000	6.900.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	217.986.000	217.986.000	219.367.300	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 % Dokumen	-	-	250.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 Bulan	36.000.000	36.000.000	6.600.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Lingkungan	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen				
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Bulan Dokumen	34.800.000	34.800.000	1.050.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 % Orang	-	-	2.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	24.603.000	24.603.000	97.474.100	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	124.457.000	124.457.000	132.013.600	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	1.100.000	1.100.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Bulan Orang	1.800.000	1.800.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Bulan Orang	1.100.000	1.100.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Bulan Dokumen	36.300.000	36.300.000	41.592.800	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Bulan Dokumen	11.200.000	11.200.000	150.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	100 % Dokumen	-	-	6.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	51.500.000	51.500.000	295.700	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	51.500.000	51.500.000	295.700	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya	12 Bulan Dokumen	51.500.000	51.500.000	295.700	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
	PUSKESMAS REBAN			3.374.446.000	3.374.446.000	3.884.496.152	
1.02.05.2.03.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.374.446.000	3.374.446.000	3.884.496.152	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.374.446.000	3.374.446.000	3.884.496.152	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.590.749.000	2.590.749.000	3.059.421.152	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.590.749.000	2.590.749.000	3.059.421.152	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	2.590.749.000	2.590.749.000	3.059.421.152	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	749.572.000	749.572.000	817.287.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	749.572.000	749.572.000	817.287.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	78.660.000	78.660.000	140.600.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	2.760.000	2.760.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4867 Orang	24.500.000	24.500.000	23.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	18 Orang	-	-	5.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	446 Orang	4.800.000	4.800.000	4.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	0 Orang	4.800.000	4.800.000	-	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Standar					
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	201.037.000	201.037.000	321.886.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	-	-	1.100.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	4.050.000	4.050.000	8.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	19.760.000	19.760.000	10.550.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	-	-	2.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	160.226.000	160.226.000	122.830.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	139.909.000	139.909.000	174.218.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	800.000	800.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	4.800.000	4.800.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	1.310.000	1.310.000	1.200.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	102.160.000	102.160.000	603.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	10 Dokumen	-	-	1.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	34.125.000	34.125.000	7.788.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	-	-	34.125.000	34.125.000	7.788.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	34.125.000	34.125.000	7.788.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS BAWANG			4.651.489.250	4.651.489.250	5.375.691.758	
1.02.05.2.03.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.651.489.250	4.651.489.250	5.375.691.758	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.651.489.250	4.651.489.250	5.375.691.758	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.854.891.250	3.854.891.250	4.468.595.258	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.854.891.250	3.854.891.250	4.468.595.258	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	3.854.891.250	3.854.891.250	4.468.595.258	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	768.878.000	768.878.000	903.521.200	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	768.878.000	768.878.000	903.521.200	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	60.800.000	60.800.000	128.340.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	3.375.000	3.375.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	47.200.000	47.200.000	49.800.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	-	-	7.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita	0 Orang	20.000.000	20.000.000	13.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Orang Terduga Tuberkulosis	Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	1.500.000	1.500.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	203.466.000	203.466.000	353.019.700	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	-	-	1.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	9.200.000	9.200.000	7.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	28.200.000	28.200.000	11.750.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	-	-	2.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	127.700.000	127.700.000	128.081.900	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	193.847.000	193.847.000	197.024.400	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	2.000.000	2.000.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	10.000.000	10.000.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	3.000.000	3.000.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	3.750.000	3.750.000	2.505.200	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	54.840.000	54.840.000	700.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0 Dokumen	-	-	1.800.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	27.720.000	27.720.000	3.575.300	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	27.720.000	27.720.000	3.575.300	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	27.720.000	27.720.000	3.575.300	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS TERSONO			2.819.261.000	2.819.261.000	4.202.755.011	
1.02.05.2.03.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.819.261.000	2.819.261.000	4.202.755.011	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.819.261.000	2.819.261.000	4.202.755.011	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.078.274.000	2.078.274.000	3.409.444.011	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.078.274.000	2.078.274.000	3.409.444.011	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.078.274.000	2.078.274.000	3.409.444.011	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	716.737.000	716.737.000	781.613.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	716.737.000	716.737.000	781.613.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	30.400.000	30.400.000	104.518.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	6.520.000	6.520.000	-	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	24.200.000	24.200.000	29.250.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	-	-	6.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	11.600.000	11.600.000	10.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	1.500.000	1.500.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	200.645.000	200.645.000	327.610.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	-	3.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	7.000.000	7.000.000	8.200.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	11.190.000	11.190.000	5.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	-	-	2.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	130.222.000	130.222.000	116.183.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	188.135.000	188.135.000	163.802.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50 Orang	9.600.000	9.600.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	600.000	600.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	4.725.000	4.725.000	2.400.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Reproduksi	pelayanan kesehatan reproduksi					
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	90.400.000	90.400.000	750.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	-	-	2.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	24.250.000	24.250.000	11.698.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	24.250.000	24.250.000	11.698.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	24.250.000	24.250.000	11.698.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS GRINGSING 1			3.303.207.500	3.303.207.500	4.180.815.932	
1.02.05.2.03.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.303.207.500	3.303.207.500	4.180.815.932	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.303.207.500	3.303.207.500	4.180.815.932	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.750.100.500	2.750.100.500	3.296.845.932	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.750.100.500	2.750.100.500	3.296.845.932	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.750.100.500	2.750.100.500	3.296.845.932	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	476.982.000	476.982.000	882.853.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	476.982.000	476.982.000	882.853.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	39.200.000	39.200.000	124.200.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	6.375.000	6.375.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	38.500.000	38.500.000	34.200.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	-	-	3.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	4.000.000	4.000.000	4.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	750.000	750.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	135.604.000	135.604.000	360.264.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	-	-	750.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	6.000.000	6.000.000	8.100.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	23.120.000	23.120.000	5.057.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	-	-	4.600.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	57.600.000	57.600.000	138.100.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	98.743.000	98.743.000	194.881.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	1.000.000	1.000.000	-	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	2.500.000	2.500.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	1.000.000	1.000.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	5.240.000	5.240.000	2.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	57.350.000	57.350.000	1.001.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0 Dokumen	-	-	1.800.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	76.125.000	76.125.000	1.117.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	76.125.000	76.125.000	1.117.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	76.125.000	76.125.000	1.117.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS GRINGSING 2			1.493.009.500	1.493.009.500	1.750.175.293	
1.02.05.2.03.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.493.009.500	1.493.009.500	1.750.175.293	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.493.009.500	1.493.009.500	1.750.175.293	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	939.429.500	939.429.500	1.132.784.043	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	939.429.500	939.429.500	1.132.784.043	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	939.429.500	939.429.500	1.132.784.043	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	-	510.530.000	510.530.000	614.913.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	510.530.000	510.530.000	614.913.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	26.200.000	26.200.000	41.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	23.925.000	23.925.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	11.600.000	11.600.000	15.200.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	-	-	4.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	3.500.000	3.500.000	4.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	300.000	300.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	148.849.000	148.849.000	273.653.850	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	-	-	5.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	14.000.000	14.000.000	5.600.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	41.725.000	41.725.000	7.800.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	-	-	7.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	0 Dokumen	84.855.000	84.855.000	90.985.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Menular					
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	98.826.000	98.826.000	134.214.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	1.400.000	1.400.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	3.500.000	3.500.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	500.000	500.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	10.550.000	10.550.000	18.660.150	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	40.800.000	40.800.000	500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0 Dokumen	-	-	6.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	43.050.000	43.050.000	2.478.250	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	43.050.000	43.050.000	2.478.250	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	43.050.000	43.050.000	2.478.250	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS LIMPUNG			3.057.689.300	3.057.689.300	3.420.570.202	
1.02.05.2.03.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.057.689.300	3.057.689.300	3.420.570.202	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.057.689.300	3.057.689.300	3.420.570.202	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.256.187.300	2.256.187.300	2.566.327.202	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.256.187.300	2.256.187.300	2.566.327.202	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Bulan Unit Kerja	2.256.187.300	2.256.187.300	2.566.327.202	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	728.677.000	728.677.000	847.639.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	728.677.000	728.677.000	847.639.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1768 Orang	62.640.000	62.640.000	110.840.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	37.250.000	37.250.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	21.050.000	21.050.000	24.950.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	13 Orang	-	-	1.300.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	2.750.000	2.750.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	204.857.000	204.857.000	370.224.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7 Dokumen	-	-	700.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	11.500.000	11.500.000	9.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	31.235.000	31.235.000	12.819.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah	100 Orang	-	-	2.600.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	125.047.000	125.047.000	124.900.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	143.088.000	143.088.000	181.837.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	2.000.000	2.000.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	3.400.000	3.400.000	3.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	4.580.000	4.580.000	2.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	79.280.000	79.280.000	1.069.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	17 Dokumen	-	-	1.200.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	72.825.000	72.825.000	6.604.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	72.825.000	72.825.000	6.604.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	72.825.000	72.825.000	6.604.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS SUBAH			3.983.797.000	3.983.797.000	5.002.221.311	
1.02.05.2.03.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.983.797.000	3.983.797.000	5.002.221.311	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			3.983.797.000	3.983.797.000	5.002.221.311	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	KESEHATAN						
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.339.650.000	3.339.650.000	4.036.566.311	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.339.650.000	3.339.650.000	4.036.566.311	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	3.339.650.000	3.339.650.000	4.036.566.311	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	580.517.000	580.517.000	961.734.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	580.517.000	580.517.000	961.734.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	21.280.000	21.280.000	113.780.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	13.980.000	13.980.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	39.400.000	39.400.000	34.300.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	-	-	3.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	1.500.000	1.500.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	300.000	300.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	179.513.000	179.513.000	420.826.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	-	-	750.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	15.000.000	15.000.000	12.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Lingkungan	Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	20.990.000	20.990.000	9.330.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	-	-	2.800.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	92.418.000	92.418.000	144.820.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	114.996.000	114.996.000	211.646.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	1.700.000	1.700.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	1.500.000	1.500.000	4.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	500.000	500.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	13.860.000	13.860.000	2.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	63.580.000	63.580.000	882.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0 Dokumen	-	-	1.200.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	63.630.000	63.630.000	3.921.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	63.630.000	63.630.000	3.921.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya	0 Dokumen	63.630.000	63.630.000	3.921.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
	PUSKESMAS TULIS			2.731.067.035	2.731.067.035	3.364.558.105	
1.02.05.2.03.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.731.067.035	2.731.067.035	3.364.558.105	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.731.067.035	2.731.067.035	3.364.558.105	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.999.153.035	1.999.153.035	2.555.878.105	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.999.153.035	1.999.153.035	2.555.878.105	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja	1.999.153.035	1.999.153.035	2.555.878.105	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	670.216.000	670.216.000	798.547.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	670.216.000	670.216.000	798.547.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	140 Orang	58.820.000	58.820.000	137.037.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165 Orang	11.540.000	11.540.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	93 Orang	17.050.000	17.050.000	11.200.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3656 Orang	-	-	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	106 Orang	-	-	4.200.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	18 Orang	3.600.000	3.600.000	2.800.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Pelayanan Sesuai Standar					
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	30 Orang	2.250.000	2.250.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	61 Dokumen	175.557.000	175.557.000	311.263.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	170 Dokumen	-	-	8.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	74 Dokumen	9.100.000	9.100.000	8.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60 Dokumen	34.580.000	34.580.000	10.550.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	91 Orang	-	-	6.800.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen	74.898.000	74.898.000	120.741.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen	168.586.000	168.586.000	171.656.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	3.000.000	3.000.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18 Orang	3.600.000	3.600.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	24 Orang	1.200.000	1.200.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	6 Dokumen	9.970.000	9.970.000	3.900.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	96.465.000	96.465.000	300.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	3342 Dokumen	-	-	1.200.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Kelanjutusiaan	pelayanan kelanjutusiaan					
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	61.698.000	61.698.000	10.133.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	61.698.000	61.698.000	10.133.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	61.698.000	61.698.000	10.133.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS BATANG 1			1.864.285.850	1.864.285.850	2.267.713.499	
1.02.05.2.03.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.864.285.850	1.864.285.850	2.267.713.499	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.864.285.850	1.864.285.850	2.267.713.499	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.288.159.600	1.288.159.600	1.610.397.499	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.288.159.600	1.288.159.600	1.610.397.499	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	1.288.159.600	1.288.159.600	1.610.397.499	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	545.194.250	545.194.250	651.347.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	541.763.000	541.763.000	651.347.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	20.600.000	20.600.000	57.960.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	17.150.000	17.150.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	0 Orang	28.800.000	28.800.000	20.400.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	pada Usia Pendidikan Dasar	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	-	-	12.300.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	14.500.000	14.500.000	8.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	4.500.000	4.500.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	142.888.000	142.888.000	282.452.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	-	-	700.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	7.600.000	7.600.000	10.600.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	31.000.000	31.000.000	11.550.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	-	-	4.600.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	70.800.000	70.800.000	84.926.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	98.595.000	98.595.000	141.099.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	20.020.000	20.020.000	4.223.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	1.500.000	1.500.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis	0 Orang	4.000.000	4.000.000	-	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	orang dengan Tuberkulosis	yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	12.600.000	12.600.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	3.410.000	3.410.000	2.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	63.800.000	63.800.000	1.137.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0 Dokumen	-	-	9.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	3.431.250	3.431.250	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	3.431.250	3.431.250	-	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	30.932.000	30.932.000	5.969.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	30.932.000	30.932.000	5.969.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	30.932.000	30.932.000	5.969.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS BATANG 2			2.027.335.250	2.027.335.250	2.318.599.000	
1.02.05.2.03.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.027.335.250	2.027.335.250	2.318.599.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.027.335.250	2.027.335.250	2.318.599.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.357.620.000	1.357.620.000	1.628.620.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.357.620.000	1.357.620.000	1.628.620.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.357.620.000	1.357.620.000	1.628.620.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	584.515.250	584.515.250	685.135.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	584.515.250	584.515.250	685.135.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	28.800.000	28.800.000	41.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	19.300.000	19.300.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	28.800.000	28.800.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	15.800.000	15.800.000	20.700.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang	-	-	6.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	4.800.000	4.800.000	4.800.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	10.000.000	10.000.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	203.993.000	203.993.000	292.605.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	27 Instansi Dokumen	-	-	7.550.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	4.000.000	4.000.000	4.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	15.099.000	15.099.000	12.711.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	23 Instansi Orang	-	-	6.900.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	59.622.000	59.622.000	97.395.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	138.601.250	138.601.250	146.019.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	-	-	15.150.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	5.100.000	5.100.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	4.800.000	4.800.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	3.200.000	3.200.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	12.400.000	12.400.000	27.360.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	30.200.000	30.200.000	1.345.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0 Dokumen	-	-	1.200.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	85.200.000	85.200.000	4.844.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	85.200.000	85.200.000	4.844.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	1 Dokumen	85.200.000	85.200.000	4.844.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Masyarakat (UKBM)	Masyarakat (UKBM)					
	PUSKESMAS BATANG 3			2.210.735.250	2.210.735.250	2.471.803.984	
1.02.05.2.03.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.210.735.250	2.210.735.250	2.471.803.984	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.210.735.250	2.210.735.250	2.471.803.984	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.468.580.000	1.468.580.000	1.737.167.984	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.468.580.000	1.468.580.000	1.737.167.984	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.468.580.000	1.468.580.000	1.737.167.984	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	616.155.250	616.155.250	731.006.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	616.155.250	616.155.250	731.006.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	25.900.000	25.900.000	51.800.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	56.220.000	56.220.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	25.000.000	25.000.000	25.700.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	-	-	9.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	6.000.000	6.000.000	4.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	1.950.000	1.950.000	-	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	154.629.000	154.629.000	336.812.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	-	2.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	8.400.000	8.400.000	8.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	14.425.000	14.425.000	17.069.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	-	-	6.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	70.200.000	70.200.000	99.875.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	164.819.250	164.819.250	158.926.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	600.000	600.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	4.800.000	4.800.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	500.000	500.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	6.612.000	6.612.000	7.200.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 0	75.200.000	75.200.000	1.824.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	-	-	1.800.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	0 Dokumen	900.000	900.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	126.000.000	126.000.000	3.630.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	126.000.000	126.000.000	3.630.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	126.000.000	126.000.000	3.630.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS BATANG 4			2.026.417.250	2.026.417.250	2.227.750.289	
1.02.05.2.03.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.026.417.250	2.026.417.250	2.227.750.289	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.026.417.250	2.026.417.250	2.227.750.289	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.388.350.000	1.388.350.000	1.579.170.289	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.388.350.000	1.388.350.000	1.579.170.289	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.388.350.000	1.388.350.000	1.579.170.289	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	579.162.250	579.162.250	641.530.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	574.927.000	574.927.000	641.530.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	41.400.000	41.400.000	78.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	10.150.000	10.150.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	15.200.000	15.200.000	12.100.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	-	-	3.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	5.000.000	5.000.000	8.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	750.000	750.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	169.669.000	169.669.000	275.621.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	-	4.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	7.000.000	7.000.000	6.700.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	17.900.000	17.900.000	3.681.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	-	-	8.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	92.242.000	92.242.000	95.900.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	105.551.000	105.551.000	137.023.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	23.165.000	23.165.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	1.000.000	1.000.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	3.000.000	3.000.000	-	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	1.000.000	1.000.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	6.500.000	6.500.000	6.900.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	75.400.000	75.400.000	1.005.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	-	-	1.200.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	4.235.250	4.235.250	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	4.235.250	4.235.250	-	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	58.905.000	58.905.000	7.050.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	58.905.000	58.905.000	7.050.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	58.905.000	58.905.000	7.050.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS WARUNGASEM			3.035.988.000	3.035.988.000	4.118.429.768	
1.02.05.2.03.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.035.988.000	3.035.988.000	4.118.429.768	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.035.988.000	3.035.988.000	4.118.429.768	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.176.500.000	2.176.500.000	3.115.148.068	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.176.500.000	2.176.500.000	3.115.148.068	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.176.500.000	2.176.500.000	3.115.148.068	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	781.258.000	781.258.000	999.911.700	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	781.258.000	781.258.000	999.911.700	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	58.680.000	58.680.000	133.200.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	12.800.000	12.800.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	-	-	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	23.200.000	23.200.000	28.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	-	-	4.700.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	3.600.000	3.600.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	215.798.000	215.798.000	415.569.650	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	-	-	2.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	6.000.000	6.000.000	6.200.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	26.610.000	26.610.000	4.700.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan	0 Orang	-	-	3.600.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Jiwa (ODMK)	Pelayanan Kesehatan					
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	132.700.000	132.700.000	160.879.800	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	153.440.000	153.440.000	218.947.700	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1.000.000	1.000.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	5.000.000	5.000.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	6.750.000	6.750.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000	12.114.550	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	126.680.000	126.680.000	1.700.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0 Dokumen	-	-	2.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	78.230.000	78.230.000	3.370.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	78.230.000	78.230.000	3.370.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	78.230.000	78.230.000	3.370.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS KANDEMAN			3.212.770.000	3.212.770.000	3.868.642.140	
1.02.05.2.03.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN			3.212.770.000	3.212.770.000	3.868.642.140	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	PELAYANAN DASAR						
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.212.770.000	3.212.770.000	3.868.642.140	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.460.800.000	2.460.800.000	2.910.264.090	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.460.800.000	2.460.800.000	2.910.264.090	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.460.800.000	2.460.800.000	2.910.264.090	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	688.966.000	688.966.000	950.426.850	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	684.428.000	684.428.000	950.426.850	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	885 Orang	56.680.000	56.680.000	152.921.300	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	5.315.000	5.315.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.192 Orang	31.200.000	31.200.000	31.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	-	-	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	26 Orang	-	-	5.200.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	513 Orang	11.400.000	11.400.000	11.100.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	2.000.000	2.000.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	189.747.400	189.747.400	371.746.500	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Gizi Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	-	-	500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80 Dokumen	10.600.000	10.600.000	8.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	25.900.000	25.900.000	20.404.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	-	-	8.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	102.750.000	102.750.000	129.364.200	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	129.255.600	129.255.600	206.060.850	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	5.100.000	5.100.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	8.000.000	8.000.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	4.000.000	4.000.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	24 Dokumen	20.000.000	20.000.000	2.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	13 Dokumen	82.480.000	82.480.000	1.430.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	-	-	1.800.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	4.538.000	4.538.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	4.538.000	4.538.000	-	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	63.004.000	63.004.000	7.951.200	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	63.004.000	63.004.000	7.951.200	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	63.004.000	63.004.000	7.951.200	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS PECALUNGAN			2.588.828.000	2.588.828.000	2.992.306.099	
1.02.05.2.03.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.588.828.000	2.588.828.000	2.992.306.099	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.588.828.000	2.588.828.000	2.992.306.099	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.929.500.000	1.929.500.000	2.277.336.099	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.929.500.000	1.929.500.000	2.277.336.099	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.929.500.000	1.929.500.000	2.277.336.099	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	592.199.000	592.199.000	711.846.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	592.199.000	592.199.000	711.846.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13200 Orang	52.400.000	52.400.000	82.800.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13000 Orang	34.700.000	34.700.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	0 Orang	24.800.000	24.800.000	23.600.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Kesehatan Sesuai Standar					
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	12 Orang	-	-	3.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	8.000.000	8.000.000	7.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	750.000	750.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	168.336.000	168.336.000	308.307.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	-	-	1.800.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	7.500.000	7.500.000	7.100.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	19.607.000	19.607.000	10.489.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	-	-	2.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	96.150.000	96.150.000	101.390.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	117.706.000	117.706.000	154.694.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	200.000	200.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	2.500.000	2.500.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan	0 Orang	1.200.000	1.200.000	-	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		kesehatan sesuai standar					
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	7.630.000	7.630.000	2.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	50.720.000	50.720.000	666.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	-	-	6.600.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	67.129.000	67.129.000	3.124.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	67.129.000	67.129.000	3.124.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	67.129.000	67.129.000	3.124.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS BANYUPUTIH			2.089.291.000	2.089.291.000	2.457.207.039	
1.02.05.2.03.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.089.291.000	2.089.291.000	2.457.207.039	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.089.291.000	2.089.291.000	2.457.207.039	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja Dinas Kesehatan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan cakupan layanan operasional kantor Persentase rata-rata capaian kinerja	98 16 94 95 92 98 % % % % % %	1.466.520.000	1.466.520.000	1.731.594.039	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		program Perangkat Daerah					
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21 Puskesmas	1.466.520.000	1.466.520.000	1.731.594.039	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.466.520.000	1.466.520.000	1.731.594.039	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	621.271.000	621.271.000	716.353.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	621.271.000	621.271.000	716.353.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	497 Orang	40.440.000	40.440.000	91.080.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	471 Orang	3.060.000	3.060.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	468 Orang	33.440.000	33.440.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5474 Orang	32.415.000	32.415.000	19.350.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24418 Orang	6.640.000	6.640.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	-	-	4.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	394 Orang	12.500.000	12.500.000	13.300.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	12.000.000	12.000.000	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	198.031.000	198.031.000	292.952.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	-	-	6.185.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Kerja dan Olahraga	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20 Dokumen	22.200.000	22.200.000	6.100.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25 Dokumen	17.070.000	17.070.000	17.700.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	-	-	3.900.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen	64.600.000	64.600.000	90.754.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	10 Dokumen	158.875.000	158.875.000	151.906.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	10 Dokumen	-	-	11.376.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2061 Dokumen	20.000.000	20.000.000	1.750.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	-	-	6.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	1.500.000	1.500.000	9.260.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.500.000	1.500.000	9.260.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1.500.000	1.500.000	9.260.000	DINAS KESEHATAN
	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.			1.980.000.000	1.980.000.000	2.246.924.799	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.980.000.000	1.980.000.000	2.246.924.799	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.980.000.000	1.980.000.000	2.246.924.799	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.980.000.000	1.980.000.000	2.246.924.799	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.980.000.000	1.980.000.000	2.246.924.799	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.980.000.000	1.980.000.000	2.246.924.799	DINAS KESEHATAN
	RSUD BATANG PEMKAB BATANG			70.902.183.000	71.652.183.000	81.866.153.404	
1.02.01.2.10.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			70.902.183.000	71.652.183.000	81.866.153.404	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			70.902.183.000	71.652.183.000	81.866.153.404	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	340 Orang/bulan	-	-	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar / Jumlah gedung, sarana dan prasarana yang diadakan /jumlah gedung yang dibangun	88 %	70.897.183.000	71.647.183.000	81.863.653.404	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan pengadaan sarana, prasarana dan alat sesuai standart untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit	100 %	900.000.000	900.000.000	3.374.211.800	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	4 Unit	500.000.000	500.000.000	650.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	400.000.000	400.000.000	2.724.211.800	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	100 %	69.997.183.000	70.747.183.000	78.489.441.604	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	69.997.183.000	70.747.183.000	78.489.441.604	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	100 %	5.000.000	5.000.000	2.500.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	100 %	5.000.000	5.000.000	2.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	20 Orang	5.000.000	5.000.000	2.500.000	DINAS KESEHATAN
	RSUD LIMPUNG			17.937.000.000	18.987.000.000	23.552.968.999	
1.02.03.2.03.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.937.000.000	18.987.000.000	23.552.968.999	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			17.937.000.000	18.987.000.000	23.552.968.999	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penyediaan jenis layanan SPM Bidang Kesehatan	100 %	17.932.000.000	18.982.000.000	23.550.468.999	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana Rumah Sakit	100 %	900.000.000	900.000.000	1.329.913.395	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 Unit	500.000.000	500.000.000	500.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang	10 Unit	400.000.000	400.000.000	829.913.395	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit	100 %	17.032.000.000	18.082.000.000	22.220.555.604	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2 Dokumen	17.032.000.000	18.082.000.000	22.220.555.604	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	100 %	5.000.000	5.000.000	2.500.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	100 %	5.000.000	5.000.000	2.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	20 Orang	5.000.000	5.000.000	2.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03.0001	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			105.370.283.450	109.612.889.450		
1.02.03.2.03.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			105.370.283.450	109.612.889.450	106.537.468.596	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			105.370.283.450	109.612.889.450	106.537.468.596	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN DPUPR yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan Persentase capaian kinerja program DPUPR persentase capaian kinerja anggaran	83,98 100 15,3 93,44 94,1 % % % % %	17.621.355.147	17.308.473.775	13.892.882.421	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		program/kegiatan DPUPR					
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	30.596.000	30.596.000	15.298.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	30.596.000	30.596.000	15.298.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah dokumen penatausahaan verifikasi keuangan SKPD	1 Tahun	13.132.767.255	13.036.257.483	11.703.594.356	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126/12 Orang/bulan	12.511.427.255	12.491.153.483	11.087.690.356	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	621.340.000	545.104.000	615.904.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16 Dokumen	399.360.000	399.360.000	399.360.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16 Dokumen	399.360.000	399.360.000	399.360.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	272.917.000	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	272.917.000	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket listrik yang disediakan, Alat Tulis Kantor, makan minum, cetak penggandaan, surat kabar/majalah serta penyelenggaraan rapat	1 Tahun	266.614.808	227.310.308	121.445.454	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		koordinasi dan konsultasi SKPD					
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	42.339.800	22.681.300	18.143.800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.651.900	43.151.900	21.063.100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.700.000	24.850.000	12.425.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.487.000	30.177.000	16.588.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	2.220.000	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	118.216.108	106.450.108	53.225.054	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung /pendukung gedung kantor atau bangunan lainya	23 Unit	2.009.495.200	2.055.360.600	373.814.354	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.400.000.000	1.400.000.000	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	429.005.200	393.739.000	44.635.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	180.490.000	261.621.600	329.179.354	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	516.840.000	513.904.500	408.840.100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	25.000.000	17.500.000	8.750.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	466.880.000	444.195.700	350.105.700	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	24.960.000	52.208.800	49.984.400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang dibayarkan pajaknya dan peralatan mesin yang dipelihara serta jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang direhabilitasi	595 Kendaraan/barang	992.764.884	1.045.684.884	870.530.157	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	300 Unit	302.818.651	299.788.651	230.357.446	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	263 Unit	576.916.233	610.896.233	507.172.711	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	113.030.000	135.000.000	133.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	4,28 %	11.015.217.933	10.734.017.933	8.227.415.605	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun, ditingaktkan, direhabilitasi, dioprasi dan pemelihara serta Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	5,00 Km	11.015.217.933	10.734.017.933	8.227.415.605	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,5 KM	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	1,4 KM	7.169.217.933	6.888.017.933	8.227.415.605	DINAS PEKERJAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Permukaan	yang Ditingkatkan					UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,6 KM	3.846.000.000	3.846.000.000	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,5 KM	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman	100 %	8.275.404.028	9.636.040.000	2.370.731.201	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum	88 %	8.275.404.028	9.636.040.000	2.370.731.201	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	100 Lembaga	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1000 Liter/Detik	8.275.404.028	9.636.040.000	2.370.731.201	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPA dalam kondisi baik	100 %	-	-	-	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA dalam kondisi Baik	1 Unit	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	945 Ton/hari	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	100 %	5.373.138.000	5.575.418.000	7.511.464.653	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan	Prosentase jumlah penduduk yg	82,5 %	5.373.138.000	5.575.418.000	7.511.464.653	DINAS PEKERJAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	memperoleh layanan pengelolaan air limbah					UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	600 M³/Hari	5.373.138.000	5.575.418.000	7.511.464.653	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	100 Penyelenggara	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air	71,43 %	5.500.771.892	5.437.055.892	6.694.958.228	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	3,04 Km	5.500.771.892	5.437.055.892	6.694.958.228	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	3,05 Sistem Drainase Perkotaan	3.300.771.892	3.237.055.892	4.630.973.828	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Sistem Drainase Perkotaan	2.200.000.000	2.200.000.000	2.063.984.400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Infrastruktur Lingkungan Perumahan yang layak	59,04 %	480.000.000	-	-	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Praarana dan Sarana Pemukiman yang dibangun dikawaan strategis Daerah Kabupate/Kota	10 Sistem Jaringan	480.000.000	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.07.2.01.0020	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	400 SR	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.07.2.01.0026	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis	590,07 M³/Hari	480.000.000	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang dibangun					
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pemanfaatan gedung yang sesuai dengan peruntukan	100 %	5.474.760.000	11.345.342.000	13.956.671.750	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pengawasan dan pemeliharaan, jumlah regulasi terkait bangunan gedung, jumlah konsultansi bangunan teknis bangunan gedung, jumlah bangunan gedung yang telah dilakukan penilikan serta jumlah rumah tinggal tunggal dan rumah derat yang telah dilakukan pemerikasaan kelaikan fungsi	22 Dokumen/unit	5.474.760.000	11.345.342.000	13.956.671.750	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	22 Dokumen	5.474.760.000	11.345.342.000	13.956.671.750	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	65,5 %	49.693.400.850	47.795.741.850	52.208.569.788	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhab, dipelihara secara berkala maupun secara rutin maupun informasi terkait kondisi jalan/jembatan diKab Batang Panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhab, dipelihara secara berkala maupun secara rutin maupun informasi terkait kondisi jalan/jembatan diKab Batang	103 Km 865 KM	49.693.400.850	47.795.741.850	52.208.569.788	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	15 Dokumen	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang	15 KM	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Desa	Diawasi Penyelenggaraannya					PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	2 Jembatan	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM	6.643.647.000	6.643.647.000	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	10 KM	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	25 KM	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	5 KM	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	12 Jembatan	16.818.187.000	10.143.400.000	11.226.433.064	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	540,45 KM	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	15 KM	26.231.566.850	31.008.694.850	40.982.136.724	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0048	Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	2 Jembatan	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	12,5 %	136.235.600	-	-	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknis yang mengikuti pelatihan serta Dokumen SOP tentang pelatihan	50 Orang	136.235.600	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		tenaga konstruksi					
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50 Orang	136.235.600	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang	75,47 %	1.800.000.000	1.780.800.000	1.674.774.950	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perda/perkada selain RTRW dan peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	10 Dokumen	525.000.000	630.236.400	553.980.680	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	5 Dokumen	370.000.000	475.236.400	456.291.680	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	5 Laporan	155.000.000	155.000.000	97.689.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk kajian pendukung RTRW dan RRTR yang disusun	9 Dokumen	575.000.000	450.563.600	468.262.670	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	5 Dokumen	575.000.000	450.563.600	468.262.670	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	5 Dokumen	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	300.000.000	300.000.000	298.559.600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	25 Dokumen	300.000.000	300.000.000	298.559.600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	5 Sistem Informasi	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan singkronisasi penertiban pelaksanaan penataan ruang	21 Dokumen	400.000.000	400.000.000	353.972.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	14 Dokumen	400.000.000	400.000.000	353.972.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BATANG			500.000.000	700.000.000	774.212.330	
1.03.12.2.04.0004	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			500.000.000	700.000.000	774.212.330	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			500.000.000	700.000.000	774.212.330	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 0	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 0	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	100 Laporan	-	-	-	DINAS PEKERJAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	4,28 %	200.000.000	187.116.000	221.328.330	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun, ditingaktkan, direhabilitasi, dioprasi dan pemelihara serta Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	1 Km	200.000.000	187.116.000	221.328.330	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	15 KM	200.000.000	187.116.000	221.328.330	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	300.000.000	512.884.000	552.884.000	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhab, dipelihara secara berkala maupun secara rutin maupun informasi terkait kondisi jalan/jembatan diKab Batang Panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhab, dipelihara secara berkala maupun secara rutin maupun informasi terkait kondisi jalan/jembatan diKab Batang	1 Km 1 KM	300.000.000	512.884.000	552.884.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	15 KM	300.000.000	512.884.000	552.884.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	UPTD PEMELIHARAAN DAN			500.000.000	500.000.000	600.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BANDAR						
1.03.10.2.01.0046	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			500.000.000	500.000.000	600.000.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			500.000.000	500.000.000	600.000.000	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Daerah						PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	4,28 %	200.000.000	190.820.000	190.820.000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun, ditingaktkan, direhabilitasi, dioprasi dan pemelihara serta Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	1 Km	200.000.000	190.820.000	190.820.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 0	200.000.000	190.820.000	190.820.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	65,5 %	300.000.000	309.180.000	409.180.000	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhab, dipelihara secara berkala maupun secara rutin maupun informasi terkait kondisi jalan/jembatan diKab Batang Panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhab, dipelihara secara berkala maupun secara rutin maupun informasi terkait kondisi jalan/jembatan diKab Batang	1 Km 1 KM	300.000.000	309.180.000	409.180.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	15 KM	300.000.000	309.180.000	409.180.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH SUBAH			500.000.000	700.000.000	682.700.000	
1.03.10.2.01.0046	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN			500.000.000	700.000.000	682.700.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	PELAYANAN DASAR						
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			500.000.000	700.000.000	682.700.000	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	10 Unit	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Dipelihara/Direhabilitasi					
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	4,28 %	200.000.000	191.975.000	208.775.000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun, ditingaktkan, direhabilitasi, dioprasi dan pemelihara serta Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	1,00 Km	200.000.000	191.975.000	208.775.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	15 KM	200.000.000	191.975.000	208.775.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	65,5 %	300.000.000	508.025.000	473.925.000	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhab, dipelihara secara berkala maupun secara rutin maupun informasi terkait kondisi jalan/jembatan diKab Batang Panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhab, dipelihara secara berkala maupun secara rutin maupun informasi terkait kondisi jalan/jembatan diKab Batang	1 Km 1 KM	300.000.000	508.025.000	473.925.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	15 KM	300.000.000	508.025.000	473.925.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BAWANG			500.000.000	700.000.000	709.000.000	
1.03.10.2.01.0046	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			500.000.000	700.000.000	709.000.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			500.000.000	700.000.000	709.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	4,28 %	200.000.000	188.505.000	188.505.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun, ditingaktkan, direhabilitasi, dioprasi dan pemelihara serta Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	1 Km	200.000.000	188.505.000	188.505.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	15 KM	200.000.000	188.505.000	188.505.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	65,5 %	300.000.000	511.495.000	520.495.000	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhab, dipelihara secara berkala maupun secara rutin maupun informasi terkait kondisi jalan/jembatan diKab Batang Panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhab, dipelihara secara berkala maupun secara rutin maupun informasi terkait kondisi jalan/jembatan diKab Batang	1 Km 1 KM	300.000.000	511.495.000	520.495.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	15 KM	300.000.000	511.495.000	520.495.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH LIMPUNG			500.000.000	500.000.000	600.000.000	
1.03.10.2.01.0046	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			500.000.000	500.000.000	600.000.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			500.000.000	500.000.000	600.000.000	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	4,28 %	200.000.000	200.000.000	208.085.000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan	Panjang jaringan irigasi permukaan	1 Km	200.000.000	200.000.000	208.085.000	DINAS PEKERJAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	yang dibangun, ditingaktkan, direhabilitasi, dioprasi dan pemelihara serta Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air					UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	15 KM	200.000.000	200.000.000	208.085.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	65,5 %	300.000.000	300.000.000	391.915.000	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhab, dipelihara secara berkala maupun secara rutin maupun informasi terkait kondisi jalan/jembatan diKab Batang Panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhab, dipelihara secara berkala maupun secara rutin maupun informasi terkait kondisi jalan/jembatan diKab Batang	1 Km 1 KM	300.000.000	300.000.000	391.915.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	15 KM	300.000.000	300.000.000	391.915.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			23.160.808.940	23.160.808.940	21.084.261.884	
1.03.10.2.01.0046	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			23.130.808.940	23.130.808.940	21.084.261.884	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			23.130.808.940	23.130.808.940	21.084.261.884	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah Cakupan layanan operasional kantor Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	68 100 25 Persen (%) Persen (%) Persen (%)	4.666.985.520	4.708.200.040	4.161.512.509	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5 Laporan	11.029.000	11.329.000	5.651.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	11.029.000	11.329.000	5.651.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan yang disusun	12 Laporan	3.928.820.920	3.952.034.920	3.651.505.269	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.641.468.420	3.641.468.420	3.341.988.769	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	287.352.500	310.566.500	309.516.500	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan	86.845.000	65.578.600	20.150.400	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	16.845.000	-	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43 Orang	70.000.000	65.578.600	20.150.400	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan	12 laporan	181.908.400	174.888.400	100.186.030	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.300.000	14.300.000	7.192.430	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.155.500	29.155.500	12.088.400	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.929.000	41.929.000	33.947.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.523.900	11.523.900	5.761.800	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	1.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	80.000.000	72.980.000	40.196.400	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	1 Laporan	99.977.000	107.981.000	107.381.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	80.000.000	90.875.400	90.275.400	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.685.000	-	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	3 Unit	5.292.000	17.105.600	17.105.600	DINAS PERUMAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	117.750.100	124.770.100	102.384.300	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.600.000	6.600.000	3.300.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.000.000	80.000.000	80.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	17.500.000	17.500.000	8.750.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.650.100	20.670.100	10.334.300	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	12 Laporan	240.655.100	271.618.020	174.254.510	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	216.655.100	250.618.020	161.629.510	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	10.000.000	5.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	6 Unit	14.000.000	11.000.000	7.625.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase RLH bagi korban bencana / terdampak program pemerintah	100 %	125.000.000	125.000.000	92.374.020	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	24.000.000	11.827.170	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	9.000.000	4.378.140	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	15.000.000	7.449.030	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani	100 %	125.000.000	101.000.000	80.546.850	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	100.000.000	85.000.000	70.140.800	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah	25.000.000	16.000.000	10.406.050	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	63,50 %	8.734.418.000	8.734.418.000	8.876.714.375	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh yang tertangani Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	1000 Unit 69,45 Persen (%)	8.734.418.000	8.734.418.000	8.876.714.375	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	160 Unit Rumah	3.515.418.000	3.515.418.000	3.563.019.700	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							PERMUKIMAN
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	9 Laporan	5.114.000.000	5.114.000.000	5.235.691.655	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	105.000.000	105.000.000	78.003.020	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	84 %	9.604.405.420	9.563.190.900	7.953.660.980	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Penyerahan PSU Perumahan Jumlah Penyusunan NA dan Raperda PKP Jumlah Rekomendasi Rencana Tapak Perumahan yang diterbitkan Prosentase kualitas sarana prasarana infrastruktur yang tertangani	10 BAST 1 Dokumen 24 Buah 84 %	9.604.405.420	9.563.190.900	7.953.660.980	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	9 Lokasi	9.179.405.420	9.138.190.900	7.622.677.500	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan	425.000.000	425.000.000	330.983.480	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0003	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			30.000.000	30.000.000	19.013.225	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			30.000.000	30.000.000	19.013.225	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian kasus pertanahan Tingkat penurunan kasus sengketa pertanahan	100 90 85 Persen (%) Persen (%)	30.000.000	30.000.000	19.013.225	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Persentase permohonan fasilitasi pernyelesaian permasalahan pertanahan yang tertangani	%				
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah permasalahan yang difasilitasi	85 % 85 Persen (%)	30.000.000	30.000.000	19.013.225	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000	19.013.225	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			15.844.837.560	11.002.231.560	9.685.841.888	
2.10.05.2.01.0002	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			15.844.837.560	11.002.231.560	9.685.841.888	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			15.844.837.560	11.002.231.560	9.685.841.888	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja anggaran program/kegiatan Satpol PP	97 %	12.730.198.760	7.887.732.460	6.581.102.537	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 Dokumen	40.079.000	45.239.000	30.371.400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	40.079.000	45.239.000	30.371.400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 Laporan	6.267.611.703	6.276.201.703	5.833.589.118	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	6.195.791.703	6.195.791.703	5.788.934.118	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	71.820.000	80.410.000	44.655.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SK/dokumen kepegawaian yang disusun	12 Dokumen	137.200.000	171.648.000	170.100.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37 Paket	100.250.000	43.300.000	162.950.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	47 Orang	36.950.000	128.348.000	7.150.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan yang dibeli, jumlah peserta rapat koordinasi, jumlah arsip yang dikelola	12 Laporan	190.210.857	322.058.157	97.843.429	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.885.000	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	43.896.100	45.521.900	13.723.800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	36.500.000	72.877.000	42.234.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.013.200	19.363.200	4.200.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.000.000	3.000.000	750.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	77.916.557	181.296.057	36.935.629	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli, jumlah alat yang dibeli, jumlah meubel yang dibeli, jumlah aset yang dibeli, jumlah gedung yang dibangun, jumlah sarpras gedung yang dibeli	63 Unit	5.742.821.200	692.821.200	25.705.600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	600.000.000	550.000.000	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	142.821.200	142.821.200	25.705.600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000.000	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	2 Orang	133.276.000	137.776.000	152.788.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000	1.500.000	1.200.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	85.000.000	89.500.000	104.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	46.776.000	46.776.000	47.088.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	50 Unit	219.000.000	241.988.400	270.704.990	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	185.000.000	201.988.400	225.704.990	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15.000.000	15.000.000	20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19.000.000	25.000.000	25.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani	100 %	1.972.460.800	1.978.197.300	2.004.562.551	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan gangguan trantib yang tertegakan	12 Laporan	1.622.460.800	1.624.796.800	1.156.706.650	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	532.086.000	589.394.000	588.519.500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang	100 Orang	139.065.000	124.660.000	68.749.500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Ditingkatkan Kapasitasnya					
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	705.484.800	699.917.800	361.652.900	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	190.725.000	155.725.000	127.684.750	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	50.000.000	50.000.000	5.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	0 Unit	5.100.000	5.100.000	5.100.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kasus pelanggaran Perda dan Perbup	12 Kasus	350.000.000	353.400.500	847.855.901	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	200.000.000	200.000.000	557.399.951	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	75.000.000	78.400.500	250.833.450	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	0 0	75.000.000	75.000.000	39.622.500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Kepala Daerah					
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase waktu tanggap "Response Time"	100 %	1.142.178.000	1.136.301.800	1.100.176.800	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kasus kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	12 Laporan	1.092.178.000	1.089.526.000	1.053.401.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	54.250.000	54.250.000	45.625.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.022.928.000	1.028.276.000	1.004.276.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	0 Unit	-	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	15.000.000	7.000.000	3.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang diberdayakan dalam pencegahan kebakaran	120 Orang	50.000.000	46.775.800	46.775.800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran	12 Desa/Kelurahan	50.000.000	46.775.800	46.775.800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya					
	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH			6.234.502.216	6.234.502.216	4.162.899.330	
1.05.04.2.04.0002	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.234.502.216	6.234.502.216	4.162.899.330	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			6.234.502.216	6.234.502.216	4.162.899.330	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.281.973.316	5.295.363.316	3.300.911.880	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	43.895.901	42.795.901	9.453.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	43.895.901	42.795.901	9.453.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.208.493.955	3.214.802.955	2.821.599.090	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.171.603.955	3.171.603.955	2.780.461.090	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	28.440.000	34.656.000	34.656.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	8.450.000	8.543.000	6.482.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	30.000.000	30.000.000	22.000.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	30.000.000	30.000.000	22.000.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	141.975.760	135.933.760	107.491.990	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.086.300	4.086.300	2.041.700	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.293.900	17.951.900	8.244.600	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.000.000	22.450.000	14.145.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.500.500	10.750.500	5.686.400	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.400.000	3.000.000	840.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	77.695.060	77.695.060	76.534.290	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.587.140.200	1.576.876.709	33.478.200	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	87.140.200	169.733.709	33.478.200	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.500.000.000	1.407.143.000	-	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	99.262.500	123.748.991	134.930.691	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	1.762.500	1.375.000	1.375.000	BADAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Surat Menyurat					PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	45.500.000	70.373.991	82.373.991	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	52.000.000	52.000.000	51.181.700	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	171.205.000	171.205.000	171.958.909	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	155.705.000	155.705.000	160.458.909	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	15.500.000	15.500.000	11.500.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	952.528.900	939.138.900	861.987.450	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	85.348.000	93.283.000	41.842.500	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	360 Orang	85.348.000	93.283.000	41.842.500	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	-	-	-	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	295.872.500	274.547.500	197.249.300	BADAN PENANGGULANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	2 Kegiatan	5.500.000	5.500.000	1.600.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	2 Unit	99.500.000	99.500.000	99.500.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 Orang	22.450.000	20.950.000	16.483.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga	8.800.000	8.975.000	6.025.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	43.872.500	38.472.500	17.041.300	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	80 Orang	8.150.000	8.600.000	7.100.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	76.200.000	60.000.000	30.000.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana	Jumlah dokumen Rencana	2 Dokumen	12.000.000	12.000.000	4.000.000	BADAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun					PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2 laporan	-	-	-	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	-	-	-	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	19.400.000	20.550.000	15.500.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	324.576.400	324.576.400	448.758.075	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	2 Laporan	13.500.000	13.500.000	12.120.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	7 Dokumen	184.622.450	184.622.450	159.536.725	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	22.500.000	22.500.000	22.500.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	135 Orang	84.893.950	84.893.950	95.736.350	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Bencana					
1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	2 Dokumen	6.600.000	6.600.000	3.300.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	2 Laporan	12.460.000	12.460.000	155.565.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	246.732.000	246.732.000	174.137.575	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	-	-	-	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000	12.561.600	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	3 Dokumen	40.000.000	40.000.000	14.648.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2 Laporan	-	-	-	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2 Kegiatan	66.732.000	66.732.000	102.987.675	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi	1 Lembaga	10.000.000	10.000.000	9.150.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal					
1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	-	-	-	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	34.790.300	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0016	DINAS SOSIAL			9.905.917.359	9.905.917.359		
1.05.03.2.04.0016	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.905.917.359	9.905.917.359	10.145.440.883	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			9.905.917.359	9.905.917.359	10.145.440.883	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	80 84 86 96 98 % % % % %	3.759.599.425	3.552.752.475	3.329.742.941	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	7 Dokumen	20.000.000	17.000.000	9.473.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	7 Laporan	20.000.000	17.000.000	9.473.000	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	7 Laporan	2.628.503.639	2.623.503.639	2.647.673.585	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.303.503.639	2.303.503.639	2.393.115.735	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	300.000.000	300.000.000	242.378.300	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	25.000.000	20.000.000	12.179.550	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penanganan laporan administrasi umum perangkat daerah	105 Laporan	221.002.250	219.143.550	116.862.070	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.953.000	7.953.000	3.976.500	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	28.725.750	26.867.050	15.197.320	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	46.640.000	46.640.000	30.681.500	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.313.500	9.313.500	4.656.750	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.800.000	4.800.000	565.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	123.570.000	123.570.000	61.785.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dibeli/ direhab	7 Unit	146.708.813	168.911.863	108.911.863	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	146.708.813	168.911.863	108.911.863	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	7 Laporan	211.500.000	217.011.400	203.421.893	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3570 Laporan	8.500.000	8.500.000	4.400.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	95.000.000	95.000.000	93.940.393	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	108.000.000	113.511.400	105.081.500	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang yang dipelihara	1315 Unit	531.884.723	307.182.023	243.400.530	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 Unit	161.111.700	149.192.000	100.302.107	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	23.950.000	23.950.000	19.720.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	313.499.823	114.040.023	113.378.423	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	33.323.200	20.000.000	10.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	100 %	576.014.400	668.742.750	434.022.875	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-		576.014.400	668.742.750	434.022.875	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat	264 Orang	20.771.000	60.550.000	30.140.000	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota					
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	204.950.000	212.150.000	196.075.000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	160519 Keluarga	201.233.400	201.233.400	100.609.200	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Lembaga	80.460.000	82.606.950	41.177.475	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	39 Sertifikat	68.600.000	112.202.400	66.021.200	DINAS SOSIAL
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran korban tidak kekerasan yang berhasil dipulangkan	45 %	3.500.000	3.500.000	1.750.000	
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-		3.500.000	3.500.000	1.750.000	DINAS SOSIAL
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	3.500.000	3.500.000	1.750.000	DINAS SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	313.326.000	313.326.000	235.696.020	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	-		313.326.000	313.326.000	235.696.020	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	19.500.000	19.500.000	9.750.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	13.800.000	13.800.000	13.758.850	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	75.000.000	75.000.000	71.554.600	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	69 Orang	1.300.000	1.300.000	485.830	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	160.000.000	160.000.000	118.390.340	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	1.066.000	1.066.000	426.400	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	42.660.000	42.660.000	21.330.000	DINAS SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial	100 %	4.506.190.400	4.620.309.000	5.268.099.710	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-		1.550.000.000	1.547.000.000	1.533.352.450	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	1530 Orang	1.550.000.000	1.547.000.000	1.533.352.450	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin			2.956.190.400	3.073.309.000	3.734.747.260	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya fakir miskin kab/kota terhadap program penanganan fakir miskin Tersedianya Data Fakir Miskin	1 dokumen 1 kegiatan				
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	170872 Orang	106.423.700	211.092.300	107.599.780	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	76556 Keluarga	38.976.700	38.976.700	31.380.680	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2100 Keluarga	2.708.840.000	2.708.840.000	3.493.566.800	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	101.950.000	114.400.000	102.200.000	DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	625.825.100	625.825.100	593.942.570	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	1 kegiatan	587.840.100	587.840.100	567.712.570	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	8.000.000	8.000.000	7.962.170	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	230 Orang	551.565.100	551.565.100	545.625.400	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	28.275.000	28.275.000	14.125.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan	Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap	1 kegiatan	37.985.000	37.985.000	26.230.000	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Bencana Kabupaten/Kota	Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	37.985.000	37.985.000	26.230.000	DINAS SOSIAL
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	100 %	121.462.034	121.462.034	282.186.767	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-		121.462.034	121.462.034	282.186.767	DINAS SOSIAL
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	102.262.034	102.262.034	262.986.767	DINAS SOSIAL
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Laporan	19.200.000	19.200.000	19.200.000	DINAS SOSIAL
1.06.07.2.01.0003	DINAS KETENAGAKERJAAN			7.356.450.524	7.356.450.524		
1.06.07.2.01.0003	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.247.664.024	7.247.664.024	7.603.697.001	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			7.247.664.024	7.247.664.024	7.603.697.001	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Kepegawaian dan Keuangan yag selesai tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/ fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan Persentase Capaian Kinerja Anggaran Program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98,5 65 95 98,8 % % % %	5.514.034.109	5.514.034.109	3.402.981.524	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banyaknya Dokumen Pelaporan Dinas	5 Dokumen	10.000.000	10.000.000	5.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	5 Laporan	10.000.000	10.000.000	5.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	12 laporan	2.851.783.723	2.851.783.723	2.711.243.847	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2.637.332.523	2.637.332.523	2.517.143.779	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	214.451.200	214.451.200	194.100.068	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	35.982.000	35.982.000	17.153.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	35.982.000	35.982.000	17.153.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	12 laporan	135.918.500	135.918.500	133.227.400	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.814.800	6.814.800	6.814.800	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.199.900	30.199.900	14.272.700	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.600.000	35.600.000	30.725.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.303.800	13.303.800	6.651.900	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.000.000	3.000.000	400.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	47.000.000	47.000.000	74.363.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	100 %	2.017.192.400	2.017.192.400	67.942.400	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	1 Unit	-	-	-	DINAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan					KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	17.192.400	17.192.400	3.942.400	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2.000.000.000	2.000.000.000	64.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Operasional Kantor	12 bulan	311.811.400	311.811.400	295.578.100	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.750.000	6.750.000	3.375.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	105.061.400	105.061.400	92.203.100	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	151.346.086	151.346.086	172.836.777	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8.500.000	8.500.000	8.500.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	92.846.086	92.846.086	105.156.106	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	-	-	-	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	10.000.000	10.000.000	19.180.671	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	40.000.000	40.000.000	40.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN	Persentase Kegiatan yang mengacu	100 %	-	-	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	TENAGA KERJA	Rencana Tenaga Kerja (RTK)					
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Kegiatan yang mengacu Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100 %	-	-	-	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	-	-	-	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rasio Penduduk yang Bekerja	74 %	1.214.745.851	1.214.745.851	3.725.694.599	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang mendapat pelatihan	960 Orang	646.860.000	646.860.000	3.216.150.240	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	80 Orang	646.860.000	646.860.000	3.216.150.240	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang mendapatkan pembinaan	90 lembaga	360.300.000	360.300.000	354.926.350	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga	360.300.000	360.300.000	354.926.350	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Tenaga Kerja Mandiri/ Wirausaha Baru	120 Orang	207.585.851	207.585.851	154.618.009	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	25 Perusahaan	207.585.851	207.585.851	154.618.009	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Pekerjaan yang mendapat pekerjaan	41 %	258.404.399	258.404.399	292.839.340	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang mendapat Pelayanan AK 1	7651 Orang	258.404.399	258.404.399	292.839.340	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	500 Orang	258.404.399	258.404.399	292.839.340	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penurunan Jumlah Perselisihan HI	14,4 Rasio	260.479.665	260.479.665	182.181.538	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PP yang disyahkan	18 buah	138.343.865	138.343.865	80.758.110	DINAS KETENAGAKERJAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	100 Perusahaan	74.658.000	74.658.000	37.623.450	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	63.685.865	63.685.865	43.134.660	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Jumlah Perselisihan HI yang berhasil dilakukan mediasi	100 %	122.135.800	122.135.800	101.423.428	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	122.135.800	122.135.800	101.423.428	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.05.2.02.0001	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			108.786.500	108.786.500	59.248.400	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			108.786.500	108.786.500	59.248.400	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang berhasil ditempatkan	100 %	108.786.500	108.786.500	59.248.400	
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Transmigran yang mendapat pelatihan	5 KK	108.786.500	108.786.500	59.248.400	DINAS KETENAGAKERJAAN
3.32.03.2.01.0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	5 Kepala Keluarga	108.786.500	108.786.500	59.248.400	DINAS KETENAGAKERJAAN
3.32.03.2.01.0003	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK			16.533.164.051	16.533.164.051		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	DAN KELUARGA BERENCANA						
3.32.03.2.01.0003	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			16.533.164.051	16.533.164.051	18.568.868.352	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			4.924.722.051	4.924.797.051	4.837.241.003	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.589.722.051	4.621.246.589	4.637.209.003	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	14.405.000	14.480.000	7.134.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	14.405.000	14.480.000	7.134.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.230.013.691	3.227.927.691	3.471.793.018	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.146.313.691	3.146.313.691	3.418.333.018	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	83.700.000	81.614.000	53.460.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	25.000.000	25.000.000	7.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	25.000.000	25.000.000	7.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat	-	-	256.687.288	290.222.826	180.821.413	DINAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Daerah						PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.700.800	5.700.800	5.448.100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.920.000	77.369.538	51.712.738	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.780.000	34.780.000	48.002.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.877.000	8.877.000	6.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	161.409.488	163.495.488	69.658.075	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	835.346.072	835.346.072	826.502.672	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	5.000.000	5.000.000	3.125.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.800.000	100.800.000	105.725.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	729.546.072	729.546.072	717.652.672	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	228.270.000	228.270.000	143.457.400	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	95.000.000	95.000.000	56.777.400	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	123.270.000	123.270.000	61.680.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10.000.000	10.000.000	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja pelaksanaan program dan kegiatan di APBD	3,4 %	114.495.000	115.660.000	52.739.000	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga/instansi pemerintah yang memiliki komitmen PUG	100 %	50.084.029	57.825.000	21.804.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	50.084.029	57.825.000	21.804.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Cakupan kader perempuan pada organisasi kemasyarakatan yang	100 %	50.000.000	50.000.000	23.675.000	DINAS PEMBERDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	didampingi dalam pemberdayaan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi					PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	23.675.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	14.410.971	7.835.000	7.260.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	14.410.971	7.835.000	7.260.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas	100 %	10.000.000	10.000.000	4.560.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		terlatih didalam unit pelayanan terpadu					
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta rakor/ sosialisasi/pendampingan terkait Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	90 orang	10.000.000	10.000.000	4.560.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	4.560.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	42.900.000	41.735.000	33.775.000	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	23.950.000	-	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	23.950.000	-	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							KELUARGA BERENCANA
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	50 orang	18.950.000	41.735.000	33.775.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	18.950.000	41.735.000	33.775.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	cakupan data pilah gender dan anak undefined	100 undefined % undefined	15.080.000	15.080.000	8.800.000	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data pilah gender dan anak	1 data	15.080.000	15.080.000	8.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	15.080.000	15.080.000	8.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	cakupan kecamatan layak anak	86,67 %	100.000.000	100.000.000	82.258.000	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	cakupan pelembagaan PHA pada Lembaga	100 persen	25.000.000	25.000.000	15.070.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	25.000.000	25.000.000	15.070.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga penyedia layanan	100 %	75.000.000	75.000.000	67.188.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	25.000.000	25.000.000	17.188.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 %	52.525.000	21.075.462	17.900.000	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan anak yang diberi layanan rujukan	100 %	52.525.000	21.075.462	17.900.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	52.525.000	21.075.462	17.900.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			11.608.442.000	11.608.367.000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					13.731.627.349	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-	460.200.000	460.200.000	428.400.000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	460.200.000	460.200.000	428.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	187.200.000	187.200.000	188.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	213.000.000	213.000.000	180.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) meningkatkan atensi dan prioritas pemangku kebijakan di multi level tentang program bangga kencana	74,34 undefined % undefined	6.555.542.000	6.555.467.000	6.845.228.500	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Bangga Kencana)	4.8 %	1.160.000.000	1.160.000.000	1.081.070.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan	80.000.000	80.000.000	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	465.000.000	465.000.000	411.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional	Jumlah Laporan Mekanisme	12 Laporan	225.000.000	225.000.000	300.000.000	DINAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	32 Organisasi	280.000.000	280.000.000	240.070.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB	Persentase jml PKB/PLKB (1 PKB/PLKB mengampu 2 Desa)	56.45 %	1.811.600.000	1.811.600.000	2.979.306.000	DINAS PEMBERDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	(PKB/PLKB)						PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	253 Orang	1.811.600.000	1.811.600.000	1.062.600.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	4 Laporan	-	-	1.916.706.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.028.692.000	3.028.692.000	2.314.452.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang	12 Laporan	28.800.000	28.800.000	29.700.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	49016 Orang	1.995.000.000	1.995.000.000	2.178.805.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	12 Laporan	10.000.000	10.000.000	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit	830.392.000	830.392.000	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	12 Laporan	159.500.000	159.500.000	95.947.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Jejaringnya					ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	555.250.000	555.175.000	470.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	3.750.000	3.750.000	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	84 Kampung	551.500.000	551.425.000	470.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Berencana)					PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pembangunan ketahanandan kesejahteraan keluarga melalui kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL)	78,71 %	4.592.700.000	4.592.700.000	6.457.998.849	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5 Kegiatan	655.600.000	655.600.000	2.120.100.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	12 Laporan / Dokumen	336.600.000	336.600.000	57.600.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Laporan	19.000.000	19.000.000	1.932.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	20 Unit	300.000.000	300.000.000	130.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia					PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah ormas	3 ormas	3.937.100.000	3.937.100.000	4.337.898.849	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 laporan	1.851.000.000	1.851.000.000	1.851.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 laporan	2.086.100.000	2.086.100.000	2.486.898.849	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.0006	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN			30.744.058.498	31.244.058.498		
2.14.04.2.02.0006	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.414.940.000	1.383.940.000	1.487.237.100	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			1.414.940.000	1.383.940.000	1.487.237.100	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	12,5 %	6.000.000	6.000.000	2.400.000	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pengembangan LPMD	1 kegiatan	6.000.000	6.000.000	2.400.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	3 Unit	6.000.000	6.000.000	2.400.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	89,7 %	1.156.940.000	1.125.940.000	1.292.387.000	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	jumlah kegaiatn penyediaan dan penyaluran pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah	4 kegiatan	91.620.000	91.620.000	45.992.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	26.620.000	26.620.000	17.766.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	24.529.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	-	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	1.848.500	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	1.848.500	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksana kegiatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kab/Kota	1 kegiatan	1.000.000.000	969.000.000	1.192.160.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Ton	1.000.000.000	969.000.000	1.192.160.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	60 Ton	-	-	-	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah pelaksanan kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita / tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	1 kegiatan	65.320.000	65.320.000	54.235.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	65.320.000	65.320.000	54.235.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rasio Desa mandiri Pangan	17 %	212.000.000	212.000.000	163.942.500	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan penanganan kerawanann pangan kewenangan kabupaten Kota	2 kegiatan	212.000.000	212.000.000	163.942.500	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	9.075.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	192.000.000	192.000.000	154.867.500	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	100 %	40.000.000	40.000.000	28.507.600	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pelaksanan pengawasan keamanan pangan segar daerah Kab/Kota	2 kegiatan	40.000.000	40.000.000	28.507.600	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	40.000.000	40.000.000	28.507.600	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.05.2.01.0009	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			29.329.118.498	29.860.118.498	19.613.760.899	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			29.329.118.498	29.860.118.498		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	PERTANIAN					19.613.760.899	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Capaian kinerja seluruh indikator	115.7 %	18.297.807.898	18.718.807.898	15.213.060.602	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	3 kegiatan	79.708.338	79.708.339	44.417.800	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	23.008.338	23.008.339	14.870.300	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	15.750.000	15.750.000	7.942.500	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	40.950.000	40.950.000	21.605.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	2 kegiatan	14.974.403.338	14.981.027.338	12.013.550.482	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang/bulan	14.934.923.338	14.934.923.338	11.968.380.482	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	39.480.000	46.104.000	45.170.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	10 Orang	25.000.000	25.000.000	25.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	25.000.000	25.000.000	25.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 kegiatan	452.396.214	502.044.214	283.623.814	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.733.000	12.733.000	6.391.100	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	188.838.214	228.778.214	124.206.214	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	72.245.000	72.245.000	72.245.000	DINAS PANGAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		yang Disediakan					PERTANIAN
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.980.000	32.980.000	26.247.500	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.800.000	4.800.000	1.600.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	140.800.000	150.508.000	52.934.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	4 kegiatan	1.876.410.508	1.994.847.508	1.980.215.008	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	276.813.508	276.813.508	276.813.508	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	39.265.000	39.265.000	24.632.500	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.552.832.000	1.671.269.000	1.671.269.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	3 kegiatan	889.889.500	1.136.180.499	866.253.498	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	154.801.500	159.801.500	129.801.500	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	511.292.000	494.960.000	255.042.500	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	223.796.000	481.418.999	481.409.498	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun Presentase Kegiatan Pengawasan	0,016 100 % %	2.231.407.000	2.246.407.000	1.597.568.800	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Pakan					
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	prosentase penggunaan sarana pertanian	100 %	2.045.507.000	2.045.507.000	1.471.222.100	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	1.995.507.000	1.995.507.000	1.446.443.900	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	24.778.200	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan kabupaten atau kota	1 kegiatan	35.000.000	50.000.000	27.789.600	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	35.000.000	50.000.000	27.789.600	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Pakan	4 kegiatan	72.500.000	72.500.000	40.024.500	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4 Laporan	72.500.000	72.500.000	40.024.500	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan	2 kegiatan	78.400.000	78.400.000	58.532.600	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	2 Laporan	50.000.000	50.000.000	41.020.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	5 Laporan	28.400.000	28.400.000	17.512.600	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100 %	7.252.631.800	7.320.781.800	1.814.250.500	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan prasarana pertanian	1 kegiatan	348.230.000	428.230.000	403.602.400	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	348.230.000	428.230.000	403.602.400	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	jumlah kegiatan pembangunan prasarana pertanian	5 kegiatan	6.184.401.800	6.172.551.800	1.050.788.100	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	755.000.000	755.000.000	569.489.950	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	480.000.000	480.000.000	-	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit	3.942.180.500	3.927.180.500	470.926.850	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	10 Unit	1.000.000.000	1.000.000.000	-	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	-	-	-	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3 Unit	7.221.300	10.371.300	10.371.300	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1 kegiatan	720.000.000	720.000.000	359.860.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	2 Laporan	720.000.000	720.000.000	359.860.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase capaian jumlah hewan yang terobati	100 %	800.771.800	797.621.800	110.261.300	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	jumlah hewan ternak yang mendapatkan penjaminan kesehatan	2500 ekor	103.750.000	103.750.000	77.803.350	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	83.750.000	83.750.000	67.799.850	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	1 Wilayah	20.000.000	20.000.000	10.003.500	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan	100 %	20.000.000	16.850.000	8.205.900	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	80 laporan	20.000.000	16.850.000	8.205.900	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelayanan jasa medik veteriner	12 Laporan	628.725.100	628.725.100	-	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	628.725.100	628.725.100	-	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	jumlah kegiatan pengawasan unit usaha dan peredaran hewan/produk hewan	2 kegiatan	48.296.700	48.296.700	24.252.050	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	20.000.000	20.000.000	10.006.300	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	10 Unit Usaha	28.296.700	28.296.700	14.245.750	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	100 %	30.000.000	30.000.000	16.349.800	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengendalian dan pengendalian Bencana Pertanian	1 kegiatan	30.000.000	30.000.000	16.349.800	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1 Ha	30.000.000	30.000.000	16.349.800	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	prosentase pendampingan unit usaha pertanian untuk memperoleh izin	100 %	27.000.000	27.000.000	13.074.000	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang	jumlah kegiatan pendampingan unit	1 kegiatan	27.000.000	27.000.000	13.074.000	DINAS PANGAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	usaha pertanian untuk memperoleh izin					PERTANIAN
3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	5 Laporan	27.000.000	27.000.000	13.074.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	1.9 %	689.500.000	719.500.000	849.195.897	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	jumlah kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian	3 kegiatan	689.500.000	719.500.000	849.195.897	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Unit	380.500.000	380.500.000	91.534.850	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	309.000.000	339.000.000	374.621.047	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	89 Orang	-	-	383.040.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.07.2.01.0006	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			17.055.023.456	17.055.023.456		
3.27.07.2.01.0006	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.055.023.456	17.055.023.456	18.304.025.850	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			17.055.023.456	17.055.023.456	18.304.025.850	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	12.426.840.600	12.388.340.600	12.487.574.504	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	55.000.000	55.000.000	39.957.950	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	55.000.000	55.000.000	39.957.950	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.204.586.130	5.222.351.530	4.817.544.854	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	60 Orang/bulan	5.122.332.830	5.129.332.830	4.746.480.554	DINAS LINGKUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Tunjangan ASN					HIDUP
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	82.253.300	93.018.700	71.064.300	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	328.306.139	278.305.600	73.105.050	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450 Orang	215.725.500	168.479.000	69.130.050	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	112.580.639	109.826.600	3.975.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	281.070.063	267.601.213	142.451.382	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	4.999.000	4.217.700	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.228.200	38.370.050	16.780.200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.305.000	52.305.000	41.630.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.658.500	18.448.800	9.224.400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	2.160.000	2.760.000	630.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	165.718.363	150.718.363	69.969.082	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	46.813.258	45.545.580	6.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	46.813.258	45.545.580	6.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.265.845.840	4.315.497.440	4.975.178.840	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	30 Laporan	2.500.000	2.140.000	2.140.000	DINAS LINGKUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Surat Menyurat					HIDUP
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	95.050.000	118.007.600	85.450.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	4.168.295.840	4.195.349.840	4.887.588.840	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.245.219.170	2.204.039.237	2.433.336.428	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit	144.087.200	139.006.200	127.175.108	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	2.044.131.970	2.057.722.020	2.288.661.320	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	-	-	7.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	57.000.000	7.311.017	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	10.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah	100 %	65.000.000	150.000.000	260.000.000	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH	100 %	65.000.000	150.000.000	150.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota	1 Dokumen	65.000.000	150.000.000	150.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi					
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-	-	-	110.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	-	-	110.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	227.345.600	227.345.600	181.469.320	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	43.145.600	43.145.600	21.246.695	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	43.145.600	43.145.600	21.246.695	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	184.200.000	184.200.000	160.222.625	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Buku IKPLHD Laporan	50.000.000	40.257.000	30.392.800	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	5 Titik	134.200.000	143.943.000	129.829.825	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-	396.804.600	393.804.600	364.319.570	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-	396.804.600	393.804.600	364.319.570	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	396.804.600	393.804.600	364.319.570	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	-	-	10.020.000	10.020.000	5.010.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	10.020.000	10.020.000	5.010.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	25 Dokumen	10.020.000	10.020.000	5.010.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-	78.492.400	77.992.400	50.454.400	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	78.492.400	77.992.400	50.454.400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	50 Dokumen	32.360.000	32.360.000	16.103.950	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	30 Badan Usaha	46.132.400	45.632.400	34.350.450	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	20.000.000	-	32.000.000	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	20.000.000	-	32.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	90 Orang	20.000.000	-	32.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	108.859.900	109.359.900	78.613.750	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	108.859.900	109.359.900	78.613.750	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	30 Entitas	108.859.900	109.359.900	78.613.750	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-	3.721.660.356	3.698.160.356	4.844.584.306	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-	3.451.016.056	3.427.516.056	4.630.780.156	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	35 Kelompok	100.963.000	94.963.000	94.963.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di	5 Dokumen	3.350.053.056	3.332.553.056	4.535.817.156	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada					
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	-	-	270.644.300	270.644.300	213.804.150	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	5 Laporan	270.644.300	270.644.300	213.804.150	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.03.0003	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			7.784.665.647	7.784.665.647		
2.11.11.2.03.0003	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.784.665.647	7.784.665.647	7.581.252.357	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			7.784.665.647	7.784.665.647	7.581.252.357	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Laporan kinerja Disdukcapil kab.Batang selama 12 bln	90 Persen (%)	5.736.197.027	5.675.921.527	5.414.755.118	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD yang disusun	90 Persen (%)	68.695.500	67.783.500	65.473.900	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	68.695.500	67.783.500	65.473.900	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	56 Bulan	4.276.103.487	4.247.399.487	3.867.867.070	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	4.221.443.487	4.221.443.487	3.841.911.070	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	54.660.000	25.956.000	25.956.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya keamanan kantor Disdukcapil Kab.Batang	48 Bulan	123.900.000	102.000.000	102.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	123.900.000	102.000.000	102.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya administrasi umum dengan baik	95 Persen (%)	262.814.800	207.901.100	169.551.100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	166.876.300	85.237.600	60.487.600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	40.867.000	40.867.000	28.867.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	50.071.500	73.796.500	69.796.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	5.000.000	8.000.000	10.400.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Tersedianya perlengkapan surat-	12 Bulan	499.461.240	559.973.440	570.085.548	DINAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Pemerintahan Daerah	menyurat, jasa telpon/internet, air , listrik pada kantor Disdukcapil					KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	371.300.000	416.244.000	420.744.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	123.161.240	138.729.440	144.341.548	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional , gedung kantor dan perawatan sarana dan prasarana kantor	48 Bulan	505.222.000	490.864.000	639.777.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	251.222.000	354.368.000	314.192.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	159.000.000	-	220.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	95.000.000	136.496.000	105.585.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase identitas Kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan	90 Persen (%)	498.554.000	508.554.000	446.220.600	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	90 Dokumen (%)	498.554.000	508.554.000	446.220.600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	0 Dokumen	30.000.000	30.000.000	25.411.600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	468.554.000	478.554.000	420.809.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir	90 Persen (%)	413.328.000	485.155.800	485.908.600	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk yang telah memiliki akta perkawinan dan penduduk usia 0-18 th yang telah memiliki akta kelahiran	90 Persen (%)	413.328.000	485.155.800	485.908.600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	0 Dokumen	306.368.000	357.795.800	370.868.600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	0 Layanan	106.960.000	127.360.000	115.040.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase Penyajian data Kependudukan yang Valid	90 Persen (%)	1.136.586.620	1.115.034.320	1.234.368.039	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Prosentase lembaga yang mengakses data kependudukan	90 Persen (%)	57.217.200	61.506.500	71.530.250	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	0 Dokumen	57.217.200	61.506.500	71.530.250	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya peningkatan dokumen pelayanan dokumen kependudukan yang diterbitkan	48 Bulan	1.079.369.420	1.053.527.820	1.162.837.789	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	1.079.369.420	1.053.527.820	1.162.837.789	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0003	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			27.025.508.405	26.975.508.405		
2.12.04.2.03.0003	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			27.025.508.405	26.975.508.405	30.714.919.129	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			27.025.508.405	26.975.508.405	30.714.919.129	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata rata capaian kinerja program Dispermades undefined	95 undefined Persen (%) undefined	3.333.829.042	3.284.629.755	2.746.701.329	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	96 Persen (%)	14.994.000	14.994.000	7.497.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	14.994.000	14.994.000	7.497.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	96 Persen	2.961.821.435	2.895.274.148	2.462.380.212	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.888.459.885	2.838.460.598	2.412.845.562	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	73.361.550	56.813.550	49.534.650	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	25 Orang	25.000.000	25.000.000	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	25.000.000	25.000.000	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Sarana Operasioanal Kantor	12 Bulan	103.043.407	132.127.407	75.669.607	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.124.700	2.124.700	1.061.700	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	29.842.307	29.842.307	25.342.307	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.984.000	7.984.000	3.989.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.492.400	9.492.400	4.746.600	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.600.000	3.600.000	988.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	50.000.000	79.084.000	39.542.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah layanan operasional kantor	12 Bulan	133.970.200	122.234.200	117.065.100	DINAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Pemerintahan Daerah						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49.800.000	49.800.000	51.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82.170.200	70.434.200	64.065.100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan operasional kantor	12 Bulan	95.000.000	95.000.000	84.089.410	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	65.000.000	65.000.000	50.839.410	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	5.000.000	5.000.000	8.250.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	25.000.000	25.000.000	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	persentase budaya desa yang dilestarikan	60 Persen (%)	35.000.000	35.000.000	17.348.500	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Adat dan Budaya Desa Yang dibina	25 Desa	35.000.000	35.000.000	17.348.500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
2.13.02.2.01.0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Laporan	35.000.000	35.000.000	17.348.500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan	56,49 %	20.309.592.800	20.309.592.800	24.723.648.000	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang dibina dan diawasi Penyelenggaraan Administrasinya	239 Desa	20.309.592.800	20.309.592.800	24.723.648.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	239 Dokumen	65.000.000	65.000.000	32.347.070	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	239 Dokumen	3.486.584.800	3.486.584.800	3.434.669.150	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	15 Dokumen	50.000.000	50.000.000	28.865.900	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	204 Laporan	40.000.000	40.000.000	19.881.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	200 Laporan	35.000.000	35.000.000	17.326.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	239 Dokumen	25.000.000	25.000.000	12.293.640	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota	239 Dokumen	16.558.008.000	16.558.008.000	21.146.690.240	DINAS PEMBERDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	yang Dilaksanakan oleh Desa	yang Dilaksanakan oleh Desa					MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	6 Dokumen	50.000.000	50.000.000	31.575.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-	3.347.086.563	3.346.285.850	3.227.221.300	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKD yang aktif dalam pemberdayaan desa	75 Persen (%)	3.347.086.563	3.346.285.850	3.227.221.300	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	239 Dokumen	580.815.113	580.814.550	478.304.300	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	239 Unit	149.999.900	149.199.800	73.961.800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	4 Dokumen	2.095.000.000	2.095.000.000	2.064.345.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Pendapatan Asli Desa	dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					DESA
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	239 Laporan	121.271.500	121.271.500	60.610.200	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	239 Dokumen	400.000.050	400.000.000	550.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0009	DINAS PERHUBUNGAN			35.781.771.959	35.920.761.959		
2.13.05.2.01.0009	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			35.781.771.959	35.920.761.959	36.477.797.518	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			35.781.771.959	35.920.761.959	36.477.797.518	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase capaian pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	29.219.836.741	29.254.746.341	29.373.408.409	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	10.199.400	10.199.400	3.914.700	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.199.400	10.199.400	3.914.700	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Perangkat daerah	12 bulan	5.450.397.091	5.422.888.137	5.297.905.581	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	5.414.937.091	5.381.860.137	5.256.877.581	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	35.460.000	41.028.000	41.028.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	425.364.300	425.364.300	305.007.200	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.693.800	19.693.800	14.422.100	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	66.470.500	66.470.500	34.310.100	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.000.000	29.000.000	14.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	200.000.000	200.000.000	137.375.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.200.000	4.200.000	1.400.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	106.000.000	106.000.000	103.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang pendukung kerja milik daerah	1 paket	-	38.469.600	38.469.600	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	-	38.469.600	38.469.600	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	22.658.080.400	22.682.608.400	23.155.422.374	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000	4.000.000	5.250.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	22.107.000.000	22.131.528.000	22.623.701.174	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Laporan	547.080.400	547.080.400	526.471.200	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	650.795.550	648.216.504	545.688.954	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	515.795.550	488.216.504	430.688.954	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Operasional atau Lapangan						
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	35.000.000	60.000.000	60.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	100.000.000	55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-	25.000.000	27.000.000	27.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	25.000.000	27.000.000	27.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-	6.561.935.218	6.666.015.618	7.104.389.109	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan	4 kegiatan	4.968.505.218	4.911.135.618	5.468.391.609	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1000 Unit	2.151.344.108	1.625.886.108	1.770.725.054	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 Unit	1.644.134.000	1.640.120.000	1.629.428.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	700 Unit	1.173.027.110	1.645.129.510	2.068.238.555	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal yang terkelola	6 unit	270.694.000	312.144.000	422.719.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	4 Dokumen	270.694.000	312.144.000	422.719.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terselenggaranya pengelolaan perparkiran	12 bulan	392.640.600	512.640.600	473.989.300	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	392.640.600	512.640.600	473.989.300	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase terujinya Kendaraan Bermotor Wajib Uji	71,80 %	440.496.600	440.496.600	328.194.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	300 Unit	7.048.600	7.048.600	2.315.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	300 Unit	166.843.000	166.843.000	95.874.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	300 Dokumen	125.000.000	125.000.000	75.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	141.605.000	141.605.000	155.005.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	12 bulan	100.000.000	100.000.000	54.555.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	5 Dokumen	100.000.000	100.000.000	54.555.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi dokumen analisis dampak lalu intas	12 bulan	69.900.000	69.900.000	54.950.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	5 Laporan	19.900.000	19.900.000	9.950.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	5 Laporan	50.000.000	50.000.000	45.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	12 bulan	256.070.000	256.070.000	247.608.800	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	256.070.000	256.070.000	247.608.800	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengkajian dan penetapan jaringan trayek pedesaan	4 kegiatan	63.628.800	63.628.800	53.981.400	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Dokumen	63.628.800	63.628.800	53.981.400	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.12.0001	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			8.474.904.915	8.474.904.915		
2.15.02.2.12.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB			8.474.904.915	8.474.904.915	7.950.531.635	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			7.906.766.965	7.906.766.965	7.622.241.185	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.559.722.965	5.559.722.965	4.840.311.388	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	20.000.000	20.000.000	9.584.400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	20.000.000	20.000.000	9.584.400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.776.059.555	3.776.059.555	3.286.802.615	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	3.716.685.555	3.716.685.555	3.254.038.115	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	59.374.000	59.374.000	32.764.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kedisiplinan ASN dan tenaga outsourching	100 %	-	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	-	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	273.591.960	273.591.960	205.866.223	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.152.000	12.152.000	12.152.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.024.800	39.024.800	31.654.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.008.000	70.008.000	40.380.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.577.500	19.577.500	10.685.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.000.000	6.000.000	1.400.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	126.829.660	126.829.660	109.594.423	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarpras penunjang kinerja aparatur OPD	100 %	7.026.600	7.026.600	6.896.100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	-	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	7.026.600	7.026.600	6.896.100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	-	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan layanan operasional kantor	100 %	1.193.109.100	1.193.109.100	1.192.091.845	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.625.000	5.625.000	5.625.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	187.484.100	187.484.100	186.466.845	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarpras penunjang kinerja aparatur OPD	100 %	264.935.750	264.935.750	127.520.205	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	143.935.750	143.935.750	91.167.205	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	-	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	30.000.000	30.000.000	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Lainnya	yang Dipelihara					DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	75.000.000	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	16.000.000	16.000.000	21.353.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-	25.000.000	25.000.000	11.550.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12 Dokumen	25.000.000	25.000.000	11.550.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	72 %	1.272.044.000	1.272.044.000	1.637.743.400	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi publik pemerintah Daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	72 %	1.272.044.000	1.272.044.000	1.637.743.400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	774.628.000	774.628.000	1.124.527.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	5 Komunitas	60.934.500	60.934.500	83.973.600	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	115.000.000	115.000.000	75.294.300	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	12 Media	321.481.500	321.481.500	353.948.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Jumlah Layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	73 %	1.075.000.000	1.075.000.000	1.144.186.397	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup	Persentase jumlah layanan yang	100 %	1.075.000.000	1.075.000.000	1.144.186.397	DINAS KOMUNIKASI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	diselenggarakan secara online					DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	120.000.000	120.000.000	114.785.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	42 Perangkat Daerah	245.000.000	245.000.000	312.649.998	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	6 Program	710.000.000	710.000.000	716.751.399	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			468.137.950	468.137.950	270.627.700	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	100 %	468.137.950	468.137.950	270.627.700	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang terkumpul dalam satu tahun	215 datasheet	468.137.950	468.137.950	270.627.700	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	52 Orang	300.000.000	300.000.000	140.302.875	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	78.137.950	78.137.950	49.646.325	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase	65.000.000	65.000.000	65.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	15.678.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			100.000.000	100.000.000	57.662.750	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase capaian sistem elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya	100 %	100.000.000	100.000.000	57.662.750	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk	Persentase Capaian Sistem Elektronik	100 %	100.000.000	100.000.000	57.662.750	DINAS KOMUNIKASI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya					DAN INFORMATIKA
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	100.000.000	100.000.000	57.662.750	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02.2.01.0003	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH			17.733.175.693	18.074.810.466		
2.21.02.2.01.0003	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.003.242.930	9.002.558.530	7.978.529.910	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			9.003.242.930	9.002.558.530	7.978.529.910	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 Persen	8.474.091.657	8.475.082.357	7.723.227.710	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	4 Dokumen	10.200.000	15.300.000	8.113.090	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.200.000	15.300.000	8.113.090	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran SKPD Jumlah Orang yang menerima kesejahteraan	12 Dokumen 70 Orang/bulan	6.858.701.530	6.857.701.530	6.300.623.972	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	70 Orang/bulan	6.824.961.530	6.824.961.530	6.268.055.672	DINAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Tunjangan ASN					PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	5.000.000	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	28.740.000	32.740.000	32.568.300	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	25.000.000	25.000.000	-	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	207 Paket	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	25.000.000	25.000.000	-	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket bacaan koran/suara merdeka/kompas	100 paket 10 Paket	410.059.427	411.950.227	212.573.750	DINAS PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Jumlah paket cetak kertas karcis Jumlah paket makan minum Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah paket peralatan listrik kantor	12 paket 30 Bulan/Kali 5 paket				PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	35.103.000	35.103.000	17.548.600	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	75.000.700	75.000.100	61.116.500	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	42.000.000	43.875.000	34.230.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	100.000.000	100.000.000	97.842.650	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.400.000	5.400.000	1.836.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah paket bangunan teras/kanopi Jumlah paket peralatan meja kursi dan	1 Paket 2 Paket	338.508.700	338.508.600	432.694.500	DINAS PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Daerah	komputer/peralatan komputer					PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	323.508.700	323.508.600	417.694.500	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.000.000	15.000.000	15.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa telpon/listrik/PDAM Jumlah jasa tenaga kebersihan	12 Bulan/Kali	536.838.000	536.838.000	516.706.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.500.000	5.500.000	5.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	433.476.000	433.476.000	433.476.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97.862.000	97.862.000	77.730.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah urusan pemerintah daerah yang terpelihara Jumlah Jasa pemeliharaan kendaraan kantor jumlah pemeliharaan pengecatan kantor	100 Persen 1 Kali 64 Kali	294.784.000	289.784.000	252.516.398	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	65 Unit	42.000.000	42.000.000	60.649.998	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	206.784.000	206.784.000	153.366.400	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	20.000.000	15.000.000	12.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	26.000.000	26.000.000	26.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Presentase Permohonan Ijin usaha simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi	10 Persen (%)	10.000.000	10.000.000	9.589.400	
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Usaha simpan pinjam yang memperoleh remondasi	13 koperasi	10.000.000	10.000.000	9.589.400	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Unit Usaha	10.000.000	10.000.000	9.589.400	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	50,53 Persen (%)	62.942.650	62.402.650	216.000.000	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30 Koperasi	62.942.650	62.402.650	216.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30 Unit Usaha	62.942.650	62.402.650	216.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi aktif	68 %	20.375.700	20.375.700	11.037.800	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	13 Koperasi	20.375.700	20.375.700	11.037.800	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	13 Unit Usaha	20.375.700	20.375.700	11.037.800	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peserta pelatihan dengan predikat baik	100 %	125.885.300	124.805.300	-	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	125.885.300	124.805.300	-	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	125.885.300	124.805.300	-	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peserta diklat dengan predikat baik	100 %	29.624.300	29.624.300	11.515.000	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan koperasi yang lulus dengan predikat baik	30 Orang	29.624.300	29.624.300	11.515.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan 0	29.624.300	29.624.300	11.515.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru	12 %	417.879.050	417.840.350	-	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	40 UMKM	417.879.050	417.840.350	-	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	40 Unit Usaha	208.613.400	208.574.700	-	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	60 Orang	209.265.650	209.265.650	-	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase produk UMKM yang terstandarisasi	20 %	15.000.000	15.000.000	7.160.000	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	90 UMKM	15.000.000	15.000.000	7.160.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	90 Unit Usaha	15.000.000	15.000.000	7.160.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08.2.01.0002	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			8.729.932.763	9.072.251.936	8.927.582.161	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			3.416.932.763	3.759.251.936	3.784.866.696	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	PERDAGANGAN						
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100 Persen	8.474.091.657	8.475.082.357	65.878.948	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket bacaan koran/suara merdeka/kompas Jumlah paket cetak kertas karcis Jumlah paket makan minum Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah paket peralatan listrik kantor	100 paket 10 Paket 12 paket 30 Bulan/Kali 5 paket	410.059.427	411.950.227	65.878.948	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	152.555.727	152.572.127	65.878.948	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Verifikasi Teknis	100 %	22.400.000	22.400.000	11.200.000	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	monitoring jumlah pusat perbelanjaan dan minimarket	4 kegiatan	22.400.000	22.400.000	11.200.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6 Dokumen	22.400.000	22.400.000	11.200.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	36,36 %	3.003.522.036	3.345.824.809	3.587.096.548	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5 unit	600.000.000	942.302.773	1.135.160.387	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	600.000.000	942.302.773	1.135.160.387	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-	2.403.522.036	2.403.522.036	2.451.936.161	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	134/12 Dokumen	2.403.522.036	2.403.522.036	2.451.936.161	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga	75 %	107.950.000	107.950.000	53.975.000	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	laporan ketersediaan bapokting	12 laporan	34.700.000	34.700.000	17.350.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	34.700.000	34.700.000	17.350.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok	monitoring harga dan stok bapokting	48 kegiatan	40.000.000	40.000.000	20.000.000	DINAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	40.000.000	40.000.000	20.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	monitoring pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	6 kegiatan	33.250.000	33.250.000	16.625.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	33.250.000	33.250.000	16.625.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor perdagangan	60215421 USD	25.505.000	25.505.000	12.752.500	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	pelaksanan pembinaan ekspor	1 Kegiatan	25.505.000	25.505.000	12.752.500	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	6 Produk	25.505.000	25.505.000	12.752.500	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	75 %	95.000.000	95.000.000	48.963.700	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pengawasan UTTP yang dilakukan Jumlah UTTP yang bertanda tera sah	12 kegiatan 500 Unit	95.000.000	95.000.000	48.963.700	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	500 Unit	75.000.000	75.000.000	38.775.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	20 Orang	20.000.000	20.000.000	10.188.700	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaksanaan Pameran dagang dalam negeri di Kabupaten Batang	100 %	10.000.000	10.000.000	5.000.000	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	terlaksananya fasilitasi UMKM	1 kegiatan	10.000.000	10.000.000	5.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	25 UMKM	10.000.000	10.000.000	5.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			5.313.000.000	5.313.000.000	5.142.715.465	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	PERINDUSTRIAN						
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan jumlah pelaku IKM	0,0079 %	5.263.000.000	5.263.000.000	5.116.594.705	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya sarana dan prasarana Usaha Kecil Menengah	125 Kelompok Usaha	5.263.000.000	5.263.000.000	5.116.594.705	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	10 Dokumen	-	-	71.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	125 Dokumen	4.963.000.000	4.963.000.000	4.895.094.705	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	300.000.000	300.000.000	150.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase peningkatan jumlah perijinan berusaha sektor industri	86 %	25.000.000	25.000.000	13.180.000	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Data Industri	10 Eksemplar	25.000.000	25.000.000	13.180.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	13.180.000	DINAS PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat					PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase jumlah Industri dalam SIINas	86 %	25.000.000	25.000.000	12.940.760	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi pendampingan pembuatan akun baru di SIINas	30 Pelaku Usaha	25.000.000	25.000.000	12.940.760	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	30 Dokumen	25.000.000	25.000.000	12.940.760	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			5.581.603.400	5.631.603.400	4.059.398.311	
3.31.04.2.01.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.581.603.400	5.631.603.400	4.059.398.311	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			5.581.603.400	5.631.603.400	4.059.398.311	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.335.016.991	4.392.276.991	3.338.677.396	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	12.011.000	12.011.000	6.511.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	12.011.000	12.011.000	6.511.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya hak- hak ASN	100 %	2.938.992.680	2.991.368.680	2.269.500.421	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.910.792.680	2.960.792.680	2.238.384.421	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen	28.200.000	30.576.000	31.116.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	25.000.000	25.000.000	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	25.000.000	25.000.000	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	50 Orang	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Peraturan Perundang-Undangan					PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penggantian komponen listrik	12 Bulan	269.953.700	274.837.700	142.960.770	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.000.000	5.495.000	2.743.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	43.000.000	43.000.000	20.966.950	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	20.207.000	20.207.000	5.157.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	75.815.000	75.815.000	37.893.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	44.999.700	44.999.700	22.753.400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.996.000	3.996.000	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							PINTU
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	75.936.000	81.325.000	53.447.420	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	163.440.600	163.440.600	79.041.790	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	100.220.300	100.220.300	18.666.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	63.220.300	63.220.300	60.375.290	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	686.982.411	686.982.411	679.654.310	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 Laporan	316.625.211	316.625.211	318.725.210	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	27 Laporan	365.357.200	365.357.200	355.929.100	DINAS PENANAMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelatihan bagi Pegawai Dinas Penanaman Modal	50 Orang	238.636.600	238.636.600	161.009.105	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	177.955.000	177.955.000	124.864.425	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35.181.600	35.181.600	20.594.680	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.500.000	25.500.000	15.550.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah investor	60 %	150.000.000	150.000.000	65.937.370	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah dalam pemberian Fasilitasi/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000	65.937.370	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	100.000.000	100.000.000	33.708.250	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara	25 Dokumen	50.000.000	50.000.000	32.229.120	DINAS PENANAMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah					MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-		-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	5 Daerah	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi di kabupaten Batang	100 %	82.800.000	82.800.000	72.730.425	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal kabupaten/Kota Presentase promosi di Kabupaten Batang	100 1 Dokumen	82.800.000	82.800.000	72.730.425	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	82.800.000	82.800.000	72.730.425	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN	Persentase ijin yang diterbitkan	100 %	516.293.009	509.033.009	358.956.560	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	PENANAMAN MODAL						
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-		516.293.009	509.033.009	358.956.560	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1250 Pelaku Usaha	348.750.109	352.490.109	270.906.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	90.758.200	90.758.200	55.316.950	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	18 Kegiatan Usaha	76.784.700	65.784.700	32.732.810	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal	8 %	407.747.000	407.747.000	156.077.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-		407.747.000	407.747.000	156.077.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20 Kegiatan Usaha.	65.688.000	65.688.000	25.480.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi	200 Pelaku Usaha	269.357.000	269.357.000	55.941.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	200 Kegiatan Usaha	72.702.000	72.702.000	74.656.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia	45 %	89.746.400	89.746.400	67.019.560	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia	100 % Satuan	89.746.400	89.746.400	67.019.560	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	89.746.400	89.746.400	67.019.560	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			13.176.719.472	13.176.719.472	7.310.637.059	
2.18.06.2.01.0002	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.334.369.604	6.122.565.567	7.310.637.059	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			6.334.369.604	6.122.565.567	7.310.637.059	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	90 %	5.144.347.472	5.121.884.767	170.579.443	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	209.129.977	184.097.347	101.431.850	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	8 Laporan	67.677.347	67.650.347	45.622.324	DINAS PARIWISATA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	141.452.630	116.447.000	55.809.526	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah peralatan yang dibeli, jumlah rapat koordinasi, jumlah arsip yang dikelola	3 Paket	355.990.000	300.072.604	61.548.900	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	tahun Paket	8.347.200	8.347.200	7.422.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	tahun Paket	60.392.000	59.710.000	7.500.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	tahun Paket	36.922.000	34.307.000	30.937.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	tahun Paket	31.096.000	25.596.000	15.689.900	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.07.0009	#N/A	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	tahun Unit	-	-		DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	26 Unit	119.294.373	126.598.965	7.598.693	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	tahun Unit	92.482.427	7.968.020	7.598.693	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	39 %	1.340.000.000	1.291.000.000	1.571.485.625	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Capaian Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda	29 persen	100.000.000	100.000.000	60.485.625	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	5 Dokumen	-	-	-	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	100 Orang	50.000.000	50.000.000	25.827.500	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	15.000.000	15.000.000	11.172.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	20 Orang	35.000.000	35.000.000	23.486.125	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 kegiatan	1.240.000.000	1.191.000.000	1.511.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	10 Organisasi	1.240.000.000	1.191.000.000	1.511.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN	capaian medali kejuaraan	45 medali	4.356.000.000	4.311.540.000	5.368.632.091	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	45 kegiatan	3.406.000.000	3.055.000.000	3.819.325.920	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2 Unit	250.000.000	150.000.000	124.325.920	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	20 Dokumen	3.156.000.000	2.905.000.000	3.695.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	capaian penyelenggaraan kejuaraan olahraga dilaksanakan	6 kegiatan	450.000.000	450.000.000	764.281.911	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	100.000.000	100.000.000	452.304.668	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	5 Kegiatan	-	-	-	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	500 Orang	350.000.000	350.000.000	311.977.243	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	capaian prestasi olahraga berjenjang, dan berkelanjutan	30 kegiatan	250.000.000	250.000.000	195.308.500	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	500 Orang	50.000.000	50.000.000	39.333.500	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							OLAH RAGA
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	50 Orang	-	-	60.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	200 Orang	200.000.000	200.000.000	95.975.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	10 Dokumen	-	-	-	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	capaian olahraga rekreasi yang dibina	30 kegiatan	250.000.000	556.540.000	589.715.760	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 Unit	250.000.000	556.540.000	589.715.760	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Penghargaan yang diterima	10 %	200.000.000	200.000.000	199.939.900	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	capaian pembinaan organisasi kepramukaan	4 kegiatan	200.000.000	200.000.000	199.939.900	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	150.000.000	150.000.000	150.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	4 Laporan	50.000.000	50.000.000	49.939.900	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.04.2.01.0005	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			6.842.349.868	7.054.153.905	6.744.396.837	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			6.842.349.868	7.054.153.905	6.744.396.837	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	35 orang	5.144.347.472	5.121.884.767	4.490.414.355	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat	jumlah bulan tersedianya gaji	24 Dokumen	4.289.911.622	4.210.634.351	4.010.462.458	DINAS PARIWISATA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Daerah	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35 Orang				KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	4.214.669.622	4.131.398.351	3.931.475.458	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	75.242.000	79.236.000	78.987.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah peralatan yang dibeli, jumlah rapat koordinasi, jumlah arsip yang dikelola	3 Paket	355.990.000	300.072.604	78.438.479	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	29.232.800	26.724.200	13.364.200	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	190.000.000	145.388.204	65.074.279	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan	6 jenis	170.021.500	300.481.500	304.749.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tahun Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	tahun Laporan	137.500.000	267.960.000	274.960.100	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	tahun Laporan	30.521.500	30.521.500	27.788.900	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	26 Unit	119.294.373	126.598.965	96.764.418	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	tahun Unit	26.811.946	118.630.945	96.764.418	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	tahun Unit	-	-	-	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan wisatawan	22 %	1.587.792.000	1.627.252.000	1.783.269.027	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	capaian destinasi wisata yang dikelola	10 obyek	100.000.000	100.000.000	66.720.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0 Laporan	100.000.000	100.000.000	66.720.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	0 Orang	-	-	-	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	capaian Destinasi Pariwisata yang dikelola	9 obyek	1.487.792.000	1.527.252.000	1.716.549.027	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Lokasi	-	-	-	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0 Lokasi	200.000.000	200.000.000	282.535.927	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	0 Unit	150.000.000	133.996.000	242.482.350	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Laporan	1.137.792.000	1.193.256.000	1.191.530.750	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan wisatawan	22 %	250.000.000	276.598.105	188.611.505	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan	Capaian jumlah wisatawan	22 persen	250.000.000	276.598.105	188.611.505	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						OLAH RAGA
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	50.000.000	50.000.000	27.705.650	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	50.000.000	76.598.105	54.698.105	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	0 Dokumen	-	-	-	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Kegiatan	100.000.000	100.000.000	71.507.750	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Promosi	50.000.000	50.000.000	34.700.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase jumlah ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	25 %	248.580.000	191.444.600	139.137.550	
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	capaian Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	17 Unit	248.580.000	191.444.600	139.137.550	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	123.580.000	76.444.600	54.722.550	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.04.2.02.0017	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	1 Promosi	75.000.000	75.000.000	50.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	2 Laporan	-	-	-	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas	20 Produk	50.000.000	40.000.000	34.415.000	DINAS PARIWISATA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Intelektual	Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif					KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Terlaksananya Kegiatan dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	100 40 % %	50.000.000	157.000.000	142.964.400	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	capaian Pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100 Orang	50.000.000	157.000.000	142.964.400	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	-	50.000.000	27.751.900	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	50.000.000	107.000.000	115.212.500	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	-	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	30 Orang	-	-	-	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			5.578.922.329	5.578.922.329	5.676.286.571	
3.26.05.2.02.0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.578.922.329	5.578.922.329	5.676.286.571	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			5.276.424.779	5.276.424.779	5.478.021.881	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	persentase capaian kinerja anggaran	93.77	4.498.075.700	4.504.575.700	4.219.172.941	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	program Perangkat Daerah cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	97.70 100 55 85 Persen (%) Persen (%) Persen (%) Persen (%) Persen (%)				
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 Persen (%)	11.525.347	11.525.347	7.879.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	11.525.347	11.525.347	7.879.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	100 Persen (%)	3.697.776.970	3.709.822.970	3.468.156.369	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	3.675.396.970	3.675.396.970	3.432.036.369	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	22.380.000	34.426.000	36.120.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 orang	25.000.000	31.000.000	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	25.000.000	31.000.000	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah	100 Persen (%)	199.894.437	201.948.537	148.263.868	DINAS PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.187.900	5.187.900	6.125.400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	63.386.600	64.586.600	59.107.150	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	27.792.000	30.780.000	27.015.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7.440.400	7.440.400	4.567.900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	7.000.000	13.500.000	13.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.966.037	76.966.037	36.983.018	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen	6.121.500	3.487.600	965.400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen (%)	382.595.100	352.495.100	349.180.800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240 Laporan	3.000.000	3.000.000	1.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	149.000.000	148.500.000	148.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	230.595.100	200.995.100	199.180.800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang kondisinya baik	84 Persen (%)	181.283.846	197.783.746	245.692.904	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	144.874.600	145.110.699	187.478.175	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	1.000.000	1.000.000	1.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	9.472.200	7.736.100	24.029.683	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	23.000.000	33.551.901	21.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	587.046	10.385.046	12.185.046	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2.350.000	-	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun	0,16 %	778.349.079	771.849.079	1.258.848.940	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perpustakaan yang aktiv	131 unit	506.660.229	500.061.429	472.152.565	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	16 Perpustakaan	82.266.800	82.266.800	19.069.300	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	17 Layanan	4.425.000	4.425.000	875.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan	20 Orang	35.000.000	35.000.000	17.345.000	DINAS PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	12.015.000	12.003.500	82.350.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	372.953.429	366.366.129	352.513.265	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai skor rata-rata durasi membaca	56,8 nilai	271.688.850	271.787.650	786.696.375	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	5 Perpustakaan	30.044.400	49.269.400	26.750.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 Orang	74.604.450	55.478.250	409.189.075	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	100 Lokus	167.040.000	167.040.000	350.757.300	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			302.497.550	302.497.550	198.264.690	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	75.4 Indeks	296.732.150	297.574.150	194.517.665	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	jumlah arsip dinamis yang dikelola	109500 Dokumen	111.850.230	112.692.230	56.646.215	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	109500 Berkas	73.596.630	74.438.630	32.895.915	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan	43 Laporan	38.253.600	38.253.600	23.750.300	DINAS PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Kabupaten/Kota					DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	jumlah arsip statis yang dikelola	1060 Dokumen	147.440.100	147.440.100	109.690.950	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100 Arsip	147.440.100	147.440.100	109.690.950	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah arsip yang diunggah ke SJIKN	150 Dokumen	37.441.820	37.441.820	28.180.500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	0 Pengguna	1.912.000	1.912.000	915.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	35.529.820	35.529.820	27.265.500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	22.4 Indeks	5.765.400	4.923.400	3.747.025	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	jumlah arsip yang dimusnahkan dengan retensi di bawah 10 tahun	2000 Dokumen	2.749.500	3.121.750	2.454.325	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	4 Arsip	2.749.500	3.121.750	2.454.325	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	jumlah daftar arsip statis dan hasil alih media yang diautentikasi	1 daftar	3.015.900	1.801.650	1.292.700	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	1 Arsip	3.015.900	1.801.650	1.292.700	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			7.575.713.575	7.725.713.575	8.346.881.741	
2.24.03.2.04.0001	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			7.575.713.575	7.725.713.575	8.346.881.741	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			7.575.713.575	7.725.713.575	8.346.881.741	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.386.703.575	5.386.703.575	6.116.063.851	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.420.318	21.286.324	13.131.397	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.420.318	21.286.324	13.131.397	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.464.819.452	4.456.659.446	5.554.000.619	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	624 Orang/bulan	4.106.821.452	4.106.821.446	5.174.222.619	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	357.998.000	349.838.000	379.778.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	84.000.000	70.000.000	33.770.400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	5.000.000	5.000.000	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	61 Orang	25.000.000	25.000.000	750.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	54.000.000	40.000.000	33.020.400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	307.737.105	323.727.105	178.461.785	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	5.000.000	2.499.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	115.054.257	129.694.257	24.463.050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	23.825.000	23.825.000	12.754.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	112.000.000	113.350.000	113.350.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000	1.200.000	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.657.848	50.657.848	25.395.735	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	25.000.000	25.000.000	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	25.000.000	25.000.000	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	212.873.900	222.073.900	194.134.300	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.250.000	1.250.000	625.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	130.000.000	139.200.000	114.300.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	81.623.900	81.623.900	79.209.300	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	285.852.800	267.956.800	142.565.350	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 Unit	70.852.800	62.956.800	43.326.400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.000.000	5.000.000	2.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	210.000.000	200.000.000	96.738.950	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	1.559.010.000	1.715.010.000	1.771.589.900	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	19.000.000	19.000.000	9.305.400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	19.000.000	19.000.000	9.305.400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	40.010.000	35.010.000	17.108.400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	150 Orang	20.000.000	17.000.000	8.295.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	20.010.000	18.010.000	8.813.400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-	1.475.000.000	1.621.000.000	1.717.461.100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6 Layanan	1.475.000.000	1.621.000.000	1.717.461.100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	25.000.000	40.000.000	27.715.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	40 Rekomendasi	25.000.000	40.000.000	27.715.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	290.000.000	290.000.000	185.919.000	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	52.355.000	57.355.000	29.155.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	38.663.000	44.763.000	22.795.750	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	0 Kelompok	13.692.000	12.592.000	6.359.250	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	237.645.000	232.645.000	156.764.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	197.645.000	192.645.000	127.819.500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	100 Unit	40.000.000	40.000.000	28.944.500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	100.000.000	100.000.000	98.645.840	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000	100.000.000	98.645.840	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05.2.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	0 0	100.000.000	100.000.000	98.645.840	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-	240.000.000	234.000.000	174.663.150	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan	-	-	240.000.000	234.000.000	174.663.150	DINAS KELAUTAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						DAN PERIKANAN
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35000 Ton	240.000.000	234.000.000	174.663.150	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			-	-	-	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-	-	-	-	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	-	-	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4 Laporan	-	-	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	5 Laporan	-	-	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	-	-	-	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	-	-	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Laporan	-	-	-	DINAS KELAUTAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					DAN PERIKANAN
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	-	-	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	-	-	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	-	-	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	2 Laporan	-	-	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-	-	-	-	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	1 Wilayah	-	-	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	80 laporan	-	-	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik	-	-	-	-	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	-	-	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	-	-	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	-	-	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-	-	-	-	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	12 laporan	-	-	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-	-	-	-	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	10 Laporan	-	-	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	SEKRETARIAT DAERAH			61.457.274.659	61.457.274.659	61.163.135.930	
3.27.06.2.01.0005	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			61.457.274.659	61.457.274.659	61.163.135.930	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			61.457.274.659	61.457.274.659	61.163.135.930	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	28.203.318.232	28.203.318.232	27.671.053.198	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.045.000	3.045.000	3.045.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	3.045.000	3.045.000	3.045.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	15.297.970.804	15.145.722.804	13.395.944.886	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/bulan	14.712.188.804	14.552.188.804	12.831.138.886	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen	542.782.000	550.534.000	521.806.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	43.000.000	43.000.000	43.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	120.000.000	110.000.000	-	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	190 Paket	60.000.000	60.000.000	-	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	50.000.000	50.000.000	-	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	10.000.000	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0011	#N/A	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	-	-		SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.774.286.400	1.774.286.400	2.035.611.400	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	260.245.900	260.245.900	269.245.900	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	314.040.500	314.040.500	372.900.500	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	100.000.000	100.000.000	70.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	165.000.000	165.000.000	177.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	67.000.000	67.000.000	22.932.500	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	450.000.000	450.000.000	600.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	418.000.000	418.000.000	523.532.500	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	403.537.600	401.537.600	633.101.800	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	50.000.000	39.514.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	256.063.200	196.063.200	354.101.800	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	97.474.400	155.474.400	239.486.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.895.666.100	1.895.666.100	1.914.975.200	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	143.202.500	143.202.500	143.202.500	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	930.000.000	930.000.000	855.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	255.020.000	255.020.000	345.020.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	567.443.600	567.443.600	571.752.700	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.131.840.200	3.282.388.200	3.098.981.400	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	128.500.000	128.500.000	73.177.500	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	1.789.078.000	1.789.078.000	1.581.977.500	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	10.000.000	50.000.000	75.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	285.000.000	322.710.200	381.860.200	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	919.262.200	992.100.000	986.966.200	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	929.232.528	929.232.528	910.881.847	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	179.232.528	179.232.528	160.881.847	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	150.000.000	150.000.000	150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	600.000.000	600.000.000	600.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	3.300.230.000	3.313.930.000	4.567.127.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	1.829.020.000	1.829.020.000	2.887.348.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	1.050.030.000	1.050.030.000	1.214.749.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang	6 Paket	421.180.000	434.880.000	465.030.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Disediakan					
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-	616.335.000	616.335.000	386.953.835	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	227.883.800	227.883.800	144.893.760	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	211.993.900	211.993.900	142.047.750	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	50.491.000	50.491.000	25.865.100	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	125.966.300	125.966.300	74.147.225	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	432 Kegiatan	731.174.600	731.174.600	724.430.830	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	144 Laporan	219.664.800	217.496.500	177.466.500	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	144 Laporan	143.527.200	157.629.000	141.874.850	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	144 Laporan	367.982.600	356.049.100	405.089.480	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	31.242.710.467	31.242.710.467	32.101.752.069	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase kegiatan administrasi tata pemerintahan, Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, dan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100 %	648.312.000	648.312.000	541.778.370	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	19 Dokumen	182.250.000	182.250.000	143.567.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	106.640.000	106.640.000	63.472.370	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	359.422.000	359.422.000	334.739.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	29.807.283.900	29.807.283.900	30.939.600.040	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	29.618.809.900	29.618.809.900	30.787.181.040	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	108.279.000	108.279.000	80.971.500	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	80.195.000	80.195.000	71.447.500	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	709.866.567	709.866.567	576.171.084	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	200 Dokumen	184.423.717	184.423.717	93.895.418	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	326.767.070	326.767.070	356.202.616	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	300 Dokumen	198.675.780	198.675.780	126.073.050	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kegiatan fasilitasi kerja sama daerah dan evaluasi pelaksanaan kerja sama	100 %	77.248.000	77.248.000	44.202.575	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	37.248.000	37.248.000	24.321.675	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	40.000.000	40.000.000	19.880.900	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN	-	-	2.011.245.960	2.011.245.960	1.390.330.663	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	PEMBANGUNAN						
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	25 Dokumen	500.000.000	500.000.000	326.074.750	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	182.480.000	182.480.000	111.096.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	192.520.000	192.520.000	138.085.050	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	15 Dokumen	125.000.000	125.000.000	76.893.700	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pembangunan	2 dokumen	560.080.000	560.080.000	450.776.175	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	158.270.300	158.270.300	133.346.650	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	229.259.400	229.259.400	182.965.225	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	172.550.300	172.550.300	134.464.300	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan	60 paket	562.551.800	562.551.800	387.663.860	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	65 Dokumen	315.336.500	315.336.500	234.843.750	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50 Dokumen	105.000.000	105.000.000	76.686.210	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang	142.215.300	142.215.300	76.133.900	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Sumber Daya Alam	12 Dokumen	388.614.160	388.614.160	225.815.878	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,	8 Dokumen	305.753.500	305.753.500	163.542.448	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja					
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	82.860.660	82.860.660	62.273.430	SEKRETARIAT DAERAH
	BAGIAN UMUM			-	-		
4.01.03.2.04.0003	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			-	-	-	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			-	-	-	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	-	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
	SEKRETARIAT DPRD			58.615.987.995	58.615.987.995	53.722.106.961	
4.01.01.2.05.0009	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			58.615.987.995	58.615.987.995	53.722.106.961	
4.02	SEKRETARIAT DPRD			58.615.987.995	58.615.987.995	53.722.106.961	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan Cakupan layanan operasional kantor Persentase administrasi keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100 100 100 undefined (%) undefined	38.585.987.995	38.528.662.995	38.312.542.486	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaranm dan evaluasi kinerja	9 dokumen	90.000.000	90.000.000	62.001.650	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	40.000.000	40.000.000	20.556.650	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000	50.000.000	41.445.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang terfasilitasi	3 kegiatan	3.785.762.275	3.785.069.275	3.485.293.906	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.576.262.775	3.576.262.775	3.285.571.078	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	199.500.000	198.807.000	194.740.728	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.999.500	9.999.500	4.982.100	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi barang milik daerah	10 dokumen	233.000.000	220.620.800	221.969.844	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	220.000.000	205.526.000	206.320.344	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	13.000.000	15.094.800	15.649.500	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah	20 orang	118.000.000	94.000.000	96.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	18.000.000	18.000.000	-	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	100.000.000	76.000.000	96.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terfasilitasi	8 kegiatan	590.000.000	553.114.676	294.522.551	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	19.838.800	21.248.140	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	48.224.676	26.940.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	120.000.000	120.000.000	45.038.611	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	200.000.000	116.270.200	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	150 Dokumen	25.000.000	25.000.000	5.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000	10.000.000	5.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	165.000.000	130.051.200	75.025.600	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	5 unit	300.000.000	220.274.800	-	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	92.219.000	-	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	128.055.800	-	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang kantor yang tersedia	10 unit	354.054.220	376.560.620	392.621.477	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan	174.054.220	174.849.220	174.849.220	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Laporan	30.000.000	33.452.800	48.785.913	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	150.000.000	168.258.600	168.986.344	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	149 unit	850.000.000	784.296.324	574.243.328	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	4 Unit	150.000.000	100.000.000	27.505.800	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	320.000.000	280.000.000	183.101.528	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	20.000.000	20.000.000	10.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000	325.726.000	291.409.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	40.000.000	38.570.324	44.302.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	20.000.000	20.000.000	17.925.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %	31.965.171.500	32.082.851.500	32.978.297.230	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	31.660.171.500	31.660.171.500	32.567.626.230	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	135 Paket	205.000.000	322.680.000	317.650.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	100.000.000	100.000.000	93.021.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD	100 %	300.000.000	321.875.000	207.592.500	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	2 Dokumen	100.000.000	100.000.000	95.980.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	30 Laporan	200.000.000	221.875.000	111.612.500	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase peningkatan kapasisitas anggota DPRD Persentase KUA/PPA dan Perda APBD yang ditetapkan	undefined 100 100 undefined undefined	20.030.000.000	20.087.325.000	15.409.564.475	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Persentase Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana dan Kode Etik DPRD	%				
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Perda non APBD yang ditetapkan	5 Perda	1.100.000.000	1.190.000.000	753.974.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	50.000.000	140.000.000	125.320.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	950.000.000	950.000.000	541.154.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	87.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah kebijakan anggaran yang dibahas	8 dokumen	330.000.000	505.000.000	354.447.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	80.000.000	255.000.000	226.106.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	60.000.000	60.000.000	33.381.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	60.000.000	60.000.000	29.980.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	60.000.000	60.000.000	29.995.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	4.995.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	60.000.000	60.000.000	29.990.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	360 laporan	1.230.000.000	1.230.000.000	729.383.775	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	80 Laporan	200.000.000	200.000.000	74.770.250	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	80 Laporan	200.000.000	200.000.000	78.731.275	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Bidang Infrastruktur	Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur					
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	80 Laporan	230.000.000	230.000.000	136.757.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	80 Laporan	200.000.000	200.000.000	67.010.450	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	24.794.800	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	10 Dokumen	350.000.000	350.000.000	347.320.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	100 %	2.790.000.000	3.090.000.000	2.764.494.900	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2.000.000.000	2.216.044.000	2.175.406.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	305.000.000	288.956.000	280.974.900	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	350.000.000	450.000.000	249.242.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	25.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	5 Dokumen	85.000.000	85.000.000	33.872.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah anggota DPRD yang melakukan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	45 orang	880.000.000	880.000.000	629.191.500	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	40.000.000	40.000.000	18.567.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	34.257.500	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	815.000.000	815.000.000	576.367.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase kepatuhan Anggota DPRD terhadap kode etik DPRD	100 %	10.000.000	70.000.000	67.741.550	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	10.000.000	70.000.000	67.741.550	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas DPRD	100 %	13.690.000.000	13.122.325.000	10.110.331.750	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	80 Dokumen	13.000.000.000	12.262.125.000	8.879.759.850	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	40.000.000	215.000.000	176.163.500	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	650.000.000	645.200.000	1.054.408.400	SEKRETARIAT DPRD
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			9.187.984.043	9.112.984.043	7.645.168.735	
4.02.02.2.08.0004	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			9.187.984.043	9.112.984.043	7.645.168.735	
5.01	PERENCANAAN			8.437.984.043	8.362.984.043	7.111.970.985	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	85 %	5.163.167.244	5.163.167.244	4.605.103.560	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	7 Dokumen	20.000.000	20.000.000	7.283.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.000.000	8.000.000	3.853.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12.000.000	12.000.000	3.430.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan yang disusun	12 laporan	4.008.140.420	3.992.958.420	3.719.421.116	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.859.388.420	3.859.388.420	3.593.186.116	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	143.724.000	128.542.000	123.791.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.028.000	5.028.000	2.444.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah SK/dokumen kepegawaian yang disusun	27 laporan	66.650.000	66.650.000	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	16.650.000	16.650.000	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	50.000.000	50.000.000	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah peralatan yang dibeli, jumlah peserta rapat koordinasi, jumlah arsip	3 jenis	228.558.424	234.956.424	265.355.924	BADAN PERENCANAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		yang dikelola					PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.124.600	11.124.600	7.784.400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.559.450	28.559.450	31.634.150	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	66.484.374	66.484.374	101.354.374	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	20.890.000	20.890.000	13.745.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.500.000	1.500.000	435.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	100.000.000	106.398.000	110.403.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	1 jenis	43.164.000	43.164.000	53.596.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							DAERAH
5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	43.164.000	43.164.000	53.596.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran	3 jenis	306.974.400	306.974.400	299.407.200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.002.000	3.002.000	2.501.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	171.900.000	171.900.000	172.400.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	132.072.400	132.072.400	124.506.200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah yang terpelihara	3 jenis	489.680.000	498.464.000	260.039.520	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	218.680.000	227.464.000	202.743.520	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	45.000.000	45.000.000	57.296.000	BADAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Lainnya	yang Dipelihara					PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	226.000.000	226.000.000	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 %	1.289.816.799	1.289.816.799	869.496.650	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang disusun	3 Dokumen	840.534.999	866.584.999	659.961.200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	264.599.999	259.199.999	233.217.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	3 Dokumen	25.000.000	25.000.000	12.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	45.220.500	38.220.500	37.220.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	46.423.000	39.898.000	36.998.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	105.496.000	101.246.000	81.009.200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	15 Usulan	11.657.000	11.657.000	7.497.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	342.138.500	391.363.500	251.519.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi yang tersedia	1 Data	204.937.500	178.887.500	85.417.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	130.638.500	130.638.500	64.561.400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	74.299.000	48.249.000	20.856.100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang sudah melaporkan evaluasi tepat waktu	52 Perangkat Daerah	244.344.300	244.344.300	124.117.950	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	244.344.300	244.344.300	124.117.950	BADAN PERENCANAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Pembangunan Daerah						PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program priroitas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target	91 %	1.985.000.000	1.910.000.000	1.637.370.775	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 laporan	740.000.000	665.000.000	495.900.450	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22 Dokumen	233.774.000	233.774.000	130.433.350	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	22 Laporan	10.000.000	10.000.000	8.216.100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	361.231.000	361.231.000	308.512.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	134.995.000	59.995.000	48.738.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1 Laporan	440.000.000	440.000.000	250.826.135	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	185.955.000	196.875.000	158.215.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	43.872.000	38.312.000	22.039.325	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	11.250.000	5.890.000	4.320.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	153.985.000	155.835.000	40.773.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	35.963.000	35.113.000	18.740.310	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	8.975.000	7.975.000	6.737.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan hasil perencanaan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 Laporan	805.000.000	805.000.000	890.644.190	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	3 Dokumen	344.315.250	344.315.250	360.800.000	BADAN PERENCANAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)					PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	59.449.000	59.449.000	26.324.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	73.020.000	73.020.000	49.966.440	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	308.880.000	308.880.000	444.103.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	10.335.750	10.335.750	4.950.250	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	9.000.000	9.000.000	4.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			750.000.000	750.000.000	533.197.750	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	60 %	750.000.000	750.000.000	533.197.750	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah rekomendasi utama kajian bidang pemerintahan yang mendukung perencanaan pembangunan	2 Rekomendasi	236.450.000	236.450.000	145.970.100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							DAERAH
5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	206.450.000	206.450.000	124.360.200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	30.000.000	30.000.000	21.609.900	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah rekomendasi kajian bidang sosial dan kependudukan yang mendukung perencanaan pembangunan	2 Rekomendasi	125.000.000	125.000.000	158.325.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2 Dokumen	125.000.000	125.000.000	158.325.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	52 Perangkat Daerah	388.550.000	388.550.000	228.902.650	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4 Dokumen	156.458.900	156.458.900	126.076.750	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	50.917.700	50.917.700	27.971.950	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	1 Laporan	113.007.400	113.007.400	34.387.950	BADAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif					PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	26.550.000	26.550.000	25.974.100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	41.616.000	41.616.000	14.491.900	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			419.995.701.558	420.145.701.558	422.682.603.029	
5.05.02.2.04.0005	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			419.995.701.558	420.145.701.558	422.682.603.029	
5.02	KEUANGAN			419.995.701.558	420.145.701.558	422.682.603.029	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100 %	44.153.029.478	44.153.029.478	43.880.709.417	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	6 Dokumen	46.492.500	46.492.500	8.825.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.355.000	15.355.000	5.329.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	11.637.500	11.637.500	2.146.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	19.500.000	19.500.000	1.350.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan yang disusun	2 Dokumen	31.652.642.383	31.619.416.480	35.528.591.627	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/bulan	31.494.302.383	31.458.716.480	35.367.143.627	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	158.340.000	160.700.000	161.448.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah SK/dokumen kepegawaian yang disusun	5 Dokumen	824.953.800	907.767.600	320.095.700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000	150.000.000	50.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	774.953.800	757.767.600	270.095.700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah peralatan yang dibeli, jumlah peserta rapat koordinasi, jumlah arsip yang dikelola	100 %	1.320.571.158	1.256.079.258	597.292.450	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	32.000.900	32.000.900	32.000.900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	789.381.750	759.679.850	182.974.850	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	72.883.000	38.093.000	39.613.700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	156.592.000	156.592.000	172.155.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	83.686.000	83.686.000	84.848.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.500.000	5.500.000	1.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	60 Laporan	180.527.508	180.527.508	84.700.000	BADAN PENGELOLAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		SKPD					KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah kendaraan dinas yang dibeli	26 Unit	7.383.578.000	7.383.578.000	5.273.478.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	26 Unit	7.383.578.000	7.383.578.000	5.273.478.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Surat Menyurat dan ASN yang terlayani	100 %	1.181.216.640	1.190.120.640	1.265.120.640	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	524.000.000	524.000.000	578.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	647.216.640	656.120.640	677.120.640	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD terpelihara	100 %	1.743.574.997	1.749.575.000	887.305.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	111 Unit	713.850.000	713.850.000	583.618.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	85.000.000	85.000.000	50.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	809.049.997	815.050.000	88.500.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	135.675.000	135.675.000	165.187.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyampaian Raperda APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	370.696.784.630	370.846.784.630	374.035.106.787	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Rancangan APBD yang tersusun	2 Dokumen	11.406.661.250	11.315.661.350	1.631.058.483	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	134.729.800	149.129.800	115.082.900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	134.598.500	148.998.500	114.922.600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	343.328.600	329.250.600	95.970.750	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	149.677.350	146.335.350	72.166.750	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	18.677.000	18.677.000	10.436.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	14.715.500	14.715.500	3.180.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	349.802.000	388.694.000	348.751.300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	334.869.700	383.661.700	287.263.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	9.400.000.000	9.215.644.100	200.951.682	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	1 Dokumen	52.773.000	52.773.000	6.889.900	BADAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Pendapatan	Perencanaan Anggaran Pendapatan					PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	154.590.000	184.402.000	30.677.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	30.800.000	30.800.000	1.094.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	288.099.800	252.579.800	343.670.801	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Realisasi penerbitan SP2D	95 %	1.157.016.200	1.157.016.200	849.991.525	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	33.384.750	33.384.750	28.700.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	315.443.800	315.443.800	256.634.750	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi	1 Dokumen	15.593.000	15.593.000	4.462.375	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	117.387.600	117.387.600	104.831.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	128.401.050	128.401.050	120.810.150	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	237.513.700	237.513.700	231.598.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	309.292.300	309.292.300	102.954.650	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah yang tersusun	1 Dokumen	964.301.700	1.055.301.600	1.045.930.700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	37.059.500	37.059.500	37.059.500	BADAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah					PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	112.389.200	112.389.200	112.389.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	46 Laporan	303.345.100	303.345.100	303.305.100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	222.184.700	313.184.600	312.740.900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	71.271.100	71.271.100	71.271.100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	94.401.800	94.401.800	85.515.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	123.650.300	123.650.300	123.649.900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyerapan Dana Desa, ADD dan BHP	100 %	357.168.805.480	357.318.805.480	370.508.126.079	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	325.428.452.200	325.428.452.200	327.308.891.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	12.000.000.000	12.150.000.000	24.561.101.879	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	19.740.353.280	19.740.353.280	18.638.133.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase tersusunnya data aset Pemda menurut lokasi, legalitas kepemilikan, pemnfaatan dan kondisinya	100 %	1.950.862.150	1.950.862.150	1.583.537.025	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan BMD Kabupaten Batang tersusun	1 dokumen	1.950.862.150	1.950.862.150	1.583.537.025	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	237.000.000	265.136.000	160.062.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	-	-	45.482.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.055.000.650	1.026.864.650	839.611.975	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	173.983.600	273.983.600	260.511.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	376.280.500	276.280.500	196.816.700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	108.597.400	108.597.400	81.052.950	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	1,36 %	3.195.025.300	3.195.025.300	3.183.249.800	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya mutu pelayanan pendapatan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	100 persen 87 skor	3.195.025.300	3.195.025.300	3.183.249.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	100.681.700	100.681.700	78.470.600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	115.261.750	115.261.750	194.578.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1.393.939.000	1.393.939.000	1.309.807.275	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	157.885.000	157.885.000	214.400.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	76.911.850	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan	195.965.050	195.965.050	189.129.025	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	844.209.700	844.209.700	926.993.700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	287.083.100	287.083.100	192.958.850	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			9.179.017.169	9.179.017.169	7.789.709.928	
5.02.04.2.01.0013	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			9.179.017.169	9.179.017.169	7.789.709.928	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
5.03	KEPEGAWAIAN			7.428.933.202	7.422.549.202	6.425.753.119	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja program BKD	100 %	4.981.040.072	4.984.455.572	4.475.898.400	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	7 dokumen	30.000.000	71.015.700	49.194.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan	30.000.000	71.015.700	49.194.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan yang disusun	12 laporan	3.575.932.022	3.578.308.022	3.431.859.250	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.549.592.022	3.549.592.022	3.404.523.250	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	26.340.000	28.716.000	27.336.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan Bintek,Sosialisasi dan workshop	3 laporan	187.218.650	170.546.150	99.700.400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	34.635.400	33.585.400	17.290.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	165 Orang	152.583.250	136.960.750	82.410.400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan	12 laporan	442.438.000	422.610.300	217.156.700	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	14.746.000	14.746.000	7.372.400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	124.431.700	124.431.700	38.865.800	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	94.920.000	84.920.000	57.820.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	46.888.600	46.888.600	38.796.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.000.000	9.000.000	3.040.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	152.451.700	142.624.000	71.262.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan layanan operasional kantor	12 bulan	427.896.400	431.680.400	420.092.550	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.113.000	2.113.000	2.113.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	243.137.700	243.137.700	243.137.700	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000	40.000.000	30.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	137.645.700	146.429.700	144.841.850	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	317.555.000	310.295.000	257.895.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	29 Unit	189.800.000	189.800.000	117.400.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya					PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	127.755.000	120.495.000	140.495.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu	100 %	2.447.893.130	2.438.093.630	1.949.854.719	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah laporan terlaksananya pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	12 laporan	1.118.959.890	1.127.743.890	649.203.049	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	26.862.000	26.862.000	13.270.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	843.452.900	843.452.900	460.012.900	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	67.637.360	67.637.360	47.208.929	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	107.007.790	115.791.790	78.656.620	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	73.999.840	73.999.840	50.054.100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah laporan terprosesnya Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Promosi ASN	12 laporan	816.620.000	775.100.000	903.304.450	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	12 Dokumen	27.620.000	27.620.000	18.683.950	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	37.000.000	37.000.000	19.298.350	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	752.000.000	710.480.000	865.322.150	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN dan Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional	12 laporan	132.575.840	132.575.840	88.658.970	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 Orang	51.555.840	51.555.840	33.107.870	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	10 Orang	81.020.000	81.020.000	55.551.100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							MANUSIA
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase terlaksananya pemberian penghargaan bagi pegawai,pembinaan disiplin ASN dan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	100 %	379.737.400	402.673.900	308.688.250	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	168.702.200	168.702.200	140.723.350	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	2500 Orang	136.205.200	132.489.200	85.623.150	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	74.830.000	101.482.500	82.341.750	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			1.750.083.967	1.756.467.967	1.363.956.809	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target	100 %	1.750.083.967	1.756.467.967	1.363.956.809	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	1 laporan	150.000.000	150.000.000	154.859.750	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	60 Orang	150.000.000	150.000.000	154.859.750	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan Latsar CPNS	200 ASN	1.600.083.967	1.606.467.967	1.209.097.059	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	1.600.083.967	1.606.467.967	1.209.097.059	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	INSPEKTORAT DAERAH			12.925.535.497	16.841.983.823	12.922.188.283	
5.04.02.2.02.0007	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			12.925.535.497	16.841.983.823	12.922.188.283	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH			12.925.535.497	16.841.983.823	12.922.188.283	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.008.983.497	10.800.162.023	8.981.299.983	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	51.392.000	9.660.800	4.100.300	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	51.392.000	9.660.800	4.100.300	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.861.053.497	6.775.508.497	6.763.834.620	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	6.749.693.497	6.649.693.497	6.685.456.620	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	52.800.000	84.000.000	42.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	58.560.000	41.815.000	36.378.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	134.250.000	91.200.000	91.200.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	134.250.000	91.200.000	91.200.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	524.328.000	1.365.442.100	489.208.350	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	274.328.000	998.992.100	314.708.350	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	250.000.000	366.450.000	174.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	600.312.000	958.414.826	619.994.413	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.162.000	351.485.000	222.560.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	151.550.000	139.045.000	90.060.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	154.000.000	123.270.000	111.400.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	-	128.175.000	92.887.500	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.000.000	5.000.000	520.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	273.600.000	211.439.826	102.566.913	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	427.416.500	3.153.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	-	270.000.000	-	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	-	-	-	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	1 Unit	-	157.416.500	3.153.000	INSPEKTORAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					DAERAH
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	293.540.000	415.555.300	393.955.300	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	160.000.000	238.260.100	238.260.100	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	129.540.000	173.295.200	151.695.200	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	544.108.000	756.964.000	615.854.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	12.000.000	385.964.000	247.274.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	433.008.000	40.000.000	51.080.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	-	105.000.000	87.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	99.100.000	226.000.000	230.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase penyelesaian tindak lanjut mandatory pengawasan dan pembinaan	100 %	3.133.012.000	4.777.153.500	2.848.719.100	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase jumlah pengawasan dan pembinaan	85 Persen	2.509.480.000	2.655.173.000	2.228.044.500	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	490.012.000	448.454.000	353.149.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	373.804.000	384.394.000	288.119.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	484.252.000	450.634.000	296.879.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	110.448.000	134.970.000	67.485.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 Laporan	131.988.000	159.628.000	283.794.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	298.576.000	533.419.000	404.219.500	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	620.400.000	543.674.000	534.399.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase jumlah penanganan kasus	80 Persen	623.532.000	2.121.980.500	620.674.600	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	108.080.000	100.036.500	63.380.600	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	515.452.000	2.021.944.000	557.294.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-	783.540.000	1.264.668.300	1.092.169.200	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-	367.100.000	699.085.400	471.962.157	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	12 Rekomendasi	124.500.000	312.291.400	230.665.200	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	242.600.000	386.794.000	241.296.957	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-	416.440.000	565.582.900	620.207.043	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan	42 perangkat daerah	40.000.000	138.600.000	305.827.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Daerah					
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42 perangkat daerah	101.080.000	113.320.000	105.820.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	241.880.000	281.112.900	180.885.043	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	42 perangkat daerah	33.480.000	32.550.000	27.675.000	INSPEKTORAT DAERAH
	KECAMATAN BATANG			12.694.157.443	12.694.157.443	10.577.619.082	
6.01.03.2.02.0004	UNSUR KEWILAYAHAN			12.694.157.443	12.694.157.443	10.577.619.082	
7.01	KECAMATAN			12.694.157.443	12.694.157.443	10.577.619.082	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah cakupan layanan operasional kantor	100 12 % bulan	11.577.786.593	11.577.786.593	9.490.285.832	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	5 buah	15.762.100	15.762.100	4.973.700	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	10.762.100	10.762.100	4.038.700	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	935.000	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 laporan	9.977.128.576	9.951.880.576	8.260.595.245	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	9.069.401.684	9.069.401.684	7.378.116.353	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	12 Dokumen	907.726.892	882.478.892	882.478.892	KECAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					BATANG
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	100 %	42.000.000	42.000.000	7.530.000	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	27.000.000	27.000.000	-	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47 Orang	15.000.000	15.000.000	7.530.000	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 %	291.872.150	296.697.650	172.185.900	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	29.363.100	28.981.300	20.486.400	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	77.121.250	78.501.250	57.420.300	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	98.415.000	97.760.000	45.460.000	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	59.672.800	63.795.100	45.044.200	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	12.300.000	12.660.000	3.775.000	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	-	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	91.568.800	199.010.200	64.502.200	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.568.800	199.010.200	64.502.200	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor	10 kegiatan	586.576.317	587.636.317	570.557.867	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	9.887.500	10.137.500	10.137.500	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	144.910.057	145.720.057	145.720.057	KECAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					BATANG
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	431.778.760	431.778.760	414.700.310	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	10 kegiatan	572.878.650	484.799.750	409.940.920	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	167.819.300	160.028.900	64.921.771	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	367.066.850	288.224.750	328.215.014	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	37.992.500	36.546.100	16.804.135	KECAMATAN BATANG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 %	25.971.500	25.971.500	25.971.500	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP Layanan kepada masyarakt di Kecamatan yang memiliki SOP	1 kegiatan	25.971.500	25.971.500	25.971.500	KECAMATAN BATANG
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	25.971.500	25.971.500	25.971.500	KECAMATAN BATANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	90 %	1.055.974.350	1.055.974.350	1.050.574.350	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	90 %	5.677.600	5.677.600	5.677.600	KECAMATAN BATANG
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.677.600	5.677.600	5.677.600	KECAMATAN BATANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Bintek kpd Lembaga Kemasyarakat Kelurahan yang diselenggarakan dengan lancar	90 %	1.050.296.750	1.050.296.750	1.044.896.750	KECAMATAN BATANG
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	67.496.750	67.496.750	67.496.750	KECAMATAN BATANG
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	982.800.000	982.800.000	977.400.000	KECAMATAN BATANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	12.239.000	12.239.000	4.270.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum Jumlah desa terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	100 % 21 laporan	12.239.000	12.239.000	4.270.000	KECAMATAN BATANG
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	12.239.000	12.239.000	4.270.000	KECAMATAN BATANG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	4.070.000	4.070.000	1.980.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	1 kegiatan	4.070.000	4.070.000	1.980.000	KECAMATAN BATANG
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	4.070.000	4.070.000	1.980.000	KECAMATAN BATANG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	90 %	18.116.000	18.116.000	4.537.400	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Presentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	90 %	18.116.000	18.116.000	4.537.400	KECAMATAN BATANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	-	KECAMATAN BATANG
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	13.116.000	13.116.000	4.537.400	KECAMATAN BATANG
	KELURAHAN WATESALIT			650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01.06.2.01.0003	UNSUR KEWILAYAHAN			650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01	KECAMATAN			650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	650.000.000	650.000.000	650.000.000	KECAMATAN BATANG
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	455.000.000	455.000.000	455.000.000	KECAMATAN BATANG
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	195.000.000	195.000.000	195.000.000	KECAMATAN BATANG
	KELURAHAN KAUMAN			650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01.03.2.02.0003	UNSUR KEWILAYAHAN			650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01	KECAMATAN			650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	650.000.000	650.000.000	650.000.000	KECAMATAN BATANG
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	455.000.000	455.000.000	455.000.000	KECAMATAN BATANG
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	195.000.000	195.000.000	195.000.000	KECAMATAN BATANG
	KELURAHAN KASEPUHAN			650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01.03.2.02.0003	UNSUR KEWILAYAHAN			650.000.000	650.000.000	650.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
7.01	KECAMATAN			650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	650.000.000	650.000.000	650.000.000	KECAMATAN BATANG
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	455.000.000	455.000.000	455.000.000	KECAMATAN BATANG
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	195.000.000	195.000.000	195.000.000	KECAMATAN BATANG
	KELURAHAN PROYONANGGAN SELATAN			650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01.03.2.02.0003	UNSUR KEWILAYAHAN			650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01	KECAMATAN			650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	650.000.000	650.000.000	650.000.000	KECAMATAN BATANG
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	455.000.000	455.000.000	455.000.000	KECAMATAN BATANG
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	195.000.000	195.000.000	195.000.000	KECAMATAN BATANG
	KELURAHAN PROYONANGGAN TENGAH			650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01.03.2.02.0003	UNSUR KEWILAYAHAN			650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01	KECAMATAN			650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	650.000.000	650.000.000	650.000.000	KECAMATAN BATANG
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	455.000.000	455.000.000	455.000.000	KECAMATAN BATANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	195.000.000	195.000.000	195.000.000	KECAMATAN BATANG
	KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA			650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01.03.2.02.0003	UNSUR KEWILAYAHAN			650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01	KECAMATAN			650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	650.000.000	650.000.000	650.000.000	KECAMATAN BATANG
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	455.000.000	455.000.000	455.000.000	KECAMATAN BATANG
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	195.000.000	195.000.000	195.000.000	KECAMATAN BATANG
	KELURAHAN KARANGASEM UTARA			650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01.03.2.02.0003	UNSUR KEWILAYAHAN			650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01	KECAMATAN			650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	650.000.000	650.000.000	650.000.000	KECAMATAN BATANG
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	455.000.000	455.000.000	455.000.000	KECAMATAN BATANG
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	195.000.000	195.000.000	195.000.000	KECAMATAN BATANG
	KELURAHAN KARANGASEM SELATAN			650.000.000	650.000.000	626.000.000	
7.01.03.2.02.0003	UNSUR KEWILAYAHAN			650.000.000	650.000.000	626.000.000	
7.01	KECAMATAN			650.000.000	650.000.000	626.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	650.000.000	650.000.000	626.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	650.000.000	650.000.000	626.000.000	KECAMATAN BATANG
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	455.000.000	455.000.000	455.000.000	KECAMATAN BATANG
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	195.000.000	195.000.000	171.000.000	KECAMATAN BATANG
	KELURAHAN SAMBONG			650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01.03.2.02.0003	UNSUR KEWILAYAHAN			650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01	KECAMATAN			650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	650.000.000	650.000.000	650.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	650.000.000	650.000.000	650.000.000	KECAMATAN BATANG
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	455.000.000	455.000.000	455.000.000	KECAMATAN BATANG
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	195.000.000	195.000.000	195.000.000	KECAMATAN BATANG
	KECAMATAN TULIS			2.028.820.151	2.058.820.151	1.771.831.409	
7.01.03.2.02.0003	UNSUR KEWILAYAHAN			2.028.820.151	2.058.820.151	1.771.831.409	
7.01	KECAMATAN			2.028.820.151	2.058.820.151	1.771.831.409	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1.948.820.151	1.949.020.151	1.679.188.409	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	2.500.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	2.500.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	12 Laporan	1.504.510.151	1.522.402.151	1.428.032.859	KECAMATAN TULIS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.491.070.151	1.491.070.151	1.396.700.859	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	13.440.000	31.332.000	31.332.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Aset yang disusun Persentase pengadaan barang milik daerah	100 % 2 Laporan	7.680.000	7.680.000	7.680.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7.680.000	7.680.000	7.680.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	2 Laporan	68.000.000	59.000.000	23.555.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.000.000	-		KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	54.000.000	54.000.000	21.035.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	5.000.000	5.000.000	2.520.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	6 Laporan	156.640.000	148.548.000	75.755.550	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.600.000	4.600.000	2.300.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	85.580.000	79.336.000	41.277.050	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000	35.000.000	21.195.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	5.000.000	2.500.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	960.000	960.000	320.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25.500.000	23.652.000	8.163.500	KECAMATAN TULIS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	67.990.000,00	67.390.000	64.665.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	17.640.000,00	17.640.000	17.640.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	48.350.000,00	47.750.000	45.025.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan pemeliharaan	10 Unit	139.000.000,00	139.000.000	77.000.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	115.000.000,00	112.000.000	62.000.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19.000.000,00	19.000.000	9.500.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	5.000.000,00	8.000.000	5.500.000	KECAMATAN TULIS
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Layanan Masyarakat di Kecamatan yang sesuai SOP	100 Persen	35.000.000,00	35.000.000	28.425.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000	25.000.000	KECAMATAN TULIS
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000	25.000.000	KECAMATAN TULIS
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000	3.425.000	KECAMATAN TULIS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000	3.425.000	KECAMATAN TULIS
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	90 %	5.000.000,00	35.000.000	35.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase peningkatan peran perempuan di perdesaan Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 % 1 Laporan	5.000.000,00	35.000.000	35.000.000	KECAMATAN TULIS
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	5.000.000,00	35.000.000	35.000.000	KECAMATAN TULIS
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	13.000.000,00	13.000.000	4.788.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibun	17 Desa	13.000.000,00	13.000.000	4.788.000	KECAMATAN TULIS
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	13.000.000,00	13.000.000	4.788.000	KECAMATAN TULIS
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	13.000.000,00	13.000.000	19.695.500	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	13.000.000,00	13.000.000	19.695.500	KECAMATAN TULIS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	23 Orang	13.000.000,00	13.000.000	4.695.500	KECAMATAN TULIS
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	45 Orang	0,00	-	15.000.000	KECAMATAN TULIS
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90 1 % Laporan	14.000.000,00	13.800.000	4.734.500	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Bimtek Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan Presentase aparatur Desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	100 % 1 Laporan	14.000.000,00	13.800.000	4.734.500	KECAMATAN TULIS
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	14.000.000,00	13.800.000	4.734.500	KECAMATAN TULIS
	KECAMATAN WARUNGASEM			2.355.388.225	2.355.388.225	1.998.970.223	
7.01.06.2.01.0003	UNSUR KEWILAYAHAN			2.355.388.225	2.355.388.225	1.998.970.223	
7.01	KECAMATAN			2.355.388.225,00	2.355.388.225	1.998.970.223	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase rata -rata capaian kinerja program perangkat Daerah	100 persen	2.225.061.425,00	2.234.798.825	1.920.493.523	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000	2.500.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000	2.500.000	KECAMATAN WARUNGASEM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Statistik Sektoral Daerah					
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang di susun	12 Laporan	1.678.052.225,00	1.724.900.225	1.542.528.393	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.640.888.225,00	1.640.888.225	1.458.516.393	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	37.164.000,00	84.012.000	84.012.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	100 persen	32.000.000,00	32.000.000	5.000.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	27.000.000,00	27.000.000	-	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat Daerah	100 persen	77.268.800,00	77.750.300	32.711.730	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.504.400,00	4.504.400	2.252.600	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.874.500,00	11.246.500	4.592.600	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	22.715.000,00	22.000.000	6.835.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	18.834.800,00	20.009.300	9.884.500	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.340.100,00	2.340.100	320.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	18.000.000,00	17.650.000	8.827.030	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang milik Daerah	100 persen	42.704.400,00	42.704.400	30.989.200	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	16.110.000,00	16.110.000	21.394.800	KECAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							WARUNGASEM
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	26.594.400,00	26.594.400	9.594.400	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor	4 Laporan	72.799.000,00	34.921.300	32.915.200	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.100.000,00	2.100.000	2.100.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.400.000,00	13.200.000	13.200.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	62.299.000,00	19.621.300	17.615.200	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 unit	317.237.000,00	317.522.600	273.849.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	77.745.000,00	78.030.600	45.377.800	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	5.000.000,00	5.000.000	-	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	223.992.000,00	223.992.000	211.996.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	7.000.000,00	7.000.000	12.975.200	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3.500.000,00	3.500.000	3.500.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 %	45.773.000,00	41.333.000	29.983.500	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Layanan kepada masyarakt di Kecamatan yang memiliki SOP	1 laporan	28.990.000,00	27.340.000	27.340.000	KECAMATAN WARUNGASEM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	28.990.000,00	27.340.000	27.340.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Laporan	16.783.000,00	13.993.000	2.643.500	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	16.783.000,00	13.993.000	2.643.500	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	90 %	5.005.000,00	5.005.000	5.005.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di Perdesaan	90 persen	5.005.000,00	5.005.000	5.005.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.005.000,00	5.005.000	5.005.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	17.786.000,00	17.786.000	8.931.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	18 Desa	17.786.000,00	17.786.000	8.931.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	17.786.000,00	17.786.000	8.931.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	27.254.800,00	24.957.400	23.478.700	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan	1 kegiatan	27.254.800,00	24.957.400	23.478.700	KECAMATAN WARUNGASEM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Penugasan Kepala Daerah	sosial)					
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	72 Orang	20.254.800,00	17.957.400	5.078.700	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	40 Orang	0,00	-	15.000.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000	3.400.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	90 %	34.508.000,00	31.508.000	11.078.500	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	85 persen	34.508.000,00	31.508.000	11.078.500	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	13.883.000,00	13.883.000	4.016.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	7.500.000,00	4.500.000	2.250.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	13.125.000,00	13.125.000	4.812.500	KECAMATAN WARUNGASEM
	KECAMATAN WONOTUNGGAL			3.459.325.655	3.459.325.655	3.093.224.070	
7.01.06.2.01.0003	UNSUR KEWILAYAHAN			3.459.325.655	3.459.325.655	3.093.224.070	
7.01	KECAMATAN			3.459.325.655,00	3.459.325.655	3.093.224.070	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100 %	3.402.347.155,00	3.385.547.155	3.023.790.570	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	Pelaksanaan Penyelenggaraan	1 laporand	5.000.000,00	5.000.000	4.865.000	KECAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					WONOTUNGGAL
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000	4.865.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	1.663.890.295,00	1.662.522.295	1.462.719.810	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang Orang/bulan	1.630.146.295,00	1.630.146.295	1.430.343.810	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	33.744.000,00	32.376.000	32.376.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan 12 Bulan	45.060.000,00	45.060.000	45.060.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	37.380.000,00	37.380.000	37.380.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.680.000,00	7.680.000	7.680.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Sosilaisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang 13 Orang 15 stel	37.850.000,00	32.000.000	1.690.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	5.850.000,00	-	-	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	5.000.000,00	5.000.000	1.690.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	27.000.000,00	27.000.000	-	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen 12 laporan	101.755.000,00	129.755.000	42.738.900	KECAMATAN WONOTUNGGAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Paket				
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.095.000,00	6.095.000	3.064.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.085.000,00	53.085.000	8.611.900	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.950.000,00	33.950.000	19.934.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.595.000,00	6.595.000	3.609.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.440.000,00	1.440.000	520.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	28.590.000,00	28.590.000	7.000.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit 50 unit	1.425.186.400,00	1.350.564.800	1.342.793.200	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	31.000.000,00	31.000.000	31.000.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.300.000.000,00	1.300.000.000	1.298.750.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	68.100.000,00	-		KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	26.086.400,00	19.564.800	13.043.200	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan 1 tahun	60.494.460,00	67.934.060	55.607.260	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.875.000,00	1.875.000	1.875.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.358.960,00	30.218.560	19.454.160	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	33.260.500,00	35.840.500	34.278.100	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 paket 1 unit 8 unit	63.111.000,00	92.711.000	68.316.400	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	55.111.000,00	55.111.000	38.116.400	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	25.600.000	24.200.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3 Unit	8.000.000,00	12.000.000	6.000.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi					
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 %	25.678.500,00	36.078.500	31.363.500	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Kali	25.678.500,00	25.678.500	24.938.500	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	25.678.500,00	25.678.500	24.938.500	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Sosialisasi kegiatan Pelayanan Publik	undefined undefined	0	10.400.000	6.425.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	0	10.400.000	6.425.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	90 %	5.000.000,00	5.000.000	4.800.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000	4.800.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000	4.800.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	6.000.000,00	6.600.000	2.420.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah hasil Koordinasi Harmonisasi hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	6.000.000,00	6.600.000	2.420.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	6.000.000,00	6.600.000	2.420.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	10.150.000,00	16.050.000	24.425.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bimtek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Laporan 45 Orang	10.150.000,00	16.050.000	24.425.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45 Orang	10.150.000,00	10.050.000	6.425.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	45 Orang	0	-	15.000.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	0	6.000.000	3.000.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	90 %	10.150.000,00	10.050.000	6.425.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi pelaksanaan Tuga dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Kegiatan	10.150.000,00	10.050.000	6.425.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	10.150.000,00	10.050.000	6.425.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	KECAMATAN BANDAR			2.747.116.771	2.747.116.771	2.454.237.397	
7.01.06.2.01.0007	UNSUR KEWILAYAHAN			2.747.116.771	2.747.116.771	2.454.237.397	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
7.01	KECAMATAN			2.747.116.771,00	2.747.116.771	2.454.237.397	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya wali data pendukung statistik sektoral di kecamatan	100 Persen (%)	2.634.461.771,00	2.678.981.771	2.374.677.397	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan	4 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan PD	1 Tahun	1.945.300.771,00	1.957.672.771	1.856.870.087	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	1.917.616.771,00	1.917.616.771	1.816.814.087	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	27.684.000,00	40.056.000	40.056.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Honorarium Jasa Keamanan Kantor	3 Orang	0	52.200.000	52.200.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	0	52.200.000	52.200.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	12 bulan	51.550.000,00	46.111.500	12.271.500	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	10.500.000,00	-		KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	61 Orang	27.000.000,00	27.000.000	-	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51 Orang	14.050.000,00	19.111.500	12.271.500	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Adminstrasi Umum PD	12 bulan	196.053.000,00	193.811.500	43.228.810	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.499.000,00	7.499.000	3.757.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	61.012.500,00	61.012.500	8.298.100	KECAMATAN BANDAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	59.550.000,00	59.550.000	15.210.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000	4.384.250	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000	800.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	55.591.500,00	53.350.000	10.779.460	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	38.000.000,00	38.000.000	35.400.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.600.000,00	4.600.000	4.600.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	15.000.000,00	15.000.000	15.000.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.400.000,00	18.400.000	15.800.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD di Kecamatan	12 bulan	398.558.000,00	386.186.000	369.707.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	58.658.000,00	58.658.000	45.087.400	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	334.000.000,00	321.628.000	321.628.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5.900.000,00	5.900.000	2.991.600	KECAMATAN BANDAR
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen (%)	30.455.000,00	30.455.000	25.080.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan	Terselenggaranya MUSRENBANG	1 keg	19.600.000,00	19.600.000	19.600.000	KECAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	RKPD					BANDAR
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	19.600.000,00	19.600.000	19.600.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan PATEN yang sesuai SOP	9 layanan	10.855.000,00	10.855.000	5.480.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9 Laporan	10.855.000,00	10.855.000	5.480.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	100 %	10.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersedianya dana untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 keg	10.000.000,00	5.000.000	5.000.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	10.000.000,00	5.000.000	5.000.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	undefined undefined	52.200.000,00	12.680.000	6.480.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Laporan	52.200.000,00	12.680.000	6.480.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	52.200.000,00	12.680.000	6.480.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	10.000.000,00	10.000.000	38.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	tersedianya dana untuk logistik kegiatan	12 bulan	10.000.000,00	10.000.000	38.000.000	KECAMATAN BANDAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Penugasan Kepala Daerah						
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	10.000.000,00	10.000.000	38.000.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	10.000.000,00	10.000.000	5.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Dana untuk kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	17 desa	10.000.000,00	10.000.000	5.000.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000	5.000.000	KECAMATAN BANDAR
	KECAMATAN BLADO			2.085.859.420	2.085.859.420	1.739.706.230	
7.01.06.2.01.0002	UNSUR KEWILAYAHAN			2.085.859.420	2.085.859.420	1.739.706.230	
7.01	KECAMATAN			2.085.859.420,00	2.085.859.420	1.739.706.230	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100 %	2.023.170.420,00	2.024.584.420	1.682.791.230	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000	2.500.000	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000	2.500.000	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan 12 Laporan	1.363.649.420,00	1.365.497.420	1.236.080.430	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.352.609.420,00	1.352.609.420	1.223.192.430	KECAMATAN BLADO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	11.040.000,00	12.888.000	12.888.000	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan aset yang disusun	1 laporan	26.492.400,00	29.372.400	29.372.400	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	21.692.400,00	21.692.400	21.692.400	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.800.000,00	7.680.000	7.680.000	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	100 %	32.000.000,00	32.000.000	2.865.000	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	27.000.000,00	27.000.000	-	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	5.000.000,00	5.000.000	2.865.000	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 dokumen 12 Laporan 1 paket	196.855.900,00	184.905.900	74.646.200	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.514.700,00	15.514.700	7.756.900	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 0	57.630.000,00	57.630.000	23.442.300	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	67.430.000,00	62.480.000	20.570.000	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.201.200,00	19.201.200	9.375.600	KECAMATAN BLADO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.580.000,00	2.580.000	851.400	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	34.500.000,00	27.500.000	12.650.000	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase pengadaan barang milik daerah	100 % 1 unit 3 unit	30.655.000,00	37.604.538	16.104.538	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	27.500.000,00	34.449.538	14.449.538	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.155.000,00	3.155.000	1.655.000	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 % 12 bulan 1 tahun	90.117.200,00	90.167.662	84.335.562	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.089.600,00	13.140.062	13.140.062	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	72.027.600,00	72.027.600	66.195.500	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 % 1 paket 1 unit 3 unit	278.400.500,00	280.036.500	236.887.100	KECAMATAN BLADO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	51.634.800,00	51.634.800	29.932.400	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.900.000,00	12.900.000	6.450.000	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000	192.750.000	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	13.865.700,00	15.501.700	7.754.700	KECAMATAN BLADO
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 %	6.600.000,00	6.600.000	2.150.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakt di Kecamatan yang memiliki SOP	100 %	6.600.000,00	6.600.000	2.150.000	KECAMATAN BLADO
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	6.600.000,00	6.600.000	2.150.000	KECAMATAN BLADO
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	90 100 % %	23.989.000,00	22.575.000	21.915.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	100 %	18.989.000,00	17.575.000	17.575.000	KECAMATAN BLADO
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	18.989.000,00	17.575.000	17.575.000	KECAMATAN BLADO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	5.000.000,00	5.000.000	4.340.000	KECAMATAN BLADO
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	5.000.000	4.340.000	KECAMATAN BLADO
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	7.700.000,00	7.700.000	5.050.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	100 %	7.700.000,00	7.700.000	5.050.000	KECAMATAN BLADO
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	7.700.000,00	7.700.000	5.050.000	KECAMATAN BLADO
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	7.700.000,00	7.700.000	18.250.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	100 %	7.700.000,00	7.700.000	18.250.000	KECAMATAN BLADO
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	7.700.000,00	7.700.000	3.250.000	KECAMATAN BLADO
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	0	-	15.000.000	KECAMATAN BLADO
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	90 %	16.700.000,00	16.700.000	9.550.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	16.700.000,00	16.700.000	9.550.000	KECAMATAN BLADO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000	4.500.000	KECAMATAN BLADO
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	7.700.000,00	7.700.000	5.050.000	KECAMATAN BLADO
	KECAMATAN REBAN			2.734.306.678	2.734.306.678	2.220.969.449	
7.01.06.2.01.0003	UNSUR KEWILAYAHAN			2.734.306.678	2.734.306.678	2.220.969.449	
7.01	KECAMATAN			2.734.306.678,00	2.734.306.678	2.220.969.449	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.674.288.678,00	2.654.805.816	2.154.387.549	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100 %	5.000.000,00	5.000.000	3.285.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000	3.285.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	100 %	1.975.976.922,00	1.977.768.922	1.634.100.049	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.917.556.678,00	1.917.556.678	1.575.247.805	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	40.120.244,00	30.520.244	30.520.244	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	18.300.000,00	29.692.000	28.332.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	26.820.122,00	25.280.122	24.635.322	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	21.060.122,00	16.260.122	16.260.122	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.760.000,00	9.020.000	8.375.200	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	71.500.000,00	59.000.000	23.482.500	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	24 Paket	12.500.000,00	-	-	KECAMATAN REBAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Atribut Kelengkapannya	Atribut Kelengkapan					
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	54.000.000,00	54.000.000	21.035.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	5.000.000,00	5.000.000	2.447.500	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	99.849.500,00	110.550.000	75.411.906	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.449.500,00	8.067.500	4.033.750	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	18.526.000,00	18.526.000	10.274.500	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.994.000,00	35.994.000	35.994.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.200.000,00	9.200.000	3.734.256	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.680.000,00	1.680.000	560.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24.000.000,00	32.082.500	17.000.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000	3.815.400	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	47.000.650,00	47.045.450	42.633.050	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	17.797.600,00	17.842.400	13.430.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	29.203.050,00	29.203.050	29.203.050	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor	100 %	54.174.122,00	58.261.322	45.415.022	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000	3.000.000	KECAMATAN REBAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.200.000,00	15.270.000	15.270.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	35.974.122,00	39.991.322	27.145.022	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	393.967.362,00	371.900.000	305.424.700	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	79.967.400,00	79.900.000	40.900.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	23.000.000,00	23.000.000	20.000.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	230.000.000,00	230.000.000	213.799.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.999.962,00	39.000.000	30.725.700	KECAMATAN REBAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 %	35.768.000,00	48.213.362	33.573.100	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Tahun	25.768.000,00	38.213.362	28.531.500	KECAMATAN REBAN
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	17.768.000,00	19.543.200	19.543.200	KECAMATAN REBAN
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	8.000.000,00	18.670.162	8.988.300	KECAMATAN REBAN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Layanan kepada masyarakt di	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000	5.041.600	KECAMATAN REBAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan yang memiliki SOP					
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000	5.041.600	KECAMATAN REBAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	90 %	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	KECAMATAN REBAN
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	KECAMATAN REBAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	8.000.000,00	4.137.500	2.068.800	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	1 Tahun	8.000.000,00	4.137.500	2.068.800	KECAMATAN REBAN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	8.000.000,00	4.137.500	2.068.800	KECAMATAN REBAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	3.000.000,00	9.400.000	19.752.500	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bimtek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	1 Tahun	3.000.000,00	9.400.000	19.752.500	KECAMATAN REBAN
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75 Orang	3.000.000,00	9.400.000	4.752.500	KECAMATAN REBAN
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang	0	-	15.000.000	KECAMATAN REBAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	90 %	8.250.000,00	12.750.000	6.187.500	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	90 persen	8.250.000,00	12.750.000	6.187.500	KECAMATAN REBAN
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	5.500.000,00	10.000.000	5.037.500	KECAMATAN REBAN
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	2.750.000,00	2.750.000	1.150.000	KECAMATAN REBAN
	KECAMATAN KANDEMAN			1.922.245.025	1.922.245.025	1.724.230.088	
7.01.06.2.01.0011	UNSUR KEWILAYAHAN			1.922.245.025	1.922.245.025	1.724.230.088	
7.01	KECAMATAN			1.922.245.025,00	1.922.245.025	1.724.230.088	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan operasional kantor cakupan layanan operasional kantor Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	1 1 100 kegiatan paket %	1.871.162.225,00	1.871.162.225	1.668.492.188	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 Laporan	1.449.195.025,00	1.453.947.025	1.384.988.518	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.426.495.025,00	1.426.495.025	1.357.536.518	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	22.700.000,00	27.452.000	27.452.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	12 bulan	20.760.000,00	50.760.000	50.760.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	45.000.000	45.000.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.760.000,00	5.760.000	5.760.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase aparatur yang disiplin	100 %	36.022.400,00	36.022.400	2.999.400	KECAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Daerah						KANDEMAN
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	4.500.000,00	4.500.000	-	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	4.522.400,00	4.522.400	2.999.400	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	27.000.000,00	27.000.000	-	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 persen	126.619.780,00	126.619.780	68.786.080	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.500.000,00	25.500.000	12.750.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.887.500,00	24.887.500	10.958.700	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.752.480,00	35.752.480	25.212.480	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.979.800,00	25.979.800	12.989.900	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000	900.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000	5.975.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	53.720.200,00	51.446.060	23.584.200	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	53.720.200,00	51.446.060	23.584.200	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	79.309.000,00	49.309.000	47.905.500	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000	3.000.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	33.650.000,00	33.650.000	38.690.000	KECAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					KANDEMAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	42.659.000,00	12.659.000	6.215.500	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	105.535.820,00	103.057.960	89.468.490	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	61.223.820,00	58.745.960	51.109.890	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	16.312.000	16.312.000	10.358.600	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19.000.000	19.000.000	19.000.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.000.000	9.000.000	9.000.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 %	20.618.000	20.618.000	19.868.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 persen	20.618.000	20.618.000	19.868.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	20.618.000	20.618.000	19.868.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang Aktif	100 %	4.999.800	4.999.800	4.754.900	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan Peningkatan Efektitfitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.999.800	4.999.800	4.754.900	KECAMATAN KANDEMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.999.800	4.999.800	4.754.900	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	10.755.000	10.755.000	6.505.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	13 desa	10.755.000	10.755.000	6.505.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	10.755.000	10.755.000	6.505.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah bimtek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	1 kegiatan	7.255.000	7.255.000	19.755.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	erlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 kegiatan	7.255.000	7.255.000	19.755.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	39 Orang	7.255.000	7.255.000	4.755.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	45 Orang	-	-	15.000.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 persen	7.455.000	7.455.000	4.855.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	100 persen	7.455.000	7.455.000	4.855.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan	1 Dokumen	7.455.000	7.455.000	4.855.000	KECAMATAN KANDEMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Peraturan Kepala Desa	Desa dan Peraturan Kepala Desa					
	KECAMATAN TERSONO			2.491.061.123	2.511.061.123	1.945.799.376	
7.01.06.2.01.0001	UNSUR KEWILAYAHAN			2.491.061.123	2.511.061.123	1.945.799.376	
7.01	KECAMATAN			2.491.061.123	2.511.061.123	1.945.799.376	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah cakupan layanan operasional kantor Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	99 100 80 % % %	2.335.759.623	2.335.759.623	1.848.092.876	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	10 Laporan	1.696.369.763	1.696.164.763	1.373.690.756	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.657.521.763	1.657.521.763	1.340.047.756	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	5.000.000	5.000.000	-	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	33.848.000	33.643.000	33.643.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan aset yang disusun	2 Laporan	5.760.000	5.760.000	5.760.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.760.000	5.760.000	5.760.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	100 %	65.000.000	59.000.000	22.794.600	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.000.000	-	-	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	54.000.000	54.000.000	21.035.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	5.000.000	5.000.000	1.759.600	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 %	176.802.000	183.030.000	88.112.400	KECAMATAN TERSONO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.783.500	9.778.100	4.970.100	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.030.200	58.258.200	15.330.600	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.250.000	40.250.000	25.960.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.208.300	36.213.700	23.366.700	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.280.000	2.280.000	760.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	36.250.000	36.250.000	17.725.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	80 %	220.478.000	220.478.000	213.978.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	5.000.000	5.000.000	-	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	215.478.000	215.478.000	213.978.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor	100 %	115.370.000	111.620.000	106.620.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.250.000	2.500.000	2.500.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	15.900.000	15.900.000	15.900.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	10.000.000	10.000.000	5.000.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	83.220.000	83.220.000	83.220.000	KECAMATAN TERSONO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	100 %	55.979.860	59.706.860	37.137.120	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	4.999.860	4.999.860	4.999.860	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	8.000.000	11.753.200	11.541.810	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	21.980.000	21.980.000	10.990.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	21.000.000	20.973.800	9.605.450	KECAMATAN TERSONO
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	14.665.000	14.665.000	6.835.800	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakt di Kecamatan yang memiliki SOP	8 Layanan	14.665.000	14.665.000	6.835.800	KECAMATAN TERSONO
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	14.665.000	14.665.000	6.835.800	KECAMATAN TERSONO
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	25.300.000	45.300.000	39.183.800	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	8 usulan	20.300.000	20.300.000	18.000.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	20.300.000	20.300.000	18.000.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah bintek kepada LKD yang diselenggarakan dengan lancar	2 kegiatan	5.000.000	25.000.000	21.183.800	KECAMATAN TERSONO
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	25.000.000	21.183.800	KECAMATAN TERSONO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	20.900.000	20.900.000	5.930.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	20 desa	20.900.000	20.900.000	5.930.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	20.900.000	20.900.000	5.930.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	38.026.000	38.026.000	25.620.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	7 Kegiatan 7 laporan	38.026.000	38.026.000	25.620.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	17.630.000	17.630.000	7.622.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	261 Orang	-	-	15.000.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20 Dokumen	20.396.000	20.396.000	2.998.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	56.410.500	56.410.500	20.136.900	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	90 %	56.410.500	56.410.500	20.136.900	KECAMATAN TERSONO
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	68 Dokumen	20.950.000	20.950.000	6.080.000	KECAMATAN TERSONO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Peraturan Kepala Desa						
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	9.615.000	9.615.000	4.737.500	KECAMATAN TERSONO
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	19.845.500	19.845.500	8.319.400	KECAMATAN TERSONO
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	6.000.000	6.000.000	1.000.000	KECAMATAN TERSONO
	KECAMATAN GRINGSING			1.984.811.734	1.984.811.734	1.706.251.291	
7.01.06.2.01.0017	UNSUR KEWILAYAHAN			1.984.811.734	1.984.811.734	1.706.251.291	
7.01	KECAMATAN			1.984.811.734	1.984.811.734	1.706.251.291	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.853.041.734	1.891.633.734	1.640.687.291	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.000.000	5.000.000	2.500.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 tahun 0	5.000.000	5.000.000	2.500.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	1.408.859.014	1.420.091.014	1.308.568.915	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1.391.759.014	1.391.759.014	1.280.236.915	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	17.100.000	28.332.000	28.332.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	12 bulan	4.800.000	7.680.000	7.680.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.800.000	7.680.000	7.680.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Paeraturan Perundang-Undangan	80 orang	42.300.000	27.000.000	-	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	10.300.000	-	-	KECAMATAN GRINGSING

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	27.000.000	27.000.000	-	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	5.000.000	-	-	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya layanan operasional kantor	12 bulan	114.392.720	158.858.320	84.091.915	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.471.000	10.471.000	5.230.800	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.350.650	49.666.250	39.563.550	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	15.621.070	15.621.070	5.627.565	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	36.000.000	41.000.000	22.480.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.500.000	3.500.000	880.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun Laporan	32.450.000	38.600.000	10.310.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14 unit	46.710.000	59.021.040	59.021.040	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	12.400.000	12.400.000	12.400.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	34.310.000	46.621.040	46.621.040	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	129.980.000	125.852.001	129.144.720	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	2.500.000	2.500.000	1.250.000	KECAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Surat Menyurat					GRINGSING
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.480.000	43.480.000	43.480.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	84.000.000	79.872.001	84.414.720	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	101.000.000	88.131.359	49.680.701	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	70.000.000	50.000.000	24.000.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	12.000.000	15.000.000	7.016.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	19.000.000	23.131.359	18.664.701	KECAMATAN GRINGSING
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 %	50.450.000	37.684.000	23.225.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakt di Kecamatan yang memiliki SOP	100 %	43.450.000	28.150.000	18.750.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	18.400.000	18.400.000	14.100.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 tahun Dokumen	25.050.000	9.750.000	4.650.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.000.000	9.534.000	4.475.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Non Perizinan	1 tahun Dokumen	7.000.000	9.534.000	4.475.000	KECAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Usaha yang Dilaksanakan					GRINGSING
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	90 %	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang Aktif	1 laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	23.860.000	10.244.000	5.019.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	100 %	23.860.000	10.244.000	5.019.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	23.860.000	10.244.000	5.019.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	7.325.000	8.300.000	19.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	1 kegiatan	7.325.000	8.300.000	19.000.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	7.325.000	8.300.000	4.000.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang	-	-	15.000.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan	90 %	45.135.000	31.950.000	13.320.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	DESA	Desa dan Pendayagunaan Aset Des					
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	1 kegiatan	45.135.000	31.950.000	13.320.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	23.300.000	11.250.000	5.400.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen	15.300.000	15.300.000	5.400.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	6.535.000	5.400.000	2.520.000	KECAMATAN GRINGSING
	KECAMATAN SUBAH			2.347.707.494	2.347.707.494	2.093.474.074	
7.01.06.2.01.0011	UNSUR KEWILAYAHAN			2.347.707.494	2.347.707.494	2.093.474.074	
7.01	KECAMATAN			2.347.707.494	2.347.707.494	2.093.474.074	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	100 %	2.263.707.494	2.263.107.494	2.022.629.074	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan jumlah keuangan yang disusun	12 dokumen	1.687.735.493	1.675.160.993	1.568.280.749	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.603.207.493	1.603.207.493	1.496.327.249	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	45.924.000	45.924.000	45.924.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	38.604.000	26.029.500	26.029.500	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan aset yang disusun	2 dokumen	28.242.000	27.226.500	27.226.500	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	20.562.000	19.200.000	19.200.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.680.000	8.026.500	8.026.500	KECAMATAN SUBAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur pemerintah yang disiplin	100 %	51.593.200	47.193.200	21.035.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	5.600.000	-	-	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	109 Orang	27.000.000	27.000.000	21.035.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	18.993.200	20.193.200	-	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi Perangkat Daerah	100 %	84.394.800	87.394.800	60.604.800	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.004.000	3.004.000	3.004.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.168.800	16.168.800	16.168.800	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.202.000	3.202.000	3.202.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.220.000	29.220.000	22.070.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.000.000	9.000.000	6.060.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.800.000	1.800.000	600.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	22.000.000	25.000.000	9.500.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	1 paket	45.737.200	61.528.476	48.629.400	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	45.737.200	61.528.476	48.629.400	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	2 Unit	-	-	-	KECAMATAN SUBAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penyediaan jasa kantor	100 %	44.004.801	53.103.525	44.403.063	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	750.000	750.000	750.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.892.801	37.353.525	28.653.063	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	16.362.000	15.000.000	15.000.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang mi;lik daerah	100 %	322.000.000	311.500.000	252.449.562	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	33.000.000	29.000.000	24.949.562	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	9.000.000	12.500.000	12.500.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	280.000.000	270.000.000	215.000.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 %	3.600.000	3.600.000	1.800.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	3.600.000	3.600.000	1.800.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	3.600.000	3.600.000	1.800.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan	90 %	44.000.000	44.000.000	39.295.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	di Desa yang Aktif					
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase usulan pembangunandesa yang menjadi prioritas	100 %	28.000.000	28.000.000	28.000.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000	28.000.000	28.000.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase peningkatan perempuan di pedesaan	100 %	16.000.000	16.000.000	11.295.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	16.000.000	16.000.000	11.295.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	4.400.000	5.000.000	2.200.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah desa terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	17 desa	4.400.000	5.000.000	2.200.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.400.000	5.000.000	2.200.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	13.000.000	13.000.000	19.935.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	1 kegiatan	13.000.000	13.000.000	19.935.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	55 Orang	13.000.000	13.000.000	19.935.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	90 %	19.000.000	19.000.000	7.615.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan	Persentase aparatur desa yang	100 %	19.000.000	19.000.000	7.615.000	KECAMATAN SUBAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa					
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17 Dokumen	19.000.000	19.000.000	7.615.000	KECAMATAN SUBAH
	KECAMATAN LIMPUNG			2.262.084.245	2.262.084.245	1.898.321.993	
7.01.06.2.01.0003	UNSUR KEWILAYAHAN			2.262.084.245	2.262.084.245	1.898.321.993	
7.01	KECAMATAN			2.262.084.245	2.262.084.245	1.898.321.993	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.213.869.345	2.213.869.345	1.847.634.693	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.000.000	5.000.000	2.500.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	2.500.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	100 %	1.583.894.517	1.581.889.317	1.418.166.979	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1.504.759.317	1.504.759.317	1.341.036.979	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	60.835.200	48.798.000	48.798.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	18.300.000	28.332.000	28.332.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	[deleted] Jumlah laporan aset yang disusun	2 Laporan	30.480.000	30.480.000	30.480.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	22.800.000	22.800.000	22.800.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.680.000	7.680.000	7.680.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	1 kegiatan	38.750.000	38.750.000	2.500.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	18 Paket	6.750.000	6.750.000	-	KECAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Atribut Kelengkapannya	Atribut Kelengkapan					LIMPUNG
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	84 Orang	27.000.000	27.000.000	-	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	5.000.000	5.000.000	2.500.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 %	78.719.100	78.719.100	56.007.190	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.539.000	5.539.000	2.769.500	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.410.000	34.410.000	38.460.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.678.600	9.678.600	4.618.500	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.100.000	2.100.000	700.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.991.500	21.991.500	6.995.690	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	2.463.500	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	33.500.000	53.500.000	-	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	33.500.000	53.500.000	-	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor	100 %	138.823.420	105.860.620	92.716.270	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.375.000	3.375.000	3.375.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.245.000	20.245.000	21.245.000	KECAMATAN LIMPUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	80.169.100	67.915.500	53.771.150	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	35.034.320	14.325.120	14.325.120	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	100 %	304.702.308	319.670.308	245.264.254	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	61.990.000	81.990.000	42.120.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.000.000	10.000.000	5.000.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	63.712.308	174.000.000	171.862.500	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	174.000.000	53.680.308	26.281.754	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 %	18.177.400	18.177.400	18.177.400	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakt di Kecamatan yang memiliki SOP	100 %	18.177.400	18.177.400	18.177.400	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	18.177.400	18.177.400	18.177.400	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	90 %	5.000.000	5.000.000	5.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	100 %	5.000.000	5.000.000	5.000.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan	-	-		KECAMATAN LIMPUNG
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	5.000.000	5.000.000	2.500.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	100 %	5.000.000	5.000.000	2.500.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	2.500.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	6.225.000	6.225.000	18.112.500	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	100 %	6.225.000	6.225.000	18.112.500	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	51 Orang	6.225.000	6.225.000	3.112.500	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	-	-	15.000.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	90 %	13.812.500	13.812.500	6.897.400	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	90 %	13.812.500	13.812.500	6.897.400	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	13.812.500	13.812.500	6.897.400	KECAMATAN LIMPUNG
	KECAMATAN BANYUPUTIH			2.349.752.283	2.374.752.283	2.080.966.875	
7.01.06.2.01.0003	UNSUR KEWILAYAHAN			2.349.752.283	2.374.752.283	2.080.966.875	
7.01	KECAMATAN			2.349.752.283	2.374.752.283	2.080.966.875	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan operasional kantor	12 bulan	2.289.093.183	2.289.093.183	2.003.683.735	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	100 % 2 Dokumen	5.000.000	5.000.000	2.500.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	2.500.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 bulan	1.617.932.923	1.626.488.923	1.488.518.721	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.526.600.923	1.526.600.923	1.388.630.721	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	70.632.000	70.632.000	70.632.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	20.700.000	29.256.000	29.256.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan aset yang disusun	12 bulan	29.280.000	29.280.000	29.280.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	21.600.000	21.600.000	21.600.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan	12 Laporan	7.680.000	7.680.000	7.680.000	KECAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD					BANYUPUTIH
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	100 %	42.590.000	32.000.000	2.448.080	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket	7.650.000	-	-	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	27.000.000	27.000.000	-	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	7.940.000	5.000.000	2.448.080	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 %	53.664.800	61.164.800	33.054.400	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.489.800	7.489.800	3.744.900	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.575.000	11.575.000	4.734.500	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.950.000	15.950.000	11.825.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.600.000	3.600.000	1.800.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.600.000	1.800.000	600.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	11.450.000	20.750.000	10.350.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	100 % 4 paket	125.368.207	133.836.607	87.680.607	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	53.348.300	36.923.300	36.923.300	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	72.019.907	96.913.307	50.757.307	KECAMATAN BANYUPUTIH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	12 bulan	50.745.100	50.745.100	48.279.500	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	23.245.100	23.245.100	20.779.500	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin Kantor Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 Unit 5 Unit	364.512.153	350.577.753	311.922.427	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	20.480.000	24.280.000	14.277.500	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	14.032.153	11.600.000	5.800.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	70.000.000	54.697.753	31.844.927	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	260.000.000	260.000.000	260.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 %	27.901.500	27.901.500	18.510.100	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perangkingan	100 %	27.901.500	27.901.500	18.510.100	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	1 Laporan	18.257.500	18.257.500	13.757.500	KECAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					BANYUPUTIH
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	9.644.000	9.644.000	4.752.600	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang Aktif	90 100 % %	5.000.000	30.000.000	30.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan Peningkatan Efektitfitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.000.000	30.000.000	30.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	5.000.000	30.000.000	30.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	8.503.800	8.503.800	4.199.020	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	8.503.800	8.503.800	4.199.020	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	8.503.800	8.503.800	4.199.020	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	1 Dokumen	8.228.800	8.228.800	19.076.520	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bimtek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial) Terlaksananya Tugas Forum	1 Kegiatan 1 tahun	8.228.800	8.228.800	19.076.520	KECAMATAN BANYUPUTIH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	8.228.800	8.228.800	4.076.520	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	-	-	15.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	90 %	11.025.000	11.025.000	5.497.500	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	100 %	11.025.000	11.025.000	5.497.500	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	11.025.000	11.025.000	5.497.500	KECAMATAN BANYUPUTIH
	KECAMATAN PECALUNGAN			2.643.067.355	2.643.067.355	2.314.593.119	
7.01.06.2.01.0002	UNSUR KEWILAYAHAN			2.643.067.355	2.643.067.355	2.314.593.119	
7.01	KECAMATAN			2.643.067.355	2.643.067.355	2.314.593.119	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100 Persen	2.583.537.355	2.583.537.355	2.256.227.329	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	100 Persen	3.405.000	3.405.000	1.630.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	2.000.000	2.000.000	870.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.405.000	1.405.000	760.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah laporan keuangan yang	100 Persen	1.452.621.355	1.460.841.355	1.292.255.909	KECAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Daerah	disusun					PECALUNGAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.427.617.355	1.427.617.355	1.260.161.909	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	23.004.000	31.224.000	31.224.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	2.000.000	2.000.000	870.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan aset yang disusun	100 Persen	46.800.000	48.720.000	48.720.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	42.000.000	42.000.000	42.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.800.000	6.720.000	6.720.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	100 Persen	34.300.000	34.300.000	3.500.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	-	-	-	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	109 Orang	27.000.000	27.000.000	-	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	7.300.000	7.300.000	3.500.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 Persen	104.616.315	104.616.315	46.387.900	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.919.835	10.919.835	5.346.500	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.591.000	15.591.000	7.705.900	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	35.834.000	35.834.000	16.114.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	2 Paket	11.021.480	11.021.480	5.571.500	KECAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan					PECALUNGAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.100.000	2.100.000	700.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	29.150.000	29.150.000	10.950.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.06.0009	NON URUSAN			2.643.067.355	2.643.067.355	2.314.593.119	
7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			2.643.067.355	2.643.067.355	2.314.593.119	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	2.583.537.355	2.583.537.355		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 Persen	748.681.520	738.541.520	730.561.520	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	-		KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.07.0006	UNSUR KEWILAYAHAN			2.643.067.355	2.643.067.355	2.314.593.119	
7.01	KECAMATAN			2.643.067.355	2.643.067.355	2.314.593.119	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	2.583.537.355	2.583.537.355		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 Persen	748.681.520	738.541.520		KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	748.681.520	738.541.520	730.561.520	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor	100 Persen	76.172.000	76.172.000	75.172.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	2.000.000	1.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	2 Laporan	22.200.000	22.200.000	22.200.000	KECAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					PECALUNGAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	51.972.000	51.972.000	51.972.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	116.941.165	116.941.165	58.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	39.650.000	39.650.000	19.500.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	10.291.165	10.291.165	5.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	67.000.000	67.000.000	33.500.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 Persen	24.835.000	24.835.000	20.682.790	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Yang Memiliki SOP	100 Persen	24.835.000	24.835.000	20.682.790	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	18.225.000	18.225.000	17.882.790	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	6.610.000	6.610.000	2.800.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan yang Aktif	100 Persen	10.000.000	10.000.000	7.815.500	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	Persentase Peningkatan Peran	100 Persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	KECAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Desa	Perempuan di Perdesaan					PECALUNGAN
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah bintek kepada LKD yang diselenggarakan dengan lancar	100 Persen	5.000.000	5.000.000	2.815.500	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	5.000.000	2.815.500	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	100 Persen	5.000.000	5.000.000	2.200.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah desa/ kelurahan terfasilitasi Dalam Penanganan Gangguan Trantibum	100 Persen	5.000.000	5.000.000	2.200.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	2.200.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 Persen	9.695.000	9.695.000	20.087.500	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Bintek, Sosialisasi, Konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	100 Persen	9.695.000	9.695.000	20.087.500	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	7.695.000	7.695.000	4.147.500	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	-	-	15.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	2.000.000	2.000.000	940.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	100 Persen	10.000.000	10.000.000	7.580.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang Meningkat Pemahaman tentang Keuangan dan Administrasi Desa	100 Persen	10.000.000	10.000.000	7.580.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen	7.000.000	7.000.000	5.080.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.250.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.250.000	KECAMATAN PECALUNGAN
	KECAMATAN BAWANG			2.181.354.992	2.181.354.992	2.091.639.102	
7.01.06.2.01.0003	UNSUR KEWILAYAHAN			2.181.354.992	2.181.354.992	2.091.639.102	
7.01	KECAMATAN			2.181.354.992	2.181.354.992	2.091.639.102	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.040.578.392	2.040.578.392	1.997.403.102	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Orang	5.000.000	5.000.000	2.500.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Tahun Dokumen	5.000.000	5.000.000	2.500.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.412.864.993	1.412.864.993	1.488.122.083	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.344.854.993	1.344.854.993	1.435.917.083	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	1 Dokumen	45.060.000	45.060.000	30.000.000	KECAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					BAWANG
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	22.950.000	22.950.000	22.205.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	39.800.000	39.800.000	37.680.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000	30.000.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9.800.000	9.800.000	7.680.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	61.650.000	61.650.000	21.035.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket	7.650.000	7.650.000	-	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	54.000.000	54.000.000	21.035.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	-	-	-	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	141.802.099	141.802.099	102.134.869	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.077.900	5.077.900	2.538.950	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.087.000	10.087.000	7.805.200	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.100.999	50.100.999	40.213.499	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.096.200	10.096.200	6.006.950	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.440.000	1.440.000	880.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Laporan	60.000.000	60.000.000	39.762.270	KECAMATAN BAWANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
		SKPD					
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	4.928.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30.000.000	30.000.000	30.000.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan kantor menjadi lebih baik dan lancar	5 Kegiatan	15.007.000	15.007.000	12.928.500	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.250.000	1.250.000	1.250.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	9.600.000	9.600.000	9.600.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.157.000	4.157.000	2.078.500	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kecamatan Bawang Terpeliharanya Barang Milik Daerah	13 Unit 20 Desa	334.454.300	334.454.300	303.002.650	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	43.454.300	43.454.300	42.441.150	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	25.000.000	25.000.000	12.500.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000	250.000.000	232.075.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	16.000.000	16.000.000	15.986.500	KECAMATAN BAWANG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 %	36.985.000	36.985.000	29.245.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan	Layanan Kepada Masyarakat Yang	12 Layanan	26.505.000	26.505.000	26.505.000	KECAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Memiliki SOP					BAWANG
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	26.505.000	26.505.000	26.505.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	10.480.000	10.480.000	2.740.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.480.000	10.480.000	2.740.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	90 %	29.980.100	29.980.100	11.746.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan yang masuk prioritas atau perangkingan	8 Kegiatan	20.000.000	20.000.000	7.656.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	20.000.000	20.000.000	7.656.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Bimtek Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Diselenggarakan Dengan Lancar	2 Kegiatan	9.980.100	9.980.100	4.090.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.980.100	9.980.100	4.090.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	21.490.500	21.490.500	9.820.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penanganan trantibum	20 Desa	21.490.500	21.490.500	9.820.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	1 Laporan	21.490.500	21.490.500	9.820.000	KECAMATAN BAWANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Wilayah Kecamatan	dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	12.321.000	12.321.000	19.945.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	12.321.000	12.321.000	19.945.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Orang	12.321.000	12.321.000	4.945.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	80 Orang	-	-	15.000.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	90 %	40.000.000	40.000.000	23.480.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang memahami tentang keuangan dan administrasi desa	100 Orang	40.000.000	40.000.000	23.480.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	12.040.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	11.440.000	KECAMATAN BAWANG
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			7.537.483.016	8.487.483.016	6.402.524.631	
7.01.06.2.01.0003	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			7.537.483.016	8.487.483.016	6.402.524.631	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			7.537.483.016	8.487.483.016	6.402.524.631	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase capaian kinerja Kesbangpol	100 %	3.685.922.016	3.720.072.016	3.026.031.631	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5 Dokumen	9.865.000	15.286.800	2.923.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	9.865.000	15.286.800	2.923.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 Laporan	2.708.056.017	2.689.819.417	2.593.671.918	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.633.703.017	2.633.703.017	2.538.972.518	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	71.628.000	53.181.400	53.181.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.725.000	2.935.000	1.518.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan Tupoksi yang mengikuti Diklat	2 Orang	25.000.000	25.000.000	16.328.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	25.000.000	25.000.000	16.328.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan	40 Paket	251.319.639	275.737.671	190.607.785	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.450.000	2.521.000	2.521.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	70.234.000	70.234.000	65.015.900	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.001.300	2.001.300	2.001.300	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	15.973.000	15.973.000	14.862.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	23.175.000	24.400.000	16.492.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.220.000	2.220.000	860.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	135.266.339	158.388.371	88.855.185	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Unit	444.496.000	444.496.000	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	444.496.000	444.496.000	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	-	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Junlah sarana dan prasarana dalam penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	25 laporan	124.185.360	128.612.128	128.612.128	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	3.000.000	3.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97.185.360	100.612.128	100.612.128	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah pencapaian sarana	100 %	123.000.000	141.120.000	93.888.000	BADAN KESATUAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dan prasarana yang dipelihara					BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	111.000.000	128.120.000	80.888.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	6.000.000	7.000.000	7.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	6.000.000	6.000.000	6.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	persentase masyarakat yang mengamalkan ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang bagus	100 %	1.398.045.000	1.949.900.000	1.417.550.000	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	19 kegiatan	1.398.045.000	1.949.900.000	1.417.550.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1050 Orang	253.045.000	804.900.000	237.550.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	30 Orang	645.000.000	645.000.000	680.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	100 Orang	500.000.000	500.000.000	500.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
							POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif mendukung Pemerintah	100 %	1.317.099.000	1.716.759.000	1.296.636.000	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan peran Parpol dan Lembaga pendidikan	4 kegiatan	1.317.099.000	1.716.759.000	1.296.636.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2600 Orang	300.000.000	700.000.000	275.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	69 Orang	998.699.000	996.894.000	1.001.771.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	1 Laporan	18.400.000	19.865.000	19.865.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100 %	68.400.000	68.740.000	68.740.000	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan untuk pemantapan bidang pemberdayaan dan Ormas	2 kegiatan	68.400.000	68.740.000	68.740.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	83 Orang	68.400.000	68.740.000	68.740.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang paham tentang ketahanan Ekososbud	100 %	167.580.000	165.725.000	108.075.000	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	4 kegiatan	167.580.000	165.725.000	108.075.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	167.580.000	165.725.000	108.075.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN	Persentase penurunan konflik sosial	100 %	900.437.000	866.287.000	485.492.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	2	2	3	4	5	6	7
	KONFLIK SOSIAL						
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik sosial	51 kegiatan	900.437.000	866.287.000	485.492.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	700 Orang	31.212.800	67.062.800	66.900.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3000 Orang	199.224.200	199.224.200	125.249.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	670.000.000	600.000.000	293.343.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JUMLAH			**2.034.527.440.436,00**	**2.038.458.065.209,00**	**2.071.322.775.738**	

Sumber : Bapelitbang, 2024

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

A. Periodesasi RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026

6.1. Indikator Kinerja Utama dalam RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026

Sub bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja daerah yang selaras dengan dokumen RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026. Dalam upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2025, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 6. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Batang dalam RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target Capaian tahun 2025	Perangkat Daerah Koordinator
-1	-2	-3	-4	-5
1	PDRB Per Kapita (ADHK)	juta rupiah	22,9	Sekretariat Daerah
2	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,5413	Sekretariat Daerah
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	70,75	Sekretariat Daerah
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	92,25	Sekretariat Daerah
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	63,96	Sekretariat Daerah
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,50-6,10	Sekretariat Daerah
7	Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan (Rp.000/tahun)	ribu rupiah	9.896	Sekretariat Daerah
8	Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)	%	21,7	Sekretariat Daerah
9	Persentase Penduduk Miskin	%	8,34-8,27	Sekretariat Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target Capaian tahun 2025	Perangkat Daerah Koordinator
-1	-2	-3	-4	-5
10	Tingkat Pengangguran terbuka	%	5,80-5,27	Sekretariat Daerah
11	Indeks Infrastruktur	Indeks	200	Sekretariat Daerah
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,14	Sekretariat Daerah
13	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,96	Sekretariat Daerah
14	Nilai SAKIP	Skor	71,25	Sekretariat Daerah
15	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Indeks	Level 3	Sekretariat Daerah
16	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	80	Sekretariat Daerah
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,6	Sekretariat Daerah
18	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	150	Sekretariat Daerah
19	Indeks Rasa Aman	Indeks	4,4	Sekretariat Daerah
20	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,83	Sekretariat Daerah
21	Indeks Demokrasi	Indeks	74	Sekretariat Daerah
22	Angka Kriminalitas	%	0,014	Sekretariat Daerah

Sumber : RPD Kab. Batang Tahun 2023-2026

6.2 Indikator Kinerja Daerah dalam RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 6. 2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2025

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
A	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**				
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	{(PDRB th n – PDRB th (n-1)) : PDRB th (n-1)} x100	5,50-6,10	Sekretariat Daerah
2	Laju Inflasi (%)	%	Angka Inflasi	2,3-3,3	Sekretariat Daerah
3	PDRB Per Kapita (Rp.juta)	juta rupiah	PDRB th n : jumlah penduduk th n	22,9	Sekretariat Daerah
4	Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)	%	Persentase pendapatan penduduk 40 terendah terhadap total pendapatan	21,7	Sekretariat Daerah
5	Persentase Angka Kemiskinan (%)	%	Jumlah penduduk miskin di Kab. Batang : jumlah penduduk Kab. Batang	8,34-8,27	Sekretariat Daerah
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	Rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran	70,75	Sekretariat Daerah
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	Rasio IPM Perempuan dibanding IPM Laki-Laki	92,25	Sekretariat Daerah
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	Peran serta wanita dalam kehidupan ekonomi dan politik	63,96	Sekretariat Daerah
9	Angka Harapan Hidup (tahun)	tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	74,94	Sekretariat Daerah
10	Harapan Lama Sekolah (th)	tahun	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	12,5	Sekretariat Daerah
11	Rata-Rata Lama Sekolah (th)	tahun	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	7,2	Sekretariat Daerah
12	Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan (Rp.000/tahun)	ribu rupiah	Rata-rata pengeluaran penduduk per tahun	9.896	Sekretariat Daerah
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	(Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja : Jumlah penduduk angkatan kerja) x100	5,80-5,27	Sekretariat Daerah
14	Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri	%	Jumlah Desa Siaga Aktif strata mandiri : jumlah desa/kelurahan x 100	14,11	Sekretariat Daerah
15	Tingkat Kesempatan kerja	%	Jumlah penduduk bekerja : jumlah angkatan kerja x 100	97	Sekretariat Daerah
16	Rasio penduduk yang bekerja	%	Jumlah Penduduk 15 th ke atas : Angkatan Kerja x 100	74	Sekretariat Daerah
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	Hasil survei kepuasan masyarakat	85,6	Sekretariat Daerah
18	Persentase Peningkatan PAD	%	[(Realisasi PAD tahun n)-(Realisasi PAD Tahun n-1)] : (Realisasi PAD Tahun n-	1,36	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
			1)*100		
19	Opini BPK	opini	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	Sekretariat Daerah
20	Persentase penguatan cadangan pangan daerah	%	jumlah cadangan pangan tahun n dikurangi tahun n-1 : tahun n-1 x 100	0,025	Sekretariat Daerah
21	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	Hasil kali konsumsi energi dengan bobot dibandingkan dengan Skor Maksimal Kelompok Pangan	89,7	Sekretariat Daerah
22	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan : Jumlah PDRB x 100	24,77	Sekretariat Daerah
23	Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	(Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n dikurangi Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n-1 : Jumlah pemdapatan sektor pariwisata tahun n-1) x 100	19	Sekretariat Daerah
24	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB dari BPS	13,24	Sekretariat Daerah
25	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	Kontribusi sektor industrin terhadap PDRB dari BPS	33,02	Sekretariat Daerah
B	**Aspek Daya Saing Daerah**				
1	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	Nilai IDSD	3,5413	Sekretariat Daerah
2	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	Capaian implementasi reformasi birokrasi yang meliputi 8 komponen	69,96	Sekretariat Daerah
3	Nilai SAKIP	skor	(30 perencanaan kinerja + 25 pengukuran kinerja + 15 pelaporan kinerja + 10 evaluasi internal + 20 capaian kinerja)	71,25	Sekretariat Daerah
4	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	indeks	Penilaian secara kualitatif melalui reviu dokumen, kuesioner, wawancara, dan observasi terhadap 8 komponen, 28 aspek dan 69 kriteria yang telah ditetapkan	level 3	Sekretariat Daerah
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	IKLH Kabupaten = IKLH =(0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)	70,66	Sekretariat Daerah
6	Indeks Infrastruktur	indeks	Indeks Infrastruktur tingkat Kabupaten/Kota = 0,4122 *jalan + 0,4149*air + 0,4620*sanitasi + 0,4368 * pkpl + 0,5037*telp_int	200	Sekretariat Daerah
7	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	indeks	Penilaian terhadap 6 dimensi yaitu: 1. Kesesuainan dokumen perencanaan dengan penganggaran; 2. Pengalokasian belanja APBD; 3.Transparansi pengelolaan keuangan daerah; 4.Penyerapan Anggaran; 5.	80	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
			Kondisi Keuangan Daerah; 6. Opini BPK atas LKPD		
8	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	indeks	perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) di masing-masing provinsi dan kabupaten/ kota	150	Sekretariat Daerah
9	Indeks Rasa Aman	indeks	survei / kuisioner kepada masyarakat	4,4	Sekretariat Daerah
10	Indeks Ketahanan Daerah	indeks	Kuantitatif & Kualitatif, melalui kuisooner terhadap 7 Parameter Indeks Ketahanan Daerah	0,83	Sekretariat Daerah
11	Indeks Demokrasi	indeks	Kualitatif, melalui kuisioner	74	Sekretariat Daerah
12	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	Total Pengeluaran RT Non Pangan : Total Pengeluaran x 100	47,56	Sekretariat Daerah
13	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB	rasio	Jumlah ekspor dan impor barang dan jasa / PDB	0,09	Sekretariat Daerah
14	Angka kriminalitas	rasio	Jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun : Jumlah penduduk	0,014	Sekretariat Daerah
15	Angka Beban ketergantungan	%	(Penduduk usia64 : Penduduk usia 15-64) x100	42,66	Sekretariat Daerah
C	**Aspek Pelayanan Umum**				
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1	**Pendidikan**				
	Angka Partisipasi Sekolah	%	Jumlah peserta didik usia 5-15 tahun : jumlah penduduk usia 5-15 tahun x 100	100	Disdikbud
	Angka pendidikan yang ditamatkan	%	Persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan	80,5	Disdikbud
	Persentase guru berkualifikasi S1/D4	%	Jumlah guru berkualfiikasi S1/D4 : jumlah guru seluruhnya x 100	100	Disdikbud
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	Disdikbud
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79	Disdikbud
	Persentase capaian SPM Pendidikan	%	Jumlah jenis layanan SPM Bidang Pendidikan yang tersedia : jumlah total jenis layanan SPM Bidang Pendidikan x 100	100	Disdikbud
	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	Jumlah satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal : jumlah seluruh satuan pendidikan x 100	95	Disdikbud
2	**Kesehatan**				
	Angka Kematian Ibu	Per	Jumlah kematian ibu	112	Dinas

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	(AKI)	100.000 KH	maternal tetapi bukan disebabkan karena kecelakaan, bencana, cidera atau bunuh diri di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 100.000		Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 1.000	7,6	Dinas Kesehatan
	Angka prevalensi balita stunting	%	Jumlah balita usia 0-59 bulan dengan status pendek di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/Jumlah Balita usia 0-59 bulan yang diukur panjang atau tinggi badan pada wilayah dan kurun waktu yang sama x 100	13,61	Dinas Kesehatan
	Persentase Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan (UU No. 40 Th 2004 dan UU No.36 Th 2009)	%	Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan : jumlah penduduk x 100	90	Dinas Kesehatan
	Persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar (PMK 43. Th 2019)	%	Jumlah puskesmas dengan ketenagaan sesuai standar : jumlah puskesmas kali 100	90,47	Dinas Kesehatan
	Persentase Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar (PMK No.73 Th. 2016, PMK No. 74 Th 2016, PMK No. 34 Th 2021)	%	Jumlah Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar : jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian x 100	75	Dinas Kesehatan
	Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri. Kepmenkes RI Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010	%	Jumlah Desa Siaga Aktif strata mandiri : jumlah desa: kelurahan x 100	13,31	Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	Dinas Kesehatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	Dinas Kesehatan
	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	74,94	Dinas Kesehatan
	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	%	Jumlah capaian masing masing indikator SPM : Jumlah indikator SPM x 100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP : jumlah	100	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
			tenaga kesehatan yang aktif x 100		
	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin	%	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang berijin : jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang ada x 100	84	Dinas Kesehatan
	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	rasio	Jumlah posyandu mandiri : jumlah balita x 100	12,74	Dinas Kesehatan
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RSUD Batang)	%	Jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standart yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standart yang seharusnya di miliki x 100	100	RSUD Batang
	Persentase Capaian Standart Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	Nilai rata - rata unsur capaian Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	88	RSUD Batang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,3	RSUD Batang
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	RSUD Batang
	Persentase tenaga kesehatan yang berijin (RSUD Batang) (SPM)	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP : jumlah tenaga kesehatan yang aktif x 100	100	RSUD Batang
	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar / Jumlah gedung, sarana dan prasarana yang diadakan / jumlah gedung yang dibangun (RSUD Batang)	%	jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standar yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standar yang seharusnya dimiliki x 100	88	RSUD Batang
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RSUD Limpung)	%	jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standar yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standar yang seharusnya dimiliki x 100	100	RSUD Limpung
	Persentase penyediaan jenis layanan SPM Bidang Kesehatan (RSUD Limpung)	%	Jumlah jenis layanan SPM Bidang Kesehatan yang tersedia : jumlah total jenis layanan SPM Bidang Kesehatan x 100	100	RSUD Limpung
	Persentase Capaian Standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	Nilai rata-rata unsur capaian Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	90	RSUD Limpung
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,25	RSUD Limpung
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	RSUD Limpung
	Persentase tenaga kesehatan yang berijin (RSUD Limpung) (SPM)	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP : jumlah tenaga kesehatan yang aktif x 100	100	RSUD Limpung
3	**Pekerjaan Umum dan**				

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Penataan Ruang				
	Persentase Infrastruktur Wilayah kondisi Baik	%	Jumlah infrastruktur kondisi baik : jumlah total infrastruktur x 100	74,58	DPUPR
	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik : luas irigasi kabupaten x 100	74,15	DPUPR
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	%	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap : Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota x 100	91,5	DPUPR
	Persentase bangunan gedung yang layak fungsi	%	Jumlah Gedung negara yang layak fungsi : Jumlah bangunan gedung negara yang menjadi kewenangan Pemkab x 100	77,01	DPUPR
	Presentase Pengaturan Rencana Detail Tata Ruang Daerah	%	Luas wilayah RDTR yang ditetapkan : Luas wilayah Kabupaten Batang x 100	15,94	DPUPR
	Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	Luas ruang terbuka hijau : Luas wilayah ber HPL / HGB x 100	28,88	DPUPR
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting : luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota x 100	4,28	DPUPR
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak (SPM)	%	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya x 100	100	DPUPR
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman (SPM)	%	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya x 100	100	DPUPR
	Persentase TPA dalam kondisi baik	%	Jumlah TPA dalam Kondisi baik : jumlah TPA seluruhnya x 100	100	DPUPR
	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik (SPM)	%	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya x100	100	DPUPR
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air	%	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) : Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km) x 100	71,43	DPUPR
	Persentase Infrastruktur Lingkungan Perumahan yang layak	%	Panjang jalan dan drainase lingkungan : Panjang jalan dan drainase lingkungan seluruhnya x100	59,04	DPUPR
	Persentase Pemanfaatan Gedung yang sesuai dengan peruntukan	%	Jumlah Gedung negara yang sesuai dengan peruntukkan : Jumlah Bangunan Gedung	100	DPUPR

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
			negara yang menjadi kewenangan Pemkab xkan 100		
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik : Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut x 100	90,42	DPUPR
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	Jumlah tenaga kerja konstruksi operator dan teknis/analis : Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/Kota x 100	12,5	DPUPR
	Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang	%	Luas wilayah RRTR yang ditetapkan : luas wilayah RRTR yang ditargetkan x 100	81,5	DPUPR
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	DPUPR
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				
	Persentase Rumah Layak Huni	%	(Jumlah Rumah Layak Huni : Jumlah Rumah se Kab. Batang) x 100	63,5	DPRKP
	Presentase perumahan dan lingkungan permukiman yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik	%	(Luasan Perumahan dan Permukiman dalam kondisi baik : Luas Total Perumahan dan Permukman) x 100	84	DPRKP
	Persentase pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak	%	Jumlah infrastruktur yg dipenuhi : jumlah infrastruktur yg ada x 100	65	DPRKP
	Persentase pengurangan pemukiman kumuh	%	(Luas lingkungan kumuh yg tertangani : Luas lingkungan kumuh lalu) x 100	63,5	DPRKP
	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	Jumlah Perumahan yang sdh dilengkapi PSU : Jumlah Perumahan se Kab. Batang x 100	84	DPRKP
	Persentase RLH bagi korban bencana / terdampak program pemerintah (SPM)	%	Jumlah rumah korban bencana yg ditangani : Jumlah Rumah Korban Bencana seluruhnya x 100	100	DPRKP
	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	%	Jumlah Luas kawasan kumuh yang tertangani : Jumlah luas kawasan kumuh seluruhnya x 100	63,5	DPRKP
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	DPRKP
5	**Ketrentaman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**				
	IKM terhadap penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan	Indeks	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	78	Satpol PP

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	masyarakat				
	Persentase penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	%	(Jumlah laporan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum : jumlah keseluruhan gangguan ketentraman dan ketertiban umum) x 100	78	Satpol PP
	Persentase luasan wilayah bencana kebakaran	%	(Luas wilayah bencana kebakaran : luas wilayah kabupaten) x100	3,5	Satpol PP
	Persentase penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran	%	(Jumlah penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran dalam tingkat waktu tanggap : jumlah seluruh kejadian kebakaran dan non kebakaran) x 100	73	Satpol PP
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Satpol PP)	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73	Satpol PP
	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	%	Jumlah Peduduk di kawasan Rawan Bencana yang mendapat informasi Rawan Bencana/ Jumlah Penduduk dikawasan RB x 100 + Jumlah Desa Tangguh Bencana/ Jumlah Deas Rawan Bencana x 100 + Jumlah Penanganan Tanggap Darurat yang dilakukan/ JUmlah Sasaran Dampak Bencana yang dilakukan tanggap Bencana x 100 + Jumlah Kejadian Bencana yng direkomendasikan Rehabilitasi dan Rekontruksi/ Jumlah Kejadian Bencana yang harus di lakukan Rehabilitasi dan Rekontruksi x 100 /4	74,17	BPBD
	Persentase Penanggulangan Bencana secara cepat dan akurat	%	Jumlah bencana yang tertangani : jumlah bencana x 100	100	BPBD
	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani (SPM)	%	Jumlah laporan gangguan trantib yang tertangani : jumlah seluruh laporan gangguan trantib x 100	100	Satpol PP
	Persentase Korban Bencana Alam Yang ditangani (SPM)	%	Jumlah korban bencana yang ditangani / Jumlah Korban Bencana X 100	100	BPBD
	Persentase Jumlah Desa/Kel yang mendapat Pelayanan Penanggulangan Bencana (SPM)	%	(Jml desa Terkena bencana mendapat penanggulangan bencana/Jml. desa terkena bencana) x 100	100	BPBD
	Persentase waktu tanggap "respon time" (SPM)	%	Jumlah penanganan kebakaran sesuai respon time : jumlah kejadian kebakaran x 100	100	Satpol PP

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	BPBD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	BPBD
6	**Sosial**				
	Persentase PMKS yg terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial serta mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga	%	Jumlah PMKS yg terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial serta mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga : Jumlah PMKS di kab Batang X 100	76	Dinas Sosial
	Presentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	%	Jumlah PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos : Jumlah PSKS di kab batang X 100	90	Dinas Sosial
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87	Dinas Sosial
	Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten (SPM)	%	Jumlah Potensi sumber Kesejahteraan Sosial ditingkatkan kemampuannya : Jumlah PSKS di Daerah Kabupaten X 100	100	Dinas Sosial
	Persentase Warga Negara Migran korban tidak kekerasan yang berhasil dipulangkan	%	jumlah warga negara migran yang berhasil dipulangkan : Jumlah warga migran korban kekerasan x 100	45	Dinas Sosial
	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (SPM)	%	Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya : Jumlah PMKS di Kabupaten Batang x 100	100	Dinas Sosial
	Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial	%	Jumlah jenis layanan SPM Urusan sosial yang tersedia : jumlah total jenis layanan SPM Urusan sosial x 100	100	Dinas Sosial
	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (SPM)	%	jumlah korban bencana alam dan sosial terpenuhi kebutuhan dasarnya : Jumlah korban bencana alam dan sosial x 100	100	Dinas Sosial
	Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	Presentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik : Jumlah Taman Makam Pahlawan x 100	100	Dinas Sosial
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,06	Dinas Sosial
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
1	**Ketenagakerjaan**				
	Tingkat Kesempatan kerja	%	Jumlah penduduk bekerja / jumlah angkatan kerja x 100	97	Dinas Ketenagakerjaan
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	Perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak : jumlah perusahaan x 100	32,01	Dinas Ketenagakerjaan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Persentase Kegiatan yang mengacu RTK	%	Jumlah kegiatan keseluruhan yang diaksanakan yang mengacu ke RTKD / Jumlah kegitan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten / Kota x 100	100	Dinas Ketenagakerjaan
	Rasio penduduk yang bekerja	%	Jumlah Penduduk 15 th ke atas / Angkatan Kerja x 100	74	Dinas Ketenagakerjaan
	Persentase Pencari pekerja yang mendapat pekerjaan	%	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan : dengan jumlah pencari kerja terdaftar x 100	41	Dinas Ketenagakerjaan
	Penurunan Jumlah Perselisihan HI	rasio	Jumlah sengketa pengusaha pekerja : jumlah perusahaan x 1000	14,4	Dinas Ketenagakerjaan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Dinas Ketenagakerjaan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	Dinas Ketenagakerjaan
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
	Ratio KDRT	rasio	Jumlah KDRT : Jumlah Rumah Tangga X 100	0,0067	DP3AP2KB
	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	%	Pekerja anak usia 5-14 tahun : Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas x 100	0	DP3AP2KB
	Persentase cakupan pernikahan anak	%	Jumlah Pernikahan Anak : Jumlah Pernikahan X 100	4,2747	DP3AP2KB
	Persentase ARG pada belanja pelaksanaan program dan kegiatan di APBD	%	Jml ARG pada Anggaran Program Kegiatan APBD : jml seluruh anggaran pada Program Kegiatan x 100	3,4	DP3AP2KB
	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	Jml aduan kekerasan thd perempuan yg tertangani : Jml kekerrasan thd perempuan yg terlaporkan x 100	100	DP3AP2KB
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	Jumlah angkatan kerja perempuan : jumlah penduduk usia kerja perempuan x 100	1,64	DP3AP2KB
	cakupan data pilah gender dan anak	%	jumlah jenis data yang tersedia : jumlah jenis data yang dibutuhkan x 100	100	DP3AP2KB
	cakupan kecamatan layak anak	%	Jml Kec yg sudah layak anak : jml kecamatan x 100	86,67	DP3AP2KB
	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	Jml aduan kekerasan thd perempuan yg tertangani : Jml kekerasan thd perempuan yg terlaporkan x 100	100	DP3AP2KB

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	DP3AP2KB
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	DP3AP2KB
3	**Pangan**				
	Persentase penguatan cadangan pangan daerah	%	jumlah cadangan pangan tahun n dikurangi tahun n-1 : tahun n-1 x 100	0,025	Dinas Pangan dan Pertanian
	Ketersediaan Bahan Pangan Utama (Ton)				
	a. Beras	Ton	Produksi Gabah Kering Panen dikurangi Angka susut (benih, pakan, tercecer, susut) dikonversi dengan rendemen beras 62,74	121.734	Dinas Pangan dan Pertanian
	b. Jagung	Ton	Produksi Jagung dikurangi Angka susut atau xkan dengan angka konversi jagung 89	72.573,00	Dinas Pangan dan Pertanian
	Cadangan Pangan Daerah (Ton)	Ton	Jumlah cadangan pangan kabupaten : standar cadangan pangan kabupaten x 100	10,7	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	%	Jumlah kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan keamndirian pangan : jumlah seluruh kegiatan ketahanan pangan x 100	12,5	Dinas Pangan dan Pertanian
	Skor Pola Pangan Harapan	%	Hasil kali konsumsi energi dengan bobot dibandingkan dengan Skor Maksimal Kelompok Pangan	89,7	Dinas Pangan dan Pertanian
	Rasio Desa mandiri Pangan	%	Desa yang mendapatkan fasilitas Desa Mandri Pangan : jumlah desa di Kab. Batang x100	17	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	%	Jumlah daerah pengawasan keamanan pangan : jumlah daerah aman pangan x 100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,3	Dinas Pangan dan Pertanian
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67,1	Dinas Pangan dan Pertanian
4	**Pertanahan**				
	Tingkat penurunan kasus sengketa pertanahan	%	{ (jumlah sengketa tanah tahun berkenaan - jumlah sengketa tanah tahun lalu) : jumlah sengketa tanah tahun lalu } x 100	90	DPRKP
	Persentase penyelesaian kasus pertanahan	%	(Jumlah kasus yang ditangani : Jumlah kasus yang terdaftar) x 100	100	DPRKP
	Persentase permohonan fasilitasi pernyelesaian	%	jumlah permohonan yang terfasilitasi : jumlah	85	DPRKP

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	permasalahan pertanahan yang tertangani		permohonan tanah seluruhnya x 100		
5	**Lingkungan Hidup**				
	Persentase Luas RTH	%	Luas RTH : Luas lahan x 100	70	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Air	Indeks	ci baru = cim-ci (hasil pengukuran)/cim-LiJ	50	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	100-(50/0.0 x ieu-0.1)	80	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	Luas tutupan hutan : Luas wilayah administrasi	68,8	Dinas Lingkungan Hidup
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63	Dinas Lingkungan Hidup
	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah	%	jumlah dokumen yang disusun : jumlah dokumen yang dibutuhkan x 100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	%	Jumlah persetujuan yang dikeluarkan : jumlah permohonan x 100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH : izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten yang ditangani /Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten x 100	65	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	%	Jumlah komunitas pduli LH yang di edukasi : Jumlah komunitas LH yang direncanakan edukasix 100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	%	Jumlah Dunia Pendidikan yang memenuhi nilai standar : jumlah sekolah yang mendaftar x 100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase penanganan sampah	%	Jumlah sampah yang tertangani : jumlah timbulan sampah x 100	80	Dinas Lingkungan Hidup
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,72	Disdukcapil

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Perangkat Daerah				
	Persentase kepemilikan identitas Penduduk dan Akte Kelahiran	%	[(Jumlah Kepemilikan KIA : Jumlah Peduduk usia 0-17 th) + (Jumlah Penduduk Ber-KTP el : Jumlah Peduduk usia di atas 17 th) + (jumlah penduduk ber-akta kelahiran usia 0-18 th : jumlah penduduk usia 0-18 th) : 3] x 100	88,33	Disdukcapil
	Persentase menurunnya data ganda dan anomali	%tase	[(Jumlah Data ganda dan anomali tahun lalu - data ganda dan anomali tahun ini) : jumlah data ganda dan anomali tahun lalu] x 100	2	Disdukcapil
	Persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan	%	[(Jumlah penduduk memiliki KTP el : Jumlah penduduk usia 17 th ke atas) + (Jumlah penduduk memiliki KIA : jumlah penduduk di bawah usia 17 th) : 2] x 100	94,5	Disdukcapil
	Persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir	%	[(Jumlah kepemilikan akta nikah : jumlah pemohon) + (jumlah akta usia bayi 0-5 th : penduduk usia 0-5 th) : 2] x 100	97,6	Disdukcapil
	Persentase penyajian data kependudukan yang valid	%	(Jumlah data kependudukan yang valid : jumlah seluruh data kependudukan) x 100	95,6	Disdukcapil
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63	Disdukcapil
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				
	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	jumlah desa maju : total jumlah se kab. batang x 100	24	Dispermades
	Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	0,57	Dispermades
	Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	0,81	Dispermades
	Indeks Ketahanan Ekologi	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	0,51	Dispermades
	Persentase sumbangan pendapatan perempuan	%	Jumlah pkk desa binaan : pkk desa sekab. Batang x 100	62,76	Dispermades
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Dispermades
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68	Dispermades
	Persentase budaya desa yang dilestarikan	%	jumlah adat dan budaya desa yang dilestarikan : jumlah adat budaya desa x 100	60	Dispermades
	Persentase desa yang tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan	desa	jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya : total desa di Kabupaten Batang x 100	56,49	Dispermades
	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam	%	jumlah LKD yang aktif : jumlah LKD keseluruhan x 100	75	Dispermades

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	pemberdayaan desa				
8	**Pengendalian Penduduk dan KB**				
	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	**r = {Pt/P_0) x (1/t)-1} x 100** r = laju pertumbuhan penduduk Pt = Jumlah Penduduk tahun t P_0 = Jumlah penduduk tahun dasar t = selisih tahun Pt dengan P_0	1,12	DP3AP2KB
	TFR (Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total)	Index	5 Σ ASFR	2,9	DP3AP2KB
	Persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana	%	Jml jenis data kependudukan bid KB : Target jml jenis data kependudukan bid. KB x 100	100	DP3AP2KB
	Peningkatan Cakupan Kesertaan Ber-KB	%	PUS yang ber-KB : Jum. PUS x 100	74	DP3AP2KB
	Cakupan pembangunan ketahanandan kesejahteraan keluarga melalui kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL)	%	Jumlah keluarga yang didampingi kelompok Tribina	78,71	DP3AP2KB
9	**Perhubungan**				
	Rasio ijin trayek	rasio	jumlah ijin trayek yang dikeluarkan : jumlah penduduk	1,5	Dinas Perhubungan
	Tingkat kelancaran dan keamanan lalu lintas	rasio	v / c ratio Jalan Kabupaten v : volume kendaraan c : kapasitas jalan	0,5	Dinas Perhubungan
	Persentase terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat	%	Jumlah kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang dilaksanakan : jumlah kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang ditetapkan x 100	87	Dinas Perhubungan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	Dinas Perhubungan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	Dinas Perhubungan
10	**Komunikasi dan Informatika**				
	Indeks SPBE	Indeks	Domain SPBE	3,55	Diskominfo
	Indeks Smart City	Indeks	Dimensi Smart City	3,48	Diskominfo
	Persentase informasi dan komunikasi publik yang bisa diakses lewat media komunikasi	%	Jumlah informasi yang diakses publik : dengan jumlah penyebaran informasi x 100	100	Diskominfo
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,5	Diskominfo
	Persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	Jumlah informasi yang diakses publik : jumlah penyebaran informasi x 100	72	Diskominfo

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	kabupaten/kota				
	Persentase Jumlah Layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	%	Jumlah layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi : jumlah layanan x 100	73	Diskominfo
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	Diskominfo
11	**Koperasi dan UKM**				
	Persentase koperasi aktif	%	(jumlah koperasi aktif : jumlah koperasi keseluruhan) x 100	68	Disperindag-kop dan UKM
	Persentase peserta pelatihan dengan predikat baik	%	(jumlah peserta pelatihan/diklat yang lulus : jumlah peserta pelatihan/diklat) x 100	100	Disperindag-kop dan UKM
	Persentase peserta diklat dengan predikat baik	%	(jumlah peserta pelatihan/diklat yang lulus : jumlah peserta pelatihan/diklat) x 100	100	Disperindag-kop dan UKM
	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru	%	(jumlah UMKM Baru tahun n - jumlah UMKM tahun n-1) : jumlah UMKM tahun n-1 } x 100	12	Disperindag-kop dan UKM
	Persentase produk UMKM yang terstandarisasi	%	Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N - Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N-1) :Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N-1) X 100	20	Disperindag-kop dan UKM
12	**Penanaman Modal**				
	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	(Investasi tahun lalu : investasi tahun ini) x 100	80	DPMPTSP
	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Trilyun	Jumlah perusahaan yang berinvestasi di batang	2,5	DPMPTSP
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	DPMPTSP
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	DPMPTSP
	Persentase peningkatan jumlah investor	%	Jumlah investor tahun n dikurangi Jumlah investor tahun (n-1) : jumlah investor tahun n x 100	60	DPMPTSP
	Persentase promosi di kabupaten Batang	%	Jumlah promosi yang direncanakan : jumlah promosi yang dilaksanakan x100	100	DPMPTSP
	Persentase ijin yang diterbitkan	%	Jumlah pemohon ijin usaha : jumlah ijin yang diterbitkan x 100	100	DPMPTSP
	Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal	%	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM : jumlah perusahaan	8	DPMPTSP
	Persentase data dan	%	Jumlah pemberian pelayanan	45	DPMPTSP

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	informasi penanaman modal yang tersedia		data : jumlah pemohon data x 100		
13	**Kepemudaan dan Olahraga**				
	Jumlah medali yang diperoleh	Medali	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	40	Disparpora
	Persentase peningkatan pemuda berprestasi	%	{(Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n – Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n-1) : Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n-1} x 100	4	Disparpora
	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	%	jumlah organisasi kepemudaan yang dibina : jumlah organisasi kepemudaan yang terdaftar x 100	39	Disparpora
	capaian medali kejuaraan	medali	Jumlah total medali yang didapat selama 1 Tahun	45	Disparpora
	Penghargaan yang diterima	%	Jumlah penghargaan yang diterima:jumlah kegiatan yang diikuti X 100	10	Disparpora
14	**Statistik**				
	Persentase pemanfaatan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	%	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi : dengan jumlah data statistik sektoral yang terkumpul x 100	100	Diskominfo
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi / Jumlah data statistik sektoral yang terkumpul x 100	100	Diskominfo
15	**Persandian**				
	Indeks Keamanan Informasi	%	Jumlah sistem elektronik yang berhasil dilakukan pengamanan : dengan jumlah seluruh sistem elektronik yang tersedia setiap tahun x 100	100	Diskominfo
	Persentase capaian sistem elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya	%	Jumlah Sistem Elektronik yang berhasil dilakukan pengamanan : dengan jumlah seluruh sistem elektronik yang tersedia setiap tahun x 100	100	Diskominfo
16	**Kebudayaan**				
	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	%	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan : jumlah keseluruhan cagar budaya x 100	100	Disdikbud
	Persentase pengunjung festival kesenian	%	Jumlah pengunjung festival kesenian tradisional yang	75	Disdikbud

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah		diselenggarakan Pemerintah Daerah : Jumlah target pengunjung kesenian tradisional yang diselenggarakan x 100		
	Persentase festival seni yg dilaksanakan	%	jumlah festival seni yang diselenggarakan pada tahun berjalan (n) : jumlah festival seni yang ditargetkan x 100	100	Disdikbud
	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	%	jumlah komunitas / sanggar kesenian yang difasilitasi : jumlah komunitas / sanggar seni yang terdaftar x 100	75	Disdikbud
17	**Perpustakaan**				
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	TGM= (0,3 ×(FM+DM+JB))+0,05×(FAI+DAI)	66,37	Disperpuska
	indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	IPLM= ∑UPLM/AM	2,9	Disperpuska
	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun	%	(Jumlah peningkatan pengunjung : Jumlah pengunjung tahun sebelumnya) x 100	0,16	Disperpuska
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	61,2	Disperpuska
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,69	Disperpuska
18	**Kearsipan**				
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Indeks	**T=(a+i+s+j)/4** T = tingkat ketersediaan arsip a = tase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = tase arsip inaktiv yang telah dibuatkan daftar arsip s = tase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = tase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	75,5	Disperpuska
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Indeks	**T=(m+b+g+a+c+i)/6** T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan atau	22,6	Disperpuska

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
			dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK		
			a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK		
			c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK		
			i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK		
	Urusan Pilihan				
1	**Kelautan dan Perikanan**				
	Indeks tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang dilaksanakan	Indeks	nilai rata- rata Indeks semua pelayanan yang dilaksanakan	85	Dislutkanna k
	Kontribusi sektor Perikanan dan Peternakan terhadap PDRB ADHK	%	data dari bps (dirilis setiap bulan februari)	21,95	Dislutkanna k
	Persentase Capaian Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	%	Capaian produksi perikanan tangkap ditambah perikanan budidaya pada tahun n : target produksi perikanan tangkap ditambah target produksi perikanan budidaya x 100	97	Dislutkanna k
	Persentase Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan	%	Capaian tingkat konsumsi makan ikan pada tahun n : target tingkat konsumsi makan ikan x 100	98	Dislutkanna k
	Capaian Bina Kelompok Masyarakat Pengawas	%	(Realisasi Jumlah Pokmaswas yang Diberdayakan : Target) x 100	100	Dislutkanna k
	Persentase Capaian Tingkat konsumsi makan ikan	%	(Realisasi Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan : Target Tingkat Konsumsi Makan Ikan) x 100	98	Dislutkanna k
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	Dislutkanna k
2	**Pariwisata**				
	Persentase Peningkatan kunjungan Wisatawan	%	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1 : Jumlah wisatawan tahun n-1) x 100	23	Disparpora
	Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	(Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n dikurangi Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n-1 : Jumlah pemdapatan sektor pariwisata tahun n-1 x 100	15	Disparpora
	Persentase inovasi ekonomi kreatif	%	(jumlah inovasi produk ekonomi kreatif : jumlah	12	Disparpora

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
			produk ekonomi kreatif/kajian yang dilaksanakan) x 100		
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72	Disparpora
	Persentase jumlah ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	%	jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki HAKI :jumlah produk ekonomi kreatif yang terdaftar X 100	25	Disparpora
	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	%	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat : Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif X 100	40	Disparpora
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	Disparpora
3	**Pertanian**				
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	%	jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian : Jumlah PDRB x 100	24,77	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	Jumlah produksi pertanian (Pangan, Horti da Perkebunan) per hektar per tahun : luas panen x 100	0,0108	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase Produksi Hasil Ternak (Daging, Telur dan Susu)	%	Capaian produksi tahun n : target produksi tahun n x 100	90	Dislutkanna k
	Persentase Hewan / Ternak yang Terobati	%	Capaian hewan ternak terobati pada tahun berjalan : target capaian hewan ternak terobati x 100	100	Dislutkanna k
	Capaian Jumlah Hewan yang Terobati	%	(Realisasi Jumlah Hewan yang Terobati di Puskeswan : Target Hewan yang Terobati di Puskeswan) x 100	100	Dislutkanna k
	Persentase Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	%	(jumlah daerah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian : jumlah seluruh daerah yang terkena bencana pertanian)*100	100	Dislutkanna k
	Persentase Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Peternakan	%	(Realisasi Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Peternakan : Target) x 100	100	Dislutkanna k
	Persentase kenaikan kualitas dan kapasitas SDM Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian	%	jumlah Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian yang mengikuti pelatihan : jumlah Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha di Kabupaten x 100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase validitas data Pertanian	%	jumlah kesesuaian data yang tervalidasi : jumlah kesesuaian data yang ada x 100	100	Dinas Pangan dan Pertanian

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Persentase kenaikan pelaksanaan Penyelenggaraan Penyuluhan	%	jumlah data laporan yang tersedia : jumlah BPP x 100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
	Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun	%	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun : luas panen X 100	0,0108	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	%	realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian : rencana kegiatan pembangunan prasarana pertanian X 100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	%	(jumlah daerah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian : jumlah seluruh daerah yang terkena bencana pertanian)*100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
4	**Perdagangan**				
	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan	%	Data BPS	13,24	Disperindagkop dan UKM
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68	Disperindagkop dan UKM
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Disperindagkop dan UKM
	Persentase Verifikasi Teknis	%	Jumlah verifikasi teknis : Jumlah yang pengajuan x100	100	Disperindagkop dan UKM
	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	jumlah pasar rakyat dan Shelter PKL yang direvitalisasi/renovasi : jumlah pasar rakyat dan Shelter PKL keseluruhan x 100	36,36	Disperindagkop dan UKM
	Persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga	%	barang pokok yang stabil harganya : seluruh barang kebutuhan pokok x100	75	Disperindagkop dan UKM
	nilai ekspor perdagangan	USD	nilai ekspor perdagangan - nilai impor pada tahun n kabupaten kota	60.215.421	Disperindagkop dan UKM
	Persentase alat2 ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	Jumlah UTTP bertera /tera ulang : Potensi UTTP x 100	75	Disperindagkop dan UKM
	Presentase Pelaksanaan Pameran dagang dalam negeri di Kabupaten Batang	%	Jumlah Pelaksanaan pameran : jumlah pameran yang direncanakan x 100	100	Disperindagkop dan UKM
5	**Perindustrian**				
	Persentase peningkatan jumlah pelaku IKM	%	jumlah pelaku IKM tahun n-jumlah pelaku IKM tahun n-1) : jumlah pelaku IKM tahun n-1 x 100	0,0079	Disperindagkop dan UKM
	Persentase peningkatan jumlah perijinan	%	jumlah izin usaha tahun n-jumlah izin usaha tahun n-1)	86	Disperindagkop dan UKM

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	berusaha sektor industri		: jumlah izin usaha tahun n-1 x 100		
	Persentase jumlah Industri dalam SIINas	%	jumlah Industri dalam SIINas tahun n- jumlah Industri dalam SIINas tahun n-1) : jumlah Industri dalam SIINas tahun n-1 x 100	86	Disperindagkop dan UKM
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
1	**Sekretariat Daerah**				
	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP B	%	Jumlah PD yang mendapat nilai B : jumlah PD yang ada x 100	95	Sekretariat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Sekretariat Daerah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,5	Sekretariat Daerah
	Nilai EKPPD	Skor	Nilai hasil evaluasi LPPD nasional menurut Kemendagri	2,99	Sekretariat Daerah
	Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu	%	Jumlah tersusunnya LPPD tepat waktu : jumlah keseluruhan LPPD perangkat daerah x 100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang difasilitasi	%	Jumlah penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi : jumlah keseluruhan administrasi tata pemerintahan x 100	100	Sekretariat Daerah
	Presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	jml kegiatan yang terlaksana : jml kegiatan yg direncanakan x 100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berhasil difasilitasi	%	(realisasi persentase penyusunan produk hukum daerah yang berhasil difasilitasi + persentase perkara hukum yang terselesaikan + tase penyediaan informasi produk) : (persentase target penyusunan produk hukum daerah yang berhasil difasilitasi + tase perkara hukum yang terselesaikan + persentase penyediaan informasi produk hukum) x 100	95	Sekretariat Daerah
	Persentase Bagi Hasil BUMD terhadap APBD (Penyertaan Modal)	%	(Jumlah deviden : Jumlah Penyertaan Modal) x 100	15	Sekretariat Daerah
	Persentase kebijakan perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti	%	(Jumlah kebijakan yang ditindaklanjuti : jumlah kebijakan yang dikeluarkan baik pusat atau daerah)* 100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Pelaksanaan APBD pada SKPD yang	%	Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan : Jumlah	97	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	sesuai target		seluruh paket pekerjaan yang direncanakan x 100		
	Persentase lelang melalui e-procurement	%	Jumlah Paket yang dilelang : Jumlah Total Rencana Paket Lelang x 100	100	Sekretariat Daerah
	Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	skor	Total nilai kematangan PD : jumlah PD	36 (sedang)	Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	Jumlah PD yang mendapat telah menerapkan SOP : jumlah PD x 100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase kegiatan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi Kepala Daerah	%	Jumlah kegiatan pimpinan yang terfasilitasi : jumlah permohonan fasilitasi kegiatan pimpinan x 100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	%	Realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional KDH dan WKDH, Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda : target x 100	90	Sekretariat Daerah
2	**Sekretariat DPRD**				
	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	Hasil Survey/Kuesioner Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	79	Sekretariat DPRD
	Persentase Peraturan Daerah non APBD yang ditetapkan	%	Capaian Peraturan Daerah non APBD yang terbentuk : target Peraturan Daerah non APBD yang ditetapkan per tahun x 100 (ket: target Perda non APBD yang ditetapkan per tahun sebanyak 5 Perda)	100	Sekretariat DPRD
	Persentase KUA/PPA dan Perda APBD yang ditetapkan	%	Capaian Peraturan Daerah APBD yang terbentuk : target Peraturan Daerah APBD yang ditetapkan per tahun x 100 (ket: target Perda APBD yang ditetapkan per tahun sebanyak 3 Perda, dan 2 Perbup KUA/PPA)	100	Sekretariat DPRD
	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana dan Kode Etik DPRD	%	Capaian kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana : target kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan x 100 (target sesuai jumlah kegiatan pengawasan yang dijadwalkan per tahun)	100	Sekretariat DPRD
	Persentase peningkatan kapasitas Anggota DPRD	%	Rata-rata capaian kinerja fasilitasi kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	100	Sekretariat DPRD
	Persentase penyerapan aspirasi masyarakat	%	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD per	100	Sekretariat DPRD

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
			tahun : jumlah seluruh anggota DPRD x 100		
	Persentase fasilitasi tugas Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD	%	Jumlah kegiatan Alat Kelengkapan Dewan yang difasilitasi : jumlah kegiatan Alat Kelengkapan Dewan yang dijadwalkan x 100	100	Sekretariat DPRD
	Persentase fasilitasi layanan administrasi DPRD	%	Jumlah kegiatan admnistrasi Dewan yang difasilitasi : jumlah kegiatan administasi Dewan yang dijadwalkan x 100	100	Sekretariat DPRD
	Persentase fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	Jumlah anggota DPRD yang mendapat layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD : jumlah Anggota DPRD x 100	100	Sekretariat DPRD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	Sekretariat DPRD
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
1	**Perencanaan**				
	Indeks Perencanaan	Indeks	60%*Capaian sasaran pemda+20%*sasaran perangkat daerah+20%*capaian program daerah	79	Bapelitbang
	Rata-rata capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	%	(Rata-rata capaian indikator kinerja program + rata-rata capaian IKU + rata-rata Capaian IKD) /3 x 100	91	Bapelitbang
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	Jumlah Program dalam RKPD : Jumlah Program dalam APBD X 100	100	Bapelitbang
	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	Jumlah Program dalam Renja Perangkat Daerah : Jumlah Program dalam Renstra Perangkat Daerah X 100	100	Bapelitbang
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	%	jumlah dokumen perencanaan yang tersedia tepat waktu : jumlah dokumen yang dihasilkan x 100	100	Bapelitbang
	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan	%	jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang dievaluasi : jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang dihasilkan x 100	100	Bapelitbang
	Persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah	%	jumlah elemen data/informasi yang tersedia : jumlah elemen data/informasi yang dibutuhkan sebagai bahan analisis x100	100	Bapelitbang
	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang PSDA yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PSDA yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup	91	Bapelitbang

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
			koord bid. PSDA) x 100		
	Persentase indikator program priroitas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PPM yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PPM) x 100	91	Bapelitbang
	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang IPW yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. IPW yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. IPW) x 100	91	Bapelitbang
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63.00.00	Bapelitbang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,8	Bapelitbang
2	**Keuangan**				
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	status	OPINI	WTP	BPKPAD
	Persentase Kepatuhan OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan	%	(Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP / jumlah total OPD) x 100	100	BPKPAD
	Presentase peningkatan pendapatan daerah	%	[(Realisasi Pendapatan Daerah tahun n)-(Realisasi Pendapatan Daerah Tahun n-1)] : (Realisasi Pendapatan Daerah Tahun n-1) x 100	0,5	BPKPAD
	Persentase Peningkatan PAD	%	[(Realisasi PAD tahun n)-(Realisasi PAD Tahun n-1)]/(Realisasi PAD Tahun n-1) x 100	1,36	BPKPAD
	Penyampaian Raperda APBD tepat waktu	status	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	BPKPAD
	Persentase tersusunnya data aset Pemda menurut lokasi, legalitas kepemilikan, pemnfaatan dan kondisinya	%	Dokumen KIB per SKPD se Kabupaten Batang	100	BPKPAD
	Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban tepat waktu	status	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	BPKPAD
	Persentase Realisasi serapan belanja terhadap anggaran belanja	%	realisasi belanja : anggaran belanja x 100	90	BPKPAD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64,5	BPKPAD
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	BPKPAD
3	**Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan**				

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Nilai Sistem Merit	Skor	(Jumlah Skor x Bobot dalam setiap aspek)	225	BKD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	BKD
	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Skor	(Total Nilai Persepsi Responden Per Parameter : Total Parameter Yang Terisi) x (1/jumlah parameter) x Nilai Dasar 25	87	BKD
	Persentase ASN dengan nilai kinerja kriteria "baik"	%	(Jumlah ASN Kab Batang yang memiliki Kinerja x : Jumlah ASN Kab. Batang) x 100	100	BKD
	Persentase ASN yang meningkat kemampuannya sesuai bidang tugas	%	(Jumlah realisasi ASN yg dilatih : Jumlah Pendaftar Pelatihan) x 100	80	BKD
	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu	%	(Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu : Jumlah semua layanan administrasi kepegawaian yang ada) x 100	100	BKD
	Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup sub koordinator diklat yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup sub koordinator diklat)x100	100	BKD
4	**Penelitian dan Pengembangan**				
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	ISP+rata-rata ISI	63.00.00	Bapelitbang
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	(Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan : Jumlah total hasil kelitbangan) x 100	100	Bapelitbang
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	(Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah : jumlah total perangkat daerah) x 100	100	Bapelitbang
	Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	(Jumlah rekomendasi utama kegiatan kelitbangan yg mjd bahan masukan penyusunan renja : Kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan) x100	60	Bapelitbang
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
1	**Pengawasan**				
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	Jumlah laporan hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti : jumlah laporan hasil pengawasan x 100	85	Inspektorat Daerah
	Persentase pencapaian peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	%	pencapaian nilai kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya x 100	85	Inspektorat Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	jumlah laporan pengaduan masyarakat yg terselesaikan : jumlah laporan pengaduan masyarakat tahun berjalan x 100	85	Inspektorat Daerah
	Persentase Jumlah Pemeriksaan Yang Dilakukan	%	Jumlah LHP yang diterbitkan dibandingkan jumlah obrik x 100	100	Inspektorat Daerah
	Level SPIP	level	kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya dalam satu tahun anggaran	3	Inspektorat Daerah
	Persentase kapabilitas APIP	%	kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya dalam satu tahun anggaran	70	Inspektorat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	Inspektorat Daerah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	Inspektorat Daerah
	Unsur Kewilayahan				
1	**Kecamatan Batang**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Batang
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	60	Kecamatan Batang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	Kecamatan Batang
	Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	60	Kecamatan Batang
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Batang
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63	Kecamatan Batang
	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	%	(Usulan yang masuk perangkingan : Jumlah Usulan Perencanaan) x 100	100	Kecamatan Batang
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Batang
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Batang
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Batang

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Batang
2	**Kecamatan Banyuputih**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Banyuputih
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	65	Kecamatan Banyuputih
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	Kecamatan Banyuputih
	Jumlah Desa dengan Status maju dan Mandiri	Desa	Jumlah Desa dengan Status maju dan Mandiri	5	Kecamatan Banyuputih
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Banyuputih
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63	Kecamatan Banyuputih
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Banyuputih
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Banyuputih
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Banyuputih
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Banyuputih
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Banyuputih
3	**Kecamatan Bandar**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Bandar
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	41,18	Kecamatan Bandar
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,15	Kecamatan Bandar
	Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	desa	Jumlah desa dengan status maju dan mandiri	7	Kecamatan Bandar
	Presentase gangguan	%	(Gangguan Trantibum yang	100	Kecamatan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	trantibum yang dapat diselesaikan		terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100		Bandar
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63	Kecamatan Bandar
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Bandar
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Bandar
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Bandar
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Bandar
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Bandar
4	**Kecamatan Bawang**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Bawang
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(jumlah Desa yang mencapai target : jumlah desa seluruhnya) x 100	80	Kecamatan Bawang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Kecamatan Bawang
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	75	Kecamatan Bawang
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Bawang
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	Kecamatan Bawang
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Bawang
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Bawang
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Bawang
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor	100	Kecamatan Bawang

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	dengan baik		forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100		
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Bawang
5	**Kecamatan Blado**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Blado
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	38,8	Kecamatan Blado
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Kecamatan Blado
	Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	38,8	Kecamatan Blado
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Blado
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Kecamatan Blado
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Blado
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Blado
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Blado
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Blado
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Blado
6	**Kecamatan Gringsing**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Gringsing
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	80	Kecamatan Gringsing
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	Kecamatan Gringsing

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	66,6	Kecamatan Gringsing
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Gringsing
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67	Kecamatan Gringsing
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Gringsing
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Gringsing
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Gringsing
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Gringsing
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	90	Kecamatan Gringsing
7	**Kecamatan Kandeman**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,50 (B)	Kecamatan Kandeman
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70	Kecamatan Kandeman
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Kecamatan Kandeman
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	90	Kecamatan Kandeman
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Kandeman
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	Kecamatan Kandeman
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Kandeman
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Kandeman
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Kandeman
	Cakupan Penyelenggaraan	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka	100	Kecamatan Kandeman

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik		hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100		
	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Kandeman
8	**Kecamatan Limpung**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Limpung
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70,59	Kecamatan Limpung
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Kecamatan Limpung
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	47,06	Kecamatan Limpung
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Limpung
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68	Kecamatan Limpung
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Limpung
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Limpung
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Limpung
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Limpung
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Limpung
9	**Kecamatan Pecalungan**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Pecalungan
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	80	Kecamatan Pecalungan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Kecamatan Pecalungan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Perangkat Daerah				
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70	Kecamatan Pecalungan
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Pecalungan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	Kecamatan Pecalungan
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Pecalungan
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Pecalungan
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Pecalungan
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Pecalungan
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Pecalungan
10	**Kecamatan Reban**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Reban
	Persentase Status Desa Maju dan Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	47,36	Kecamatan Reban
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	Kecamatan Reban
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Majan Mandiri tiap tahun	%	Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri/ Jumlah Desa) x 100	36,84	Kecamatan Reban
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Reban
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	Kecamatan Reban
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Reban
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Reban
	Persentase gangguan	%	(Gangguan Trantibum yang	100	Kecamatan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	trantibum yang dapat diselesaikan		terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100		Reban
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Reban
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	90	Kecamatan Reban
11	**Kecamatan Subah**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Subah
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(jumlah Desa yang Maju dan Mandiri : jumlah desa seluruhnya) x 100	35,29	Kecamatan Subah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Kecamatan Subah
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	35,29	Kecamatan Subah
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Subah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	Kecamatan Subah
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Subah
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Subah
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Subah
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Subah
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Subah
12	**Kecamatan Tersono**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Tersono
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	80	Kecamatan Tersono
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,5	Kecamatan Tersono
	Persentase Jumlah Desa	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa	75	Kecamatan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun		Mandiri : Jumlah Desa) x 100		Tersono
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Tersono
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63	Kecamatan Tersono
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Tersono
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Tersono
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Tersono
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Tersono
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Tersono
13	**Kecamatan Tulis**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,80 (SB)	Kecamatan Tulis
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70	Kecamatan Tulis
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	Kecamatan Tulis
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70	Kecamatan Tulis
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Tulis
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Kecamatan Tulis
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Tulis
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Tulis
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Tulis

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Tulis
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Tulis
14	**Kecamatan Warungasem**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Warungasem
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	80	Kecamatan Warungasem
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Kecamatan Warungasem
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	85	Kecamatan Warungasem
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Warungasem
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Kecamatan Warungasem
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Warungasem
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Warungasem
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Warungasem
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Warungasem
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	90	Kecamatan Warungasem
15	**Kecamatan Wonotunggal**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Wonotunggal
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	33,3	Kecamatan Wonotunggal
	Indeks Kepuasan	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,42	Kecamatan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		(IKM)		Wonotunggal
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	46,6	Kecamatan Wonotunggal
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Wonotunggal
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Wonotunggal
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Wonotunggal
	Unsur Pemerintahan Umum				**Bakesbangpol**
	Indeks Kerukunan	%	Dilakukan Survey (Toleransi+Kesetaraan+Kerjasama) : 3*100	80	**Bakesbangpol**
	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	Skor	Nilai hasil evaluasi mplementasi SAKIP oleh Kemenpan RB	72	**Bakesbangpol**
	Persentase demo tertangani	%	(jumlah demo tertangani : jumlah demo yang ada)*100	100	**Bakesbangpol**
	Persentase potensi gangguan/konflik sosial keagamaan yang teratasi	%	(jumlah konflik sosial tahun berkenaan : jumlah konflik sosial tahun sebelumnya) * 100	100	**Bakesbangpol**
	Persentase masyarakat yang mengamalkan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang bagus	%	(Jumlah masyarakat yang telah mendapat Sosialisasi wasbang yang mengamalkan ideologi dan karakter bangsa yang bagus : jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi wasbang) x 100	95	**Bakesbangpol**
	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif mendukung Pemerintah	%	(Jumlah Parpol dan Lembaga pendidikan yang berperan aktif dalam mendukung pemerintah : jumlah parpol	100	**Bakesbangpol**

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
			dan lembaga pendidikan dibatang) x 100		
	Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	%	(Jumlah Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan : Jumlah Ormas yang terdaftar resmi) x 100	100	**Bakesbangpol**
	Persentase masyarakat yang paham tentang ketahanan Ekososbud	%	(Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialiasi dan paham terhadap ketahanan Ekosbud : jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi) x 100 (Melalui Pretest dan postest)	100	**Bakesbangpol**
	Persentase penurunan konflik sosial	%	(Jumlah konflik sosial tahun berkenaaan : jumlah konflik sosial tahun sebelumnya) x 100	100	**Bakesbangpol**

Sumber : RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026

B. Periodesasi RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

6.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

Sub bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja daerah yang selaras dengan dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029. Dalam upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2025, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2025 sebagai berikut

Tabel 6. 3 Penetapan Indikator Kinerja Utama dalam Rancangan RPJMD Kabupatenn Batang Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun	KET
			2024	2025	
1	PDRB Perkapita	Rp Juta	36,26	41,67	Sekretariat Daerah
2	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Angka	3,59	3,74	Sekretariat Daerah
3	Tingkat Kemiskinan	%	8,73	8,34-8,27	Sekretariat Daerah
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,73	70,75	Sekretariat Daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun	KET
			2024	2025	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,67	5,65 - 5,27	Sekretariat Daerah
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,03	5,5 - 6,1	Sekretariat Daerah
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	64,47	70,66	Sekretariat Daerah
8	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Angka	128,7	126,8	Sekretariat Daerah
9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Angka	81,71	81,5	Sekretariat Daerah
10	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Rasio	0,962	0,992	Sekretariat Daerah
11	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Angka	NA	6,64	Sekretariat Daerah

Sumber : RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

6.1 Indikator Kinerja Daerah dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Batang tahun 2025, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran, IKU perangkat daerah, serta indikator program perangkat daerah yang tercantum dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029. Indikator kinerja daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 4 Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025 dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN
			2024	2025
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	5,9	6,16

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN
			2024	2025
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	20,96	21,05
3	Indeks Kualitas lingkungan Hidup	Angka	64,47	70,66
4	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2eq	169,79	746.332,82
5	Indeks Resiko Bencana	Angka	81,71	81,5
6	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	84,77	84,95
7	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	6,53	6,32
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,03	5,5 - 6,1
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,73	8,34-8,27
3	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	36,26	41,67
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,67	5,65 - 5,27
5	Indeks Gini	Angka	0,312	0,310
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,73	70,75
7	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,29	0,289-0,278
8	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	NA	19,28
9	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	NA	14.700
10	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	NA	20
11	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	60	63
ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Angka Ketergantungan	%	44,59	45,14
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	34,89	35,55
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	4,32	4,34
4	Rasio Kewirausahaan	%	2,76	3,4

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN
			2024	2025
5	Return on Aset (ROA) BUMD	%	2,88	3,0
6	Disparitas Harga	%	±10	±10
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	77,91	78
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	27,07	27,08
9	Ekspor Barang dan Jasa	USD	59.034.726	60.215.421
10	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	68,17	68,54
11	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	86,00	91,00
12	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	81,00	84,00
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98,62	98,00
	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):			
14	a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	86,14	83,84
15	b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	88,15	87,9
16	c) Numerasi SD/Sederajat	%	76,26	80,98
17	d) Numerasi SMP/Sederajat	%	83,54	84,82
18	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	14,76	14,8
19	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	3,51	3,55
20	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	95,81	88,01
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	66,81	67,3
22	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,53	0,71
23	Tingkat Inflasi	%	2,19	2,3-3,3
24	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kab/Kota per PDRB	%	0,73	0,93
25	Total Kredit pada Bank Milik Kab/Kota per PDRB	%	0,57	0,60
26	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	34,89	35,55
27	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	NA	75
28	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	20,17	20

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN
			2024	2025
29	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	4,32	4,34
30	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Angka	0,962	0,99
ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	87,58	81
2	Indeks Integritas Nasional	Angka	80,49	80,5
3	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,59	3,74
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	81,71	81,5
5	Indeks Harmoni Indonesia	Angka	NA	6,64
6	Indeks Zakat Nasional	Angka	0,48	0,51
7	Jumlah Kejadian Konflik SARA	kali	0	0
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH				
A	**Pendidikan**			
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,10	7,2
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,4	12,5
3	Persentase capaian SPM Pendidikan (SPM)	%	100	100
B	**Kesehatan**			
1	**Dinas Kesehatan**			
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,01	75,17
2	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	9,00	9,00
3	Jumlah Kematian Balita	Kasus	157,00	152,00
4	Prevalensi Stunting	%	20,70	19,70
5	Angka Populasi Bebas PTM	%	10,00	15,00
6	Angka Populasi Bebas PM	%	23,00	28,00
7	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	87,74	90,00
8	Presentase fasilitas kesehatan sesuai standar	%	54,84	54,84
9	Nilai AKIP Dinas Kesehatan	Angka	79,60	79,70
10	Indeks Pelayanan Publik Dinas Kesehatan	Angka	3,81	4,15
2	**RSUD Batang**			
1	Persentase Standard Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RSUD Batang)	%	80,2	82
2	Persentase Capaian Standart Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (RSUD Batang)	%	87,35	88
3	Indeks Pelayanan Publik RSUD Batang	Angka	3,68	3,75
4	Nilai AKIP RSUD Batang	Angka	67,3	68,8

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN
			2024	2025
3	**RSUD Limpung**			
1	Persentase Standard Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RSUD Limpung)	%	87	88
2	Persentase Capaian Standart Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (RSUD Limpung)	%	84,32	85
3	Indeks Pelayanan Publik RSUD Limpung	Angka	3,13	3,5
4	Nilai AKIP RSUD Limpung	Angka	69,7	69,75
C	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
1	Indeks Infrastruktur	angka	0,74	0,822
2	Persentase infrastruktur wilayah (jalan, drainase, irigasi, air minum, sanitasi, dan bangunan gedung) dalam kondisi baik	%	57,19	58,26
3	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	85,31	86,81
4	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	angka indeks	57,35	57,66
5	Persentase bangunan gedung negara yang layak fungsi	%	77,01	78,25
6	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	50,98	51,08
7	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	83,22	84
8	Nilai Kinerja Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan (TURBINLAK) Penataan Ruang	Nilai Kinerja	71,02	74,25
9	Indeks Pelayanan Publik DPUPR	Angka	2,72	2,73
10	Nilai AKIP DPUPR	skor	78,55	78,9
D	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**			
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	NA	69,03
2	Persentase Rumah Layak Huni	%	81,12	90,42
3	Persentase luas kawasan kumuh	%	61,51	61,21
4	Nilai AKIP	skor	74,5	75
5	Indeks Pelayanan Publik DPRKP	Angka	2,9	3
E	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**			
1	**SATPOL PP**			
1	Indeks Rasa Aman	Angka	4,47	4,48

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN
			2024	2025
2	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	%	100	100
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15
5	Indeks Pelayanan Publik SATPOL PP	Angka	2,5	2,75
6	Nilai AKIP SATPOL PP	Skor	77,5	78
2	**BPBD**			
1	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,57	0,6
2	Persentase Cakupan Ketangguhan Daerah dalam Menghadapi Bencana	%	4,84	6,85
3	Nilai AKIP BPBD	Skor	73,8	75
4	Indeks Pelayanan Publik BPBD	Angka	2,01	2,25
F	**Sosial**			
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	57,34	57,45
2	Persentase Populasi PPKS	%	16,82	15,9
3	Persentase PPKS yang diberdayakan kapasitasnya dalam peningkatan kesejahteraan sosial	%	7,09	7,12
4	Indeks Pelayanan Publik Dinsos	Angka	3,16	3,2
5	Nilai AKIP Dinsos	Skor	76,95	78,2
G	**Tenaga Kerja**			
1	Tingkat Kesempatan Kerja	%	94,33	94,5
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	35,25	35,35
3	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	64,03	64,05
4	Indeks Pelayanan Publik Disnaker	Angka	3,02	3,03
5	Nilai AKIP Disnaker	Skor	76,1	76,7
H	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,68	92,88
2	Persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak.	%	10,2	10,67
I	**Pangan**			
1	Persentase cadangan pangan daerah	%	5,56	0,025
2	Ketersediaan pangan :			

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN
			2024	2025
	- Beras	Ton	96.057,00	80.550
	- Jagung	Ton	61.601,00	45.054
3	Cadangan pangan daerah	Ton	123,02	60
J	**Pertanahan**			
1	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	%	100	100
K	**Lingkungan Hidup**			
1	Persentase kasus lingkungan hidup yang terselesaikan	%	90	92
2	Indeks kualitas air (IKA)	Angka	58,68	59,9
3	Indeks kualitas udara (IKU)	Angka	80,61	84,82
4	Indeks kualitas tutupan lahan (IKL)	Angka	44,58	62,95
5	Persentase penanganan sampah	%	55	55
6	Nilai AKIP DLH	Skor	72,75	74
7	Indeks Pelayanan Publik DLH	Angka	3,3	3,35
L	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			
1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	%	NA	85,67
2	Rasio Kepemilikan dokumen dan pencatatan sipil Masyarakat Batang	%	78,82	79,81
3	Nilai AKIP Disdukcapil	Skor	77,4	77,5
4	Indeks Pelayanan Publik Disdukcapil	Angka	3,23	3,35
M	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			
1	Indeks Desa	Angka	0,7	0,71
2	Persentase Desa Mandiri	Angka	2,51	4,6
3	Persentase Jumlah Desa yang meningkat status kemandiriannya di Kabupaten Batang	%	27,62	7,11
4	Persentase PKK Aktif	%	55,3	100
5	Indeks Pelayanan Publik Dispermasdes	Angka	2,23	2,3
6	Nilai AKIP Dispermades	Angka	75,05	76
N	**Pengendalian Penduduk dan KB**			
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	64,85	66
2	Angka pertumbuhan penduduk per tahun/LPP	%	1,44	1,41
3	Indeks Lansia Berdaya	Angka	56	56,5
4	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Angka	85,8	86,8
5	Indeks Pelayanan Publik DP3AP2KB	Angka	3,12	3,22
6	Nilai AKIP DP3AP2KB	Skor	73,35	73,85

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN
			2024	2025
O	**Perhubungan**			
1	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi di Jalan Kabupaten	Rasio	NA	93
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	60	61
3	Indeks Pelayanan Publik Dishub	Angka	3,8	3,83
4	Nilai AKIP Dishub	Skor	74,6	74,6
P	**Komunikasi dan Informatika**			
1	Indeks Smart City	Angka	3,59	3,5
2	Indeks Pemerintah Digital	Angka	1,75	1,8
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100
4	Indeks Pelayanan Publik Diskominfo	Angka	3,7	3,72
Q	**Koperasi dan UKM**			
1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,00	2,10
2	Persentase Koperasi Aktif	%	68,00	12,00
3	Persentase UMKM yang berdaya saing	%	15,00	20,00
R	**Penanaman Modal**			
1	Pertumbuhan Nilai investasi di Kabupaten Batang	%	3,5	4
2	Persentase peningkatan perusahaan yang berinvestasi di Kab Batang	%	3	3,5
3	Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP	Angka	4,55	4,56
4	Nilai AKIP DPMPTSP	Skor	76,00	76,55
S	**Kepemudaan dan Olahraga**			
1	Persentase Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	%	10	10
2	Persentase medali yang diperoleh	%	10	10
T	**Statistik**			
1	Persentase pemanfaatan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100
U	**Persandian**			
1	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	100	100
V	**Kebudayaan**			
1	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN
			2024	2025
2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan, dikelola dan dilindungi	%	0	0
3	Nilai AKIP Disdikbud	Skor	77,5	79
4	Indeks Pelayanan Publik Disdikbud	Angka	3,11	3,2
W	**Perpustakaan**			
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	13,82	13,85
2	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	NA	0,11
X	**Kearsipan**			
1	Persentase OPD dan Pemerintah Desa yang melaksanakan arsip secara baku	%	15	15
2	Tingkat transparansi informasi publik terkait pengelolaan arsip yang dapat diakses oleh masyarakat, termasuk arsip laporan keuangan dan administrasi pemerintahan	%	0,00	0,00
3	Indeks Pelayanan Publik Disperpuska	Angka	2,68	3,07
4	Nilai AKIP Disperpuska	Skor	74,05	75,25
Y	**Kelautan dan Perikanan**			
1	Pertumbuhan Produksi Perikanan	%	0,24	0,3
2	Persentase Capaian Produksi Perikanan	%	119,88	98,5
3	Capaian peningkatan angka konsumsi ikan	%	96	97
4	Nilai AKIP Dislutkan	Skor	68,4	69,85
5	Indeks Pelayanan Publik Dislutkan	Angka	2,29	2,51
Z	**Pariwisata**			
1	Persentase peningkatan pengunjung pariwisata	%	10	12
2	Rata-Rata Lama Menginap wisatawan	Hari	1	1
3	Nilai AKIP Disparpora	Skor	75	75
4	Indeks Pelayanan Publik Disparpora	Angka	2,8	2,8
AA	**Pertanian**			
1	Produksi komoditas pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)			
	a. padi	ton	160.299	161.099
	b. jagung	ton	89.659	90.107
	c. Bawang Merah	kuintal	5.372	5.256

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN
			2024	2025
	d. Cabai Besar	kuintal	3.298	13.087
	e. Kentang	kuintal	213.902	184.213
	f. Kopi	kg	753.929	738.850
	g. Teh	kg	1.414.461	1.386.172
	h. Kakao	kg	176.604	173.072
	i. Kelapa	kg	1.001.083	981.061
2	Persentase Produksi Hasil Ternak (Daging, Telur dan Susu)	%	150,49	100
3	Persentase Hewan / Ternak yang Terobati	%	430,08	100
4	Indeks Pelayanan Publik Dispaperta	Angka	2,39	2,51
AB	**Perdagangan**			
1	Kontribusi sektor Perdagangan Besar,kecil,Reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	%	12,53	12,54
2	Persentase retribusi pasar terhadap PAD	%	1	1,03
AC	**Perindustrian**			
1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	34,56	34,57
2	Prersentase peningkatan IKM	%	13,9	0,66
3	Nilai AKIP Disperindagkop UKM	skor	77,2	77,3
4	Indeks Pelayanan Publik Disperindagkop UKM	Angka	3,43	3,53
AD	**Transmigrasi**			
1	Persentase transmigran yang berhasil ditempatkan	%	100	100
AE	**Sekretariat Daerah**			
1	Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	68,95	69,5
2	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	Angka	4,37	4,37
3	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	skor	39,4	40,25
4	Persentase PD dengan Nilai AKIP BB	%	70,45	70,5
5	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	4,13	4,2
AF	**Sekretariat DPRD**			
1	Nilai AKIP SETWAN	Skor	78,55	78,6
2	Indeks Pelayanan Publik SETWAN	Angka	3,15	3,2
3	Persentase Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	%	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN
			2024	2025
AG	**Perencanaan**			
1	Skor Perencanaan	Angka	23,16	23,4
2	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100
AH	**Keuangan**			
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP
2	Persentase Kepatuhan OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan	%	100	100
3	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	9,7	11,5
4	Indeks Pelayanan Publik BPKPAD	Angka	3,24	3,36
AI	**Kepegawaian**			
1	Nilai Sistem Merit	Angka	0,66	0,60
2	Indeks Pelayanan Publik BKPSDM	Angka	3,47	3,55
3	Nilai AKIP BKPSDM	skor	80,50	80,60
4	Indeks NSPK Manajemen ASN	Angka	81,10	81,50
AJ	**Pendidikan, dan Pelatihan**			
1	Persentase ASN yang Telah Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi	Angka	NA	5,17
AK	**Penelitian dan Pengembangan**			
1	Nilai Kapabilitas Inovasi	Angka	2,11	2,19
2	Indeks Inovasi Daerah	Angka	57,46	57,78
3	Indeks Pelayanan Publik Bapelitbang	Angka	3,66	3,7
AL	**Pengawasan**			
1	Kapabilitas APIP	Level	3	3
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan	%	85	85
3	Nilai AKIP Inspektorat	Skor	80,2	80,3
4	Indeks Pelayanan Publik Inspektorat	Angka	3,65	3,66
AM	**KEWILAYAHAN**			
1	**Kecamatan Batang**			
1	Nilai AKIP Kecamatan Batang	Angka	69,1	69,1
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Batang	Angka	2,8	2,9

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN
			2024	2025
3	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Batang	Angka	0,727	0,738
2	**Kecamatan Bandar**			
1	Nilai AKIP Kecamatan Bandar	Angka	65	66,25
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bandar	Angka	2,51	2,51
3	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Bandar	Angka	0,675	0,685
3	**Kecamatan Banyuputih**			
1	Nilai AKIP Kecamatan Banyuputih	Angka	70,15	71
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Banyuputih	Angka	2,78	2,8
3	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Banyuputih	Angka	0,709	0,719
4	**Kecamatan Bawang**			
1	Nilai AKIP Kecamatan Bawang	Angka	54,9	60
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bawang	Angka	2,97	2,97
3	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Bawang	Angka	0,675	0,686
5	**Kecamatan Blado**			
1	Nilai AKIP Kecamatan Blado	Angka	70,95	72,3
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Blado	Angka	2,76	2,80
3	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Blado	Angka	0,672	0,683
6	**Kecamatan Gringsing**			
1	Nilai AKIP Kecamatan Gringsing	Angka	64,25	65,3
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Gringsing	Angka	2,8	3
3	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Gringsing	Angka	0,713	0,724
7	**Kecamatan Kandeman**			
1	Nilai AKIP Kecamatan Kandeman	Angka	62,5	64
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kandeman	Angka	2,5	2,52
3	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Kandeman	Angka	0,720	0,731
8	**Kecamatan Limpung**			
1	Nilai AKIP Kecamatan Limpung	Angka	71,85	72,6
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Limpung	Angka	2,85	2,89
3	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Limpung	Angka	0,728	0,739
9	**Kecamatan Pecalungan**			
1	Nilai AKIP Kecamatan Pecalungan	Angka	62,45	63,05
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Pecalungan	Angka	2	2,6
2	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Pecalungan	Angka	0,667	0,677
10	**Kecamatan Reban**			
1	Nilai AKIP Kecamatan Reban	Angka	67,45	68,2
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Reban	Angka	2,66	2,68
2	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Reban	Angka	0,724	0,735
11	**Kecamatan Subah**			
1	Nilai AKIP Kecamatan Subah	Angka	71,95	72

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN
			2024	2025
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Subah	Angka	2,39	2,5
3	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Subah	Angka	0,739	0,751
12	**Kecamatan Tersono**			
1	Nilai AKIP Kecamatan Tersono	Angka	68,1	69,1
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Tersono	Angka	2,6	2,65
3	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Tersono	Angka	0,706	0,717
13	**Kecamatan Tulis**			
1	Nilai AKIP Kecamatan Tulis	Angka	68,1	68,1
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Tulis	Angka	2,65	2,68
3	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Tulis	Angka	0,706	0,716
14	**Kecamatan Warungasem**			
1	Nilai AKIP Kecamatan Warungasem	Angka	60,7	60,7
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Warungasem	Angka	3,41	3,41
3	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Warungasem	Angka	0,704	0,714
15	**Kecamatan Wonotunggal**			
1	Nilai AKIP Kecamatan Wonotunggal	Angka	72,15	72,9
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Wonotunggal	Angka	2,37	2,5
3	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Wonotunggal	Angka	0,711	0,721
AN	**Unsur Pemerintahan Umum**			
1	Indeks Kerukunan	Angka	71,95	72,8
2	Persentase potensi gangguan/konflik sosial keagamaan yang teratasi	%	100	100
3	Nilai AKIP Bakesbangpol	Skor	76,7	76,71
4	Indeks Pelayanan Publik Bakesbangpol	Angka	2,02	3,5

BAB VII
PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 disusun sebagai jawaban atas perkembangan lingkungan internal maupun eksternal dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Batang juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah melalui program- program pembangunan daerah. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) 2025;
2. Perubahan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 sebagai landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan

Perubahan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi perangkat daerah yang terangkum dalam Rencana Kerja PD Tahun 2025, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

BUPATI BATANG,

M. Faiz Kurniawan, S.H.,M.H.